

Tahap Initiation. Identifikasi Project Opportunities. Project Opportunities adalah tahap awal dalam proses pengembangan bisnis pembangkitan di mana PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) mengidentifikasi proyek-proyek potensial yang strategis dan sejalan dengan tujuan korporat. Tahap ini melibatkan pemetaan dan analisis peluang proyek untuk memastikan bahwa proyek potensial tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan ekspansi bisnis PLN NR, khususnya dalam bisnis IPP (Independent Power Producer).. Tahap Project Opportunities sangat penting karena menentukan arah dan fokus pengembangan bisnis PLN NR. Dengan mengidentifikasi proyek yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan kebutuhan pasar, PLN NR dapat memastikan investasi yang dilakukan akan memberikan hasil optimal dan mendukung tujuan pertumbuhan jangka panjang.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. BDI Database: Informasi intelijen bisnis untuk pengembangan proyek.. Proposal Stakeholder: Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan.. Pengembangan Aset PLN Nusantara Power dan PLN NR: Rencana internal pengembangan aset.. Profil Proyek: Informasi awal tentang proyek yang diidentifikasi.. Output yang Diharapkan. Daftar Proyek: Daftar proyek potensial yang dihasilkan dari pemetaan peluang, siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap berikutnya.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan jangka panjang yang memetakan kebutuhan listrik.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Memetakan Proyek-Proyek Potensial. Langkah pertama dalam identifikasi peluang proyek adalah memetakan proyek-proyek potensial yang sesuai dengan strategi dan tujuan jangka panjang PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini melibatkan:.. Analisis RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik): Mengkaji dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan listrik di berbagai wilayah dan potensi proyek baru.. Penggunaan BDI Database (Business Development Intelligence): Mengakses dan menganalisis data intelijen bisnis yang relevan untuk menemukan peluang proyek baru.. Pengumpulan Proposal Stakeholder: Mengumpulkan dan mengevaluasi usulan proyek dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas lokal.. Pengembangan Aset Internal: Mengidentifikasi rencana pengembangan aset yang sudah ada di PLN Nusantara Power dan PLN NR untuk menemukan sinergi dengan proyek baru.. Menetapkan Kriteria Longlist. Setelah proyek-proyek potensial dipetakan, langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria untuk menyusun Longlist proyek. Kriteria ini meliputi:.. Keselarasan dengan Strategi Korporat: Proyek harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis PLN NR.. Kelayakan Finansial: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang jelas dan mampu menarik investasi yang dibutuhkan.. Kesesuaian Regulasi: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang relevan.. Dampak Lingkungan dan Sosial: Proyek harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan komunitas lokal, serta harus dapat diatasi atau diminimalkan.. Menyusun Daftar Potensi Proyek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, daftar potensi proyek disusun. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Awal Proyek: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dimasukkan dalam daftar panjang.. Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek lebih lanjut, termasuk studi awal dan analisis risiko.. Diskusi Internal: Mengadakan diskusi dengan tim internal dan pakar eksternal untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang lebih luas tentang proyek-proyek potensial.. Mengembangkan Profil Proyek Lebih Rinci. Langkah terakhir adalah mengembangkan profil proyek yang lebih rinci untuk proyek-proyek yang telah masuk dalam daftar panjang. Profil proyek ini meliputi:.. Deskripsi Proyek: Gambaran umum tentang proyek, termasuk tujuan, lokasi, kapasitas, dan teknologi yang digunakan.. Analisis Kelayakan: Studi kelayakan yang lebih mendalam, termasuk analisis teknis, ekonomi, dan keuangan.. Rencana Implementasi: Rencana langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan proyek, termasuk jadwal waktu dan anggaran.. Penilaian Risiko: Identifikasi dan penilaian risiko utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, serta strategi mitigasi risiko.. Pembuatan Longlist Proyek. Longlist Proyek adalah daftar awal proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang. Longlist Proyek mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan potensi keberhasilan.. Tahap Longlist Proyek sangat penting karena menyaring proyek-proyek potensial yang paling sesuai dengan strategi jangka panjang PLN NR. Ini memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan proyek yang dipilih memiliki peluang sukses yang tinggi.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau

PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Potensi Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari tahap Project Opportunities.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai dan memprioritaskan proyek.. Output yang Diharapkan. Dokumen Longlist Proyek: Daftar proyek yang telah dievaluasi dan disetujui, siap untuk tahap seleksi lebih lanjut.. Referensi Utama. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Peraturan terkait pengembangan proyek pembangkitan. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Longlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek potensial. Kriteria ini meliputi:.. Legalitas Proyek: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, peraturan keselamatan, dan persyaratan lisensi.. Keatraktifan Proyek: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang menarik, termasuk aspek teknis, ekonomis, dan finansial. Faktor-faktor seperti lokasi proyek, teknologi yang digunakan, dan skala proyek juga dipertimbangkan.. Kapabilitas Perusahaan: Proyek harus sesuai dengan kapabilitas teknis dan manajerial PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Ini mencakup kemampuan perusahaan dalam hal pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek potensial berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan:.. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi rinci tentang setiap proyek dari daftar potensi proyek yang dihasilkan dari tahap Project Opportunities.. Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mencakup analisis kualitatif (misalnya, penilaian risiko) dan analisis kuantitatif (misalnya, analisis biaya-manfaat).. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan penilaian yang dilakukan. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam longlist.. Penyusunan Longlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Longlist Proyek. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan. Proyek dengan skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam longlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Longlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam longlist.. Persetujuan dan Pengesahan Longlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Longlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan:.. Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Longlist Proyek.. Pembuatan Shortlist Proyek. Setelah penyusunan Longlist Proyek, di mana proyek-proyek potensial telah diidentifikasi dan diberi skor berdasarkan kriteria awal, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi lebih lanjut untuk menghasilkan Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan evaluasi lebih rinci dan komprehensif terhadap proyek-proyek yang ada dalam Longlist.. Shortlist Proyek adalah daftar terpilih dari proyek-proyek potensial yang telah melalui proses evaluasi lebih mendalam dari Longlist Proyek. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dan potensi keberhasilan yang signifikan. Shortlist Proyek disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Longlist Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari Longlist.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan dalam tahap sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Shortlist Proyek: Daftar proyek terpilih yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk pengembangan lebih lanjut.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang lebih rinci dibandingkan dengan tahap Longlist. Kriteria ini meliputi:.. Status Proyek: Menilai sejauh mana proyek telah berkembang, termasuk apakah studi kelayakan telah dilakukan, apakah ada persetujuan awal, dan apakah ada komitmen dari stakeholder.. Keatraktifan Proyek: Menilai daya tarik proyek berdasarkan potensi keuntungan, skala proyek, lokasi, dan teknologi yang digunakan.. Kapabilitas Perusahaan: Menilai kemampuan teknis dan manajerial PLN NR serta partner yang terlibat dalam proyek. Ini mencakup pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Risiko Proyek: Mengidentifikasi dan menilai risiko terkait dengan proyek, termasuk risiko finansial, teknis,

operasional, dan lingkungan.. Biaya Proyek: Menilai biaya keseluruhan proyek dan sumber pendanaan yang tersedia. Ini mencakup analisis biaya awal, biaya operasional, dan potensi pengembalian investasi.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek dalam Longlist berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan: Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi lebih rinci tentang setiap proyek yang ada dalam Longlist untuk melengkapi data yang sudah ada.. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), analisis risiko, dan analisis biaya-manfaat.. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan hasil analisis. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam Shortlist.. Penyusunan Shortlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan: Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan, dengan proyek-proyek yang memiliki skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam Shortlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Shortlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam Shortlist.. Persetujuan dan Pengesahan Shortlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan: Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Shortlist Proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study. Penyusunan Pre-Feasibility Study (Pre-FS) adalah proses awal dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Pre-FS memberikan analisis awal tentang berbagai aspek proyek termasuk operasional, finansial, legal, dan risiko. Hasil dari Pre-FS digunakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Pengadaan Konsultan Pre-FS: Konsultan yang dipilih untuk melakukan Pre-FS.. Dokumen Terkait Proyek: Dokumen yang relevan dengan proyek yang sedang dievaluasi.. Output yang Diharapkan. Dokumen Pre-FS: Dokumen yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek, siap untuk ditinjau dan disetujui oleh manajemen.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Pengadaan dan Pemilihan Konsultan. Proses pertama dalam penyusunan Pre-FS adalah pengadaan dan pemilihan konsultan yang akan bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan awal. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Kebutuhan Konsultan: Menentukan spesifikasi dan keahlian yang diperlukan dari konsultan berdasarkan kompleksitas dan kebutuhan proyek.. Penyusunan Term of Reference (ToR): Membuat ToR yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, tujuan, metode, dan deliverables yang diharapkan dari konsultan.. Proses Pengadaan: Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, termasuk pengumuman tender, evaluasi penawaran, dan seleksi konsultan terbaik.. Penunjukan Konsultan: Menandatangani kontrak kerja dengan konsultan terpilih dan memberikan briefing awal tentang proyek.. Pengumpulan Dokumen Terkait Proyek. Langkah kedua adalah mengumpulkan semua dokumen yang relevan dengan proyek yang akan dievaluasi. Dokumen ini menjadi dasar informasi bagi konsultan untuk melakukan analisis kelayakan. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Dokumen: Menentukan jenis dokumen yang diperlukan seperti data teknis, laporan sebelumnya, rencana bisnis, regulasi, dan dokumen lain yang relevan.. Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk dari divisi terkait dalam PLN NR.. Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa semua dokumen yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan up-to-date.. Penyusunan Skema Bisnis, Kebutuhan Sumber Daya, Kebutuhan Pendanaan. Langkah ketiga adalah menyusun skema bisnis yang mencakup kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pendanaan untuk proyek. Proses ini melibatkan: Analisis Skema Bisnis: Mengidentifikasi model bisnis yang paling sesuai untuk proyek, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, dan analisis persaingan.. Kebutuhan Sumber Daya: Menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk proyek seperti tenaga kerja, teknologi, material, dan infrastruktur.. Analisis Pendanaan: Mengidentifikasi sumber pendanaan potensial dan membuat proyeksi kebutuhan dana,

termasuk analisis Return on Investment (ROI) dan cash flow projection.. Dokumentasi: Menyusun hasil analisis dalam bentuk dokumen yang sistematis dan mudah dipahami.. Penyusunan Dokumen Pre-FS. Langkah terakhir adalah penyusunan dokumen Pre-FS yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah:.. Analisis Kelayakan Operasional: Menilai aspek teknis dan operasional proyek termasuk teknologi yang akan digunakan, lokasi proyek, dan kelayakan teknis lainnya.. Analisis Kelayakan Finansial: Menilai aspek finansial proyek termasuk biaya proyek, proyeksi pendapatan, analisis risiko finansial, dan potensi keuntungan.. Analisis Kelayakan Legal: Menilai kepatuhan proyek terhadap regulasi dan hukum yang berlaku termasuk perizinan dan kepatuhan lingkungan.. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi proyek dan strategi mitigasi risiko.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dalam bentuk laporan Pre-FS yang lengkap dan komprehensif.. Review dan Persetujuan: Mengajukan laporan Pre-FS kepada manajemen untuk ditinjau dan disetujui.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Project. Dokumen Manajemen Risiko (DMR) Project adalah dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). DMR bertujuan untuk memastikan bahwa semua risiko potensial telah diidentifikasi dan diantisipasi, serta strategi mitigasi yang tepat telah disiapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Feasibility Study: Dokumen studi kelayakan yang memberikan informasi detail tentang proyek.. Peraturan Internal PLN NR: Kebijakan dan pedoman manajemen risiko internal.. Peraturan Eksternal: Regulasi dan peraturan eksternal yang berlaku.. Output yang Diharapkan. Dokumen Manajemen Risiko Proyek: Dokumen komprehensif yang mencakup identifikasi, analisis, penilaian, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek pengembangan pembangkit listrik.. Referensi Utama. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan manajemen risiko proyek.. Profil Risiko Korporat: Profil risiko yang telah disusun sebelumnya untuk memahami konteks risiko yang lebih luas.. Proses dan Langkah-langkah. Menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Langkah pertama dalam penyusunan Dokumen Manajemen Risiko adalah menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Proses ini melibatkan:.. Kajian Kelayakan Operasional (KKO):.. Aspek Ekonomi: Evaluasi dampak ekonomi proyek pada komunitas dan perekonomian secara keseluruhan.. Sistem Kelistrikan: Penilaian kesesuaian proyek dengan sistem kelistrikan yang ada.. Lokasi dan Sosial: Analisis lokasi proyek termasuk dampak sosial dan ketersediaan infrastruktur pendukung.. Transmisi: Kesesuaian proyek dengan jaringan transmisi yang ada dan rencana pengembangannya.. Teknologi Pembangkit: Evaluasi teknologi pembangkit yang akan digunakan, termasuk inovasi terbaru dan keandalannya.. Energi Primer: Ketersediaan dan keamanan pasokan energi primer.. Kajian Kelayakan Finansial (KKF):.. Biaya Proyek: Estimasi total biaya proyek dari awal hingga selesai.. Project Financing/Financial Model: Pengembangan model keuangan proyek termasuk sumber pendanaan.. Makro Ekonomi: Evaluasi kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi proyek.. Tarif PPA: Analisis tarif Power Purchase Agreement (PPA) yang disepakati.. Evaluasi Kelayakan Finansial: Menggunakan indikator seperti Return on Equity (ROE), Net Present Value (NPV), dan Weighted Average Cost of Capital (WACC).. Melakukan Analisis dan Penilaian Risiko. Langkah kedua adalah melakukan analisis dan penilaian risiko terhadap proyek. Proses ini melibatkan:.. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek.. Kategorisasi Risiko: Mengelompokkan risiko ke dalam kategori seperti risiko operasional, finansial, legal, dan lingkungan.. Penilaian Risiko: Menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap risiko menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.. Prioritas Risiko: Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap proyek.. Mengembangkan Strategi Mitigasi. Langkah ketiga adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Proses ini melibatkan:.. Strategi Pencegahan: Mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko.. Strategi Pengurangan Dampak: Menyusun rencana untuk mengurangi dampak jika risiko terjadi.. Rencana Tanggap Darurat: Menyusun prosedur tanggap darurat untuk menghadapi risiko yang telah terjadi.. Alokasi Tanggung Jawab: Menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk setiap strategi mitigasi yang dikembangkan.. Menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko. Langkah terakhir adalah menyusun dan menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko Proyek. Dokumen ini mencakup semua hasil analisis dan strategi mitigasi yang telah disusun sebelumnya. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dan strategi mitigasi dalam bentuk laporan yang komprehensif dan mudah dipahami.. Review dan Validasi: Melakukan review internal untuk memastikan semua informasi akurat dan valid.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari manajemen untuk Dokumen Manajemen Risiko Proyek..

Pengidentifikasian Partner. Identifikasi Partner adalah proses sistematis untuk menentukan mitra strategis yang akan bekerja sama dengan PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun daftar mitra potensial berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa PLN NR bekerja dengan mitra yang dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Stakeholder Proposal:** Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap mitra..
- Partner Proposal:** Usulan dari mitra potensial yang menyatakan minat dan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek..
- Business Development Intelligence (BDI):** Informasi intelijen bisnis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi mitra potensial..
- Expression of Interest (EOI):** Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek..

Output yang Diharapkan.

- List Calon Partner:** Daftar mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap Seleksi Longlist dan Shortlist..

Referensi Utama.

Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner.

Panduan Pemilihan Proyek dan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan proyek dan mitra..

Regulasi Terkait: Peraturan dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis..

Proses dan Langkah-langkah.

Identifikasi Kebutuhan dan Kriteria Proyek.

Langkah pertama dalam pengidentifikasian partner adalah menentukan kebutuhan proyek dan kriteria pemilihan mitra yang sesuai. Proses ini melibatkan:.

- Menentukan Kebutuhan Proyek:.** Jenis Proyek: Identifikasi jenis pembangkit listrik yang akan dikembangkan (misalnya PLTU, PLTA, PLTS)..
- Teknologi:** Kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk proyek..
- Sumber Daya:** Kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan infrastruktur..
- Jangka Waktu:** Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek..
- Menetapkan Kriteria Pemilihan Mitra:.** Kompetensi Teknis: Kemampuan teknis mitra dalam mengelola proyek serupa..
- Kapabilitas Finansial:** Kekuatan finansial dan kemampuan pendanaan mitra..
- Reputasi dan Rekam Jejak:** Reputasi dan pengalaman mitra dalam proyek sejenis..
- Keselarasan Strategis:** Keselarasan visi dan misi mitra dengan tujuan PLN NR..
- Kepatuhan Hukum:** Kepatuhan mitra terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku..

Pemetaan Partner Potensial.

Setelah kebutuhan dan kriteria proyek ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memetakan mitra potensial yang mungkin cocok untuk proyek. Proses ini melibatkan:.

- Riset Pasar:.** Melakukan riset untuk mengidentifikasi perusahaan atau entitas yang memiliki kemampuan dan minat dalam proyek..
- Menggunakan data intelijen bisnis (BDI) untuk mengumpulkan informasi tentang calon mitra potensial..**
- Konsultasi dengan Stakeholder:.** Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan usulan dan masukan terkait mitra potensial..
- Memanfaatkan proposal dari stakeholder dan calon mitra untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai..**

Penyusunan Daftar Awal:.

Menyusun daftar awal mitra potensial berdasarkan hasil riset dan konsultasi..

Identifikasi Lebih Detail dan Analisis Awal.

Setelah daftar awal mitra potensial disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi lebih detail dan analisis awal terhadap calon mitra tersebut. Proses ini melibatkan:.

- Pengumpulan Informasi Tambahan:.** Mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang setiap calon mitra, termasuk profil perusahaan, portofolio proyek, dan laporan keuangan..
- Evaluasi Awal:.** Melakukan analisis awal untuk mengevaluasi kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek dan kriteria yang telah ditetapkan..
- Menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria awal..**
- Penyusunan Daftar Pendek Awal:.** Menyusun daftar pendek awal mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan layak untuk dievaluasi lebih lanjut..

Penyusunan dan Distribusi Request for Proposal (RFP).

Langkah terakhir dalam pengidentifikasian partner adalah menyusun dan mendistribusikan Request for Proposal (RFP) kepada calon mitra potensial. Proses ini melibatkan:.

- Penyusunan RFP:.** Menyusun dokumen RFP yang mendetail, mencakup tujuan proyek, kebutuhan spesifik, kriteria pemilihan, dan timeline..
- Menyertakan informasi tentang proyek, termasuk aspek teknis, finansial, legal, dan risiko yang perlu dipertimbangkan oleh calon mitra..**
- Distribusi RFP:.** Mengirimkan RFP kepada calon mitra potensial yang telah diidentifikasi..
- Mengatur mekanisme penerimaan dan evaluasi proposal dari calon mitra..**
- Penerimaan Proposal:.** Mengumpulkan proposal dari calon mitra yang tertarik dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap seleksi Longlist dan Shortlist..

Pembuatan Longlist Partner.

Seleksi Longlist Partner adalah proses evaluasi perusahaan potensial untuk menentukan daftar awal mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian calon mitra berdasarkan kriteria tertentu sehingga hanya perusahaan yang memenuhi standar tinggi yang dapat melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Daftar Potensi Partner:** Informasi calon mitra yang diidentifikasi dari tahap Partner Identification..
- Kriteria Longlist Partner:** Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai calon mitra..

Output

yang Diharapkan. Dokumen Longlist Partner: Daftar awal mitra strategis yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk evaluasi lebih lanjut.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner: Pedoman terkait pemilihan proyek dan mitra.. Proses dan Langkah-langkah. Menghimpun Sumber Informasi. Langkah pertama dalam seleksi Longlist adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang calon mitra potensial. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:. Expression of Interest (EOI): Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek.. Pendaftaran Umum: Informasi yang diperoleh dari pendaftaran umum calon mitra yang berminat dalam proyek.. Data Peserta Terseleksi (DPT) oleh PLN Group: Daftar peserta yang telah terseleksi oleh PLN Group berdasarkan kriteria tertentu.. Business Development Intelligence (BDI) (opsional): Informasi intelijen bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi calon mitra potensial berdasarkan data pasar dan analisis kompetitif.. Meminta Masukan/Pertimbangan dari PLN Group. Setelah menghimpun informasi, langkah berikutnya adalah meminta masukan dan pertimbangan dari PLN Group. Ini melibatkan:. Konsultasi dengan Divisi Terkait: Berkoordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam PLN Group untuk mendapatkan wawasan dan masukan mengenai calon mitra potensial.. Evaluasi Awal: Melakukan evaluasi awal berdasarkan masukan dari PLN Group untuk menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria dasar.. Melakukan Seleksi Berdasarkan Kriteria. Setelah mendapatkan masukan dari PLN Group, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan:. Penetapan Kriteria Seleksi:. Capital: Kondisi keuangan positif dan stabilitas finansial calon mitra.. Competence: Sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh calon mitra yang melengkapi kebutuhan proyek.. Compatibility: Budaya dan etika bisnis yang selaras dengan PLN NR.. Circumstances: Tidak memiliki isu legal dan masalah lain yang dapat menghambat kerja sama.. Evaluasi dan Skoring:. Melakukan penilaian terhadap calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.. Memberikan skor untuk setiap kriteria guna menentukan tingkat kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Longlist:. Menyusun daftar awal mitra strategis berdasarkan hasil evaluasi dan skoring.. Daftar ini mencakup mitra yang memenuhi standar tinggi dan memiliki potensi untuk melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.. Pengesahan dan Persetujuan Longlist. Langkah terakhir dalam seleksi Longlist adalah pengesahan dan persetujuan daftar mitra strategis oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:. Penyusunan Dokumen Longlist:. Menyusun dokumen Longlist yang mencakup daftar calon mitra yang telah lolos seleksi awal.. Dokumen ini harus memuat informasi detail tentang setiap mitra, termasuk skor evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:. Mengajukan dokumen Longlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:. Mendistribusikan dokumen Longlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Pembuatan Shortlist Partner. Seleksi Shortlist Partner adalah proses evaluasi lebih lanjut untuk menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan penilaian kapabilitas strategis baik dari PLN Nusantara Renewables (PLN NR) maupun calon mitra, menggunakan metode seleksi yang komprehensif untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kemampuan dan kesesuaian yang optimal untuk keberhasilan proyek. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Longlist Partner: Informasi calon mitra yang lolos tahap longlist.. Kapabilitas Strategis PJB dan Partner: Data mengenai kapabilitas strategis baik dari PLN NR maupun calon mitra.. Output yang Diharapkan. Kapabilitas Strategis PLN NR: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis yang dimiliki oleh PLN NR.. Kapabilitas Strategis Partner: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis calon mitra.. Hasil Kajian Shortlist Partner: Daftar calon mitra yang telah diseleksi berdasarkan kapabilitas strategis dan siap untuk evaluasi akhir.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Pemilihan Metode Penyusunan Shortlist. Langkah pertama dalam proses ini adalah memilih metode yang tepat untuk menyusun shortlist. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik mitra potensial. Beberapa metode yang dapat digunakan meliputi:. Desk Study: Analisis mendalam terhadap data dan dokumen yang ada untuk mengevaluasi kapabilitas mitra potensial.. Due Diligence: Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang dan kapabilitas mitra potensial untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan.. Focused Selection: Memfokuskan pada sejumlah kecil calon mitra yang telah diidentifikasi sebagai yang paling potensial, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap mereka.. Roadshow: Mengadakan presentasi dan diskusi dengan calon mitra potensial untuk mengevaluasi kapabilitas dan

kesesuaian mereka.. Pemilihan Langsung: Memilih mitra potensial langsung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melalui proses seleksi yang panjang. . Penunjukan Langsung: Menunjuk mitra potensial secara langsung berdasarkan kepercayaan dan rekam jejak yang telah terbukti.. Penetapan Kriteria Seleksi Shortlist. Langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk menilai calon mitra. Kriteria ini harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting seperti:.. Kapabilitas Teknis: Pengalaman dan keahlian teknis calon mitra dalam mengelola proyek serupa.. Kapabilitas Finansial: Stabilitas dan kemampuan finansial calon mitra untuk mendukung proyek.. Kesesuaian Strategis: Sejauh mana visi dan misi calon mitra selaras dengan PLN NR.. Reputasi dan Kredibilitas: Rekam jejak dan reputasi calon mitra dalam industri terkait.. Risiko dan Kepatuhan: Potensi risiko yang terkait dengan calon mitra dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.. Penyusunan Shortlist Partner. Setelah menetapkan kriteria seleksi, langkah selanjutnya adalah menyusun shortlist mitra berdasarkan hasil evaluasi. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Kapabilitas Strategis:.. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kapabilitas strategis PLN NR dan calon mitra.. Menyusun dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis masing-masing pihak.. Skoring dan Peringkat:.. Memberikan skor untuk setiap calon mitra berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan.. Menyusun peringkat calon mitra berdasarkan skor yang diperoleh.. Review dan Validasi:.. Melakukan review internal terhadap hasil evaluasi dan peringkat calon mitra.. Memastikan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan objektif.. Pengesahan dan Persetujuan Shortlist. Langkah terakhir dalam proses ini adalah pengesahan dan persetujuan daftar shortlist mitra oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Dokumen Shortlist:.. Menyusun dokumen resmi yang mencakup daftar calon mitra yang telah diseleksi beserta hasil evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:.. Mengajukan dokumen shortlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar calon mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:.. Mendistribusikan dokumen shortlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Penentuan Partner Terpilih. Partner Terpilih adalah hasil akhir dari proses seleksi mitra strategis yang telah melalui tahap identifikasi, longlist, dan shortlist. Pada tahap ini, PLN Nusantara Renewables (PLN NR) menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif. Proses ini memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kapabilitas dan kesesuaian yang optimal untuk mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Shortlist Partner: Informasi dan hasil evaluasi dari tahap seleksi shortlist yang mencakup profil detail calon mitra potensial.. Proposal Stakeholder : Khusus untuk partner yang mengajukan proyek ke PLN NR.. Output yang Diharapkan. Kajian Partnership: Dokumen yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas dan kesesuaian calon mitra dengan PLN NR.. Usulan Partner Terpilih: Laporan yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Akhir. Langkah pertama dalam penentuan partner terpilih adalah melakukan evaluasi akhir terhadap calon mitra yang telah masuk dalam shortlist atau calon mitra yang mengajukan proyek ke PLN NR. Dalam kasus pengajuan proyek oleh calon mitra, maka calon mitra bersangkutan melakukan pengajuan proyek ke PLN NR untuk selanjutnya dilakukan Due Dilligence sebagaimana tertuang dalam Pedoman pemilihan partner dan proyek.. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kapabilitas dan kesesuaian calon mitra telah dianalisis secara mendalam dan komprehensif.. Verifikasi Data:.. Memeriksa kembali semua data dan informasi yang telah dikumpulkan tentang calon mitra selama proses seleksi.. Melakukan verifikasi ulang terhadap kapabilitas teknis, finansial, dan legal calon mitra.. Wawancara dan Presentasi:.. Mengundang calon mitra untuk melakukan presentasi final dan wawancara dengan tim evaluasi PLN NR.. Menilai kemampuan calon mitra dalam menjawab pertanyaan kritis dan memberikan solusi untuk potensi tantangan proyek.. Analisis Risiko:.. Melakukan analisis risiko lebih lanjut untuk menilai potensi risiko yang mungkin timbul dari kerjasama dengan calon mitra.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih rinci berdasarkan temuan analisis.. Penyusunan Usulan Partner Terpilih. Setelah evaluasi akhir dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun usulan partner terpilih. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan semua hasil evaluasi menjadi laporan yang komprehensif.. Pengumpulan Hasil Evaluasi:.. Mengumpulkan semua hasil evaluasi dari tahap-tahap sebelumnya, termasuk evaluasi akhir.. Mengompilasi data dan informasi yang relevan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami.. Penyusunan Laporan Analisis Partnership:.. Menyusun laporan yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas, kesesuaian, dan risiko calon mitra.. Menyertakan rekomendasi dan justifikasi untuk pemilihan

calon mitra terpilih.. Penulisan Usulan Partner Terpilih.. Menulis usulan resmi yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan oleh Direksi PLN NR.. Menyertakan semua dokumen pendukung dan hasil evaluasi dalam usulan tersebut.. Pengesahan dan Persetujuan. Langkah terakhir adalah mendapatkan pengesahan dan persetujuan resmi dari pihak terkait dalam PLN NR untuk calon mitra yang terpilih. Proses ini melibatkan beberapa tahap persetujuan internal.. Pengajuan Usulan kepada Direksi.. Mengajukan usulan partner terpilih kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan disetujui.. Melakukan presentasi singkat jika diperlukan untuk menjelaskan alasan dan justifikasi pemilihan calon mitra.. Pengesahan oleh Direksi.. Direksi meninjau usulan dan melakukan diskusi untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan matang.. Direksi memberikan pengesahan resmi terhadap calon mitra terpilih.. Persetujuan Akhir.. Setelah pengesahan oleh Direksi, usulan partner terpilih diajukan untuk persetujuan akhir oleh pemangku kepentingan terkait dalam PLN NR.. Setelah mendapatkan persetujuan akhir, calon mitra terpilih diumumkan secara resmi dan proses kerjasama dapat dimulai.. Permohonan Persetujuan RUPS Partner. Permohonan Persetujuan RUPS Partner adalah proses formal untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pemilihan mitra strategis yang telah dipilih oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didukung oleh seluruh pemangku kepentingan utama dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Usulan dan Kajian Partner Terpilih: Informasi dan hasil evaluasi dari proses pemilihan partner terpilih.. Dokumen Manajemen Risiko Proyek dan Partner: Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Financial Model (termasuk Remunerasi): Proyeksi finansial dan struktur remunerasi yang diusulkan.. Output yang Diharapkan. Persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, RUPS: Persetujuan resmi dari organ perseroan untuk melanjutkan proyek dengan mitra terpilih.. Partner Terpilih: Pengesahan mitra strategis yang akan bekerja sama dalam proyek.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Juklak Pemilihan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan mitra.. Anggaran Dasar dan Board Manual PLN NR: Dokumen yang mencakup ketentuan dan prosedur terkait tata kelola perusahaan.. Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Penyusunan DMR.. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (DMR) yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Memastikan DMR mencakup semua aspek risiko potensial dan strategi mitigasinya.. Penyampaian DMR.. Mengajukan DMR kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan mendapatkan persetujuan.. Melakukan presentasi jika diperlukan untuk menjelaskan rincian dan pentingnya DMR dalam konteks pemilihan mitra.. Review dan Persetujuan Direksi.. Direksi meninjau DMR untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah direncanakan.. Direksi memberikan persetujuan atau memberikan masukan untuk perbaikan DMR.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Menyusun Keputusan Rapat Direksi.. Menyusun draf keputusan rapat Direksi yang mencakup persetujuan terhadap pemilihan mitra strategis.. Memastikan draf keputusan mencakup semua detail penting, termasuk hasil evaluasi dan justifikasi pemilihan mitra.. Penyusunan Pakta Integritas.. Menyusun pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua pihak terkait sebagai bentuk komitmen terhadap keputusan yang diambil.. Pakta integritas mencakup komitmen untuk menjalankan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.. Rapat Direksi.. Mengadakan rapat Direksi untuk membahas dan mengesahkan keputusan serta pakta integritas.. Semua anggota Direksi menandatangani keputusan rapat dan pakta integritas.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Penyampaian Keputusan Rapat Direksi.. Mengirimkan keputusan rapat Direksi dan pakta integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tinjauan dan tanggapan.. Permintaan Tanggapan Tertulis.. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pemilihan mitra strategis.. Mengatur pertemuan atau diskusi jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran Dewan Komisaris.. Review Dewan Komisaris.. Dewan Komisaris meninjau keputusan rapat Direksi dan memberikan tanggapan tertulis.. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Penyampaian Keputusan kepada Pemegang Saham.. Mengajukan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. Persiapan RUPS.. Menyusun agenda RUPS yang mencakup pembahasan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan semua dokumen pendukung, termasuk DMR, keputusan rapat Direksi, dan tanggapan Dewan Komisaris.. Pelaksanaan RUPS.. Mengadakan RUPS untuk membahas dan mengesahkan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan presentasi dan jawaban atas pertanyaan pemegang saham terkait pemilihan mitra.. Persetujuan RUPS.. Pemegang saham memberikan persetujuan resmi terhadap pemilihan mitra strategis.. Keputusan RUPS didokumentasikan dan

ditandatangani oleh semua pihak terkait.. Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama adalah proses formal untuk merumuskan, membahas, dan menandatangani dokumen perjanjian antara PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dan mitra strategis yang telah dipilih. Proses ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memastikan bahwa kerjasama yang terjalin mendukung keberhasilan proyek investasi pembangkit listrik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power. PLN NR bertindak sebagai Support.. Input yang Diperlukan. Persetujuan RUPS PLN NR atas Proyek dan Partner Terpilih: Dokumen persetujuan dari PLN NR yang menyatakan pemilihan proyek dan mitra strategis.. Draft Perjanjian Kerjasama: Draft awal perjanjian kerjasama yang disusun berdasarkan informasi yang relevan.. Output yang Diharapkan. Project Development Agreement atau Consortium Agreement atau Memorandum of Understanding atau Head of Agreement: Dokumen-dokumen perjanjian kerjasama yang mencakup berbagai aspek kerjasama proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama dan Konsultasi Terkait. Pengumpulan Informasi:.. Mengumpulkan semua informasi yang relevan dari tahap sebelumnya, termasuk hasil negosiasi, persetujuan RUPS, dan kajian mitra.. Mengkaji ulang dokumen terkait untuk memastikan semua aspek kerjasama telah dipertimbangkan.. Penyusunan Draft Awal:.. Menyusun draft awal perjanjian kerjasama berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melibatkan tim hukum dan konsultan untuk memastikan bahwa draft tersebut mencakup semua aspek legal dan komersial.. Konsultasi Internal:.. Mengadakan konsultasi internal dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terhadap draft awal.. Melakukan revisi draft berdasarkan masukan yang diterima.. Pembahasan dan Negosiasi Perjanjian Kerjasama dengan Partner. Penjadwalan Pertemuan:.. Menjadwalkan pertemuan dengan mitra strategis untuk membahas draft perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan hadir dalam pertemuan tersebut.. Pembahasan Draft:.. Membahas draft perjanjian kerjasama secara rinci, memastikan bahwa semua hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat diterima.. Mendiskusikan dan menyelesaikan setiap isu atau ketidaksepakatan yang muncul selama pembahasan.. Negosiasi:.. Melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai semua ketentuan dalam perjanjian.. Memastikan bahwa hasil negosiasi tercermin dalam draft perjanjian yang diperbarui.. Revisi Draft:.. Melakukan revisi draft perjanjian kerjasama berdasarkan hasil negosiasi.. Mengirimkan draft yang telah direvisi kepada mitra untuk peninjauan akhir.. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Persiapan Penandatanganan:.. Menyelesaikan semua persiapan administrasi dan legal untuk penandatanganan perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan diverifikasi.. Penandatanganan:.. Mengadakan acara penandatanganan resmi di hadapan para pemangku kepentingan.. Menandatangani perjanjian kerjasama oleh perwakilan resmi dari PLN NR dan mitra strategis.. Distribusi Dokumen:.. Mendokumentasikan dan mendistribusikan salinan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada semua pihak terkait.. Mengarsipkan dokumen asli sebagai catatan resmi perusahaan.. Tahap Development. Update Feasibility Study. Update Feasibility Study atau kajian tambahan (supplementary studies), jika diperlukan, adalah proses untuk memperbarui studi kelayakan proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan perubahan atau perkembangan baru yang terjadi sejak penyusunan awal, terutama jika terjadi perubahan yang bersifat mendasar. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan didasarkan pada informasi terbaru.. Proses ini dilakukan hanya jika diperlukan, termasuk dalam kasus di mana studi sebelumnya masih dalam bentuk Pre-FS dan perlu diubah menjadi FS. Jika studi sebelumnya sudah dalam bentuk FS, maka cukup dilakukan kajian tambahan.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Perjanjian Kerjasama: Informasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah disusun sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Update Feasibility Study: Dokumen yang mencakup, namun tidak sebatas pada, kajian kelayakan operasional, finansial, dan analisa risiko yang telah diperbarui sesuai dengan perubahan terbaru.. Referensi Utama. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah dibuat di Tahap Initiation. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Awal. Langkah pertama dalam pembaruan Feasibility Study adalah melakukan evaluasi awal terhadap dokumen yang ada dan informasi terbaru. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan area mana yang memerlukan pembaruan atau kajian tambahan.. A. Analisis Dokumen:.. Memeriksa Pre-FS dan mengidentifikasi area yang perlu diperbarui atau ditambahkan.. Mengkaji Perjanjian Kerjasama untuk memahami implikasi terhadap studi kelayakan.. B. Identifikasi Perubahan:.. Mengidentifikasi perubahan atau perkembangan baru yang

mempengaruhi proyek.. Menyusun daftar kebutuhan informasi tambahan atau kajian mendalam.. Pengumpulan Data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperbarui Feasibility Study. Ini termasuk data teknis, finansial, dan operasional yang relevan.. A. Data Teknis:. Mengumpulkan data teknis terbaru terkait teknologi pembangkit, kondisi lokasi, dan persyaratan operasional.. Meninjau data lingkungan dan regulasi terbaru.. B. Data Finansial:. Mengumpulkan data biaya terbaru, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain.. Mengkaji data keuangan terkait perubahan kondisi pasar dan asumsi finansial.. Analisis dan Pembaruan Studi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan memperbarui Feasibility Study berdasarkan data dan informasi terbaru.. A. Analisis Teknis:. Melakukan analisis teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi dan desain proyek masih sesuai dan optimal.. Mengidentifikasi potensi masalah teknis dan menyusun strategi mitigasi.. B. Analisis Finansial:. Mengkaji ulang proyeksi keuangan dan melakukan analisis biaya-manfaat.. Menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan asumsi terbaru.. C. Analisis Risiko:. Mengidentifikasi risiko baru atau yang berubah sejak studi awal.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang komprehensif.. Penyusunan Dokumen Update Feasibility Study. Langkah terakhir adalah menyusun dokumen Update Feasibility Study yang mencakup semua hasil analisis dan kajian tambahan.. A. Penyusunan Dokumen:. Menyusun laporan yang komprehensif dan terstruktur, mencakup semua bagian studi kelayakan yang diperbarui.. Memastikan bahwa dokumen mencerminkan perubahan terbaru dan memberikan rekomendasi yang jelas.. B. Review dan Validasi:. Melakukan review internal untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen.. Meminta tinjauan eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan.. C. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan dokumen Update Feasibility Study untuk disetujui oleh pihak terkait.. Mengkomunikasikan hasil pembaruan kepada semua pemangku kepentingan proyek.. Penerbitan Lol Pengadaan. Penerbitan Letter of Intent (LoI) Pengadaan adalah proses formal yang dilakukan setelah penyusunan Feasibility Study (FS) untuk mengonfirmasi kesiapan dan kelayakan proyek. Proposal ini menyatakan bahwa proyek siap dikembangkan dan telah memenuhi semua aspek kelayakan. LoI merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan dan komitmen untuk membeli energi listrik dari proyek yang diusulkan dengan bilangan tarif sesuai yang diajukan.. Konteksnya adalah di saat PLN NR sudah mendapatkan timeline atau waktu yang diberikan oleh PLN untuk mengirimkan proposal (sesuai permintaan PLN). Setelah didapatkannya informasi dari PLN terkait undangan penyampaian proposal proyek, PLN NP (untuk skema Penugasan) bersama PLN NR secara bersama melakukan submission proposal atas draft proposal yang sebelumnya telah disusun bersama dengan partner. Lingkup proposal ini meliputi aspek legal, teknis, komersial.. Dari proposal yang diterima, PLN melakukan proses klarifikasi proposal serta negosiasi tarif listrik. Setelah PLN menyepakati proposal bersangkutan, maka dilakukanlah penandatanganan Berita Acara negosiasi Tarif yang akan diterbitkan oleh PLN. Dengan penandatanganan Berita Acara, PLN akan menerbitkan Letter of intent (LOI) atas proyek beserta tarif yang disepakati dan ketentuan selanjutnya mengenai tindak lanjut proyek di dalam dokumen LOI.. Input yang Diperlukan. FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis kelayakan proyek.. RFP/KAK (Request for Proposal/Kerangka Acuan Kerja): Dokumen yang menjelaskan detail kebutuhan dan persyaratan proyek.. Dokumen Draft Proposal: Draft awal proposal yang disusun berdasarkan FS dan KAK/TOR dari PLN.. Dokumen teknis, legal, dan lainnya yang diperlukan. Output yang Diharapkan. Dokumen Proposal: Proposal akhir yang mencakup semua komponen dokumen proposal yang tertuang dalam KAK/TOR dari PLN.. Tanda Terima Proposal dari PLN: Konfirmasi penerimaan proposal oleh PLN.. BA Negosiasi Tarif: Berita acara hasil dari negosiasi tarif yang diterbitkan oleh PLN.. Issued Lol: Letter of Intent yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan untuk membeli energi listrik dari proyek sesuai dengan tarif dan komponen komersial lainnya yang disepakati dan tertulis di Lol tersebut.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Proposal dan Validasinya. Langkah pertama dalam proses penerbitan Lol adalah menyusun proposal yang komprehensif dan memastikan bahwa semua komponen proposal telah divalidasi.. A. Penyusunan Proposal:. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan, termasuk FS, RFP/KAK, dan dokumen teknis serta legal.. Menyusun proposal berdasarkan pedoman dan persyaratan yang ditetapkan dalam KAK/TOR dari PLN.. B. Validasi Internal:. Melakukan review internal untuk memastikan bahwa proposal memenuhi semua persyaratan teknis, legal, dan komersial.. Memastikan bahwa semua data dan informasi yang disertakan dalam proposal akurat dan up-to-date.. C. Validasi Eksternal:. Meminta review eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan untuk memastikan validitas proposal.. Melakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan masukan dari review eksternal.. Penandatanganan dan Penyampaian Proposal. Setelah proposal disusun dan divalidasi, langkah berikutnya adalah penandatanganan dan penyampaian proposal kepada PLN.. A. Penandatanganan Proposal:. Mengumpulkan tanda tangan dari pihak yang berwenang di JVC untuk menyetujui dan mengesahkan proposal.. Menyusun dokumen pendukung yang diperlukan untuk

penyampaian proposal.. B. Penyampaian Proposal:. Mengirimkan proposal kepada PLN sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.. Memastikan bahwa PLN menerima proposal dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan.. Pembahasan Proposal dan Negosiasi. Setelah proposal diterima oleh PLN, langkah berikutnya adalah pembahasan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.. A. Pembahasan Proposal:. Mengatur pertemuan dengan PLN untuk membahas isi proposal secara mendetail.. Menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi yang diperlukan selama pembahasan.. B. Negosiasi:. Melakukan negosiasi mengenai tarif, syarat komersial, dan aspek teknis lainnya yang tertuang dalam proposal.. Mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua persyaratan telah disepakati.. Penerbitan Letter of Intent (LoI). Setelah pembahasan dan negosiasi selesai, langkah terakhir adalah penerbitan Letter of Intent (LoI) oleh PLN.. A. Persiapan Dokumen LoI:. Menyusun draft LoI yang mencakup semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi.. Memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan tertulis dengan jelas dan lengkap dalam LoI.. B. Review dan Finalisasi:. Melakukan review internal terhadap draft LoI untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan sesuai dengan kesepakatan.. Meminta persetujuan akhir dari pihak berwenang di PLN sebelum penerbitan LoI.. C. Penerbitan LoI:. Menerbitkan LoI dan menyampaikannya kepada JVC sebagai tanda kesediaan PLN untuk membeli energi listrik dari proyek.. Mendokumentasikan dan menyimpan salinan LoI serta memastikan bahwa semua pihak terkait menerima salinan dokumen tersebut.. Permohonan RUPS untuk Pendirian JVC, Setoran Modal Awal JVC, Tambahan Modal Disetor, Penunjukan Wakil. Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses penting dalam aksi korporasi untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam pendirian Joint Venture Company (JVC), setoran modal awal JVC, Tambahan Modal Disetor (TMD), dan Penunjukan Wakil. Proses ini memastikan semua aspek pendanaan dan struktur organisasi JVC telah disetujui oleh pemegang saham sehingga proyek dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi. Dalam skema akuisisi yang memerlukan pembelian saham, hasil valuasi saham dan due diligence harus disertakan.. Pada proses ini, dimungkinkan adanya proses permohonan RUPS secara terpisah mengikuti keadaan dan keperluan proyek yang sedang dilakukan, berlaku untuk Proyek Penugasan maupun Proyek Non Penugasan.. Input yang Diperlukan. DMR (Dokumen Manajemen Risiko): Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Kepdir & Pakta Integritas: Keputusan Direktur dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil... Rekomendasi Dewan Komisaris (Dekom): Rekomendasi resmi dari Dewan Komisaris terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Persetujuan RUPS: Persetujuan awal dari RUPS untuk memastikan prosedur yang benar telah diikuti terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Output yang Diharapkan. RUPS Terkait (Setoran Modal Awal JVC, TMD, Penunjukan Wakil): Dokumen persetujuan resmi dari RUPS yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melanjutkan pendirian JVC dan proyek. . Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian DMR kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Langkah pertama adalah menyampaikan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan atas analisis risiko terkait pendirian JVC dan setoran modal awal.. A. Penyusunan DMR:. Menyusun DMR yang mencakup analisis risiko operasional, finansial, dan legal terkait pendirian JVC.. Memastikan bahwa DMR telah disusun secara komprehensif dan mencakup semua aspek yang relevan.. B. Penyampaian kepada Direksi:. Mengajukan DMR kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Direksi.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Setelah DMR disetujui oleh Direksi, langkah berikutnya adalah menyusun Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC.. A. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi:. Menyusun draft Keputusan Rapat Direksi yang mencakup persetujuan atas pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Memastikan bahwa draft keputusan telah mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku.. B. Penyusunan Pakta Integritas:. Menyusun Pakta Integritas yang mencakup komitmen untuk mematuhi semua aturan dan regulasi terkait pendirian JVC.. Mendapatkan tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk persetujuan dan komitmen.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris dan meminta tanggapan tertulis mereka.. A. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi resmi.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Dewan Komisaris.. B. Permintaan Tanggapan Tertulis:. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pendirian JVC.. Mendokumentasikan semua tanggapan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Langkah terakhir adalah menyampaikan semua dokumen yang telah disetujui kepada pemegang saham untuk

mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. A. Penyampaian Dokumen kepada Pemegang Saham:.. Mengajukan semua dokumen yang relevan, termasuk DMR, Keputusan Rapat Direksi, Pakta Integritas, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada pemegang saham.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh pemegang saham.. B. Persetujuan RUPS:.. Mengadakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemegang saham terkait pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Mendokumentasikan hasil RUPS dan menyimpan salinan persetujuan untuk keperluan arsip dan referensi di masa mendatang..

Penandatanganan SHA. Penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) adalah langkah penting dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC). Proses ini diawali dengan negosiasi pasal-pasal dalam SHA oleh para calon pemegang saham pada JVC project company. Perjanjian ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyepakati tanggung jawab dan keuntungan dari proyek yang dikembangkan..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat..

Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC..

Referensi Utama. SHA Termsheet: Shareholder Agreement termsheet yang menjadi bagian dari dokumen RFP (request for proposal) partnership, jika ada.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi..

Proses dan Langkah-langkah.

Pembahasan Hak dan Kewajiban; Diskusi dan Negosiasi. Langkah pertama dalam penandatanganan SHA adalah melakukan diskusi dan negosiasi mengenai hak dan kewajiban para calon pemegang saham..

A. Persiapan Diskusi:.. Mengkaji perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Menyusun draft SHA termsheet berdasarkan dokumen pengadaan partner..

B. Diskusi dan Negosiasi:.. Melakukan pertemuan dengan semua calon pemegang saham untuk mendiskusikan setiap pasal dalam draft SHA.. Negosiasi mengenai hak dan kewajiban, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab manajemen, dan mekanisme penyelesaian sengketa..

C. Dokumentasi Pertemuan:.. Mencatat semua poin penting yang dibahas dan disepakati selama pertemuan.. Menyusun notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan untuk memastikan bahwa semua poin penting telah dicatat..

Finalisasi Draft SHA. Setelah diskusi dan negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft SHA..

A. Penyusunan Final Draft:.. Menggabungkan semua poin yang telah disepakati selama diskusi dan negosiasi ke dalam draft SHA.. Memastikan bahwa draft final SHA sesuai dengan Panduan Penyusunan SHA dan regulasi terkait..

B. Review dan Verifikasi:.. Melakukan review ulang terhadap draft final SHA oleh tim hukum dan para calon pemegang saham.. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua pasal sudah jelas dan tidak ada ambiguitas..

C. Persetujuan Draft Final:.. Mendapatkan persetujuan dari semua calon pemegang saham atas draft final SHA.. Mempersiapkan dokumen final untuk penandatanganan..

Penandatanganan SHA. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penandatanganan SHA oleh semua calon pemegang saham..

A. Persiapan Penandatanganan:.. Mengatur waktu dan tempat untuk penandatanganan SHA.. Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk draft final SHA dan dokumen pendukung lainnya..

B. Proses Penandatanganan:.. Mengumpulkan semua calon pemegang saham untuk menandatangani SHA.. Menyaksikan dan mencatat proses penandatanganan untuk memastikan keabsahan dokumen..

C. Dokumentasi dan Penyimpanan:.. Menyimpan salinan SHA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi di masa mendatang.. Mendokumentasikan penandatanganan sebagai bukti legal bahwa semua pihak telah menyepakati perjanjian..

Pembentukan Joint Venture Company (JVC). Pembentukan Joint Venture Company (JVC) adalah tahap penting dalam skema Independent Power Producer (IPP) di mana perusahaan patungan dibentuk untuk mengembangkan dan merealisasikan proyek pembangkit listrik. JVC bertindak sebagai project vehicle dari para pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan kesepakatan dalam Shareholder Agreement (SHA)..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat.. SK Kementerian Hukum dan HAM yang terkait. Dokumen Administratif, yang meliputi:.. Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT JVC . Surat Kuasa NR untuk mewakili Pengurusan Akta Pendirian. POA/ Surat Kuasa PT JVC untuk register akun, pengurusan NIB dan Izin umum yang diperlukan. Surat Pernyataan

Penyetoran Modal. Surat Pernyataan Domisili. Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh NPWP dan SPT PT . Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh Keputusan, Persetujuan, dan/atau Rekomendasi dari Instansi Terkait sesuai dengan Bidang Usaha PT. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dari PT . Corporate Approval penunjukan wakil Partner. Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC.. Referensi Utama. Panduan Penyusunan SHA: Dokumen panduan yang digunakan untuk menyusun SHA sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Anggaran Dasar JVC. Langkah pertama dalam pembentukan JVC adalah penyusunan Anggaran Dasar (AD) yang akan menjadi dasar hukum operasional JVC.. A. Penyusunan Draft Anggaran Dasar:. Mengumpulkan informasi dari SHA yang telah ditandatangani.. Menyusun draft Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku.. B. Konsultasi dengan Pemegang Saham:. Mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham untuk membahas dan merevisi draft Anggaran Dasar.. Memastikan semua pemegang saham setuju dengan isi Anggaran Dasar.. C. Finalisasi Anggaran Dasar:. Memperbaiki dan menyelesaikan Anggaran Dasar berdasarkan masukan dari pemegang saham.. Mempersiapkan dokumen final untuk pengesahan.. Penyusunan Semua Dokumen Perijinan yang Diperlukan untuk Pendirian JVC. Setelah Anggaran Dasar disusun, langkah berikutnya adalah menyiapkan semua dokumen perijinan yang diperlukan untuk mendirikan JVC.. A. Identifikasi Dokumen Perijinan:. Mengidentifikasi semua dokumen perijinan yang diperlukan seperti Izin Usaha, NPWP, NIB, dan dokumen lainnya.. B. Pengumpulan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dari para pemegang saham dan pihak terkait.. Memastikan dokumen yang dikumpulkan lengkap dan sesuai dengan persyaratan hukum.. C. Penyusunan dan Verifikasi Dokumen:. Menyusun semua dokumen perijinan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen untuk memastikan keabsahannya.. Pengesahan JVC dan Mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah semua dokumen perijinan disiapkan, langkah berikutnya adalah pengesahan JVC dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.. A. Pengajuan Dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM:. Mengajukan semua dokumen perijinan yang telah disusun ke Kementerian Hukum dan HAM.. Memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi.. B. Proses Pengesahan:. Mengikuti proses pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika ada kendala dalam proses pengesahan.. C. Mendapatkan SK Pengesahan:. Mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.. Menyimpan SK sebagai bukti legalitas JVC.. Implementasi dan Operasionalisasi JVC. Setelah JVC disahkan, langkah terakhir adalah implementasi dan operasionalisasi JVC.. A. Penetapan Struktur Organisasi:. Menetapkan struktur Dewan Komisaris (BOC) dan Direksi (BOD) sesuai dengan Anggaran Dasar.. Menunjuk wakil perseroan yang telah disetujui.. B. Pengadaan Sarana dan Prasarana:. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional JVC.. Mengatur kantor, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya.. C. Pelaksanaan Operasional:. Memulai kegiatan operasional sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun.. Melaksanakan proyek pembangkit listrik sesuai dengan kesepakatan dalam SHA.. Power Purchase Agreement. Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) adalah perjanjian yang mengatur jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik selaku penjual (seller) dan PT PLN (Persero) selaku pembeli (offtaker). PPA meliputi semua persyaratan komersial untuk penjualan tenaga listrik antara kedua belah pihak, termasuk tanggal operasional komersial, jadwal pengiriman listrik, denda untuk keterlambatan, syarat pembayaran, dan ketentuan pengakhiran kontrak. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner. PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC.. Input yang Diperlukan. Dokumen Perjanjian (SHA): Shareholder Agreement yang telah disepakati.. Proposal dan Letter of Intent (LoI): Proposal proyek dan LoI yang diterbitkan oleh PLN.. Feasibility Study: Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. Draft PPA: Draft awal perjanjian PPA untuk dibahas dan dinegosiasikan.. Output yang Diharapkan. Dokumen PPA Final: Perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Referensi Utama. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi dalam penyusunan PPA.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Review PPA. Langkah pertama adalah menyusun draft review PPA yang mencakup semua ketentuan penting dan syarat komersial yang akan dinegosiasikan.. A. Penyusunan Draft Awal:

Menggunakan informasi dari dokumen SHA, proposal, Lol, dan hasil Feasibility Study untuk menyusun draft awal PPA.. Melibatkan tim legal dan teknis untuk memastikan semua aspek penting tercakup dalam draft.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft PPA untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi internal serta eksternal.. Mengadakan rapat internal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari tim manajemen.. Negosiasi dengan PLN. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk mencapai kesepakatan final tentang ketentuan dalam PPA.. A. Pengaturan Jadwal Negosiasi:. Mengatur jadwal pertemuan dengan tim PLN untuk membahas draft PPA.. Menyusun agenda dan poin-poin negosiasi yang akan dibahas.. B. Pembahasan Poin-Poin Penting:. Membahas tarif harga jual listrik, termasuk staging harga.. Menegosiasikan periode PPA dengan mempertimbangkan kelayakan proyek dan bankability proyek.. Mendiskusikan skema BOOT atau BOT, financing date, periode Take or Pay dan Take and Pay, liquidated damage, force majeure, termination, supply energi primer, dan dispute resolution.. C. Penyusunan Notulen Pertemuan:. Mencatat semua poin yang disepakati dan perbedaan yang masih ada.. Menyusun notulen pertemuan sebagai dasar untuk revisi draft PPA.. Finalisasi Draft PPA. Setelah negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi.. A. Revisi Draft PPA:. Melakukan revisi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi dengan PLN.. Memastikan semua perubahan yang disepakati telah dimasukkan dalam draft final.. B. Validasi Final Draft:. Melakukan validasi akhir terhadap draft PPA oleh tim legal dan manajemen.. Mengadakan rapat final untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait.. Penandatanganan PPA oleh Pihak Berwenang. Langkah terakhir adalah penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. A. Penyiapan Dokumen untuk Penandatanganan:. Menyiapkan dokumen PPA final yang telah disetujui untuk ditandatangani oleh pihak berwenang.. Mengatur jadwal penandatanganan dengan PLN.. B. Penandatanganan PPA:. Melakukan penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. Menyimpan salinan PPA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi.. C. Distribusi Dokumen PPA:. Mendistribusikan salinan PPA kepada semua pihak yang berkepentingan.. Memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam PPA.. EPC Procurement. EPC Procurement adalah proses pengadaan kontraktor yang bertanggung jawab atas Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam proyek pembangunan pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan konstruksi pembangkit. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner.. Input yang Diperlukan:. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Kajian teknis yang menentukan spesifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk proyek.. Hasil Kajian Lokasi Pembangkit: Kajian lokasi yang menentukan persyaratan lokasi untuk kontraktor EPC.. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. Draft Kontrak EPC: Draft awal kontrak yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani.. Output yang Diharapkan. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor EPC yang telah diidentifikasi.. List Konsultan Transactional: Daftar konsultan yang akan membantu dalam proses transaksi.. Kontraktor EPC Terpilih: Kontraktor EPC yang dipilih melalui proses pengadaan.. Draft Kontrak EPC: Draft final kontrak yang siap untuk ditandatangani.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak EPC yang telah ditandatangani dan disahkan.. Laporan Pelaksanaan Konstruksi: Laporan berkala yang memantau kemajuan konstruksi.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan.. SK PJB No. 100.K/010/DIR/2017: Surat Keputusan terkait pengadaan EPC.. Permenperin No. 54/2012: Peraturan Menteri Perindustrian terkait pengadaan.. Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi Kontraktor dan Konsultan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kontraktor dan konsultan potensial yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk proyek.. A. Pemetaan Kontraktor Potensial:. Mengumpulkan data dari hasil kajian teknologi dan lokasi pembangkit untuk menentukan spesifikasi yang dibutuhkan.. Menyusun list kontraktor EPC potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. B. Penilaian Awal:. Melakukan penilaian awal terhadap kontraktor berdasarkan pengalaman, reputasi, dan kapabilitas teknis mereka.. Menyusun list konsultan transactional yang akan membantu dalam proses transaksi.. Proses Pengadaan Kontraktor EPC. Langkah kedua adalah melaksanakan proses pengadaan untuk memilih kontraktor EPC yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun draft kontrak EPC awal yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Menyiapkan dokumen tender dan mengumumkan pengadaan secara terbuka atau terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari kontraktor yang berminat.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Mengadakan presentasi dan wawancara dengan

kontraktor potensial untuk memastikan kesesuaian.. C. Penentuan Kontraktor Terpilih:. Menyusun laporan evaluasi dan merekomendasikan kontraktor EPC terpilih.. Mendapatkan persetujuan dari manajemen dan pihak terkait.. Penandatanganan Kontrak EPC. Langkah ketiga adalah menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor terpilih.. A. Negosiasi Final:. Mengadakan negosiasi akhir dengan kontraktor terpilih untuk memastikan semua persyaratan dan ketentuan telah disepakati.. Menyusun draft final kontrak EPC berdasarkan hasil negosiasi.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft final kontrak EPC untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.. Mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang untuk penandatanganan kontrak.. C. Penandatanganan Kontrak:. Menandatangani kontrak EPC oleh pihak berwenang dari JVC dan kontraktor terpilih.. Mendokumentasikan kontrak yang telah ditandatangani dan menyimpan salinan untuk arsip.. Implementasi Kontrak EPC. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan kontrak EPC dan memantau pelaksanaannya.. A. Mobilisasi Kontraktor:. Mengkoordinasikan mobilisasi kontraktor ke lokasi proyek.. Menyusun jadwal pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. B. Pemantauan dan Laporan Berkala:. Melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan konstruksi dan memastikannya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.. Menyusun laporan pelaksanaan konstruksi dan menyampaikan kepada pihak terkait.. C. Penanganan Isu dan Penyelesaian:. Menyelesaikan isu-isu yang muncul selama pelaksanaan kontrak.. Memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan..

Land Procurement. Land Procurement adalah proses pengadaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik. Ketersediaan lahan yang memadai dan legal sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Proses ini mencakup kajian risiko operasional dan finansial, serta memastikan kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, Proses ini dilakukan oleh JVC dan PLN NR hanya sebagai support atau consult. . Dalam rangka percepatan proyek, maka Land Procurement dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Kajian Risiko Operasional: Hasil kajian risiko operasional yang mencakup penilaian potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Kajian Risiko Finansial: Hasil kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Dokumentasi Legal: Dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Output yang Diharapkan. Kepastian Kepemilikan Lahan: Kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, siap digunakan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis lokasi dan kebutuhan lahan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan lahan.. Kebijakan Internal PLN NR: Kebijakan dan prosedur internal PLN NR terkait pengadaan lahan..

Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi dan Evaluasi Lahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi lahan yang potensial untuk pembangunan pembangkit listrik.. A. Pemetaan Lahan Potensial:. Menggunakan hasil kajian lokasi pembangkit dari Dokumen FS untuk menentukan area yang sesuai.. Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi lahan yang memenuhi kriteria teknis dan legal.. B. Penilaian Risiko Operasional dan Finansial:. Melakukan kajian risiko operasional yang mencakup potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Melakukan kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Menentukan skema pemanfaatan lahan, apakah berbentuk jual beli atau sewa menyewa.. C. Dokumentasi dan Verifikasi Legal:. Mengumpulkan dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Memverifikasi keabsahan dokumen legal dengan instansi terkait.. Negosiasi Pengadaan Lahan. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan pembelian.. A. Pendekatan dan Penawaran:. Menghubungi pemilik lahan untuk membahas potensi akuisisi atau sewa menyewa.. Menyusun dan mengajukan penawaran harga yang sesuai dengan hasil kajian risiko finansial.. B. Negosiasi dan Kesepakatan:. Melakukan negosiasi harga dan persyaratan pembelian atau sewa menyewa dengan pemilik lahan.. Mencapai kesepakatan final yang menguntungkan kedua belah pihak.. C. Penyusunan Perjanjian Jual Beli atau Sewa Menyewa Lahan:. Menyusun perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Mendapatkan tanda tangan dari kedua belah pihak pada perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan.. Pengesahan dan Penyerahan Lahan. Langkah ketiga adalah mengesahkan dan menyerahkan lahan yang telah dibeli.. A. Pengesahan Dokumen:. Mengajukan dokumen perjanjian jual beli untuk pengesahan kepada notaris atau pejabat terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.. B. Penyerahan dan Pencatatan:. Melakukan penyerahan lahan secara resmi dari pemilik lama ke JVC, sesuai skema yang disepakati.. Mencatat perubahan kepemilikan lahan di instansi terkait untuk memastikan kepemilikan sah, jika skema yang

dipilih adalah sewa menyewa.. Pengelolaan dan Penggunaan Lahan. Langkah terakhir adalah mengelola dan menggunakan lahan yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Persiapan dan Pembersihan Lahan:. Melakukan persiapan lahan, termasuk pembersihan dan perataan tanah.. Mengelola lahan agar siap digunakan untuk kegiatan konstruksi.. B. Penggunaan Lahan untuk Proyek:. Mengalokasikan lahan sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun.. Memantau dan mengelola penggunaan lahan selama seluruh tahap proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan rencana awal..

Pengurusan Perizinan. Pengurusan perizinan adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi yang memungkinkan pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik dalam skema Independent Power Producer (IPP) maupun skema NON IPP. Proses ini mencakup berbagai jenis izin yang harus dipenuhi dari tahap pengembangan hingga tahap konstruksi. Perizinan ini mencakup izin lingkungan, izin penanaman modal, dan izin operasional lainnya. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC.. Dalam rangka percepatan proyek, maka Pengurusan Perizinan dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Feasibility Study (FS): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. List Kebutuhan Perizinan: Daftar kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. Dokumen Persyaratan Pengurusan Perizinan: Semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin.. Set Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah disiapkan untuk diajukan ke instansi terkait.. Output yang Diharapkan. List Kebutuhan Perizinan: Daftar lengkap kebutuhan perizinan yang telah diidentifikasi.. Prosedur Tiap Perizinan: Prosedur rinci untuk setiap jenis perizinan yang diperlukan.. List Konsultan Perizinan dan Kompetensinya: Daftar konsultan yang akan membantu dalam pengurusan perizinan beserta kompetensi mereka.. List Lembaga Perizinan: Daftar instansi atau lembaga yang terkait dengan proses perizinan.. Basic Komunikasi Pengurusan Perizinan dengan Instansi Terkait: Panduan komunikasi dasar dengan instansi terkait.. Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah diterbitkan dan sah.. PPA Signing: Penandatanganan Power Purchase Agreement setelah izin diperoleh.. Pencapaian Financing Close: Penyelesaian proses pendanaan setelah izin diperoleh.. Pelaksanaan EPC: Implementasi kontrak EPC setelah semua izin diperoleh.. Referensi Utama. SOP Instansi Terkait: Standar Operasional Prosedur dari instansi pemerintah terkait.. PERMENHU B 25/2011: Peraturan Menteri Perhubungan yang relevan.. KEPPRES NO. 39/1991: Keputusan Presiden yang terkait dengan perizinan..

Proses dan Langkah-langkah. Pengurusan Perizinan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait. Langkah pertama adalah mengurus perizinan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan telah terpenuhi.. A. Identifikasi Kebutuhan Perizinan:. Menggunakan hasil studi kelayakan (FS) untuk mengidentifikasi semua izin yang diperlukan.. Menyusun daftar lengkap kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. B. Persiapan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen persyaratan pengurusan perizinan yang diperlukan.. Menyusun set dokumen perizinan yang siap diajukan ke instansi terkait.. C. Koordinasi dengan Instansi:. Melakukan komunikasi dengan instansi terkait untuk memastikan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti.. Mengatur pertemuan atau konsultasi dengan instansi untuk mendapatkan klarifikasi jika diperlukan.. Pengesahan atas Semua Dokumen Perizinan. Langkah kedua adalah mengesahkan semua dokumen perizinan yang telah disiapkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait.. A. Penyampaian Dokumen:. Menyerahkan set dokumen perizinan yang telah disiapkan kepada instansi terkait untuk pengesahan.. Mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi untuk pengesahan dokumen.. B. Verifikasi dan Pengesahan:. Mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi yang berwenang.. C. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Mencatat dan menyimpan salinan dokumen perizinan yang telah disahkan sebagai referensi.. Mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah atau Instansi Terkait. Langkah ketiga adalah mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau instansi terkait yang memungkinkan proyek untuk dilanjutkan ke tahap eksekusi.. A. Tindak Lanjut dan Monitoring:. Memantau status pengajuan izin untuk memastikan tidak ada hambatan atau keterlambatan.. Mengikuti perkembangan proses izin secara berkala dengan instansi terkait.. B. Pengambilan Izin:. Mengambil dokumen izin resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau instansi terkait.. Memastikan bahwa semua izin yang diperlukan telah diperoleh sebelum memulai tahap konstruksi.. C. Pelaporan dan Komunikasi:. Melaporkan status perizinan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.. Menyediakan panduan komunikasi dasar untuk mengkoordinasikan pengurusan perizinan dengan instansi terkait..

Financing Close. Financing Close (FC) adalah proses dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik untuk skema NONIPP maupun skema IPP, yang melibatkan pemenuhan semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (lender) kepada peminjam (borrower) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman (Facility Agreement) sebelum pencairan pinjaman dapat dilakukan. Proses ini memastikan bahwa semua

persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi sehingga pinjaman dapat dicairkan untuk membiayai proyek. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC..

Input yang Diperlukan. JVC Establishment: Dokumen pendirian JVC yang telah disahkan.. Power Purchase Agreement (PPA): PPA yang telah ditandatangani.. Land Procurement: Dokumen kepemilikan dan izin lahan.. EPC Bid: Dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Permit & License: Izin dan lisensi yang diperlukan.. Pemenuhan Syarat FC: Semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement..

Output yang Diharapkan. Financial Close (FC): Kondisi di mana semua persyaratan peminjaman telah terpenuhi, dan pinjaman dapat dicairkan..

Referensi Utama. Facility Agreement: Perjanjian Pinjaman yang menetapkan semua syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pencairan pinjaman..

Proses dan Langkah-langkah. Pemenuhan Persyaratan. Langkah pertama dalam proses Financing Close adalah memastikan semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman dalam Facility Agreement telah terpenuhi. Ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi berbagai dokumen serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan..

A. JVC Establishment: Mengumpulkan dan mengesahkan dokumen pendirian JVC.. Memastikan bahwa JVC telah secara resmi didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

B. Power Purchase Agreement (PPA): Memastikan bahwa PPA telah ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Menyimpan salinan resmi PPA untuk referensi..

C. Land Procurement: Mengumpulkan dokumen kepemilikan dan izin lahan.. Memastikan bahwa lahan yang diperlukan untuk proyek telah tersedia dan siap digunakan..

D. EPC Bid: Mengumpulkan dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Memastikan bahwa kontraktor EPC telah dipilih dan siap untuk memulai pekerjaan..

E. Permit & License: Mengumpulkan semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk proyek.. Memastikan bahwa semua persyaratan perizinan telah terpenuhi..

F. Pemenuhan Syarat FC: Mengumpulkan semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman telah dipenuhi..

Validasi Data. Langkah kedua adalah melakukan validasi data untuk memastikan bahwa semua informasi dan dokumen yang diserahkan akurat dan lengkap. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat menghambat proses pencairan pinjaman..

A. Verifikasi Dokumen: Memeriksa kembali semua dokumen yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti PPA, izin lahan, dan kontrak EPC..

B. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul selama proses validasi..

C. Penyelesaian Discrepancies: Mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap perbedaan atau kekurangan dalam dokumen yang telah dikumpulkan.. Memastikan bahwa semua masalah telah diselesaikan sebelum dokumen diserahkan kepada pemberi pinjaman..

Pencairan Pinjaman. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan data telah divalidasi, langkah terakhir adalah pencairan pinjaman. Pencairan ini menandai bahwa proyek telah mencapai tahap Financing Close dan siap untuk dilanjutkan ke tahap implementasi..

A. Penandatanganan Dokumen Akhir: Menandatangani semua dokumen akhir yang diperlukan untuk pencairan pinjaman.. Memastikan bahwa semua pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan mereka..

B. Pencairan Dana: Mengatur pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui..

C. Pelaporan dan Dokumentasi: Menyimpan semua dokumen dan laporan yang terkait dengan proses Financing Close.. Menyusun laporan akhir untuk pemangku kepentingan yang relevan..

Halaman ini sengaja dikosongkan. . Tahap Execution. Engineering, Procurement, Construction. Proses Engineering, Procurement, Construction (EPC) bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan proses konstruksi pembangkit listrik dengan memperhatikan regulasi yang berlaku dan menjunjung prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Aktivitas utama dalam proses EPC meliputi identifikasi kontraktor, pelaksanaan pengadaan, penandatanganan kontrak, dan implementasi kontrak..

Input yang Diperlukan. Dokumen FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan proyek yang mencakup analisis teknis, finansial, dan risiko.. Detailed Engineering Design: Rancangan teknis detail yang menjadi acuan dalam konstruksi pembangkit.. Power Plant Equipment: Spesifikasi dan daftar peralatan utama yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Dokumen Permintaan Backfeeding: Dokumen yang menjelaskan kebutuhan backfeeding untuk persiapan testing dan commissioning..

Output yang Diharapkan. Detail Engineering Design: Rancangan teknis detail yang telah disiapkan dan disetujui.. Power Plant Equipment: Peralatan pembangkit yang telah diadakan dan siap untuk instalasi.. Block Pembangkit (Power house, BoP, Auxiliary): Struktur dan fasilitas pendukung pembangkit yang telah dibangun.. Start Up dan Siap untuk Pengujian Pembangkit: Pembangkit siap untuk dioperasikan dan diuji sebelum commissioning..

Referensi Utama. EPC Contract: Kontrak EPC yang

mencakup semua persyaratan dan ketentuan pengadaan serta pelaksanaan proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Proses Engineering . Proses ini mencakup penyiapan dokumen detail engineering design oleh Kontraktor EPC, baik untuk peralatan utama maupun peralatan pendukung pembangkit.. A. Penyusunan Detail Engineering Design (DED):. Menyiapkan desain teknis yang rinci untuk semua komponen utama dan pendukung pembangkit.. Mengadakan pertemuan teknis dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian desain. . B. Validasi Desain:. Melakukan review dan validasi desain oleh tim internal dan eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar.. Mengajukan desain untuk disetujui oleh pihak berwenang.. Proses Procurement. Kontraktor EPC melakukan pengadaan seluruh peralatan pembangkit dan melaksanakan pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk mendukung proses konstruksi.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun spesifikasi teknis dan dokumen tender untuk pengadaan peralatan pembangkit.. Mengumumkan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari pemasok.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk dan memilih pemasok yang paling sesuai.. C. Penyiapan Kontrak Pengadaan:. Menyusun kontrak pengadaan berdasarkan hasil seleksi dan negosiasi dengan pemasok.. Menandatangani kontrak pengadaan dengan pemasok terpilih.. Proses Construction. Proses konstruksi dilaksanakan oleh Kontraktor EPC sesuai dengan Detail Engineering Design dan Kontrak EPC yang telah ditandatangani. Proses ini biasanya mengikuti Work Breakdown Structure (WBS) yang telah dibuat oleh Kontraktor EPC.. . A. Mobilisasi dan Persiapan:. Mengkoordinasikan mobilisasi tim dan peralatan ke lokasi proyek.. Menyiapkan lokasi konstruksi sesuai dengan rencana kerja dan WBS.. B. Pelaksanaan Konstruksi:. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan jadwal yang telah disusun.. Melakukan pengawasan dan kontrol kualitas secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.. C. Laporan Kemajuan:. Menyusun laporan kemajuan konstruksi secara berkala dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang muncul selama proses konstruksi.. Backfeeding. Pelaksanaan backfeeding dilakukan sebagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan testing dan commissioning pembangkit.. A. Persiapan Backfeeding:. Menyusun rencana dan jadwal backfeeding berdasarkan kebutuhan proyek.. Mengajukan permintaan backfeeding dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.. B. Pelaksanaan Backfeeding:. Melaksanakan proses backfeeding sesuai dengan rencana yang telah disetujui.. Memastikan bahwa semua sistem dan peralatan berfungsi dengan baik selama proses backfeeding.. C. Pengujian dan Verifikasi:. Melakukan pengujian awal dan verifikasi sistem untuk memastikan kesiapan sebelum tahap commissioning.. Menyusun laporan hasil backfeeding dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Penyediaan Energi Primer. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik, khususnya untuk pembangkit non-EBT, agar dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan energi primer, penyusunan proposal, persetujuan skema penyediaan energi primer, pengadaan bahan bakar, dan penandatanganan perjanjian bahan bakar dengan supplier.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Analisis teknologi yang digunakan dalam pembangkit untuk menentukan jenis dan jumlah energi primer yang dibutuhkan.. Perencanaan Supply Energi Primer: Rencana yang mencakup perkiraan kebutuhan energi primer dan sumbernya.. Harga Energi Primer: Informasi tentang harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Proposal yang Disetujui: Dokumen proposal yang telah disetujui oleh pihak terkait.. Supplier Terpilih: Daftar pemasok bahan bakar yang telah dipilih berdasarkan evaluasi.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara PLN atau SPC dengan pemasok.. Output yang Diharapkan. Supply Energi Primer: Pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik.. Harga Energi Primer: Harga bahan bakar yang telah disepakati dalam perjanjian.. Proposal yang Disetujui: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pihak terkait.. Fuel Agreement dengan PLN: Perjanjian bahan bakar antara PLN dan pemasok.. Terpilihnya Supplier Energi Primer: Pemasok bahan bakar yang telah dipilih.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara SPC dan pemasok.. Supply Energi Primer oleh Supplier: Penyediaan bahan bakar oleh pemasok sesuai dengan perjanjian.. Proses dan Langkah-langkah. Perencanaan Supply Energi Primer . Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan suplai energi primer untuk pengembangan pembangkit listrik baru. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian teknologi pembangkit.. A. Identifikasi Kebutuhan Energi Primer:. Melakukan analisis kebutuhan energi primer berdasarkan jenis teknologi pembangkit yang akan digunakan.. Menyusun perkiraan kebutuhan bahan bakar untuk jangka waktu tertentu.. B. Estimasi Harga Energi Primer:. Mengumpulkan data harga bahan bakar dari berbagai sumber.. Menyusun perkiraan biaya bahan bakar untuk kebutuhan pembangkit.. Penyusunan Proposal. Perencanaan energi primer tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan proposal yang diajukan ke PT PLN (Persero).. A. Penyusunan Rencana Kebutuhan Energi Primer:. Menyusun dokumen proposal yang mencakup rencana kebutuhan energi primer selama masa PPA (Power Purchase Agreement)..

Mengajukan skema penyediaan energi primer yang diusulkan.. B. Pengajuan Proposal:. Mengajukan proposal ke PT PLN (Persero) untuk mendapatkan persetujuan.. Persetujuan Skema Penyediaan Energi Primer. PLN akan memutuskan skema yang digunakan dalam penyediaan energi primer.. A. Evaluasi Proposal:. PT PLN (Persero) mengevaluasi proposal yang diajukan.. Memutuskan skema penyediaan energi primer yang akan digunakan (Passthrough atau IPP).. B. Penentuan Skema:. Menentukan apakah penyediaan energi primer dilakukan oleh PLN atau SPC.. Menyesuaikan nilai Komponen C dalam PPA berdasarkan skema yang dipilih.. Fuel Procurement. Jika skema penyediaan energi primer yang disetujui dilakukan oleh SPC, maka SPC harus melaksanakan proses pengadaan energi primer.. A. Proses Pengadaan:. SPC melakukan proses pengadaan energi primer sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Mengumumkan tender dan mengumpulkan penawaran dari pemasok.. B. Evaluasi Penawaran:. Melakukan evaluasi teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Memilih pemasok yang memenuhi kriteria dan kebutuhan proyek.. Fuel Agreement PLN dengan Supplier. Untuk skema penyediaan energi primer yang dilakukan oleh PLN, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan PLN. Sedangkan untuk skema yang dilakukan oleh SPC, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan SPC.. A. Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian:. Melakukan negosiasi dengan pemasok energi primer untuk mencapai kesepakatan harga dan syarat lainnya.. Menyusun dan menandatangani perjanjian bahan bakar (fuel agreement) dengan pemasok terpilih.. B. Pelaksanaan Perjanjian:. Memastikan pemasok melaksanakan penyediaan energi primer sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.. Mengawasi dan mengontrol kualitas dan kuantitas energi primer yang disuplai oleh pemasok.. Penyiapan Jasa Operation & Maintenance. Aktivitas penyiapan jasa Operation & Maintenance (O&M) bertujuan untuk memastikan operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini melibatkan penunjukan pihak yang bertanggung jawab, penyusunan perjanjian, mobilisasi SDM, pendampingan, monitoring, pelatihan, dan pengelolaan kinerja pembangkit.. Input yang Diperlukan. Surat Penunjukan/LOI: Dokumen yang menunjuk pihak yang akan mengelola O&M.. EPC Contract: Kontrak antara perusahaan EPC dan pemilik aset terkait pembangunan pembangkit.. COD (Commercial Operation Date): Tanggal mulai operasional komersial pembangkit.. Data Kinerja Pembangkit: Informasi tentang kinerja operasional pembangkit.. Data Pending Items: Daftar item atau pekerjaan yang belum selesai.. Output yang Diharapkan. Perjanjian Induk: Dokumen perjanjian antara pihak terkait untuk pelaksanaan jasa O&M.. Dokumen Mobilisasi SDM: Dokumen yang mencakup rekrutmen dan penempatan personil.. Laporan Monitoring EPC: Laporan bulanan tentang progress proyek EPC.. Laporan Pelaksanaan Jasa O&M: Laporan berkala mengenai pelaksanaan O&M.. Sertifikat STOP: Sertifikat penerimaan akhir dari EPC kontraktor.. Final Acceptance Certificate: Sertifikat penerimaan final setelah masa garansi.. Proses dan Langkah-langkah. Penugasan/Penunjukkan (LOI). Surat penunjukan/penugasan (LOI) dari pemilik aset (PLN NP/SPC Proyek) kepada Asset Manager atau Asset Operator (PJBS/MKP/perusahaan jasa O&M) untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tersebut.. Penerbitan LOI oleh pemilik aset.. Penugasan Asset Manager atau Asset Operator untuk O&M.. Penyepakatan Perjanjian Induk. Penyusunan dan persetujuan Perjanjian Induk yang mengatur syarat-syarat pokok pelaksanaan jasa O&M pembangkit.. Negosiasi syarat dan ketentuan antara pihak terkait.. Penandatanganan Perjanjian Induk.. Supporting . Tahap ini terbagi dalam dua tahapan: Pra COD dan COD-FAC.. Pra COD:. Mobilisasi SDM: Rekrutmen dan penempatan personil untuk operasi dan pemeliharaan.. Pendampingan EPC Proyek: Pendampingan oleh Asset Manager atau Asset Operator terhadap EPC proyek sebelum penyerahan.. Monitoring EPC Proyek: Monitoring progress pembangunan oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Training oleh EPC Kontraktor: Pelatihan oleh EPC Kontraktor kepada Asset Manager atau Asset Operator.. Pembuatan Laporan Monitoring: Pelaporan hasil monitoring kepada pemilik aset setiap bulan.. COD-FAC:. Mobilisasi SDM: Pemenuhan jumlah personil BSO dan non BSO.. Penyiapan Tata Kelola: Penyiapan tata kelola unit pembangkit selama 6 bulan setelah COD.. Supporting COD-FAC: Dukungan paralel dengan proses mobilisasi dan penyiapan tata kelola pembangkit.. Tahap Performance. Pengelolaan jasa O&M sepenuhnya oleh Asset Manager atau Asset Operator tanpa supervisi dari EPC Kontraktor.. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Pengawasan dan evaluasi kinerja pembangkit secara mandiri.. Penyiapan Organisasi dan SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga

kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Commercial Operation Date. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa pembangkit listrik telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Tahap ini juga digunakan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PJB atau penjelasan realisasi Commercial Operation Date (COD) proyek-proyek yang ada di RUPTL. Setelah pembangkit dinyatakan lolos COD, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit akan tetap berada di bawah supervisi EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. Input yang Diperlukan. Progres EPC. Penyediaan energi primer. Penyiapan SDM untuk OM. Checklist pre-commissioning. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Data pendukung lainnya. Checklist untuk persiapan COD. Output yang Diharapkan. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Sertifikat Laik Operasi (SLO). Checklist untuk persiapan COD. COD pembangkit. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pre-Commissioning. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki tahap commissioning. Tahap ini terdiri dari backfeeding test serta pengujian terhadap peralatan-peralatan supporting operasional pembangkit, di antaranya adalah WTP (water treatment process), cooling system, cleaning system, coal handling system, serta fire protection system.. Persiapan dan Pemeriksaan:. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sistem pendukung operasional pembangkit.. Menyiapkan daftar periksa (checklist) untuk setiap sistem dan komponen yang akan diuji.. Pelaksanaan Pengujian:. Melaksanakan backfeeding test untuk memastikan keandalan sistem distribusi listrik internal.. Menguji sistem WTP, cooling system, cleaning system, coal handling system, dan fire protection system.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan memastikan semua sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.. Commissioning. Tahap ini menjadi bukti bahwa pembangkit yang bersangkutan bisa benar-benar beroperasi dan dijadikan bahan untuk penyusunan SLO. Tahap ini terdiri dari pengujian terhadap first firing, steam admission, first synchrone, load rejection, reliability run & test, serta performance test. Ketika nilai performanya sesuai dengan kesepakatan yang ada pada kontrak, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.. First Firing and Steam Admission:. Menguji pembakaran pertama (first firing) dan pemasukan uap (steam admission) untuk memastikan sistem boiler dan turbin bekerja dengan baik.. First Synchronization:. Melakukan sinkronisasi pertama (first synchrone) untuk menghubungkan pembangkit ke grid listrik.. Load Rejection and Reliability Run:. Menguji reaksi sistem terhadap penolakan beban (load rejection) dan melakukan uji keandalan (reliability run) untuk memastikan stabilitas operasi.. Performance Test:. Melaksanakan uji kinerja (performance test) untuk memastikan pembangkit memenuhi spesifikasi performa yang disepakati dalam kontrak.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan menilai apakah pembangkit memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kontrak EPC.. Penyusunan Sertifikat

Laik Operasi (SLO). Tahap ini bersifat administratif dan harus dilakukan berdasarkan tata cara sertifikasi SLO sesuai regulasi dari lembaga pemerintahan yang bersangkutan.. Pengumpulan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen dan data hasil pengujian dari tahap pre-commissioning dan commissioning.. Penyusunan Sertifikat:. Menyusun Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.. Proses Pengesahan:. Mengajukan SLO ke instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan dan registrasi resmi.. Dokumentasi:. Mendokumentasikan sertifikat yang telah disahkan dan menyimpan salinannya sebagai bukti legalitas operasional.. er Plant COD. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk penanda bahwa pembangkit telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Selain itu, tahap ini juga dijadikan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PLN NP ataupun penjelasan realisasi COD proyek-proyek yang ada di RUPTL.. Persiapan COD:. Melakukan persiapan akhir untuk memastikan semua sistem siap untuk operasi komersial.. Menyusun checklist persiapan COD dan memastikan semua item telah terpenuhi.. Pelaksanaan COD:. Melaksanakan kegiatan operasional yang menandai pembangkit memasuki tahap COD.. Memastikan semua prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan telah dilaksanakan dengan benar.. Dokumentasi COD:. Mendokumentasikan hasil dan proses yang dilakukan selama tahap COD.. Menyimpan dokumen resmi yang menunjukkan pembangkit telah mencapai COD.. Supervisi Pasca-COD:. Melakukan supervisi terhadap operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. . Tahap Completion. Penyusunan Serah Terima Operasi. Proses ini bertujuan untuk membuat dokumen serah terima operasi (STOP) sesuai dengan organisasi SPC yang telah diatur. Pengoperasian pembangkit perlu dilakukan oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Pembangkit, sebagaimana opsi-opsi O&M sesuai kesepakatan pada SHA, serta keputusan opsi yang dipilih oleh JVC.. Input yang Diperlukan. COD pembangkit. Checklist pasca COD. Data kinerja pembangkit. Output yang Diharapkan. Sertifikat STOP. Data pending items. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Kinerja Pembangkit dan Penyusunan Dokumen. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja pembangkit pasca-COD untuk memastikan bahwa semua sistem dan peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun dokumen serah terima operasi (STOP).. Pengumpulan Data Kinerja:. Mengumpulkan data kinerja pembangkit sejak COD hingga waktu evaluasi.. Menggunakan checklist pasca-COD untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan standar yang telah ditetapkan.. Evaluasi Kinerja:. Melakukan analisis terhadap data kinerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.. Menilai kinerja pembangkit dalam hal efisiensi, keandalan, dan pemenuhan target operasi.. Penyusunan Dokumen:. Menyusun dokumen serah terima operasi (STOP) berdasarkan hasil evaluasi.. Memastikan semua temuan dan rekomendasi tercatat dengan jelas dalam dokumen.. Identifikasi Pending Items. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat item-item yang masih pending atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum serah terima operasi dapat dilakukan sepenuhnya.. Pengumpulan Data Pending Items:. Mengidentifikasi item-item yang masih dalam proses penyelesaian atau perbaikan.. Mendokumentasikan semua pending items dengan deskripsi rinci dan status saat ini.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:. Berkoordinasi dengan kontraktor EPC dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penyelesaian pending items.. Menetapkan timeline untuk penyelesaian dan verifikasi pending items.. Pembaharuan Checklist:. Memperbarui checklist pasca-COD dengan status terbaru dari pending items.. Koordinasi dengan Pihak Terkait dan Peninjauan Akhir Dokumen. Langkah ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa dokumen serah terima operasi telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor dan Pihak Terkait:. Mengadakan pertemuan dengan kontraktor EPC, O&M team, dan pihak lain yang relevan untuk meninjau dokumen STOP.. Mendiskusikan temuan, rekomendasi, dan pending items yang masih perlu diselesaikan.. . Peninjauan Akhir Dokumen:. Melakukan review akhir terhadap dokumen STOP untuk memastikan kelengkapannya.. Memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi.. Validasi Dokumen:. Mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait terhadap dokumen STOP yang telah disusun.. Penerbitan Sertifikat STOP. Tahap akhir adalah penerbitan Sertifikat Serah Terima Operasi Pembangkit (STOP), yang menandai bahwa pembangkit telah siap untuk dioperasikan secara penuh oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan.. Penyusunan Sertifikat STOP:. Menyusun Sertifikat STOP berdasarkan dokumen yang telah disetujui.. Memastikan sertifikat mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items.. Penerbitan Sertifikat:. Menerbitkan sertifikat STOP secara resmi.. Menyampaikan sertifikat kepada Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan serta pihak-pihak terkait lainnya.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses serah terima operasi sebagai

referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Taking Over Certificate. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa seluruh pekerjaan EPC Contractor telah selesai dan aset sepenuhnya diserahkan dari EPC Contractor ke SPC/PJB. Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan setelah tercapainya COD dan semua pekerjaan EPC dianggap selesai. Jika masih ada pending item minor, maka akan disepakati bersama untuk dicatat dan dijadwalkan penyelesaiannya dalam masa garansi (Warranty Period).. Input yang Diperlukan. Sertifikat STOP. Data penyelesaian pending items. Output yang Diharapkan. Taking Over Certificate (TOC). Data temuan first year inspection (FYI). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pemeriksaan dan Evaluasi Aset. Tahap ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset pembangkit untuk memastikan semua pekerjaan EPC telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat setiap pending item minor yang masih perlu diselesaikan.. Inspeksi Fisik.. Melakukan inspeksi fisik terhadap seluruh komponen pembangkit.. Memeriksa kondisi operasional dan performa sistem secara keseluruhan.. Evaluasi Kinerja.. Menganalisis data kinerja dari periode pasca-COD.. Mengidentifikasi setiap masalah operasional atau ketidaksesuaian yang memerlukan penyelesaian.. Dokumentasi Pending Items.. Mencatat semua pending items minor yang masih harus diselesaikan.. Menyusun rencana penyelesaian untuk setiap pending item selama masa garansi.. Penyusunan Dokumen TOC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi aset selesai, dokumen Taking Over Certificate (TOC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penyusunan Draft TOC.. Menyusun draft TOC yang mencakup hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Memasukkan data penyelesaian pending items dan rencana penyelesaiannya dalam masa garansi.. Review Internal.. Melakukan review internal terhadap draft TOC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Memastikan semua pihak terkait setuju dengan isi draft TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dan Peninjauan. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan pihak lain yang relevan, untuk melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor.. Mengatur pertemuan dengan EPC Contractor untuk membahas hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Mendiskusikan pending items dan menyepakati rencana penyelesaiannya.. Peninjauan Akhir.. Melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC dengan semua pihak terkait.. Memastikan bahwa semua kesepakatan telah dicatat dengan jelas dalam dokumen TOC.. Penerbitan Taking Over Certificate. Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan secara resmi untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penerbitan TOC.. Menerbitkan TOC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa TOC mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items dan rencana penyelesaiannya.. Dokumentasi dan Penyimpanan.. Menyimpan salinan TOC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan TOC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Final Acceptance Certificate. Proses Final Acceptance Certificate (FAC) bertujuan untuk menandai bahwa proyek pembangkit telah benar-benar selesai dibangun oleh pihak EPC sesuai dengan seluruh ketentuan yang sudah disepakati dalam EPC contract. Ini termasuk penyelesaian pending items yang belum terselesaikan selama masa COD dan penyelesaian temuan first year inspection dalam masa garansi setelah masa COD. Setelah seluruh peralatan selama masa garansi dipastikan beroperasi dengan baik dan seluruh pending items telah diselesaikan, FAC dapat diterbitkan. Terbitnya FAC menandai berakhirnya EPC Contract dan seluruh sisa pembayaran akhir dapat dilakukan oleh SPC ke EPC Contractor.. Input yang Diperlukan. Taking Over Certificate (TOC). Data penyelesaian temuan first year inspection (FYI). Output yang Diharapkan. Final Acceptance Certificate (FAC). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Penyelesaian Temuan First Year Inspection. Langkah ini melibatkan penyelesaian semua temuan yang diidentifikasi selama first year inspection (FYI). Semua temuan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam EPC contract sebelum FAC dapat diterbitkan.. Identifikasi Temuan FYI.. Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua temuan dari first year inspection.. Penyelesaian Temuan.. Mengkoordinasikan dengan EPC Contractor untuk menyelesaikan semua temuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak.. Verifikasi Penyelesaian.. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua temuan telah diselesaikan dengan memuaskan.. Pemeriksaan dan Evaluasi Akhir; Koordinasi dan Peninjauan. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan EPC telah diselesaikan sesuai dengan kontrak. Koordinasi dan peninjauan dilakukan dengan semua pihak terkait untuk memastikan tidak ada isu yang belum terselesaikan.. Pemeriksaan Akhir.. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan sistem untuk memastikan operasional yang optimal.. Evaluasi Akhir.. Mengevaluasi hasil pemeriksaan

akhir dan membandingkannya dengan ketentuan dalam EPC contract.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:. Mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan lainnya, untuk memastikan semua persyaratan telah dipenuhi.. Peninjauan Dokumen:. Meninjau semua dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapannya.. Penyusunan Dokumen FAC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi akhir selesai, dokumen Final Acceptance Certificate (FAC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB secara resmi.. Penyusunan Draft FAC:. Menyusun draft FAC yang mencakup semua hasil pemeriksaan dan evaluasi akhir.. Review Internal:. Melakukan review internal terhadap draft FAC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Persetujuan Akhir:. Memastikan bahwa semua pihak terkait menyetujui isi draft FAC sebelum diterbitkan.. Penerbitan Final Acceptance Certificate; Pelaksanaan Pembayaran Akhir . Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Final Acceptance Certificate (FAC) diterbitkan secara resmi, menandai berakhirnya EPC Contract dan memungkinkan pelaksanaan pembayaran akhir.. Penerbitan FAC:. Menerbitkan FAC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa FAC mencakup semua informasi penting, termasuk status penyelesaian temuan FYI.. Pelaksanaan Pembayaran Akhir:. Mengatur pembayaran akhir kepada EPC Contractor sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. Memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan FAC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan FAC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. . Fungsi Kontrol dan Support. Fungsi Kontrol Project Management Office. Project Management Office (PMO) memainkan peran vital dalam keseluruhan proses tata kelola pengembangan pembangkit di PLN Nusantara Renewables. PMO bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi administrasi konstruksi. Tugas utama PMO mencakup administrasi proyek, manajemen proyek, review pelaksanaan konstruksi, serta penyelesaian segala permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proyek. PMO menjalankan tugas pokoknya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).. Perencanaan Proyek:. Menyusun rencana kerja dan anggaran proyek (RKAP) dengan detail, mencakup seluruh aspek teknis, finansial, dan operasional.. Mengembangkan timeline proyek yang realistis dan memastikan setiap tahapan memiliki milestone yang jelas.. Menetapkan sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan secara efektif untuk memastikan efisiensi.. Pelaksanaan Proyek:. Mengawasi implementasi rencana kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk engineering, procurement, dan construction.. Menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.. Pengembangan dan Evaluasi Administrasi Konstruksi:. Melakukan administrasi proyek yang meliputi dokumentasi, pelaporan, dan manajemen kontrak.. Mengembangkan sistem evaluasi untuk mengukur kinerja proyek secara berkala.. Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.. . Review Pelaksanaan Konstruksi:. Meninjau dan mengevaluasi progres konstruksi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana.. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dan menyusun strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Penyelesaian Permasalahan Proyek:. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang timbul selama proyek berlangsung.. Menyusun solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut.. Mengkoordinasikan implementasi solusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menghambat progres proyek.. Dalam menjalankan tugasnya, PMO harus selalu berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi:. Transparansi: Menjamin bahwa seluruh proses dan keputusan dalam proyek dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.. Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proyek memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas tugasnya.. Responsibilitas: Memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta selaras dengan tujuan perusahaan.. Independensi: Menjaga agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan proyek.. Keadilan: Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek diperlakukan secara adil dan setara, serta mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.. Fungsi Support Legal/Hukum. Bidang Legal atau Hukum di PLN Nusantara Renewables memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan proyek pembangkit listrik mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan fungsi support yang kuat di berbagai tahap proyek dan tanggung jawab penuh dalam penyusunan perjanjian kerjasama, bidang legal memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan aman

dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini membantu PLN Nusantara Renewables mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif, sambil mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul.. Fungsi Support (S) Bidang Legal. Dalam berbagai tahap pengembangan proyek pembangkit listrik, bidang legal di PLN Nusantara Renewables memegang peranan penting sebagai pendukung (support) yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa aktivitas di mana bidang legal memberikan dukungan:.. Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses identifikasi peluang proyek dengan memberikan analisis hukum terkait kelayakan proyek. Mereka meninjau regulasi dan peraturan yang relevan untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan panduan hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi dapat dilaksanakan tanpa hambatan hukum.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Dalam penyusunan longlist proyek, bidang legal memberikan masukan hukum untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.. Peran: Melakukan due diligence hukum dan memberikan rekomendasi terkait aspek hukum dari proyek-proyek potensial.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan studi kelayakan awal dengan meninjau aspek hukum yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan proyek.. Peran: Menyediakan analisis hukum yang komprehensif untuk mendukung keputusan bisnis yang berbasis hukum.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam mengidentifikasi mitra potensial dengan meninjau kelayakan hukum dan rekam jejak mitra potensial.. Peran: Menyediakan penilaian hukum terhadap calon mitra untuk memastikan kerjasama yang aman dan sesuai dengan hukum.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung dalam pembuatan daftar panjang dan pendek mitra serta pendanaan dengan meninjau aspek hukum dan regulasi yang relevan.. Peran: Memberikan saran hukum untuk memilih mitra dan skema pendanaan yang sesuai.. Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam proses permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk proyek dan mitra dengan menyediakan dukungan hukum yang diperlukan.. Peran: Menyusun dan meninjau dokumen hukum yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penerbitan Letter of Intent (Lol) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur memenuhi persyaratan hukum.. Peran: Melakukan peninjauan dan penyusunan dokumen Lol yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam menyusun dokumen permohonan RUPS dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses permohonan yang lancar dan sesuai dengan regulasi.. Penandatanganan SHA:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dengan meninjau dan menyusun dokumen yang diperlukan.. Peran: Memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi sebelum penandatanganan.. Pembentukan JVC:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Memberikan dukungan hukum untuk pembentukan JVC yang legal dan sah.. Power Purchase Agreement:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan dan peninjauan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) untuk memastikan kepatuhan hukum.. Peran: Menyediakan analisis hukum dan saran untuk menyusun PPA yang sesuai dengan peraturan.. EPC Procurement:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses pengadaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan kontrak sesuai dengan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk pengadaan yang sah dan sesuai regulasi.. Land Procurement:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pengadaan lahan dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum pertanahan.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk memastikan bahwa proses pengadaan lahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Pengurusan Perizinan:.. Tugas: Bidang legal mendukung pengurusan perizinan dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses perizinan yang lancar dan sah.. Fungsi Responsible (R) Bidang Legal. Dalam beberapa aktivitas, bidang legal bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan tugas atau aktivitas tersebut. Berikut adalah aktivitas di mana bidang legal memiliki peran Responsible:.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Bidang legal bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan meninjau semua dokumen perjanjian kerjasama untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengamankan kepentingan PLN Nusantara Renewables.. Peran: Menyusun, meninjau, dan menyetujui dokumen perjanjian kerjasama, serta memastikan bahwa semua perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.. Fungsi Support Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam mendukung dan mengkonsultasikan berbagai aktivitas proyek pengembangan pembangkit listrik. Dengan menyediakan analisis risiko yang mendalam dan rekomendasi mitigasi yang sesuai, satuan ini membantu memastikan bahwa semua proyek berjalan

dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.. Fungsi Support (S) dalam Satuan Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangkit listrik dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul. Dalam beberapa aktivitas, satuan ini berfungsi sebagai pendukung (support), memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang didukung oleh Satuan Manajemen Risiko:..

Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan dukungan dalam mengidentifikasi peluang proyek dengan menilai potensi risiko yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. . Peran: Melakukan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam fase identifikasi proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Dalam penyusunan studi kelayakan awal, Satuan Manajemen Risiko mendukung dengan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang bisa mempengaruhi kelayakan proyek.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek risiko telah dipertimbangkan dalam studi kelayakan.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menyusun dokumen manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek tersebut.. Peran: Mengembangkan dokumen manajemen risiko yang terperinci dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan strategi mitigasi telah ditetapkan... Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko mendukung dalam proses permohonan persetujuan RUPS dengan memberikan analisis risiko yang relevan.. Peran: Menyediakan informasi risiko dan strategi mitigasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di RUPS.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Sama dengan permohonan persetujuan proyek dan partner, satuan ini juga memberikan dukungan dalam permohonan RUPS untuk aspek-aspek risiko.. Peran: Menyediakan dukungan dalam menyusun analisis risiko yang relevan untuk proses pengajuan permohonan RUPS.. Fungsi Consult (C) dalam Satuan Manajemen Risiko. Dalam beberapa aktivitas lain, Satuan Manajemen Risiko berperan sebagai pihak yang harus dikonsultasikan (consult) untuk memberikan saran, masukan, atau keahlian khusus yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang dikonsultasikan oleh Satuan Manajemen Risiko:.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan masukan terkait risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proyek-proyek yang masuk dalam longlist.. Peran: Menyediakan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek-proyek tersebut.. Pembuatan Shortlist Proyek:.. Tugas: Sama seperti dalam longlist, satuan ini juga memberikan konsultasi dalam menyusun shortlist proyek dengan mempertimbangkan aspek risiko.. Peran: Memberikan saran dan masukan terkait risiko untuk memastikan bahwa proyek-proyek dalam shortlist memiliki risiko yang terkelola dengan baik.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pengidentifikasian partner dengan menilai risiko-risiko yang terkait dengan masing-masing partner.. Peran: Menyediakan analisis risiko terhadap partner untuk memastikan kerjasama yang aman dan minim risiko.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan terkait risiko-risiko dalam penyusunan longlist dan shortlist partner serta skema pendanaan.. Peran: Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan analisis risiko untuk memastikan pemilihan partner dan skema pendanaan yang sesuai.. Penentuan Partner Terpilih:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses penentuan partner terpilih dengan mempertimbangkan risiko yang terkait.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang mendalam untuk memastikan bahwa partner yang dipilih memiliki profil risiko yang dapat diterima.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan dalam penyusunan perjanjian kerjasama dengan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah ditetapkan.. Peran: Memberikan saran terkait klausul-klausul dalam perjanjian yang berhubungan dengan risiko.. Update Feasibility Study:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pembaruan studi kelayakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin muncul dari perubahan terbaru.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang diperbarui untuk memastikan bahwa studi kelayakan tetap relevan dan akurat.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan konsultasi terkait risiko-risiko dalam penerbitan Letter of Intent (LoI) pengadaan.. Peran: Menyediakan masukan terkait mitigasi risiko dalam LoI untuk memastikan proses pengadaan yang aman.. Penandatanganan SHA, Pembentukan JVC, Power Purchase Agreement, EPC Procurement, Land Procurement, Pengurusan Perizinan, Financing Close:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko berperan dalam memberikan konsultasi untuk semua aktivitas ini dengan menilai risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang sesuai.. Peran: Menyediakan analisis risiko dan masukan terkait untuk memastikan bahwa

semua aspek proyek dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko.. TAHAP EXECUTION dan COMPLETION:.. Tugas: Dalam tahap-tahap ini, satuan manajemen risiko memberikan konsultasi pada berbagai aktivitas seperti engineering, procurement, construction, penyediaan energi primer, penyiapan jasa operation & maintenance, penyiapan organisasi & SDM, commercial operation date, penyusunan serah terima operasi, penerbitan taking over certificate, dan penerbitan final acceptance certificate.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif dan memberikan saran mitigasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek dalam tahap eksekusi dan penyelesaian.. Fungsi Support SDM. Sub Bab Proses Bisnis Support SDM menguraikan peran penting bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung utama dalam menjalankan proses bisnis utama di PLN Nusantara Renewables. Bab ini memberikan panduan mengenai bagaimana SDM berperan dalam mendukung berbagai tahapan pengembangan pembangkit listrik, mulai dari inisiasi hingga eksekusi proyek.. Dalam konteks pengembangan pembangkit listrik, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya finansial yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat. PLN Nusantara Renewables memahami bahwa SDM adalah aset penting yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.. Bab ini akan menguraikan berbagai aktivitas support yang dilakukan oleh bagian SDM, mulai dari penyusunan kapasitas dan kapabilitas hingga pemenuhan SDM untuk proyek. Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk mendukung proses bisnis utama di setiap tahapan pengembangan proyek, memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Kapasitas SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-Langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Penyusunan Kapabilitas SDM. Penyusunan Kapabilitas SDM merupakan elemen krusial di Tahapan Initiation dalam mendukung penyusunan Longlist proyek di Tahap Initiation pengembangan pembangkit oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Longlist Proyek adalah daftar awal dari proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN NR dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang, mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan

potensi keberhasilan.. Dalam konteks ini, Penyusunan Kapabilitas SDM berperan sebagai proses support yang tidak hanya mendukung tetapi juga menguatkan tahapan ini. Proses Penyusunan Kapabilitas SDM bertujuan untuk me-review kembali desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja guna memastikan kesesuaian dan optimalisasi sumber daya manusia dalam menjalankan proyek yang direncanakan. Proses ini bertujuan untuk mencapai struktur organisasi yang lean, sehingga menghindari kelebihan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Selain itu, proses ini memastikan bahwa standar kompetensi karyawan dan job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Tipe Teknologi: Jenis teknologi yang digunakan dalam proyek pembangkit listrik.. Kapasitas Pembangkit: Kapasitas total pembangkit listrik yang akan dibangun.. Jenis Pembangkit: Kategori atau jenis pembangkit listrik (misalnya, PLTU, PLTA, PLTS).. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Dokumen yang mencakup standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan berdasarkan kebutuhan proyek.. Output yang Diharapkan. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Daftar standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi dan persyaratan lainnya..

Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Standar Kompetensi (KKJ). Pada aktivitas ini dilakukan penyusunan standar kompetensi berdasarkan pada formasi tenaga kerja dalam struktur organisasi yang dibuat. Standar kompetensi yang dibutuhkan menyesuaikan dengan proyek yang akan dijalankan nantinya. Hasil dari aktivitas ini berupa Standar Kompetensi Karyawan untuk setiap divisi atau bidang dalam formasi tenaga kerja..

A. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi: Menentukan kebutuhan kompetensi berdasarkan tipe teknologi, kapasitas pembangkit, dan jenis pembangkit.. Mengkaji standar kompetensi yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan proyek..

B. Penyusunan Standar Kompetensi: Mengembangkan standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Mengadakan konsultasi dengan pakar industri dan pemangku kepentingan untuk memastikan keakuratan standar kompetensi..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi standar kompetensi dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan standar kompetensi karyawan..

Penyusunan Job Specification. Di sini dilakukan penyusunan job specification yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Job specification dapat berupa jenis kelamin, usia minimal, pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman kerja, standar fisik yang dibutuhkan, dan lainnya. Hasil dari aktivitas ini berupa Job Specification untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

A. Identifikasi Kriteria Job Specification: Menentukan kriteria job specification yang relevan untuk setiap posisi berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun.. Mengkaji kebutuhan spesifik untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

B. Penyusunan Job Specification: Mengembangkan job specification untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi, pengalaman, pendidikan, dan persyaratan lainnya.. Menyertakan detail spesifik seperti jenis kelamin (jika relevan), usia minimal, dan standar fisik..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi job specification dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan job specification untuk setiap posisi..

Review Kapasitas & Kapabilitas SDM untuk Proyek. Proses ini bertujuan untuk mereview kembali apakah desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja telah sesuai dan optimal untuk menjalankan proyek yang ditetapkan di Tahap Initiation guna mencapai struktur organisasi yang lean. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kompetensi serta job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang telah disusun untuk proyek.. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan untuk setiap posisi dalam proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk setiap posisi.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Output yang Diharapkan. Update Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang diperbarui dan lebih sesuai dengan kebutuhan proyek.. Update Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang diperbarui dan optimal.. Kapabilitas SDM Proyek: Kapabilitas SDM yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan proyek.. Update Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperbarui dan optimal..

Proses dan Langkah-langkah. Review Desain Struktur Organisasi. Pada aktivitas ini, dilakukan review kembali struktur organisasi yang telah dibuat untuk melihat apakah struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini berupa update struktur organisasi..

Analisis Struktur Organisasi: Meninjau struktur organisasi yang telah disusun.. Mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.. Konsultasi dengan Tim Proyek.. Melakukan diskusi dengan tim proyek untuk mendapatkan masukan terkait struktur organisasi.. Mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau pengurangan posisi..

Penyusunan Update Struktur Organisasi: Mengupdate struktur organisasi berdasarkan hasil analisis dan konsultasi..

Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Standard Kompetensi Karyawan. Melakukan review untuk memastikan bahwa standard kompetensi karyawan telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nanti nya. Hasil dari aktivitas ini berupa Kapabilitas SDM Proyek.. Evaluasi Standard Kompetensi:. Meninjau standar kompetensi yang telah ditetapkan.. Memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan skala proyek.. Identifikasi Kesenjangan Kompetensi:. Mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang ada dengan yang dibutuhkan.. Menyusun rencana pelatihan atau pengembangan untuk menutup kesenjangan tersebut.. Penyusunan Kapabilitas SDM Proyek:. Mengupdate standar kompetensi berdasarkan evaluasi dan identifikasi kesenjangan.. Mendokumentasikan kapabilitas SDM proyek.. Review Pengaturan Peran SDM. Melakukan review kembali terhadap peran dan tanggung jawab divisi atau bidang yang akan mengisi struktur organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah peran dan tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan struktur organisasi yang akan dibuat nantinya.. Evaluasi Tanggung Jawab Divisi:. Meninjau tanggung jawab dan peran masing-masing divisi atau bidang.. Memastikan bahwa peran tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Tim Manajemen:. Mengadakan diskusi dengan tim manajemen untuk mendapatkan masukan terkait peran dan tanggung jawab.. Menyesuaikan peran dan tanggung jawab berdasarkan masukan yang diterima.. Penyusunan Update Pengaturan Peran SDM:. Mengupdate peran dan tanggung jawab divisi dalam struktur organisasi.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Job Specification. Melakukan review terhadap job specification yang dibutuhkan untuk setiap formasi tenaga kerja pada struktur organisasi yang dibuat. Hasil dari aktivitas ini berupa kapabilitas SDM proyek yang sesuai dengan standard kompetensi karyawan dari proyek yang akan dijalankan nantinya.. Evaluasi Job Specification:. Meninjau job specification yang telah disusun untuk setiap posisi.. Memastikan bahwa spesifikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek.. Identifikasi Kebutuhan Spesifik:. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk setiap posisi berdasarkan tipe teknologi, kapasitas, dan jenis pembangkit.. Penyusunan Update Job Specification:. Mengupdate job specification berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Manpower Planning. Melakukan review kembali kebutuhan optimal dari tenaga kerja yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menghindari tenaga kerja berlebih atau kurang yang akan mengganggu proses pengembangan proyek tersebut.. Evaluasi Manpower Planning:. Meninjau proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang telah disusun.. Memastikan bahwa proyeksi tersebut sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek.. Identifikasi Kesenjangan Tenaga Kerja:. Mengidentifikasi kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan yang dibutuhkan.. Menyusun rencana rekrutmen atau redistribusi tenaga kerja untuk menutup kesenjangan tersebut.. Penyusunan Update Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja:. Mengupdate proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Negosiasi SDM dengan Partner. Proses ini bertujuan untuk menentukan kapasitas dan kapabilitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek dari sisi PLN Nusantara Renewable (PLN NR) dan partner serta pembagian komposisi jumlah tenaga kerja antara PLN NR dan partner dalam struktur tersebut. Negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan, serta bagaimana tenaga kerja tersebut akan dibagi dan dikelola selama proyek berlangsung.. Input yang Diperlukan. Proposal: Dokumen yang mencakup rencana proyek dan kebutuhan SDM.. Lol (SHA): Letter of Intent atau Shareholder Agreement yang mencakup ketentuan awal terkait SDM dan kerja sama antara PLN NR dan partner.. Output yang Diharapkan. SDM Proyek: Kesepakatan tentang kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan untuk proyek, serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner.. Referensi Utama. Dokumen Kesepakatan: Dokumen resmi yang mencakup hasil negosiasi dan kesepakatan terkait SDM antara PLN NR dan partner.. Proses dan Langkah-langkah. Negosiasi SDM dengan Partner. SPC akan melakukan negosiasi dengan partner untuk menginformasikan terkait update struktur organisasi, formasi tenaga kerja, kapabilitas SDM proyek, dan kebutuhan tenaga kerja yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar partner dan PLN NR mencapai kesepakatan terkait kapasitas dan kapabilitas SDM serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner yang telah diusulkan.. Persiapan Negosiasi:. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi terkait yang diperlukan untuk negosiasi, termasuk proposal, Lol (SHA), dan update struktur organisasi serta formasi tenaga kerja.. Menyiapkan agenda dan poin-poin penting yang akan dibahas selama negosiasi.. Penyampaian Informasi:. Mengadakan pertemuan dengan partner untuk menyampaikan update struktur organisasi, formasi tenaga kerja, kapabilitas SDM proyek, dan kebutuhan tenaga kerja.. Menjelaskan alasan dan dasar dari setiap update dan perubahan yang diusulkan.. Diskusi dan Negosiasi:. Membahas dan mendiskusikan setiap poin yang telah disampaikan.. Mendengarkan masukan dan saran dari partner serta menyesuaikan

rencana jika diperlukan.. Melakukan negosiasi terkait kapasitas dan kapabilitas SDM serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner.. Mencapai Kesepakatan:.. Berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan proyek.. Mencatat semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi untuk dituangkan dalam dokumen kesepakatan resmi.. Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menandatangani dokumen kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.. Penyusunan Dokumen Kesepakatan:.. Menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup semua poin yang telah disepakati selama negosiasi.. Memastikan bahwa dokumen tersebut jelas dan mencakup semua rincian penting terkait SDM proyek.. Review dan Validasi:.. Melakukan review internal terhadap dokumen kesepakatan untuk memastikan akurasi dan kelengkapannya.. Mengajukan dokumen tersebut kepada partner untuk review dan validasi.. Penandatanganan Dokumen:.. Mengatur pertemuan untuk penandatanganan dokumen kesepakatan oleh pihak berwenang dari PLN NR dan partner.. Menandatangani dokumen kesepakatan secara resmi.. Distribusi dan Dokumentasi:.. Mendistribusikan salinan dokumen kesepakatan kepada semua pihak yang berkepentingan.. Mendokumentasikan dan menyimpan salinan dokumen kesepakatan untuk referensi dan arsip.. Pemenuhan SDM di SPC Proyek. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan porsi yang dimiliki PLN Nusantara Renewable (PLN NR) serta kapabilitas yang sesuai untuk menjalankan proyek tersebut. Proses ini memastikan bahwa personel yang direkrut atau dimutasikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan proyek.. Input yang Diperlukan. SHA: Shareholders Agreement yang mengatur tentang porsi dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam SPC.. Kapasitas SDM Proyek: Informasi tentang jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Kapabilitas SDM Proyek: Informasi tentang kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dari tenaga kerja untuk proyek.. Output yang Diharapkan. Penetapan BOD dan BOC pada SPC: Struktur organisasi dengan penunjukan Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) pada SPC.. Personel Proyek: Personel yang telah ditugaskan dan siap bekerja pada proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Penunjukkan BOD dan BOC pada SPC. Melakukan penunjukkan BOD dan BOC pada SPC sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM yang telah disepakati pada SHA Proyek. Hasil dari aktivitas ini adalah penetapan BOD dan BOC yang akan mengisi struktur organisasi dalam proyek tersebut.. Identifikasi Kandidat:.. Mengidentifikasi calon BOD dan BOC yang sesuai dengan kriteria dan kapabilitas yang telah ditetapkan dalam SHA.. Evaluasi dan Seleksi:.. Melakukan evaluasi dan seleksi terhadap calon BOD dan BOC berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan kinerja sebelumnya.. Penunjukan Resmi:.. Melakukan penunjukan resmi BOD dan BOC sesuai dengan prosedur yang berlaku.. Mendokumentasikan keputusan penunjukan dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak terkait.. Mutasi Karyawan. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mutasi karyawan. Karyawan yang akan dimutasikan disesuaikan dengan Kapasitas SDM Proyek dan Kapabilitas SDM Proyek. Tujuan dari aktivitas ini adalah menetapkan personel atau karyawan yang akan ditugaskan dalam proyek pengembangan tersebut.. Identifikasi Karyawan untuk Mutasi:.. Mengidentifikasi karyawan yang memiliki kapabilitas sesuai dan dapat dimutasikan ke proyek.. Evaluasi dan Persetujuan:.. Melakukan evaluasi terhadap karyawan yang akan dimutasikan untuk memastikan kesesuaian kompetensi.. Mendapatkan persetujuan dari manajemen terkait mutasi karyawan.. Pelaksanaan Mutasi:.. Melaksanakan proses mutasi karyawan sesuai dengan prosedur perusahaan.. Memberikan orientasi dan briefing kepada karyawan yang dimutasikan mengenai tugas dan tanggung jawab baru mereka.. Rekrutmen Karyawan. Melakukan rekrutmen untuk mengisi posisi dalam struktur organisasi tersebut. Pemenuhan karyawan melalui rekrutmen akan mengikuti Kapasitas SDM dan Kapabilitas SDM proyek. Tujuan dari aktivitas ini adalah mendapatkan personel atau karyawan yang akan menjalankan proyek pengembangan tersebut.. . Perencanaan Rekrutmen:.. Menyusun rencana rekrutmen berdasarkan kebutuhan SDM yang telah diidentifikasi.. Pengumuman dan Penerimaan Lamaran:.. Mengumumkan posisi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi.. Menerima dan menyeleksi lamaran dari calon karyawan.. Proses Seleksi:.. Melakukan seleksi melalui tes, wawancara, dan evaluasi kompetensi.. Menyusun daftar kandidat terpilih untuk wawancara lebih lanjut.. Penawaran dan Penempatan:.. Membuat penawaran kerja kepada kandidat terpilih.. Melakukan penempatan karyawan baru dalam struktur organisasi proyek.. Memberikan orientasi kepada karyawan baru mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam proyek.. Fungsi Support Pendanaan. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, PLN Nusantara Renewables harus memastikan bahwa setiap proyek pembangkit listrik memiliki struktur pendanaan yang solid dan terencana dengan baik. Pendanaan merupakan salah satu aspek krusial dalam siklus hidup proyek, mulai dari Tahap Initiation hingga tahap penyelesaian. Tanpa pendanaan yang memadai dan tepat waktu, risiko keterlambatan proyek dan peningkatan biaya dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan strategi pendanaan yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan proyek.. Sub Bab ini memberikan

pemahaman tentang bagaimana PLN Nusantara Renewables mengelola dan mengoptimalkan sumber daya finansial untuk mendukung pengembangan proyek-proyek pembangkit dalam Tata Kelola Pengembangan Pembangkit.. Gambaran Umum Alur Pendanaan. Berikut adalah gambaran tentang alur pendanaan proyek pengembangan pembangkit listrik di PLN Nusantara Renewables. Proses ini mencakup dari identifikasi proyek, analisis kelayakan, penutupan keuangan, hingga pemantauan dan peninjauan setelah proyek berjalan. Setiap tahap memiliki proses-proses penting yang memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, dengan fokus pada manajemen risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan.. . Gambar 3 Gambaran Umum Alur Pendanaan. Alur pendanaan proyek berlangsung di sepanjang empat tahap utama tata kelola pengembangan pembangkit: Initiation (Inisiasi), Development (Pengembangan), Execution (Eksekusi), Completion (Penyelesaian). Pipeline to Financial Close. Bagian ini menggambarkan proses pendanaan yang berlangsung dari tahap awal hingga penutupan keuangan proyek (financial close). Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah:. Identification (Identifikasi): Mengidentifikasi proyek yang potensial untuk didanai.. Pre-Screening: Melakukan pra-penyaringan terhadap proyek yang diidentifikasi untuk memastikan kelayakannya.. Credit & ESS Analysis & Rating: Melakukan analisis kredit dan ESS (Environmental, Social, and Governance) serta memberikan penilaian.. Execution: Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.. Facility Disbursement & Monitoring. Setelah penutupan keuangan, proses berlanjut ke penyaluran fasilitas dan pemantauan. Tahapan ini meliputi:. Disbursement (Penyaluran): Proses pencairan dana untuk mendanai proyek.. Monitoring (Pemantauan): Memantau pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.. Project Stages (Tahapan Proyek). Setiap proyek pengembangan pembangkit melalui beberapa tahapan:. Project Initiation (Inisiasi Proyek): Tahap awal proyek, melibatkan persiapan dasar dan identifikasi proyek.. Project Assessment and Approval Process (Proses Penilaian dan Persetujuan Proyek): Melakukan penilaian mendalam dan proses persetujuan proyek.. Financial Close (Penutupan Keuangan): Tahap akhir dalam persiapan keuangan proyek, memastikan semua persyaratan keuangan terpenuhi.. Highlighted Process (Proses yang Disorot). Beberapa proses penting dalam alur pendanaan proyek:. Name Clearance: Pemeriksaan dan persetujuan nama proyek.. Key Terms & Conditions: Penentuan dan persetujuan syarat serta ketentuan utama.. Project Due Diligence: Penelitian mendalam terhadap proyek yang meliputi berbagai aspek seperti:. KYC Due Diligence (Know Your Customer). Financial Due Diligence (Keuangan). S&E Due Diligence (Safety & Environment). Lender Advisor Due Diligence: Penelitian mendalam oleh penasihat pemberi pinjaman, mencakup aspek teknis, hukum, dan lingkungan.. Credit Documentation: Dokumentasi kredit yang diperlukan.. Credit Agreements: Perjanjian kredit yang disetujui.. Security Documentation: Dokumentasi jaminan untuk pendanaan.. Post-Approval Stage (Tahap Pasca-Persetujuan). Setelah proyek disetujui dan dana dicairkan, ada beberapa aktivitas penting yang dilakukan:. Repayment Obligation Monitoring: Pemantauan kewajiban pembayaran kembali.. Project Review: Peninjauan berkala terhadap proyek.. Early Warning System: Sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.. Jenis Pendanaan. Concessional Funding. Concessional Funding adalah jenis pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah, negara, atau sektor publik lainnya, serta oleh special funds, Multilateral Financial Institutions (MFIs), dan Development Finance Institutions (DFIs). Pendanaan ini dirancang untuk memberikan dukungan keuangan dengan syarat yang lebih lunak dibandingkan dengan pinjaman komersial biasa. Pendanaan ini sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk pengembangan pembangkit listrik dan energi baru terbarukan (EBT).. Concessional funding adalah alat pendanaan yang sangat efektif untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik dan proyek energi terbarukan. Dengan menawarkan syarat pinjaman yang lebih lunak, termasuk bunga rendah atau nol dan fleksibilitas pembayaran, concessional funding membantu mengurangi beban keuangan pada proyek, memungkinkan akses ke dana yang lebih besar, dan menyediakan dukungan teknis dari penyedia pendanaan yang berfokus pada pembangunan. Hal ini menjadikan concessional funding sebagai pilihan yang menarik bagi PLN Nusantara Renewables dalam mengembangkan proyek-proyek energi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.. Karakteristik Concessional Funding. Bunga yang Sangat Rendah atau Tidak Ada. Salah satu ciri utama dari concessional funding adalah tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Dalam beberapa kasus, pendanaan ini bahkan tidak mengenakan bunga sama sekali. Tingkat bunga yang rendah ini membuat concessional funding sangat menarik bagi proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar namun memiliki sumber pendapatan yang mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya pinjaman komersial yang lebih tinggi.. Pembayaran Bunga yang Fleksibel. Pembayaran bunga dalam skema concessional funding sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Fleksibilitas ini mencakup penjadwalan ulang pembayaran bunga sesuai dengan

tahapan perkembangan proyek, yang sangat berguna untuk proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tahap operasional dan menghasilkan pendapatan.. Tema Pembangunan Spesifik. Banyak concessional funding yang ditujukan untuk mendukung tema pembangunan spesifik, terutama terkait dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Pendanaan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan akses energi bersih. Pendanaan ini sering kali terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan memiliki persyaratan yang mengharuskan proyek untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu.. Keuntungan Concessional Funding. Biaya Rendah. Karena tingkat bunga yang rendah atau nol, biaya keseluruhan pendanaan melalui concessional funding lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Hal ini mengurangi beban keuangan pada proyek, terutama pada tahap awal pengembangan.. Akses ke Dana yang Lebih Besar. Proyek yang memenuhi syarat untuk concessional funding sering kali dapat mengakses jumlah dana yang lebih besar dibandingkan dengan yang mungkin diperoleh melalui pinjaman komersial. Ini sangat penting untuk proyek besar seperti pembangunan pembangkit listrik.. Dukungan dari Penyedia yang Terkait dengan Pembangunan. Penyedia concessional funding seperti pemerintah dan DFIs biasanya memberikan dukungan tambahan dalam bentuk keahlian teknis, bantuan teknis, dan pemantauan proyek untuk memastikan keberhasilan proyek dan dampak positif yang diharapkan.. Contoh Penyedia Concessional Funding. Pemerintah dan Negara. Banyak pemerintah menyediakan concessional funding untuk proyek-proyek yang sejalan dengan kebijakan energi dan lingkungan nasional mereka. Misalnya, pemerintah dapat memberikan hibah atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek energi terbarukan.. Multilateral Financial Institutions (MFIs) dan Development Finance Institutions (DFIs). Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Finance Corporation (IFC) sering menyediakan concessional funding. Mereka mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak pembangunan yang signifikan dan sejalan dengan tujuan pembangunan global.. Project Finance/Project Bond. Project Finance adalah struktur pendanaan yang digunakan untuk mendanai proyek jangka panjang dan besar, di mana utang dan ekuitas digunakan untuk membiayai proyek. Dalam struktur ini, pinjaman dilunasi dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut, bukan dari neraca perusahaan sponsor. Project Bond adalah instrumen utang yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari publik atau investor institusional, yang juga dilunasi dari arus kas proyek.. Project finance dan project bond merupakan opsi pendanaan yang efektif untuk proyek-proyek pengembangan pembangkit listrik dan energi terbarukan. Dengan leverage yang tinggi, tenor yang panjang, dan struktur non-recourse atau limited recourse, jenis pendanaan ini memungkinkan proyek besar untuk mendapatkan dana yang diperlukan sambil membatasi risiko bagi sponsor proyek. Penggunaan project finance dan project bond dapat membantu PLN Nusantara Renewables dalam mengembangkan proyek-proyek energi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.. Penyedia pendanaan untuk project finance dan project bond meliputi: Commercial Lenders: Bank komersial yang memberikan pinjaman kepada proyek berdasarkan analisis kelayakan proyek dan arus kas yang diharapkan.. Multilateral Financial Institutions (MFIs) / Development Finance Institutions (DFIs) / Export Credit Agencies (ECAs): Lembaga-lembaga ini memberikan dukungan keuangan dan jaminan kepada proyek yang memiliki dampak pembangunan yang signifikan.. Public (Project Bond): Obligasi proyek yang diterbitkan di pasar modal untuk menarik investasi dari publik dan investor institusional.. Karakteristik Project Finance/Project Bond. Tingkat Leverage yang Tinggi. Project finance biasanya memiliki struktur leverage yang tinggi, dengan rasio Debt-to-Equity hingga 80%:20%. Ini berarti sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari utang, yang dapat meningkatkan pengembalian ekuitas bagi investor tetapi juga menambah risiko finansial.. Tenor yang Panjang. Pendanaan melalui project finance dan project bond biasanya memiliki tenor yang panjang, sering kali lebih dari 15 tahun. Tenor yang panjang ini sesuai dengan sifat jangka panjang proyek infrastruktur dan memungkinkan arus kas proyek untuk mendukung pembayaran utang secara bertahap... Non-recourse atau Limited Recourse. Dalam struktur non-recourse, kreditur hanya memiliki klaim terhadap arus kas dan aset proyek, bukan terhadap aset atau neraca sponsor proyek. Dalam struktur limited recourse, ada batasan tertentu pada klaim kreditur terhadap sponsor proyek. Ini mengurangi risiko bagi sponsor tetapi menambah risiko bagi kreditur, yang membuat mereka sangat bergantung pada keberhasilan proyek.. Keuntungan Project Finance/Project Bond. Pembiayaan Proyek Besar. Project finance memungkinkan pembiayaan proyek-proyek besar yang memerlukan investasi signifikan, seperti pembangkit listrik, infrastruktur transportasi, dan proyek energi terbarukan.. Meningkatkan Return on Equity. Dengan struktur leverage yang tinggi, project finance dapat meningkatkan return on equity bagi sponsor proyek, asalkan proyek berhasil dan menghasilkan arus kas yang memadai.. Diversifikasi Sumber Dana. Dengan menggunakan project bond, proyek dapat menarik dana dari pasar modal, mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank dan memungkinkan partisipasi

dari investor institusional dan publik.. Meningkatkan Disiplin Proyek. Struktur pembiayaan ini meningkatkan disiplin dalam manajemen proyek karena kreditur dan investor memantau kinerja proyek secara ketat untuk memastikan bahwa utang dapat dilunasi tepat waktu.. Contoh Implementasi Project Finance/Project Bond. Proyek Pembangkit Listrik. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan project finance untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik baru. Dana yang diperoleh melalui pinjaman bank atau penerbitan project bond digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional awal pembangkit. Arus kas yang dihasilkan dari penjualan listrik digunakan untuk melunasi utang.. Proyek Energi Terbarukan:. Dalam proyek energi terbarukan, seperti pembangunan ladang angin atau solar farm, project bond dapat diterbitkan untuk menarik investasi dari publik dan investor institusional. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai proyek, sementara arus kas dari penjualan energi terbarukan digunakan untuk membayar kembali obligasi.. Commercial Loan. Commercial Loan adalah pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan komersial untuk membiayai kebutuhan bisnis atau proyek tertentu. Pinjaman ini biasanya diberikan berdasarkan analisis kredit yang komprehensif terhadap peminjam dan proyek yang akan dibiayai.. Commercial loan merupakan opsi pendanaan yang fleksibel dan cepat untuk proyek pengembangan pembangkit listrik. Dengan jadwal pembayaran yang disepakati di awal, jaminan, dan restriksi tertentu, commercial loan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan sambil menjaga kendali penuh atas proyek. Penggunaan commercial loan dapat membantu PLN Nusantara Renewables dalam mencapai tujuan pengembangan energi yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas produksi energi yang ramah lingkungan.. Penyedia pendanaan untuk commercial loan meliputi:. Commercial Lenders (Perbankan nasional, regional, dan global): Bank komersial yang menawarkan pinjaman kepada perusahaan berdasarkan penilaian risiko dan kelayakan proyek. Ini termasuk bank nasional yang beroperasi di dalam negeri, bank regional yang melayani beberapa negara, dan bank global yang memiliki jaringan internasional.. Karakteristik Commercial Loan. Jadwal Pembayaran yang Disepakati di Awal. Pembayaran pinjaman mengikuti jadwal amortisasi yang telah disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman pada awal perjanjian. Jadwal ini mencakup pembayaran pokok dan bunga yang dibayarkan secara berkala, seperti bulanan atau triwulanan, selama masa pinjaman.. Memerlukan Jaminan. Sebagian besar commercial loan memerlukan jaminan (collateral) dari peminjam. Jaminan ini bisa berupa aset tetap seperti properti, peralatan, atau inventaris, yang dapat disita oleh pemberi pinjaman jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran.. Mensyaratkan Restriksi atau Kewajiban Tertentu (Covenants). Pemberi pinjaman biasanya menetapkan restriksi atau kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh peminjam selama masa pinjaman. Covenants ini bisa berupa pembatasan terhadap pengeluaran modal, rasio keuangan yang harus dipertahankan, atau kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan secara berkala. Covenants ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan memastikan kesehatan keuangan peminjam selama periode pinjaman.. . Keuntungan Commercial Loan. Akses Cepat ke Dana. Commercial loan memungkinkan perusahaan untuk mengakses dana dengan cepat dibandingkan dengan metode pendanaan lainnya seperti penerbitan obligasi atau ekuitas. Ini sangat penting untuk proyek yang membutuhkan modal dalam waktu singkat.. Fleksibilitas Penggunaan Dana. Dana yang diperoleh dari commercial loan dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik, peningkatan kapasitas produksi, atau memperluas operasional perusahaan.. Kendali Penuh atas Proyek. Dengan commercial loan, perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas proyek tanpa harus berbagi kepemilikan dengan investor lain. Ini berbeda dengan pendanaan ekuitas di mana perusahaan mungkin harus menyerahkan sebagian kontrol kepada pemegang saham baru.. Contoh Implementasi Commercial Loan. Proyek Pembangkit Listrik. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan commercial loan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik baru. Dana yang diperoleh dari bank digunakan untuk membeli peralatan, membayar biaya konstruksi, dan menutup biaya operasional awal. Pembayaran pinjaman dilakukan sesuai dengan jadwal amortisasi yang disepakati, dan aset pembangkit dapat dijadikan jaminan.. Peningkatan Kapasitas Produksi. Untuk meningkatkan kapasitas produksi energi, PLN Nusantara Renewables dapat mengambil commercial loan untuk mendanai pembelian dan pemasangan peralatan baru. Pembayaran pinjaman dilakukan dari pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh peningkatan kapasitas produksi.. Obligasi/Green Bond. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari publik. Obligasi ini merupakan janji untuk membayar kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, beserta bunga (kupon) yang dibayarkan secara berkala. Green Bond adalah jenis obligasi yang khusus digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, atau pengelolaan air bersih.. Obligasi/green bond merupakan opsi pendanaan yang efektif untuk proyek pengembangan pembangkit listrik, menawarkan pendanaan jangka panjang dengan fleksibilitas

dalam struktur pembayaran. Dengan dukungan dari publik, baik retail maupun institusional, obligasi/green bond memungkinkan PLN Nusantara Renewables untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek besar sambil memenuhi komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.. Penyedia pendanaan untuk obligasi/green bond meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu (retail) dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi (institusional) yang membeli obligasi sebagai bentuk investasi.. Karakteristik Pendanaan Obligasi/Green Bond. Pembayaran Pokok di Akhir Periode. Pembayaran pokok pinjaman pada umumnya dilakukan di akhir periode pinjaman, pada tanggal jatuh tempo obligasi. Investor menerima pembayaran pokok secara penuh setelah tenor obligasi berakhir.. Seri dengan Tenor dan Kupon Berbeda. Obligasi/green bond dapat terdiri dari beberapa seri dengan tenor dan kupon yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi seri A dengan tenor 5 tahun dan kupon 5%, serta obligasi seri B dengan tenor 10 tahun dan kupon 6%. Ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih seri obligasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.. Dapat Diterbitkan Tanpa Jaminan atau dengan Jaminan. Obligasi/green bond dapat diterbitkan tanpa jaminan (clean) atau dengan jaminan, bergantung pada peringkat kredit penerbit. Obligasi tanpa jaminan biasanya diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat kredit tinggi yang memiliki reputasi baik di pasar. Obligasi dengan jaminan dapat diberikan jika penerbit memiliki peringkat kredit yang lebih rendah, di mana aset tertentu dijadikan jaminan untuk memberikan keamanan tambahan bagi investor.. Keuntungan Obligasi/Green Bond. Pendanaan Jangka Panjang. Obligasi/green bond menyediakan pendanaan jangka panjang dengan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Ini membantu perusahaan mengelola arus kas dan meminimalkan risiko refinancing dalam jangka pendek.. . Fleksibilitas Struktur Pembayaran. Dengan pembayaran pokok di akhir periode dan kupon yang dibayarkan secara berkala, obligasi/green bond memberikan fleksibilitas dalam struktur pembayaran. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan dana secara optimal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan.. Dukungan Lingkungan. Green bond khususnya memberikan keuntungan tambahan dengan mendukung proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan. Ini membantu perusahaan memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta menarik investor yang memiliki fokus pada investasi berkelanjutan.. Contoh Implementasi Obligasi/Green Bond. Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menerbitkan green bond untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli peralatan, membiayai konstruksi, dan menutup biaya operasional awal. Pembayaran pokok dilakukan di akhir periode obligasi, sementara investor menerima pembayaran kupon secara berkala.. Peningkatan Efisiensi Energi. Green bond juga dapat digunakan untuk mendanai proyek peningkatan efisiensi energi di fasilitas yang sudah ada. Misalnya, mengganti peralatan lama dengan teknologi yang lebih efisien atau mengimplementasikan sistem manajemen energi. Pendanaan ini tidak hanya membantu mengurangi konsumsi energi tetapi juga menurunkan emisi karbon dan biaya operasional.. Sekuritisasi (KIK-EBA). Sekuritisasi adalah proses di mana aset yang menghasilkan arus kas, seperti piutang atau pendapatan dari proyek, dikonversi menjadi sekuritas atau efek yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, skema sekuritisasi dikenal sebagai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sekuritisasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual hak atas arus kas masa depan dari aset tersebut kepada investor.. Sekuritisasi (KIK-EBA) merupakan opsi pendanaan yang efektif dan fleksibel untuk pengembangan pembangkit listrik, menawarkan berbagai keuntungan seperti peningkatan likuiditas, diversifikasi sumber pendanaan, dan optimalisasi struktur neraca. Dengan melibatkan publik sebagai investor, baik retail maupun institusional, sekuritisasi memungkinkan PLN Nusantara Renewables mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek besar sambil memaksimalkan nilai aset yang ada.. Penyedia pendanaan untuk sekuritisasi (KIK-EBA) meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu (retail) dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi (institusional) yang membeli sekuritas sebagai bentuk investasi.. Karakteristik Pendanaan Sekuritisasi (KIK-EBA). Off Balance Sheet Financing. Sekuritisasi merupakan metode pembiayaan off balance sheet, di mana aset dan kewajiban terkait dikeluarkan dari neraca perusahaan. Penerimaan kas di muka diperoleh dari hasil penjualan piutang dalam bentuk efek KIK-EBA, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek baru atau akuisisi proyek yang sudah berjalan (brownfield/operasional). Hal ini membantu perusahaan meningkatkan likuiditas tanpa menambah utang di neraca mereka.. Asset Recycling. Sekuritisasi memungkinkan perusahaan melakukan asset recycling, yaitu penerimaan kas di muka dari hasil penjualan piutang yang dapat digunakan untuk memperoleh atau mengembangkan proyek baru. Dengan cara ini, aset yang sudah menghasilkan arus kas dapat digunakan untuk mendanai proyek lain yang berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan.. Beragam Skema dan Fitur. Sekuritisasi memiliki berbagai macam skema dan fitur yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan proyek. Ini termasuk struktur pembayaran yang fleksibel, tingkat suku bunga yang bervariasi, dan tenor yang dapat disesuaikan. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk merancang sekuritisasi yang paling sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan pendanaan proyek.. Keuntungan Sekuritisasi (KIK-EBA). Peningkatan Likuiditas. Sekuritisasi memungkinkan perusahaan mengakses likuiditas dengan cepat melalui penjualan piutang atau aset yang menghasilkan arus kas. Ini memberikan dana yang diperlukan untuk mendanai proyek baru atau memperluas operasi tanpa menambah beban utang.. Diversifikasi Sumber Pendanaan. Dengan menggunakan sekuritisasi, perusahaan dapat mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, mengurangi ketergantungan pada pinjaman tradisional atau ekuitas. Ini membantu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.. Optimalisasi Struktur Neraca. Off balance sheet financing membantu perusahaan menjaga struktur neraca yang sehat dengan mengurangi aset dan kewajiban yang tercatat. Ini dapat meningkatkan rasio keuangan dan membuat perusahaan lebih menarik bagi investor dan pemberi pinjaman.. Fleksibilitas dalam Pembiayaan. Beragam skema dan fitur sekuritisasi memungkinkan perusahaan untuk merancang struktur pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek dan kondisi pasar. Ini termasuk opsi pembayaran yang fleksibel dan tenor yang dapat disesuaikan.. Contoh Implementasi Sekuritisasi (KIK-EBA). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan sekuritisasi untuk mendanai pembangunan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Piutang atau pendapatan dari proyek yang sudah berjalan dapat dijual kepada investor dalam bentuk KIK-EBA, menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai proyek baru.. Akuisisi Proyek Brownfield. Sekuritisasi dapat digunakan untuk mengakuisisi proyek brownfield atau operasional yang sudah menghasilkan arus kas. Penerimaan kas di muka dari penjualan piutang proyek dapat digunakan untuk membeli aset baru yang menghasilkan pendapatan, memperluas portofolio perusahaan.. Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Kemitraan dalam konteks pendanaan proyek pembangkit listrik mencakup berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Kedua skema ini melibatkan penggalangan dana dari publik, baik dari investor retail maupun institusional, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.. Kemitraan, termasuk RDPT dan DINFRA, merupakan opsi pendanaan yang strategis untuk pengembangan pembangkit listrik. Dengan melibatkan publik dan mitra berpengalaman, PLN Nusantara Renewables dapat mengakses modal yang lebih besar, membagi risiko, dan meningkatkan kapasitas internal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan finansial perusahaan tetapi juga memastikan bahwa proyek dijalankan dengan standar kualitas dan efisiensi tertinggi.. Penyedia pendanaan untuk kemitraan, termasuk RDPT dan DINFRA, meliputi: Publik (retail dan institusional); Investor individu dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dengan potensi pengembalian yang stabil dan jangka panjang.. Karakteristik Pendanaan Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Berbagai Pendanaan dan Kontrol atas Proyek dengan Mitra. Kemitraan memungkinkan berbagai bentuk pendanaan, termasuk ekuitas dan utang, serta kontrol bersama atas proyek dengan mitra. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan manajemen proyek, memastikan bahwa kebutuhan spesifik proyek dapat terpenuhi.. Mitra Dapat Berupa Investor Strategis atau Investor Finansial/Pasar Modal. Mitra dalam kemitraan ini dapat berupa investor strategis yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam industri energi, atau investor finansial yang menyediakan modal melalui pasar modal. Kedua jenis mitra ini membawa nilai tambah yang berbeda, seperti keahlian teknis atau akses ke sumber pendanaan yang lebih besar.. Manfaat Risk Sharing dan Transfer of Knowledge. Kemitraan memungkinkan pembagian risiko antara PLN Nusantara Renewables dan mitra. Ini mengurangi eksposur risiko perusahaan dan meningkatkan stabilitas proyek. Selain itu, kemitraan dengan mitra berpengalaman dapat membawa transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas internal dan efisiensi operasional.. Mitra dengan Skala Global Dapat Membawa Serta Pendanaan. Kemitraan dengan mitra berskala global, seperti perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional, dapat membawa serta pendanaan yang signifikan. Ini tidak hanya memperkuat modal proyek tetapi juga membuka akses ke jaringan global dan praktik terbaik di industri energi.. Keuntungan Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Akses ke Modal yang Lebih Besar. Kemitraan memungkinkan PLN Nusantara Renewables mengakses modal yang lebih besar melalui kontribusi dari mitra. Ini penting untuk mendanai proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi awal yang signifikan.. Diversifikasi Risiko. Dengan berbagi risiko dengan mitra, PLN Nusantara Renewables dapat mengurangi eksposur risiko proyek. Ini mencakup risiko finansial, operasional, dan teknis, yang dapat dikelola lebih efektif melalui kemitraan.. Penguatan Kapasitas dan Keahlian. Kemitraan dengan mitra berpengalaman memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi. Ini meningkatkan kapasitas internal PLN Nusantara Renewables dan memastikan bahwa proyek dijalankan dengan efisiensi dan standar kualitas yang tinggi.. Keuntungan dari Efisiensi Operasional. Mitra strategis

sering membawa praktik terbaik dan teknologi terbaru ke dalam proyek. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang, meningkatkan profitabilitas proyek.. Contoh Implementasi Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menjalin kemitraan dengan investor strategis atau finansial untuk mengembangkan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. RDPT dan DINFRA dapat digunakan untuk menggalang dana dari publik, memungkinkan partisipasi luas dan akses ke modal yang diperlukan.. Peningkatan Infrastruktur Listrik. Kemitraan dengan perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur listrik yang ada. Ini termasuk modernisasi pembangkit listrik, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan efisiensi energi.. Initial Public Offering (IPO). Initial Public Offering (IPO) adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik dan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan dapat menggalang dana dari investor publik, baik retail maupun institusional, yang tertarik untuk memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan.. Initial Public Offering (IPO) merupakan opsi pendanaan yang strategis bagi PLN Nusantara Renewables untuk menggalang dana yang signifikan dari investor publik. Melalui IPO, perusahaan dapat meningkatkan profilnya, memperoleh likuiditas, dan mengakses modal yang diperlukan untuk mendanai proyek infrastruktur besar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek, PLN Nusantara Renewables juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan investor, dan mencapai tujuan strategisnya dalam pengembangan pembangkit listrik dan energi baru terbarukan.. . Penyedia pendanaan untuk IPO meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi yang tertarik untuk berinvestasi dalam saham perusahaan yang baru terdaftar.. Karakteristik Pendanaan Initial Public Offering (IPO). Pendanaan Ekuitas dari Investor Publik. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual saham kepada investor publik. Ini berbeda dengan pinjaman atau utang karena dana yang diperoleh melalui IPO adalah ekuitas, yang tidak memerlukan pembayaran kembali dalam bentuk pokok atau bunga.. Memperoleh Dana Segar untuk Pengembangan Perusahaan. Dana yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan proyek baru, ekspansi usaha, pelunasan utang, dan peningkatan modal kerja. Ini memberikan fleksibilitas keuangan yang signifikan bagi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.. Melepaskan Sebagian Kepemilikan Perusahaan kepada Publik. Melalui IPO, perusahaan melepaskan sebagian kepemilikannya kepada investor publik. Ini berarti pemegang saham yang ada akan berbagi kepemilikan dan kontrol perusahaan dengan investor baru. Namun, ini juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas basis pemegang sahamnya dan meningkatkan likuiditas sahamnya.. Menjadi Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek. Setelah IPO, perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek. Ini membawa berbagai manfaat, termasuk akses ke pasar modal yang lebih luas, peningkatan visibilitas dan reputasi, serta kemampuan untuk menggalang dana lebih lanjut di masa depan melalui penerbitan saham tambahan.. Saham Perusahaan Diperdagangkan dengan Mekanisme Pasar. Saham perusahaan yang telah melakukan IPO akan diperdagangkan di bursa efek dengan mekanisme pasar. Ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham perusahaan secara bebas, memberikan likuiditas bagi pemegang saham dan menciptakan nilai pasar yang transparan bagi perusahaan.. Keuntungan Initial Public Offering (IPO). Akses ke Modal yang Signifikan. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal yang signifikan dari investor publik. Ini penting untuk mendanai proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi awal yang besar.. Peningkatan Profil Perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek, perusahaan akan mendapatkan perhatian lebih dari media, analis keuangan, dan investor. Ini dapat meningkatkan profil perusahaan dan memberikan pengaruh positif terhadap reputasi dan kepercayaan investor.. Likuiditas bagi Pemegang Saham. Saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek memberikan likuiditas bagi pemegang saham. Mereka dapat membeli dan menjual saham perusahaan dengan mudah, memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan investasi.. Transparansi dan Akuntabilitas. Sebagai perusahaan terbuka, perusahaan harus mematuhi standar pelaporan dan pengungkapan yang ketat. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.. Contoh Implementasi Initial Public Offering (IPO). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan dana yang diperoleh dari IPO untuk mendanai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau biomassa. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas portofolio energi hijau dan mendukung target keberlanjutan.. Ekspansi Usaha dan Diversifikasi. Dana IPO juga dapat digunakan untuk ekspansi usaha ke wilayah baru atau diversifikasi ke sektor lain yang terkait dengan energi. Ini membantu perusahaan

untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi risiko melalui diversifikasi.. Strategi Pendanaan pada Berbagai Tahap Pengembangan. . Gambar 4 Strategi Pendanaan pada Berbagai Tahap Pengembangan. Bagan ini menggambarkan strategi pendanaan yang diadopsi oleh PLN Nusantara Power dalam konteks pengembangan pembangkit listrik pada berbagai tahap pengembangan: Early Stage, Late Development, Construction, dan Operation. Pendekatan ini menggunakan berbagai skema pendanaan untuk mengoptimalkan pembiayaan proyek, meningkatkan efisiensi biaya, dan meminimalkan risiko. Silahkan perhatikan nomor yang tampak di gambar. Nomor tersebut menunjukkan posisi penerapan opsi pendanaan.. 1. Concessional Funding pada Early Stage. Pada tahap awal pengembangan proyek, concessional funding sangat ideal karena menawarkan biaya pendanaan yang rendah. Ini bisa berupa hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), atau pembiayaan campuran (blended-financing) yang biasanya berasal dari pemerintah, lembaga keuangan internasional (MFIs/DFIs), atau sektor publik lainnya. Karakteristik utamanya adalah suku bunga yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, serta jadwal pembayaran yang fleksibel.. Pada Level Aset/Proyek. 2. Ekuitas Sendiri pada Early Stage hingga Construction dan Operation. Ekuitas sendiri digunakan terutama pada tahap awal pengembangan proyek untuk mendukung kebutuhan modal. Dalam beberapa kasus, ekuitas juga diperlukan hingga tahap konstruksi dan operasi sebagai dukungan defisiensi kas (cash deficiency support).. 3. Project Finance/Project Bond pada Construction dan Operation. Project finance merupakan metode pembiayaan yang optimal digunakan pada tahap konstruksi dan operasi proyek. Pendanaan ini biasanya melibatkan leverage yang tinggi dengan rasio utang terhadap ekuitas hingga 80:20 dan menawarkan tenor yang panjang (>15 tahun). Pendanaan ini bisa bersifat non-recourse atau limited recourse, yang berarti pembayaran pinjaman terutama berasal dari arus kas proyek itu sendiri, bukan dari aset sponsor proyek.. 4. Skema Kemitraan (Strategic Partnership) pada Early Stage hingga Operation. Kemitraan strategis bisa memberikan nilai tambah bagi PLN-NR dalam pengembangan proyek secara keseluruhan. Melalui kemitraan ini, PLN-NR dapat berbagi risiko, serta mendapatkan transfer pengetahuan dan sumber daya tambahan dari mitra strategis.. 5. Sekuritisasi (KIK-EBA) pada Early Stage hingga Operation. Sekuritisasi dapat dipertimbangkan untuk aset yang sudah menghasilkan pendapatan dan memiliki arus kas positif. Melalui skema ini, PLN-NR dapat melakukan recycling asset, di mana penerimaan kas di muka dari penjualan piutang digunakan untuk mendanai proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada. Contoh skema ini adalah KIK-EBA untuk aset yang sudah beroperasi dan DINFRA atau RDPT untuk proyek dalam tahap pengembangan.. Pada Level Holding/Portfolio. 6. Commercial Loan, Obligasi, dan Green Bond pada Construction hingga Operation. Pada level holding atau portofolio, commercial loan, obligasi, dan green bond dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Green bond khususnya menawarkan nilai lebih dibandingkan commercial loan karena tidak memerlukan jaminan dan memiliki keunggulan reputasi di pasar modal. Obligasi juga menarik karena memberikan tambahan pool of investor dan meningkatkan citra perusahaan.. 7. Initial Public Offering (IPO) pada Early Stage hingga Operation. IPO dilakukan untuk mengumpulkan dana segar guna mendanai pengembangan proyek baru. Selain memperoleh modal baru, IPO juga memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan visibilitas dan transparansi perusahaan, serta peningkatan likuiditas saham di pasar modal.. Strategi Pendanaan sebagai Subsidiary PLN . Status PLN Nusantara Renewables (PLN-NR) sebagai anak perusahaan (subsidiary) PLN yang memiliki status "unrestricted" memberikan fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan eksternal dengan beberapa keuntungan dan keterbatasan terkait ketentuan global bond yang dipegang oleh PLN.. PLN-NR Sebagai Unrestricted Subsidiary. Pendanaan Eksternal: PLN-NR sebagai unrestricted subsidiary dibentuk untuk memperoleh pendanaan eksternal tanpa terikat ketat oleh ketentuan indenture global bond yang membatasi.. Akses Pendanaan yang Lebih Baik: Dengan status ini, PLN-NR dapat lebih leluasa mengakses pendanaan eksternal.. Investasi: Investasi oleh unrestricted subsidiary dilakukan agar tidak mengganggu kepatuhan terhadap covenant Global Bond yang dipegang oleh PLN.. Implikasi pada PLN-NR. Keterbatasan Jaminan: PLN-NR tidak dapat menggunakan jaminan dari induk (PLN) atau resource agreement untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Artinya, mereka harus mandiri dalam hal pendanaan dan tidak dapat bergantung pada dukungan langsung dari PLN.. Kebutuhan Pendapatan dan Arus Kas: PLN-NR perlu memiliki pendapatan tetap dan arus kas yang stabil dari proyek-proyek yang berjalan untuk mendukung status dan kebutuhan pendanaannya.. Status PLN-NR sebagai unrestricted subsidiary memungkinkan PLN-NR untuk mengeksplorasi opsi pendanaan ini dengan lebih fleksibel, tetapi juga menuntut kemandirian dalam hal manajemen risiko dan pendanaan tanpa bergantung pada jaminan dari PLN. Strategi ini membantu PLN-NR dalam mengoptimalkan struktur pendanaannya dan memastikan kepatuhan terhadap covenant global bond yang dipegang oleh PLN.. Berikut adalah berbagai jenis perjanjian dan ketentuan (covenants) yang terkait dengan status unrestricted subsidiary.. Parent Guarantee. PLN dan/atau PLN-NP (Nusantara Power) tidak dapat memberikan jaminan

Tahap Initiation. Identifikasi Project Opportunities. Project Opportunities adalah tahap awal dalam proses pengembangan bisnis pembangkitan di mana PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) mengidentifikasi proyek-proyek potensial yang strategis dan sejalan dengan tujuan korporat. Tahap ini melibatkan pemetaan dan analisis peluang proyek untuk memastikan bahwa proyek potensial tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan ekspansi bisnis PLN NR, khususnya dalam bisnis IPP (Independent Power Producer).. Tahap Project Opportunities sangat penting karena menentukan arah dan fokus pengembangan bisnis PLN NR. Dengan mengidentifikasi proyek yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan kebutuhan pasar, PLN NR dapat memastikan investasi yang dilakukan akan memberikan hasil optimal dan mendukung tujuan pertumbuhan jangka panjang.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. BDI Database: Informasi intelijen bisnis untuk pengembangan proyek.. Proposal Stakeholder: Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan.. Pengembangan Aset PLN Nusantara Power dan PLN NR: Rencana internal pengembangan aset.. Profil Proyek: Informasi awal tentang proyek yang diidentifikasi.. Output yang Diharapkan. Daftar Proyek: Daftar proyek potensial yang dihasilkan dari pemetaan peluang, siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap berikutnya.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan jangka panjang yang memetakan kebutuhan listrik.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Memetakan Proyek-Proyek Potensial. Langkah pertama dalam identifikasi peluang proyek adalah memetakan proyek-proyek potensial yang sesuai dengan strategi dan tujuan jangka panjang PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini melibatkan:.. Analisis RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik): Mengkaji dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan listrik di berbagai wilayah dan potensi proyek baru.. Penggunaan BDI Database (Business Development Intelligence): Mengakses dan menganalisis data intelijen bisnis yang relevan untuk menemukan peluang proyek baru.. Pengumpulan Proposal Stakeholder: Mengumpulkan dan mengevaluasi usulan proyek dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas lokal.. Pengembangan Aset Internal: Mengidentifikasi rencana pengembangan aset yang sudah ada di PLN Nusantara Power dan PLN NR untuk menemukan sinergi dengan proyek baru.. Menetapkan Kriteria Longlist. Setelah proyek-proyek potensial dipetakan, langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria untuk menyusun Longlist proyek. Kriteria ini meliputi:.. Keselarasan dengan Strategi Korporat: Proyek harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis PLN NR.. Kelayakan Finansial: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang jelas dan mampu menarik investasi yang dibutuhkan.. Kesesuaian Regulasi: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang relevan.. Dampak Lingkungan dan Sosial: Proyek harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan komunitas lokal, serta harus dapat diatasi atau diminimalkan.. Menyusun Daftar Potensi Proyek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, daftar potensi proyek disusun. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Awal Proyek: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dimasukkan dalam daftar panjang.. Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek lebih lanjut, termasuk studi awal dan analisis risiko.. Diskusi Internal: Mengadakan diskusi dengan tim internal dan pakar eksternal untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang lebih luas tentang proyek-proyek potensial.. Mengembangkan Profil Proyek Lebih Rinci. Langkah terakhir adalah mengembangkan profil proyek yang lebih rinci untuk proyek-proyek yang telah masuk dalam daftar panjang. Profil proyek ini meliputi:.. Deskripsi Proyek: Gambaran umum tentang proyek, termasuk tujuan, lokasi, kapasitas, dan teknologi yang digunakan.. Analisis Kelayakan: Studi kelayakan yang lebih mendalam, termasuk analisis teknis, ekonomi, dan keuangan.. Rencana Implementasi: Rencana langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan proyek, termasuk jadwal waktu dan anggaran.. Penilaian Risiko: Identifikasi dan penilaian risiko utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, serta strategi mitigasi risiko.. Pembuatan Longlist Proyek. Longlist Proyek adalah daftar awal proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang. Longlist Proyek mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan potensi keberhasilan.. Tahap Longlist Proyek sangat penting karena menyaring proyek-proyek potensial yang paling sesuai dengan strategi jangka panjang PLN NR. Ini memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan proyek yang dipilih memiliki peluang sukses yang tinggi.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau

PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Potensi Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari tahap Project Opportunities.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai dan memprioritaskan proyek.. Output yang Diharapkan. Dokumen Longlist Proyek: Daftar proyek yang telah dievaluasi dan disetujui, siap untuk tahap seleksi lebih lanjut.. Referensi Utama. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Peraturan terkait pengembangan proyek pembangkitan. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Longlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek potensial. Kriteria ini meliputi:.. Legalitas Proyek: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, peraturan keselamatan, dan persyaratan lisensi.. Keatraktifan Proyek: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang menarik, termasuk aspek teknis, ekonomis, dan finansial. Faktor-faktor seperti lokasi proyek, teknologi yang digunakan, dan skala proyek juga dipertimbangkan.. Kapabilitas Perusahaan: Proyek harus sesuai dengan kapabilitas teknis dan manajerial PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Ini mencakup kemampuan perusahaan dalam hal pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek potensial berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan:.. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi rinci tentang setiap proyek dari daftar potensi proyek yang dihasilkan dari tahap Project Opportunities.. Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mencakup analisis kualitatif (misalnya, penilaian risiko) dan analisis kuantitatif (misalnya, analisis biaya-manfaat).. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan penilaian yang dilakukan. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam longlist.. Penyusunan Longlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Longlist Proyek. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan. Proyek dengan skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam longlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Longlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam longlist.. Persetujuan dan Pengesahan Longlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Longlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan:.. Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Longlist Proyek.. Pembuatan Shortlist Proyek. Setelah penyusunan Longlist Proyek, di mana proyek-proyek potensial telah diidentifikasi dan diberi skor berdasarkan kriteria awal, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi lebih lanjut untuk menghasilkan Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan evaluasi lebih rinci dan komprehensif terhadap proyek-proyek yang ada dalam Longlist.. Shortlist Proyek adalah daftar terpilih dari proyek-proyek potensial yang telah melalui proses evaluasi lebih mendalam dari Longlist Proyek. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dan potensi keberhasilan yang signifikan. Shortlist Proyek disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Longlist Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari Longlist.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan dalam tahap sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Shortlist Proyek: Daftar proyek terpilih yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk pengembangan lebih lanjut.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang lebih rinci dibandingkan dengan tahap Longlist. Kriteria ini meliputi:.. Status Proyek: Menilai sejauh mana proyek telah berkembang, termasuk apakah studi kelayakan telah dilakukan, apakah ada persetujuan awal, dan apakah ada komitmen dari stakeholder.. Keatraktifan Proyek: Menilai daya tarik proyek berdasarkan potensi keuntungan, skala proyek, lokasi, dan teknologi yang digunakan.. Kapabilitas Perusahaan: Menilai kemampuan teknis dan manajerial PLN NR serta partner yang terlibat dalam proyek. Ini mencakup pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Risiko Proyek: Mengidentifikasi dan menilai risiko terkait dengan proyek, termasuk risiko finansial, teknis,

operasional, dan lingkungan.. Biaya Proyek: Menilai biaya keseluruhan proyek dan sumber pendanaan yang tersedia. Ini mencakup analisis biaya awal, biaya operasional, dan potensi pengembalian investasi.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek dalam Longlist berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan: Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi lebih rinci tentang setiap proyek yang ada dalam Longlist untuk melengkapi data yang sudah ada.. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), analisis risiko, dan analisis biaya-manfaat.. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan hasil analisis. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam Shortlist.. Penyusunan Shortlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan: Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan, dengan proyek-proyek yang memiliki skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam Shortlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Shortlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam Shortlist.. Persetujuan dan Pengesahan Shortlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan: Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Shortlist Proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study. Penyusunan Pre-Feasibility Study (Pre-FS) adalah proses awal dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Pre-FS memberikan analisis awal tentang berbagai aspek proyek termasuk operasional, finansial, legal, dan risiko. Hasil dari Pre-FS digunakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Pengadaan Konsultan Pre-FS: Konsultan yang dipilih untuk melakukan Pre-FS.. Dokumen Terkait Proyek: Dokumen yang relevan dengan proyek yang sedang dievaluasi.. Output yang Diharapkan. Dokumen Pre-FS: Dokumen yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek, siap untuk ditinjau dan disetujui oleh manajemen.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Pengadaan dan Pemilihan Konsultan. Proses pertama dalam penyusunan Pre-FS adalah pengadaan dan pemilihan konsultan yang akan bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan awal. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Kebutuhan Konsultan: Menentukan spesifikasi dan keahlian yang diperlukan dari konsultan berdasarkan kompleksitas dan kebutuhan proyek.. Penyusunan Term of Reference (ToR): Membuat ToR yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, tujuan, metode, dan deliverables yang diharapkan dari konsultan.. Proses Pengadaan: Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, termasuk pengumuman tender, evaluasi penawaran, dan seleksi konsultan terbaik.. Penunjukan Konsultan: Menandatangani kontrak kerja dengan konsultan terpilih dan memberikan briefing awal tentang proyek.. Pengumpulan Dokumen Terkait Proyek. Langkah kedua adalah mengumpulkan semua dokumen yang relevan dengan proyek yang akan dievaluasi. Dokumen ini menjadi dasar informasi bagi konsultan untuk melakukan analisis kelayakan. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Dokumen: Menentukan jenis dokumen yang diperlukan seperti data teknis, laporan sebelumnya, rencana bisnis, regulasi, dan dokumen lain yang relevan.. Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk dari divisi terkait dalam PLN NR.. Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa semua dokumen yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan up-to-date.. Penyusunan Skema Bisnis, Kebutuhan Sumber Daya, Kebutuhan Pendanaan. Langkah ketiga adalah menyusun skema bisnis yang mencakup kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pendanaan untuk proyek. Proses ini melibatkan: Analisis Skema Bisnis: Mengidentifikasi model bisnis yang paling sesuai untuk proyek, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, dan analisis persaingan.. Kebutuhan Sumber Daya: Menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk proyek seperti tenaga kerja, teknologi, material, dan infrastruktur.. Analisis Pendanaan: Mengidentifikasi sumber pendanaan potensial dan membuat proyeksi kebutuhan dana,

termasuk analisis Return on Investment (ROI) dan cash flow projection.. Dokumentasi: Menyusun hasil analisis dalam bentuk dokumen yang sistematis dan mudah dipahami.. Penyusunan Dokumen Pre-FS. Langkah terakhir adalah penyusunan dokumen Pre-FS yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah:.. Analisis Kelayakan Operasional: Menilai aspek teknis dan operasional proyek termasuk teknologi yang akan digunakan, lokasi proyek, dan kelayakan teknis lainnya.. Analisis Kelayakan Finansial: Menilai aspek finansial proyek termasuk biaya proyek, proyeksi pendapatan, analisis risiko finansial, dan potensi keuntungan.. Analisis Kelayakan Legal: Menilai kepatuhan proyek terhadap regulasi dan hukum yang berlaku termasuk perizinan dan kepatuhan lingkungan.. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi proyek dan strategi mitigasi risiko.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dalam bentuk laporan Pre-FS yang lengkap dan komprehensif.. Review dan Persetujuan: Mengajukan laporan Pre-FS kepada manajemen untuk ditinjau dan disetujui.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Project. Dokumen Manajemen Risiko (DMR) Project adalah dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). DMR bertujuan untuk memastikan bahwa semua risiko potensial telah diidentifikasi dan diantisipasi, serta strategi mitigasi yang tepat telah disiapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Feasibility Study: Dokumen studi kelayakan yang memberikan informasi detail tentang proyek.. Peraturan Internal PLN NR: Kebijakan dan pedoman manajemen risiko internal.. Peraturan Eksternal: Regulasi dan peraturan eksternal yang berlaku.. Output yang Diharapkan. Dokumen Manajemen Risiko Proyek: Dokumen komprehensif yang mencakup identifikasi, analisis, penilaian, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek pengembangan pembangkit listrik.. Referensi Utama. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan manajemen risiko proyek.. Profil Risiko Korporat: Profil risiko yang telah disusun sebelumnya untuk memahami konteks risiko yang lebih luas.. Proses dan Langkah-langkah. Menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Langkah pertama dalam penyusunan Dokumen Manajemen Risiko adalah menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Proses ini melibatkan:.. Kajian Kelayakan Operasional (KKO):.. Aspek Ekonomi: Evaluasi dampak ekonomi proyek pada komunitas dan perekonomian secara keseluruhan.. Sistem Kelistrikan: Penilaian kesesuaian proyek dengan sistem kelistrikan yang ada.. Lokasi dan Sosial: Analisis lokasi proyek termasuk dampak sosial dan ketersediaan infrastruktur pendukung.. Transmisi: Kesesuaian proyek dengan jaringan transmisi yang ada dan rencana pengembangannya.. Teknologi Pembangkit: Evaluasi teknologi pembangkit yang akan digunakan, termasuk inovasi terbaru dan keandalannya.. Energi Primer: Ketersediaan dan keamanan pasokan energi primer.. Kajian Kelayakan Finansial (KKF):.. Biaya Proyek: Estimasi total biaya proyek dari awal hingga selesai.. Project Financing/Financial Model: Pengembangan model keuangan proyek termasuk sumber pendanaan.. Makro Ekonomi: Evaluasi kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi proyek.. Tarif PPA: Analisis tarif Power Purchase Agreement (PPA) yang disepakati.. Evaluasi Kelayakan Finansial: Menggunakan indikator seperti Return on Equity (ROE), Net Present Value (NPV), dan Weighted Average Cost of Capital (WACC).. Melakukan Analisis dan Penilaian Risiko. Langkah kedua adalah melakukan analisis dan penilaian risiko terhadap proyek. Proses ini melibatkan:.. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek.. Kategorisasi Risiko: Mengelompokkan risiko ke dalam kategori seperti risiko operasional, finansial, legal, dan lingkungan.. Penilaian Risiko: Menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap risiko menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.. Prioritas Risiko: Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap proyek.. Mengembangkan Strategi Mitigasi. Langkah ketiga adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Proses ini melibatkan:.. Strategi Pencegahan: Mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko.. Strategi Pengurangan Dampak: Menyusun rencana untuk mengurangi dampak jika risiko terjadi.. Rencana Tanggap Darurat: Menyusun prosedur tanggap darurat untuk menghadapi risiko yang telah terjadi.. Alokasi Tanggung Jawab: Menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk setiap strategi mitigasi yang dikembangkan.. Menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko. Langkah terakhir adalah menyusun dan menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko Proyek. Dokumen ini mencakup semua hasil analisis dan strategi mitigasi yang telah disusun sebelumnya. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dan strategi mitigasi dalam bentuk laporan yang komprehensif dan mudah dipahami.. Review dan Validasi: Melakukan review internal untuk memastikan semua informasi akurat dan valid.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari manajemen untuk Dokumen Manajemen Risiko Proyek..

Pengidentifikasian Partner. Identifikasi Partner adalah proses sistematis untuk menentukan mitra strategis yang akan bekerja sama dengan PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun daftar mitra potensial berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa PLN NR bekerja dengan mitra yang dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Stakeholder Proposal:** Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap mitra..
- Partner Proposal:** Usulan dari mitra potensial yang menyatakan minat dan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek..
- Business Development Intelligence (BDI):** Informasi intelijen bisnis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi mitra potensial..
- Expression of Interest (EOI):** Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek..

Output yang Diharapkan.

- List Calon Partner:** Daftar mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap Seleksi Longlist dan Shortlist..

Referensi Utama.

Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner.

Panduan Pemilihan Proyek dan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan proyek dan mitra..

Regulasi Terkait: Peraturan dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis..

Proses dan Langkah-langkah.

Identifikasi Kebutuhan dan Kriteria Proyek.

Langkah pertama dalam pengidentifikasian partner adalah menentukan kebutuhan proyek dan kriteria pemilihan mitra yang sesuai. Proses ini melibatkan:.

- Menentukan Kebutuhan Proyek:.** Jenis Proyek: Identifikasi jenis pembangkit listrik yang akan dikembangkan (misalnya PLTU, PLTA, PLTS)..
- Teknologi:** Kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk proyek..
- Sumber Daya:** Kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan infrastruktur..
- Jangka Waktu:** Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek..
- Menetapkan Kriteria Pemilihan Mitra:.** Kompetensi Teknis: Kemampuan teknis mitra dalam mengelola proyek serupa..
- Kapabilitas Finansial:** Kekuatan finansial dan kemampuan pendanaan mitra..
- Reputasi dan Rekam Jejak:** Reputasi dan pengalaman mitra dalam proyek sejenis..
- Keselarasan Strategis:** Keselarasan visi dan misi mitra dengan tujuan PLN NR..
- Kepatuhan Hukum:** Kepatuhan mitra terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku..

Pemetaan Partner Potensial.

Setelah kebutuhan dan kriteria proyek ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memetakan mitra potensial yang mungkin cocok untuk proyek. Proses ini melibatkan:.

- Riset Pasar:.** Melakukan riset untuk mengidentifikasi perusahaan atau entitas yang memiliki kemampuan dan minat dalam proyek..
- Menggunakan data intelijen bisnis (BDI) untuk mengumpulkan informasi tentang calon mitra potensial..**
- Konsultasi dengan Stakeholder:.** Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan usulan dan masukan terkait mitra potensial..
- Memanfaatkan proposal dari stakeholder dan calon mitra untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai..**

Penyusunan Daftar Awal:.

Menyusun daftar awal mitra potensial berdasarkan hasil riset dan konsultasi..

Identifikasi Lebih Detail dan Analisis Awal.

Setelah daftar awal mitra potensial disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi lebih detail dan analisis awal terhadap calon mitra tersebut. Proses ini melibatkan:.

- Pengumpulan Informasi Tambahan:.** Mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang setiap calon mitra, termasuk profil perusahaan, portofolio proyek, dan laporan keuangan..
- Evaluasi Awal:.** Melakukan analisis awal untuk mengevaluasi kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek dan kriteria yang telah ditetapkan..
- Menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria awal..**

Penyusunan Daftar Pendek Awal:.

Menyusun daftar pendek awal mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan layak untuk dievaluasi lebih lanjut..

Penyusunan dan Distribusi Request for Proposal (RFP).

Langkah terakhir dalam pengidentifikasian partner adalah menyusun dan mendistribusikan Request for Proposal (RFP) kepada calon mitra potensial. Proses ini melibatkan:.

- Penyusunan RFP:.** Menyusun dokumen RFP yang mendetail, mencakup tujuan proyek, kebutuhan spesifik, kriteria pemilihan, dan timeline..
- Menyertakan informasi tentang proyek, termasuk aspek teknis, finansial, legal, dan risiko yang perlu dipertimbangkan oleh calon mitra..**

Distribusi RFP:.

- Mengirimkan RFP kepada calon mitra potensial yang telah diidentifikasi..
- Mengatur mekanisme penerimaan dan evaluasi proposal dari calon mitra..

Penerimaan Proposal:.

- Mengumpulkan proposal dari calon mitra yang tertarik dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap seleksi Longlist dan Shortlist..

Pembuatan Longlist Partner.

Seleksi Longlist Partner adalah proses evaluasi perusahaan potensial untuk menentukan daftar awal mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian calon mitra berdasarkan kriteria tertentu sehingga hanya perusahaan yang memenuhi standar tinggi yang dapat melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Daftar Potensi Partner:** Informasi calon mitra yang diidentifikasi dari tahap Partner Identification..
- Kriteria Longlist Partner:** Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai calon mitra..

Output

yang Diharapkan. Dokumen Longlist Partner: Daftar awal mitra strategis yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk evaluasi lebih lanjut.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner: Pedoman terkait pemilihan proyek dan mitra.. Proses dan Langkah-langkah. Menghimpun Sumber Informasi. Langkah pertama dalam seleksi Longlist adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang calon mitra potensial. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:. Expression of Interest (EOI): Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek.. Pendaftaran Umum: Informasi yang diperoleh dari pendaftaran umum calon mitra yang berminat dalam proyek.. Data Peserta Terseleksi (DPT) oleh PLN Group: Daftar peserta yang telah terseleksi oleh PLN Group berdasarkan kriteria tertentu.. Business Development Intelligence (BDI) (opsional): Informasi intelijen bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi calon mitra potensial berdasarkan data pasar dan analisis kompetitif.. Meminta Masukan/Pertimbangan dari PLN Group. Setelah menghimpun informasi, langkah berikutnya adalah meminta masukan dan pertimbangan dari PLN Group. Ini melibatkan:. Konsultasi dengan Divisi Terkait: Berkoordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam PLN Group untuk mendapatkan wawasan dan masukan mengenai calon mitra potensial.. Evaluasi Awal: Melakukan evaluasi awal berdasarkan masukan dari PLN Group untuk menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria dasar.. Melakukan Seleksi Berdasarkan Kriteria. Setelah mendapatkan masukan dari PLN Group, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan:. Penetapan Kriteria Seleksi:. Capital: Kondisi keuangan positif dan stabilitas finansial calon mitra.. Competence: Sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh calon mitra yang melengkapi kebutuhan proyek.. Compatibility: Budaya dan etika bisnis yang selaras dengan PLN NR.. Circumstances: Tidak memiliki isu legal dan masalah lain yang dapat menghambat kerja sama.. Evaluasi dan Skoring:. Melakukan penilaian terhadap calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.. Memberikan skor untuk setiap kriteria guna menentukan tingkat kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Longlist:. Menyusun daftar awal mitra strategis berdasarkan hasil evaluasi dan skoring.. Daftar ini mencakup mitra yang memenuhi standar tinggi dan memiliki potensi untuk melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.. Pengesahan dan Persetujuan Longlist. Langkah terakhir dalam seleksi Longlist adalah pengesahan dan persetujuan daftar mitra strategis oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:. Penyusunan Dokumen Longlist:. Menyusun dokumen Longlist yang mencakup daftar calon mitra yang telah lolos seleksi awal.. Dokumen ini harus memuat informasi detail tentang setiap mitra, termasuk skor evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:. Mengajukan dokumen Longlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:. Mendistribusikan dokumen Longlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Pembuatan Shortlist Partner. Seleksi Shortlist Partner adalah proses evaluasi lebih lanjut untuk menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan penilaian kapabilitas strategis baik dari PLN Nusantara Renewables (PLN NR) maupun calon mitra, menggunakan metode seleksi yang komprehensif untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kemampuan dan kesesuaian yang optimal untuk keberhasilan proyek. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Longlist Partner: Informasi calon mitra yang lolos tahap longlist.. Kapabilitas Strategis PJB dan Partner: Data mengenai kapabilitas strategis baik dari PLN NR maupun calon mitra.. Output yang Diharapkan. Kapabilitas Strategis PLN NR: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis yang dimiliki oleh PLN NR.. Kapabilitas Strategis Partner: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis calon mitra.. Hasil Kajian Shortlist Partner: Daftar calon mitra yang telah diseleksi berdasarkan kapabilitas strategis dan siap untuk evaluasi akhir.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Pemilihan Metode Penyusunan Shortlist. Langkah pertama dalam proses ini adalah memilih metode yang tepat untuk menyusun shortlist. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik mitra potensial. Beberapa metode yang dapat digunakan meliputi:. Desk Study: Analisis mendalam terhadap data dan dokumen yang ada untuk mengevaluasi kapabilitas mitra potensial.. Due Diligence: Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang dan kapabilitas mitra potensial untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan.. Focused Selection: Memfokuskan pada sejumlah kecil calon mitra yang telah diidentifikasi sebagai yang paling potensial, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap mereka.. Roadshow: Mengadakan presentasi dan diskusi dengan calon mitra potensial untuk mengevaluasi kapabilitas dan

kesesuaian mereka.. Pemilihan Langsung: Memilih mitra potensial langsung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melalui proses seleksi yang panjang. . Penunjukan Langsung: Menunjuk mitra potensial secara langsung berdasarkan kepercayaan dan rekam jejak yang telah terbukti.. Penetapan Kriteria Seleksi Shortlist. Langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk menilai calon mitra. Kriteria ini harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting seperti:.. Kapabilitas Teknis: Pengalaman dan keahlian teknis calon mitra dalam mengelola proyek serupa.. Kapabilitas Finansial: Stabilitas dan kemampuan finansial calon mitra untuk mendukung proyek.. Kesesuaian Strategis: Sejauh mana visi dan misi calon mitra selaras dengan PLN NR.. Reputasi dan Kredibilitas: Rekam jejak dan reputasi calon mitra dalam industri terkait.. Risiko dan Kepatuhan: Potensi risiko yang terkait dengan calon mitra dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.. Penyusunan Shortlist Partner. Setelah menetapkan kriteria seleksi, langkah selanjutnya adalah menyusun shortlist mitra berdasarkan hasil evaluasi. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Kapabilitas Strategis:.. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kapabilitas strategis PLN NR dan calon mitra.. Menyusun dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis masing-masing pihak.. Skoring dan Peringkat:.. Memberikan skor untuk setiap calon mitra berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan.. Menyusun peringkat calon mitra berdasarkan skor yang diperoleh.. Review dan Validasi:.. Melakukan review internal terhadap hasil evaluasi dan peringkat calon mitra.. Memastikan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan objektif.. Pengesahan dan Persetujuan Shortlist. Langkah terakhir dalam proses ini adalah pengesahan dan persetujuan daftar shortlist mitra oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Dokumen Shortlist:.. Menyusun dokumen resmi yang mencakup daftar calon mitra yang telah diseleksi beserta hasil evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:.. Mengajukan dokumen shortlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar calon mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:.. Mendistribusikan dokumen shortlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Penentuan Partner Terpilih. Partner Terpilih adalah hasil akhir dari proses seleksi mitra strategis yang telah melalui tahap identifikasi, longlist, dan shortlist. Pada tahap ini, PLN Nusantara Renewables (PLN NR) menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif. Proses ini memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kapabilitas dan kesesuaian yang optimal untuk mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Shortlist Partner: Informasi dan hasil evaluasi dari tahap seleksi shortlist yang mencakup profil detail calon mitra potensial.. Proposal Stakeholder : Khusus untuk partner yang mengajukan proyek ke PLN NR.. Output yang Diharapkan. Kajian Partnership: Dokumen yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas dan kesesuaian calon mitra dengan PLN NR.. Usulan Partner Terpilih: Laporan yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Akhir. Langkah pertama dalam penentuan partner terpilih adalah melakukan evaluasi akhir terhadap calon mitra yang telah masuk dalam shortlist atau calon mitra yang mengajukan proyek ke PLN NR. Dalam kasus pengajuan proyek oleh calon mitra, maka calon mitra bersangkutan melakukan pengajuan proyek ke PLN NR untuk selanjutnya dilakukan Due Dilligence sebagaimana tertuang dalam Pedoman pemilihan partner dan proyek.. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kapabilitas dan kesesuaian calon mitra telah dianalisis secara mendalam dan komprehensif.. Verifikasi Data:.. Memeriksa kembali semua data dan informasi yang telah dikumpulkan tentang calon mitra selama proses seleksi.. Melakukan verifikasi ulang terhadap kapabilitas teknis, finansial, dan legal calon mitra.. Wawancara dan Presentasi:.. Mengundang calon mitra untuk melakukan presentasi final dan wawancara dengan tim evaluasi PLN NR.. Menilai kemampuan calon mitra dalam menjawab pertanyaan kritis dan memberikan solusi untuk potensi tantangan proyek.. Analisis Risiko:.. Melakukan analisis risiko lebih lanjut untuk menilai potensi risiko yang mungkin timbul dari kerjasama dengan calon mitra.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih rinci berdasarkan temuan analisis.. Penyusunan Usulan Partner Terpilih. Setelah evaluasi akhir dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun usulan partner terpilih. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan semua hasil evaluasi menjadi laporan yang komprehensif.. Pengumpulan Hasil Evaluasi:.. Mengumpulkan semua hasil evaluasi dari tahap-tahap sebelumnya, termasuk evaluasi akhir.. Mengompilasi data dan informasi yang relevan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami.. Penyusunan Laporan Analisis Partnership:.. Menyusun laporan yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas, kesesuaian, dan risiko calon mitra.. Menyertakan rekomendasi dan justifikasi untuk pemilihan

calon mitra terpilih.. Penulisan Usulan Partner Terpilih.. Menulis usulan resmi yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan oleh Direksi PLN NR.. Menyertakan semua dokumen pendukung dan hasil evaluasi dalam usulan tersebut.. Pengesahan dan Persetujuan. Langkah terakhir adalah mendapatkan pengesahan dan persetujuan resmi dari pihak terkait dalam PLN NR untuk calon mitra yang terpilih. Proses ini melibatkan beberapa tahap persetujuan internal.. Pengajuan Usulan kepada Direksi.. Mengajukan usulan partner terpilih kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan disetujui.. Melakukan presentasi singkat jika diperlukan untuk menjelaskan alasan dan justifikasi pemilihan calon mitra.. Pengesahan oleh Direksi.. Direksi meninjau usulan dan melakukan diskusi untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan matang.. Direksi memberikan pengesahan resmi terhadap calon mitra terpilih.. Persetujuan Akhir.. Setelah pengesahan oleh Direksi, usulan partner terpilih diajukan untuk persetujuan akhir oleh pemangku kepentingan terkait dalam PLN NR.. Setelah mendapatkan persetujuan akhir, calon mitra terpilih diumumkan secara resmi dan proses kerjasama dapat dimulai.. Permohonan Persetujuan RUPS Partner. Permohonan Persetujuan RUPS Partner adalah proses formal untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pemilihan mitra strategis yang telah dipilih oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didukung oleh seluruh pemangku kepentingan utama dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Usulan dan Kajian Partner Terpilih: Informasi dan hasil evaluasi dari proses pemilihan partner terpilih.. Dokumen Manajemen Risiko Proyek dan Partner: Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Financial Model (termasuk Remunerasi): Proyeksi finansial dan struktur remunerasi yang diusulkan.. Output yang Diharapkan. Persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, RUPS: Persetujuan resmi dari organ perseroan untuk melanjutkan proyek dengan mitra terpilih.. Partner Terpilih: Pengesahan mitra strategis yang akan bekerja sama dalam proyek.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Juklak Pemilihan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan mitra.. Anggaran Dasar dan Board Manual PLN NR: Dokumen yang mencakup ketentuan dan prosedur terkait tata kelola perusahaan.. Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Penyusunan DMR.. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (DMR) yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Memastikan DMR mencakup semua aspek risiko potensial dan strategi mitigasinya.. Penyampaian DMR.. Mengajukan DMR kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan mendapatkan persetujuan.. Melakukan presentasi jika diperlukan untuk menjelaskan rincian dan pentingnya DMR dalam konteks pemilihan mitra.. Review dan Persetujuan Direksi.. Direksi meninjau DMR untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah direncanakan.. Direksi memberikan persetujuan atau memberikan masukan untuk perbaikan DMR.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Menyusun Keputusan Rapat Direksi.. Menyusun draf keputusan rapat Direksi yang mencakup persetujuan terhadap pemilihan mitra strategis.. Memastikan draf keputusan mencakup semua detail penting, termasuk hasil evaluasi dan justifikasi pemilihan mitra.. Penyusunan Pakta Integritas.. Menyusun pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua pihak terkait sebagai bentuk komitmen terhadap keputusan yang diambil.. Pakta integritas mencakup komitmen untuk menjalankan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.. Rapat Direksi.. Mengadakan rapat Direksi untuk membahas dan mengesahkan keputusan serta pakta integritas.. Semua anggota Direksi menandatangani keputusan rapat dan pakta integritas.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Penyampaian Keputusan Rapat Direksi.. Mengirimkan keputusan rapat Direksi dan pakta integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tinjauan dan tanggapan.. Permintaan Tanggapan Tertulis.. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pemilihan mitra strategis.. Mengatur pertemuan atau diskusi jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran Dewan Komisaris.. Review Dewan Komisaris.. Dewan Komisaris meninjau keputusan rapat Direksi dan memberikan tanggapan tertulis.. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Penyampaian Keputusan kepada Pemegang Saham.. Mengajukan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. Persiapan RUPS.. Menyusun agenda RUPS yang mencakup pembahasan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan semua dokumen pendukung, termasuk DMR, keputusan rapat Direksi, dan tanggapan Dewan Komisaris.. Pelaksanaan RUPS.. Mengadakan RUPS untuk membahas dan mengesahkan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan presentasi dan jawaban atas pertanyaan pemegang saham terkait pemilihan mitra.. Persetujuan RUPS.. Pemegang saham memberikan persetujuan resmi terhadap pemilihan mitra strategis.. Keputusan RUPS didokumentasikan dan

ditandatangani oleh semua pihak terkait.. Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama adalah proses formal untuk merumuskan, membahas, dan menandatangani dokumen perjanjian antara PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dan mitra strategis yang telah dipilih. Proses ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memastikan bahwa kerjasama yang terjalin mendukung keberhasilan proyek investasi pembangkit listrik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power. PLN NR bertindak sebagai Support.. Input yang Diperlukan. Persetujuan RUPS PLN NR atas Proyek dan Partner Terpilih: Dokumen persetujuan dari PLN NR yang menyatakan pemilihan proyek dan mitra strategis.. Draft Perjanjian Kerjasama: Draft awal perjanjian kerjasama yang disusun berdasarkan informasi yang relevan.. Output yang Diharapkan. Project Development Agreement atau Consortium Agreement atau Memorandum of Understanding atau Head of Agreement: Dokumen-dokumen perjanjian kerjasama yang mencakup berbagai aspek kerjasama proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama dan Konsultasi Terkait. Pengumpulan Informasi:.. Mengumpulkan semua informasi yang relevan dari tahap sebelumnya, termasuk hasil negosiasi, persetujuan RUPS, dan kajian mitra.. Mengkaji ulang dokumen terkait untuk memastikan semua aspek kerjasama telah dipertimbangkan.. Penyusunan Draft Awal:.. Menyusun draft awal perjanjian kerjasama berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melibatkan tim hukum dan konsultan untuk memastikan bahwa draft tersebut mencakup semua aspek legal dan komersial.. Konsultasi Internal:.. Mengadakan konsultasi internal dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terhadap draft awal.. Melakukan revisi draft berdasarkan masukan yang diterima.. Pembahasan dan Negosiasi Perjanjian Kerjasama dengan Partner. Penjadwalan Pertemuan:.. Menjadwalkan pertemuan dengan mitra strategis untuk membahas draft perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan hadir dalam pertemuan tersebut.. Pembahasan Draft:.. Membahas draft perjanjian kerjasama secara rinci, memastikan bahwa semua hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat diterima.. Mendiskusikan dan menyelesaikan setiap isu atau ketidaksepakatan yang muncul selama pembahasan.. Negosiasi:.. Melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai semua ketentuan dalam perjanjian.. Memastikan bahwa hasil negosiasi tercermin dalam draft perjanjian yang diperbarui.. Revisi Draft:.. Melakukan revisi draft perjanjian kerjasama berdasarkan hasil negosiasi.. Mengirimkan draft yang telah direvisi kepada mitra untuk peninjauan akhir.. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Persiapan Penandatanganan:.. Menyelesaikan semua persiapan administrasi dan legal untuk penandatanganan perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan diverifikasi.. Penandatanganan:.. Mengadakan acara penandatanganan resmi di hadapan para pemangku kepentingan.. Menandatangani perjanjian kerjasama oleh perwakilan resmi dari PLN NR dan mitra strategis.. Distribusi Dokumen:.. Mendokumentasikan dan mendistribusikan salinan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada semua pihak terkait.. Mengarsipkan dokumen asli sebagai catatan resmi perusahaan.. Tahap Development. Update Feasibility Study. Update Feasibility Study atau kajian tambahan (supplementary studies), jika diperlukan, adalah proses untuk memperbarui studi kelayakan proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan perubahan atau perkembangan baru yang terjadi sejak penyusunan awal, terutama jika terjadi perubahan yang bersifat mendasar. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan didasarkan pada informasi terbaru.. Proses ini dilakukan hanya jika diperlukan, termasuk dalam kasus di mana studi sebelumnya masih dalam bentuk Pre-FS dan perlu diubah menjadi FS. Jika studi sebelumnya sudah dalam bentuk FS, maka cukup dilakukan kajian tambahan.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Perjanjian Kerjasama: Informasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah disusun sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Update Feasibility Study: Dokumen yang mencakup, namun tidak sebatas pada, kajian kelayakan operasional, finansial, dan analisa risiko yang telah diperbarui sesuai dengan perubahan terbaru.. Referensi Utama. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah dibuat di Tahap Initiation. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Awal. Langkah pertama dalam pembaruan Feasibility Study adalah melakukan evaluasi awal terhadap dokumen yang ada dan informasi terbaru. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan area mana yang memerlukan pembaruan atau kajian tambahan.. A. Analisis Dokumen:.. Memeriksa Pre-FS dan mengidentifikasi area yang perlu diperbarui atau ditambahkan.. Mengkaji Perjanjian Kerjasama untuk memahami implikasi terhadap studi kelayakan.. B. Identifikasi Perubahan:.. Mengidentifikasi perubahan atau perkembangan baru yang

mempengaruhi proyek.. Menyusun daftar kebutuhan informasi tambahan atau kajian mendalam.. Pengumpulan Data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperbarui Feasibility Study. Ini termasuk data teknis, finansial, dan operasional yang relevan.. A. Data Teknis:. Mengumpulkan data teknis terbaru terkait teknologi pembangkit, kondisi lokasi, dan persyaratan operasional.. Meninjau data lingkungan dan regulasi terbaru.. B. Data Finansial:. Mengumpulkan data biaya terbaru, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain.. Mengkaji data keuangan terkait perubahan kondisi pasar dan asumsi finansial.. Analisis dan Pembaruan Studi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan memperbarui Feasibility Study berdasarkan data dan informasi terbaru.. A. Analisis Teknis:. Melakukan analisis teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi dan desain proyek masih sesuai dan optimal.. Mengidentifikasi potensi masalah teknis dan menyusun strategi mitigasi.. B. Analisis Finansial:. Mengkaji ulang proyeksi keuangan dan melakukan analisis biaya-manfaat.. Menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan asumsi terbaru.. C. Analisis Risiko:. Mengidentifikasi risiko baru atau yang berubah sejak studi awal.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang komprehensif.. Penyusunan Dokumen Update Feasibility Study. Langkah terakhir adalah menyusun dokumen Update Feasibility Study yang mencakup semua hasil analisis dan kajian tambahan.. A. Penyusunan Dokumen:. Menyusun laporan yang komprehensif dan terstruktur, mencakup semua bagian studi kelayakan yang diperbarui.. Memastikan bahwa dokumen mencerminkan perubahan terbaru dan memberikan rekomendasi yang jelas.. B. Review dan Validasi:. Melakukan review internal untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen.. Meminta tinjauan eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan.. C. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan dokumen Update Feasibility Study untuk disetujui oleh pihak terkait.. Mengkomunikasikan hasil pembaruan kepada semua pemangku kepentingan proyek.. Penerbitan Lol Pengadaan. Penerbitan Letter of Intent (LoI) Pengadaan adalah proses formal yang dilakukan setelah penyusunan Feasibility Study (FS) untuk mengonfirmasi kesiapan dan kelayakan proyek. Proposal ini menyatakan bahwa proyek siap dikembangkan dan telah memenuhi semua aspek kelayakan. LoI merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan dan komitmen untuk membeli energi listrik dari proyek yang diusulkan dengan bilangan tarif sesuai yang diajukan.. Konteksnya adalah di saat PLN NR sudah mendapatkan timeline atau waktu yang diberikan oleh PLN untuk mengirimkan proposal (sesuai permintaan PLN). Setelah didapatkannya informasi dari PLN terkait undangan penyampaian proposal proyek, PLN NP (untuk skema Penugasan) bersama PLN NR secara bersama melakukan submission proposal atas draft proposal yang sebelumnya telah disusun bersama dengan partner. Lingkup proposal ini meliputi aspek legal, teknis, komersial.. Dari proposal yang diterima, PLN melakukan proses klarifikasi proposal serta negosiasi tarif listrik. Setelah PLN menyepakati proposal bersangkutan, maka dilakukanlah penandatanganan Berita Acara negosiasi Tarif yang akan diterbitkan oleh PLN. Dengan penandatanganan Berita Acara, PLN akan menerbitkan Letter of intent (LOI) atas proyek beserta tarif yang disepakati dan ketentuan selanjutnya mengenai tindak lanjut proyek di dalam dokumen LOI.. Input yang Diperlukan. FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis kelayakan proyek.. RFP/KAK (Request for Proposal/Kerangka Acuan Kerja): Dokumen yang menjelaskan detail kebutuhan dan persyaratan proyek.. Dokumen Draft Proposal: Draft awal proposal yang disusun berdasarkan FS dan KAK/TOR dari PLN.. Dokumen teknis, legal, dan lainnya yang diperlukan. Output yang Diharapkan. Dokumen Proposal: Proposal akhir yang mencakup semua komponen dokumen proposal yang tertuang dalam KAK/TOR dari PLN.. Tanda Terima Proposal dari PLN: Konfirmasi penerimaan proposal oleh PLN.. BA Negosiasi Tarif: Berita acara hasil dari negosiasi tarif yang diterbitkan oleh PLN.. Issued Lol: Letter of Intent yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan untuk membeli energi listrik dari proyek sesuai dengan tarif dan komponen komersial lainnya yang disepakati dan tertulis di Lol tersebut.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Proposal dan Validasinya. Langkah pertama dalam proses penerbitan Lol adalah menyusun proposal yang komprehensif dan memastikan bahwa semua komponen proposal telah divalidasi.. A. Penyusunan Proposal:. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan, termasuk FS, RFP/KAK, dan dokumen teknis serta legal.. Menyusun proposal berdasarkan pedoman dan persyaratan yang ditetapkan dalam KAK/TOR dari PLN.. B. Validasi Internal:. Melakukan review internal untuk memastikan bahwa proposal memenuhi semua persyaratan teknis, legal, dan komersial.. Memastikan bahwa semua data dan informasi yang disertakan dalam proposal akurat dan up-to-date.. C. Validasi Eksternal:. Meminta review eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan untuk memastikan validitas proposal.. Melakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan masukan dari review eksternal.. Penandatanganan dan Penyampaian Proposal. Setelah proposal disusun dan divalidasi, langkah berikutnya adalah penandatanganan dan penyampaian proposal kepada PLN.. A. Penandatanganan Proposal:. Mengumpulkan tanda tangan dari pihak yang berwenang di JVC untuk menyetujui dan mengesahkan proposal.. Menyusun dokumen pendukung yang diperlukan untuk

penyampaian proposal.. B. Penyampaian Proposal:. Mengirimkan proposal kepada PLN sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.. Memastikan bahwa PLN menerima proposal dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan.. Pembahasan Proposal dan Negosiasi. Setelah proposal diterima oleh PLN, langkah berikutnya adalah pembahasan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.. A. Pembahasan Proposal:. Mengatur pertemuan dengan PLN untuk membahas isi proposal secara mendetail.. Menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi yang diperlukan selama pembahasan.. B. Negosiasi:. Melakukan negosiasi mengenai tarif, syarat komersial, dan aspek teknis lainnya yang tertuang dalam proposal.. Mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua persyaratan telah disepakati.. Penerbitan Letter of Intent (LoI). Setelah pembahasan dan negosiasi selesai, langkah terakhir adalah penerbitan Letter of Intent (LoI) oleh PLN.. A. Persiapan Dokumen LoI:. Menyusun draft LoI yang mencakup semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi.. Memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan tertulis dengan jelas dan lengkap dalam LoI.. B. Review dan Finalisasi:. Melakukan review internal terhadap draft LoI untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan sesuai dengan kesepakatan.. Meminta persetujuan akhir dari pihak berwenang di PLN sebelum penerbitan LoI.. C. Penerbitan LoI:. Menerbitkan LoI dan menyampaikannya kepada JVC sebagai tanda kesediaan PLN untuk membeli energi listrik dari proyek.. Mendokumentasikan dan menyimpan salinan LoI serta memastikan bahwa semua pihak terkait menerima salinan dokumen tersebut.. Permohonan RUPS untuk Pendirian JVC, Setoran Modal Awal JVC, Tambahan Modal Disetor, Penunjukan Wakil. Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses penting dalam aksi korporasi untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam pendirian Joint Venture Company (JVC), setoran modal awal JVC, Tambahan Modal Disetor (TMD), dan Penunjukan Wakil. Proses ini memastikan semua aspek pendanaan dan struktur organisasi JVC telah disetujui oleh pemegang saham sehingga proyek dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi. Dalam skema akuisisi yang memerlukan pembelian saham, hasil valuasi saham dan due diligence harus disertakan.. Pada proses ini, dimungkinkan adanya proses permohonan RUPS secara terpisah mengikuti keadaan dan keperluan proyek yang sedang dilakukan, berlaku untuk Proyek Penugasan maupun Proyek Non Penugasan.. Input yang Diperlukan. DMR (Dokumen Manajemen Risiko): Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Kepdir & Pakta Integritas: Keputusan Direktur dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil... Rekomendasi Dewan Komisaris (Dekom): Rekomendasi resmi dari Dewan Komisaris terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Persetujuan RUPS: Persetujuan awal dari RUPS untuk memastikan prosedur yang benar telah diikuti terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Output yang Diharapkan. RUPS Terkait (Setoran Modal Awal JVC, TMD, Penunjukan Wakil): Dokumen persetujuan resmi dari RUPS yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melanjutkan pendirian JVC dan proyek. . Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian DMR kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Langkah pertama adalah menyampaikan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan atas analisis risiko terkait pendirian JVC dan setoran modal awal.. A. Penyusunan DMR:. Menyusun DMR yang mencakup analisis risiko operasional, finansial, dan legal terkait pendirian JVC.. Memastikan bahwa DMR telah disusun secara komprehensif dan mencakup semua aspek yang relevan.. B. Penyampaian kepada Direksi:. Mengajukan DMR kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Direksi.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Setelah DMR disetujui oleh Direksi, langkah berikutnya adalah menyusun Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC.. A. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi:. Menyusun draft Keputusan Rapat Direksi yang mencakup persetujuan atas pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Memastikan bahwa draft keputusan telah mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku.. B. Penyusunan Pakta Integritas:. Menyusun Pakta Integritas yang mencakup komitmen untuk mematuhi semua aturan dan regulasi terkait pendirian JVC.. Mendapatkan tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk persetujuan dan komitmen.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris dan meminta tanggapan tertulis mereka.. A. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi resmi.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Dewan Komisaris.. B. Permintaan Tanggapan Tertulis:. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pendirian JVC.. Mendokumentasikan semua tanggapan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Langkah terakhir adalah menyampaikan semua dokumen yang telah disetujui kepada pemegang saham untuk

mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. A. Penyampaian Dokumen kepada Pemegang Saham:.. Mengajukan semua dokumen yang relevan, termasuk DMR, Keputusan Rapat Direksi, Pakta Integritas, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada pemegang saham.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh pemegang saham.. B. Persetujuan RUPS:.. Mengadakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemegang saham terkait pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Mendokumentasikan hasil RUPS dan menyimpan salinan persetujuan untuk keperluan arsip dan referensi di masa mendatang..

Penandatanganan SHA. Penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) adalah langkah penting dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC). Proses ini diawali dengan negosiasi pasal-pasal dalam SHA oleh para calon pemegang saham pada JVC project company. Perjanjian ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyepakati tanggung jawab dan keuntungan dari proyek yang dikembangkan..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat.. Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC.. Referensi Utama. SHA Termsheet: Shareholder Agreement termsheet yang menjadi bagian dari dokumen RFP (request for proposal) partnership, jika ada.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi.. Proses dan Langkah-langkah.

Pembahasan Hak dan Kewajiban; Diskusi dan Negosiasi. Langkah pertama dalam penandatanganan SHA adalah melakukan diskusi dan negosiasi mengenai hak dan kewajiban para calon pemegang saham.. A. Persiapan Diskusi:.. Mengkaji perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Menyusun draft SHA termsheet berdasarkan dokumen pengadaan partner.. B. Diskusi dan Negosiasi:.. Melakukan pertemuan dengan semua calon pemegang saham untuk mendiskusikan setiap pasal dalam draft SHA.. Negosiasi mengenai hak dan kewajiban, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab manajemen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.. C. Dokumentasi Pertemuan:.. Mencatat semua poin penting yang dibahas dan disepakati selama pertemuan.. Menyusun notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan untuk memastikan bahwa semua poin penting telah dicatat.. Finalisasi Draft SHA. Setelah diskusi dan negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft SHA.. A. Penyusunan Final Draft:.. Menggabungkan semua poin yang telah disepakati selama diskusi dan negosiasi ke dalam draft SHA.. Memastikan bahwa draft final SHA sesuai dengan Panduan Penyusunan SHA dan regulasi terkait.. B. Review dan Verifikasi:.. Melakukan review ulang terhadap draft final SHA oleh tim hukum dan para calon pemegang saham.. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua pasal sudah jelas dan tidak ada ambiguitas.. C. Persetujuan Draft Final:.. Mendapatkan persetujuan dari semua calon pemegang saham atas draft final SHA.. Mempersiapkan dokumen final untuk penandatanganan..

Penandatanganan SHA. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penandatanganan SHA oleh semua calon pemegang saham.. A. Persiapan Penandatanganan:.. Mengatur waktu dan tempat untuk penandatanganan SHA.. Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk draft final SHA dan dokumen pendukung lainnya.. B. Proses Penandatanganan:.. Mengumpulkan semua calon pemegang saham untuk menandatangani SHA.. Menyaksikan dan mencatat proses penandatanganan untuk memastikan keabsahan dokumen.. C. Dokumentasi dan Penyimpanan:.. Menyimpan salinan SHA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi di masa mendatang.. Mendokumentasikan penandatanganan sebagai bukti legal bahwa semua pihak telah menyepakati perjanjian..

Pembentukan Joint Venture Company (JVC). Pembentukan Joint Venture Company (JVC) adalah tahap penting dalam skema Independent Power Producer (IPP) di mana perusahaan patungan dibentuk untuk mengembangkan dan merealisasikan proyek pembangkit listrik. JVC bertindak sebagai project vehicle dari para pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan kesepakatan dalam Shareholder Agreement (SHA)..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat.. SK Kementerian Hukum dan HAM yang terkait. Dokumen Administratif, yang meliputi:.. Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT JVC . Surat Kuasa NR untuk mewakili Pengurusan Akta Pendirian. POA/ Surat Kuasa PT JVC untuk register akun, pengurusan NIB dan Izin umum yang diperlukan. Surat Pernyataan

Penyetoran Modal. Surat Pernyataan Domisili. Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh NPWP dan SPT PT . Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh Keputusan, Persetujuan, dan/atau Rekomendasi dari Instansi Terkait sesuai dengan Bidang Usaha PT. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dari PT . Corporate Approval penunjukan wakil Partner. Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC.. Referensi Utama. Panduan Penyusunan SHA: Dokumen panduan yang digunakan untuk menyusun SHA sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Anggaran Dasar JVC. Langkah pertama dalam pembentukan JVC adalah penyusunan Anggaran Dasar (AD) yang akan menjadi dasar hukum operasional JVC.. A. Penyusunan Draft Anggaran Dasar:. Mengumpulkan informasi dari SHA yang telah ditandatangani.. Menyusun draft Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku.. B. Konsultasi dengan Pemegang Saham:. Mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham untuk membahas dan merevisi draft Anggaran Dasar.. Memastikan semua pemegang saham setuju dengan isi Anggaran Dasar.. C. Finalisasi Anggaran Dasar:. Memperbaiki dan menyelesaikan Anggaran Dasar berdasarkan masukan dari pemegang saham.. Mempersiapkan dokumen final untuk pengesahan.. Penyusunan Semua Dokumen Perijinan yang Diperlukan untuk Pendirian JVC. Setelah Anggaran Dasar disusun, langkah berikutnya adalah menyiapkan semua dokumen perijinan yang diperlukan untuk mendirikan JVC.. A. Identifikasi Dokumen Perijinan:. Mengidentifikasi semua dokumen perijinan yang diperlukan seperti Izin Usaha, NPWP, NIB, dan dokumen lainnya.. B. Pengumpulan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dari para pemegang saham dan pihak terkait.. Memastikan dokumen yang dikumpulkan lengkap dan sesuai dengan persyaratan hukum.. C. Penyusunan dan Verifikasi Dokumen:. Menyusun semua dokumen perijinan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen untuk memastikan keabsahannya.. Pengesahan JVC dan Mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah semua dokumen perijinan disiapkan, langkah berikutnya adalah pengesahan JVC dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.. A. Pengajuan Dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM:. Mengajukan semua dokumen perijinan yang telah disusun ke Kementerian Hukum dan HAM.. Memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi.. B. Proses Pengesahan:. Mengikuti proses pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika ada kendala dalam proses pengesahan.. C. Mendapatkan SK Pengesahan:. Mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.. Menyimpan SK sebagai bukti legalitas JVC.. Implementasi dan Operasionalisasi JVC. Setelah JVC disahkan, langkah terakhir adalah implementasi dan operasionalisasi JVC.. A. Penetapan Struktur Organisasi:. Menetapkan struktur Dewan Komisaris (BOC) dan Direksi (BOD) sesuai dengan Anggaran Dasar.. Menunjuk wakil perseroan yang telah disetujui.. B. Pengadaan Sarana dan Prasarana:. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional JVC.. Mengatur kantor, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya.. C. Pelaksanaan Operasional:. Memulai kegiatan operasional sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun.. Melaksanakan proyek pembangkit listrik sesuai dengan kesepakatan dalam SHA.. Power Purchase Agreement. Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) adalah perjanjian yang mengatur jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik selaku penjual (seller) dan PT PLN (Persero) selaku pembeli (offtaker). PPA meliputi semua persyaratan komersial untuk penjualan tenaga listrik antara kedua belah pihak, termasuk tanggal operasional komersial, jadwal pengiriman listrik, denda untuk keterlambatan, syarat pembayaran, dan ketentuan pengakhiran kontrak. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner. PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC.. Input yang Diperlukan. Dokumen Perjanjian (SHA): Shareholder Agreement yang telah disepakati.. Proposal dan Letter of Intent (LoI): Proposal proyek dan LoI yang diterbitkan oleh PLN.. Feasibility Study: Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. Draft PPA: Draft awal perjanjian PPA untuk dibahas dan dinegosiasikan.. Output yang Diharapkan. Dokumen PPA Final: Perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Referensi Utama. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi dalam penyusunan PPA.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Review PPA. Langkah pertama adalah menyusun draft review PPA yang mencakup semua ketentuan penting dan syarat komersial yang akan dinegosiasikan.. A. Penyusunan Draft Awal:

Menggunakan informasi dari dokumen SHA, proposal, Lol, dan hasil Feasibility Study untuk menyusun draft awal PPA.. Melibatkan tim legal dan teknis untuk memastikan semua aspek penting tercakup dalam draft.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft PPA untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi internal serta eksternal.. Mengadakan rapat internal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari tim manajemen.. Negosiasi dengan PLN. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk mencapai kesepakatan final tentang ketentuan dalam PPA.. A. Pengaturan Jadwal Negosiasi:. Mengatur jadwal pertemuan dengan tim PLN untuk membahas draft PPA.. Menyusun agenda dan poin-poin negosiasi yang akan dibahas.. B. Pembahasan Poin-Poin Penting:. Membahas tarif harga jual listrik, termasuk staging harga.. Menegosiasikan periode PPA dengan mempertimbangkan kelayakan proyek dan bankability proyek.. Mendiskusikan skema BOOT atau BOT, financing date, periode Take or Pay dan Take and Pay, liquidated damage, force majeure, termination, supply energi primer, dan dispute resolution.. C. Penyusunan Notulen Pertemuan:. Mencatat semua poin yang disepakati dan perbedaan yang masih ada.. Menyusun notulen pertemuan sebagai dasar untuk revisi draft PPA.. Finalisasi Draft PPA. Setelah negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi.. A. Revisi Draft PPA:. Melakukan revisi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi dengan PLN.. Memastikan semua perubahan yang disepakati telah dimasukkan dalam draft final.. B. Validasi Final Draft:. Melakukan validasi akhir terhadap draft PPA oleh tim legal dan manajemen.. Mengadakan rapat final untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait.. Penandatanganan PPA oleh Pihak Berwenang. Langkah terakhir adalah penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. A. Penyiapan Dokumen untuk Penandatanganan:. Menyiapkan dokumen PPA final yang telah disetujui untuk ditandatangani oleh pihak berwenang.. Mengatur jadwal penandatanganan dengan PLN.. B. Penandatanganan PPA:. Melakukan penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. Menyimpan salinan PPA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi.. C. Distribusi Dokumen PPA:. Mendistribusikan salinan PPA kepada semua pihak yang berkepentingan.. Memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam PPA.. EPC Procurement. EPC Procurement adalah proses pengadaan kontraktor yang bertanggung jawab atas Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam proyek pembangunan pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan konstruksi pembangkit. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner.. Input yang Diperlukan:. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Kajian teknis yang menentukan spesifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk proyek.. Hasil Kajian Lokasi Pembangkit: Kajian lokasi yang menentukan persyaratan lokasi untuk kontraktor EPC.. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. Draft Kontrak EPC: Draft awal kontrak yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani.. Output yang Diharapkan. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor EPC yang telah diidentifikasi.. List Konsultan Transactional: Daftar konsultan yang akan membantu dalam proses transaksi.. Kontraktor EPC Terpilih: Kontraktor EPC yang dipilih melalui proses pengadaan.. Draft Kontrak EPC: Draft final kontrak yang siap untuk ditandatangani.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak EPC yang telah ditandatangani dan disahkan.. Laporan Pelaksanaan Konstruksi: Laporan berkala yang memantau kemajuan konstruksi.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan.. SK PJB No. 100.K/010/DIR/2017: Surat Keputusan terkait pengadaan EPC.. Permenperin No. 54/2012: Peraturan Menteri Perindustrian terkait pengadaan.. Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi Kontraktor dan Konsultan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kontraktor dan konsultan potensial yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk proyek.. A. Pemetaan Kontraktor Potensial:. Mengumpulkan data dari hasil kajian teknologi dan lokasi pembangkit untuk menentukan spesifikasi yang dibutuhkan.. Menyusun list kontraktor EPC potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. B. Penilaian Awal:. Melakukan penilaian awal terhadap kontraktor berdasarkan pengalaman, reputasi, dan kapabilitas teknis mereka.. Menyusun list konsultan transactional yang akan membantu dalam proses transaksi.. Proses Pengadaan Kontraktor EPC. Langkah kedua adalah melaksanakan proses pengadaan untuk memilih kontraktor EPC yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun draft kontrak EPC awal yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Menyiapkan dokumen tender dan mengumumkan pengadaan secara terbuka atau terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari kontraktor yang berminat.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Mengadakan presentasi dan wawancara dengan

kontraktor potensial untuk memastikan kesesuaian.. C. Penentuan Kontraktor Terpilih:. Menyusun laporan evaluasi dan merekomendasikan kontraktor EPC terpilih.. Mendapatkan persetujuan dari manajemen dan pihak terkait.. Penandatanganan Kontrak EPC. Langkah ketiga adalah menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor terpilih.. A. Negosiasi Final:. Mengadakan negosiasi akhir dengan kontraktor terpilih untuk memastikan semua persyaratan dan ketentuan telah disepakati.. Menyusun draft final kontrak EPC berdasarkan hasil negosiasi.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft final kontrak EPC untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.. Mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang untuk penandatanganan kontrak.. C. Penandatanganan Kontrak:. Menandatangani kontrak EPC oleh pihak berwenang dari JVC dan kontraktor terpilih.. Mendokumentasikan kontrak yang telah ditandatangani dan menyimpan salinan untuk arsip.. Implementasi Kontrak EPC. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan kontrak EPC dan memantau pelaksanaannya.. A. Mobilisasi Kontraktor:. Mengkoordinasikan mobilisasi kontraktor ke lokasi proyek.. Menyusun jadwal pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. B. Pemantauan dan Laporan Berkala:. Melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan konstruksi dan memastikannya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.. Menyusun laporan pelaksanaan konstruksi dan menyampaikan kepada pihak terkait.. C. Penanganan Isu dan Penyelesaian:. Menyelesaikan isu-isu yang muncul selama pelaksanaan kontrak.. Memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan..

Land Procurement. Land Procurement adalah proses pengadaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik. Ketersediaan lahan yang memadai dan legal sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Proses ini mencakup kajian risiko operasional dan finansial, serta memastikan kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, Proses ini dilakukan oleh JVC dan PLN NR hanya sebagai support atau consult. . Dalam rangka percepatan proyek, maka Land Procurement dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Kajian Risiko Operasional: Hasil kajian risiko operasional yang mencakup penilaian potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Kajian Risiko Finansial: Hasil kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Dokumentasi Legal: Dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Output yang Diharapkan. Kepastian Kepemilikan Lahan: Kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, siap digunakan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis lokasi dan kebutuhan lahan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan lahan.. Kebijakan Internal PLN NR: Kebijakan dan prosedur internal PLN NR terkait pengadaan lahan..

Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi dan Evaluasi Lahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi lahan yang potensial untuk pembangunan pembangkit listrik.. A. Pemetaan Lahan Potensial:. Menggunakan hasil kajian lokasi pembangkit dari Dokumen FS untuk menentukan area yang sesuai.. Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi lahan yang memenuhi kriteria teknis dan legal.. B. Penilaian Risiko Operasional dan Finansial:. Melakukan kajian risiko operasional yang mencakup potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Melakukan kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Menentukan skema pemanfaatan lahan, apakah berbentuk jual beli atau sewa menyewa.. C. Dokumentasi dan Verifikasi Legal:. Mengumpulkan dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Memverifikasi keabsahan dokumen legal dengan instansi terkait.. Negosiasi Pengadaan Lahan. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan pembelian.. A. Pendekatan dan Penawaran:. Menghubungi pemilik lahan untuk membahas potensi akuisisi atau sewa menyewa.. Menyusun dan mengajukan penawaran harga yang sesuai dengan hasil kajian risiko finansial.. B. Negosiasi dan Kesepakatan:. Melakukan negosiasi harga dan persyaratan pembelian atau sewa menyewa dengan pemilik lahan.. Mencapai kesepakatan final yang menguntungkan kedua belah pihak.. C. Penyusunan Perjanjian Jual Beli atau Sewa Menyewa Lahan:. Menyusun perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Mendapatkan tanda tangan dari kedua belah pihak pada perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan.. Pengesahan dan Penyerahan Lahan. Langkah ketiga adalah mengesahkan dan menyerahkan lahan yang telah dibeli.. A. Pengesahan Dokumen:. Mengajukan dokumen perjanjian jual beli untuk pengesahan kepada notaris atau pejabat terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.. B. Penyerahan dan Pencatatan:. Melakukan penyerahan lahan secara resmi dari pemilik lama ke JVC, sesuai skema yang disepakati.. Mencatat perubahan kepemilikan lahan di instansi terkait untuk memastikan kepemilikan sah, jika skema yang

dipilih adalah sewa menyewa.. Pengelolaan dan Penggunaan Lahan. Langkah terakhir adalah mengelola dan menggunakan lahan yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Persiapan dan Pembersihan Lahan:. Melakukan persiapan lahan, termasuk pembersihan dan perataan tanah.. Mengelola lahan agar siap digunakan untuk kegiatan konstruksi.. B. Penggunaan Lahan untuk Proyek:. Mengalokasikan lahan sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun.. Memantau dan mengelola penggunaan lahan selama seluruh tahap proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan rencana awal..

Pengurusan Perizinan. Pengurusan perizinan adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi yang memungkinkan pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik dalam skema Independent Power Producer (IPP) maupun skema NON IPP. Proses ini mencakup berbagai jenis izin yang harus dipenuhi dari tahap pengembangan hingga tahap konstruksi. Perizinan ini mencakup izin lingkungan, izin penanaman modal, dan izin operasional lainnya. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC.. Dalam rangka percepatan proyek, maka Pengurusan Perizinan dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Feasibility Study (FS): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. List Kebutuhan Perizinan: Daftar kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. Dokumen Persyaratan Pengurusan Perizinan: Semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin.. Set Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah disiapkan untuk diajukan ke instansi terkait.. Output yang Diharapkan. List Kebutuhan Perizinan: Daftar lengkap kebutuhan perizinan yang telah diidentifikasi.. Prosedur Tiap Perizinan: Prosedur rinci untuk setiap jenis perizinan yang diperlukan.. List Konsultan Perizinan dan Kompetensinya: Daftar konsultan yang akan membantu dalam pengurusan perizinan beserta kompetensi mereka.. List Lembaga Perizinan: Daftar instansi atau lembaga yang terkait dengan proses perizinan.. Basic Komunikasi Pengurusan Perizinan dengan Instansi Terkait: Panduan komunikasi dasar dengan instansi terkait.. Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah diterbitkan dan sah.. PPA Signing: Penandatanganan Power Purchase Agreement setelah izin diperoleh.. Pencapaian Financing Close: Penyelesaian proses pendanaan setelah izin diperoleh.. Pelaksanaan EPC: Implementasi kontrak EPC setelah semua izin diperoleh.. Referensi Utama. SOP Instansi Terkait: Standar Operasional Prosedur dari instansi pemerintah terkait.. PERMENHU B 25/2011: Peraturan Menteri Perhubungan yang relevan.. KEPPRES NO. 39/1991: Keputusan Presiden yang terkait dengan perizinan..

Proses dan Langkah-langkah. Pengurusan Perizinan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait. Langkah pertama adalah mengurus perizinan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan telah terpenuhi.. A. Identifikasi Kebutuhan Perizinan:. Menggunakan hasil studi kelayakan (FS) untuk mengidentifikasi semua izin yang diperlukan.. Menyusun daftar lengkap kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. B. Persiapan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen persyaratan pengurusan perizinan yang diperlukan.. Menyusun set dokumen perizinan yang siap diajukan ke instansi terkait.. C. Koordinasi dengan Instansi:. Melakukan komunikasi dengan instansi terkait untuk memastikan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti.. Mengatur pertemuan atau konsultasi dengan instansi untuk mendapatkan klarifikasi jika diperlukan.. Pengesahan atas Semua Dokumen Perizinan. Langkah kedua adalah mengesahkan semua dokumen perizinan yang telah disiapkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait.. A. Penyampaian Dokumen:. Menyerahkan set dokumen perizinan yang telah disiapkan kepada instansi terkait untuk pengesahan.. Mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi untuk pengesahan dokumen.. B. Verifikasi dan Pengesahan:. Mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi yang berwenang.. C. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Mencatat dan menyimpan salinan dokumen perizinan yang telah disahkan sebagai referensi.. Mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah atau Instansi Terkait. Langkah ketiga adalah mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau instansi terkait yang memungkinkan proyek untuk dilanjutkan ke tahap eksekusi.. A. Tindak Lanjut dan Monitoring:. Memantau status pengajuan izin untuk memastikan tidak ada hambatan atau keterlambatan.. Mengikuti perkembangan proses izin secara berkala dengan instansi terkait.. B. Pengambilan Izin:. Mengambil dokumen izin resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau instansi terkait.. Memastikan bahwa semua izin yang diperlukan telah diperoleh sebelum memulai tahap konstruksi.. C. Pelaporan dan Komunikasi:. Melaporkan status perizinan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.. Menyediakan panduan komunikasi dasar untuk mengkoordinasikan pengurusan perizinan dengan instansi terkait..

Financing Close. Financing Close (FC) adalah proses dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik untuk skema NONIPP maupun skema IPP, yang melibatkan pemenuhan semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (lender) kepada peminjam (borrower) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman (Facility Agreement) sebelum pencairan pinjaman dapat dilakukan. Proses ini memastikan bahwa semua

persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi sehingga pinjaman dapat dicairkan untuk membiayai proyek. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC..

Input yang Diperlukan. JVC Establishment: Dokumen pendirian JVC yang telah disahkan.. Power Purchase Agreement (PPA): PPA yang telah ditandatangani.. Land Procurement: Dokumen kepemilikan dan izin lahan.. EPC Bid: Dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Permit & License: Izin dan lisensi yang diperlukan.. Pemenuhan Syarat FC: Semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement..

Output yang Diharapkan. Financial Close (FC): Kondisi di mana semua persyaratan peminjaman telah terpenuhi, dan pinjaman dapat dicairkan..

Referensi Utama. Facility Agreement: Perjanjian Pinjaman yang menetapkan semua syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pencairan pinjaman..

Proses dan Langkah-langkah. Pemenuhan Persyaratan. Langkah pertama dalam proses Financing Close adalah memastikan semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman dalam Facility Agreement telah terpenuhi. Ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi berbagai dokumen serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan..

A. JVC Establishment: Mengumpulkan dan mengesahkan dokumen pendirian JVC.. Memastikan bahwa JVC telah secara resmi didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

B. Power Purchase Agreement (PPA): Memastikan bahwa PPA telah ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Menyimpan salinan resmi PPA untuk referensi..

C. Land Procurement: Mengumpulkan dokumen kepemilikan dan izin lahan.. Memastikan bahwa lahan yang diperlukan untuk proyek telah tersedia dan siap digunakan..

D. EPC Bid: Mengumpulkan dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Memastikan bahwa kontraktor EPC telah dipilih dan siap untuk memulai pekerjaan..

E. Permit & License: Mengumpulkan semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk proyek.. Memastikan bahwa semua persyaratan perizinan telah terpenuhi..

F. Pemenuhan Syarat FC: Mengumpulkan semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman telah dipenuhi..

Validasi Data. Langkah kedua adalah melakukan validasi data untuk memastikan bahwa semua informasi dan dokumen yang diserahkan akurat dan lengkap. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat menghambat proses pencairan pinjaman..

A. Verifikasi Dokumen: Memeriksa kembali semua dokumen yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti PPA, izin lahan, dan kontrak EPC..

B. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul selama proses validasi..

C. Penyelesaian Discrepancies: Mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap perbedaan atau kekurangan dalam dokumen yang telah dikumpulkan.. Memastikan bahwa semua masalah telah diselesaikan sebelum dokumen diserahkan kepada pemberi pinjaman..

Pencairan Pinjaman. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan data telah divalidasi, langkah terakhir adalah pencairan pinjaman. Pencairan ini menandai bahwa proyek telah mencapai tahap Financing Close dan siap untuk dilanjutkan ke tahap implementasi..

A. Penandatanganan Dokumen Akhir: Menandatangani semua dokumen akhir yang diperlukan untuk pencairan pinjaman.. Memastikan bahwa semua pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan mereka..

B. Pencairan Dana: Mengatur pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui..

C. Pelaporan dan Dokumentasi: Menyimpan semua dokumen dan laporan yang terkait dengan proses Financing Close.. Menyusun laporan akhir untuk pemangku kepentingan yang relevan..

Halaman ini sengaja dikosongkan..

Tahap Execution. Engineering, Procurement, Construction. Proses Engineering, Procurement, Construction (EPC) bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan proses konstruksi pembangkit listrik dengan memperhatikan regulasi yang berlaku dan menjunjung prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Aktivitas utama dalam proses EPC meliputi identifikasi kontraktor, pelaksanaan pengadaan, penandatanganan kontrak, dan implementasi kontrak..

Input yang Diperlukan. Dokumen FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan proyek yang mencakup analisis teknis, finansial, dan risiko.. Detailed Engineering Design: Rancangan teknis detail yang menjadi acuan dalam konstruksi pembangkit.. Power Plant Equipment: Spesifikasi dan daftar peralatan utama yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Dokumen Permintaan Backfeeding: Dokumen yang menjelaskan kebutuhan backfeeding untuk persiapan testing dan commissioning..

Output yang Diharapkan. Detail Engineering Design: Rancangan teknis detail yang telah disiapkan dan disetujui.. Power Plant Equipment: Peralatan pembangkit yang telah diadakan dan siap untuk instalasi.. Block Pembangkit (Power house, BoP, Auxiliary): Struktur dan fasilitas pendukung pembangkit yang telah dibangun.. Start Up dan Siap untuk Pengujian Pembangkit: Pembangkit siap untuk dioperasikan dan diuji sebelum commissioning..

Referensi Utama. EPC Contract: Kontrak EPC yang

mencakup semua persyaratan dan ketentuan pengadaan serta pelaksanaan proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Proses Engineering . Proses ini mencakup penyiapan dokumen detail engineering design oleh Kontraktor EPC, baik untuk peralatan utama maupun peralatan pendukung pembangkit.. A. Penyusunan Detail Engineering Design (DED):. Menyiapkan desain teknis yang rinci untuk semua komponen utama dan pendukung pembangkit.. Mengadakan pertemuan teknis dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian desain. . B. Validasi Desain:. Melakukan review dan validasi desain oleh tim internal dan eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar.. Mengajukan desain untuk disetujui oleh pihak berwenang.. Proses Procurement. Kontraktor EPC melakukan pengadaan seluruh peralatan pembangkit dan melaksanakan pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk mendukung proses konstruksi.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun spesifikasi teknis dan dokumen tender untuk pengadaan peralatan pembangkit.. Mengumumkan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari pemasok.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk dan memilih pemasok yang paling sesuai.. C. Penyiapan Kontrak Pengadaan:. Menyusun kontrak pengadaan berdasarkan hasil seleksi dan negosiasi dengan pemasok.. Menandatangani kontrak pengadaan dengan pemasok terpilih.. Proses Construction. Proses konstruksi dilaksanakan oleh Kontraktor EPC sesuai dengan Detail Engineering Design dan Kontrak EPC yang telah ditandatangani. Proses ini biasanya mengikuti Work Breakdown Structure (WBS) yang telah dibuat oleh Kontraktor EPC.. . A. Mobilisasi dan Persiapan:. Mengkoordinasikan mobilisasi tim dan peralatan ke lokasi proyek.. Menyiapkan lokasi konstruksi sesuai dengan rencana kerja dan WBS.. B. Pelaksanaan Konstruksi:. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan jadwal yang telah disusun.. Melakukan pengawasan dan kontrol kualitas secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.. C. Laporan Kemajuan:. Menyusun laporan kemajuan konstruksi secara berkala dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang muncul selama proses konstruksi.. Backfeeding. Pelaksanaan backfeeding dilakukan sebagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan testing dan commissioning pembangkit.. A. Persiapan Backfeeding:. Menyusun rencana dan jadwal backfeeding berdasarkan kebutuhan proyek.. Mengajukan permintaan backfeeding dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.. B. Pelaksanaan Backfeeding:. Melaksanakan proses backfeeding sesuai dengan rencana yang telah disetujui.. Memastikan bahwa semua sistem dan peralatan berfungsi dengan baik selama proses backfeeding.. C. Pengujian dan Verifikasi:. Melakukan pengujian awal dan verifikasi sistem untuk memastikan kesiapan sebelum tahap commissioning.. Menyusun laporan hasil backfeeding dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Penyediaan Energi Primer. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik, khususnya untuk pembangkit non-EBT, agar dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan energi primer, penyusunan proposal, persetujuan skema penyediaan energi primer, pengadaan bahan bakar, dan penandatanganan perjanjian bahan bakar dengan supplier.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Analisis teknologi yang digunakan dalam pembangkit untuk menentukan jenis dan jumlah energi primer yang dibutuhkan.. Perencanaan Supply Energi Primer: Rencana yang mencakup perkiraan kebutuhan energi primer dan sumbernya.. Harga Energi Primer: Informasi tentang harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Proposal yang Disetujui: Dokumen proposal yang telah disetujui oleh pihak terkait.. Supplier Terpilih: Daftar pemasok bahan bakar yang telah dipilih berdasarkan evaluasi.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara PLN atau SPC dengan pemasok.. Output yang Diharapkan. Supply Energi Primer: Pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik.. Harga Energi Primer: Harga bahan bakar yang telah disepakati dalam perjanjian.. Proposal yang Disetujui: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pihak terkait.. Fuel Agreement dengan PLN: Perjanjian bahan bakar antara PLN dan pemasok.. Terpilihnya Supplier Energi Primer: Pemasok bahan bakar yang telah dipilih.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara SPC dan pemasok.. Supply Energi Primer oleh Supplier: Penyediaan bahan bakar oleh pemasok sesuai dengan perjanjian.. Proses dan Langkah-langkah. Perencanaan Supply Energi Primer . Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan suplai energi primer untuk pengembangan pembangkit listrik baru. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian teknologi pembangkit.. A. Identifikasi Kebutuhan Energi Primer:. Melakukan analisis kebutuhan energi primer berdasarkan jenis teknologi pembangkit yang akan digunakan.. Menyusun perkiraan kebutuhan bahan bakar untuk jangka waktu tertentu.. B. Estimasi Harga Energi Primer:. Mengumpulkan data harga bahan bakar dari berbagai sumber.. Menyusun perkiraan biaya bahan bakar untuk kebutuhan pembangkit.. Penyusunan Proposal. Perencanaan energi primer tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan proposal yang diajukan ke PT PLN (Persero).. A. Penyusunan Rencana Kebutuhan Energi Primer:. Menyusun dokumen proposal yang mencakup rencana kebutuhan energi primer selama masa PPA (Power Purchase Agreement)..

Mengajukan skema penyediaan energi primer yang diusulkan.. B. Pengajuan Proposal:. Mengajukan proposal ke PT PLN (Persero) untuk mendapatkan persetujuan.. Persetujuan Skema Penyediaan Energi Primer. PLN akan memutuskan skema yang digunakan dalam penyediaan energi primer.. A. Evaluasi Proposal:. PT PLN (Persero) mengevaluasi proposal yang diajukan.. Memutuskan skema penyediaan energi primer yang akan digunakan (Passthrough atau IPP).. B. Penentuan Skema:. Menentukan apakah penyediaan energi primer dilakukan oleh PLN atau SPC.. Menyesuaikan nilai Komponen C dalam PPA berdasarkan skema yang dipilih.. Fuel Procurement. Jika skema penyediaan energi primer yang disetujui dilakukan oleh SPC, maka SPC harus melaksanakan proses pengadaan energi primer.. A. Proses Pengadaan:. SPC melakukan proses pengadaan energi primer sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Mengumumkan tender dan mengumpulkan penawaran dari pemasok.. B. Evaluasi Penawaran:. Melakukan evaluasi teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Memilih pemasok yang memenuhi kriteria dan kebutuhan proyek.. Fuel Agreement PLN dengan Supplier. Untuk skema penyediaan energi primer yang dilakukan oleh PLN, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan PLN. Sedangkan untuk skema yang dilakukan oleh SPC, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan SPC.. A. Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian:. Melakukan negosiasi dengan pemasok energi primer untuk mencapai kesepakatan harga dan syarat lainnya.. Menyusun dan menandatangani perjanjian bahan bakar (fuel agreement) dengan pemasok terpilih.. B. Pelaksanaan Perjanjian:. Memastikan pemasok melaksanakan penyediaan energi primer sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.. Mengawasi dan mengontrol kualitas dan kuantitas energi primer yang disuplai oleh pemasok.. Penyiapan Jasa Operation & Maintenance. Aktivitas penyiapan jasa Operation & Maintenance (O&M) bertujuan untuk memastikan operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini melibatkan penunjukan pihak yang bertanggung jawab, penyusunan perjanjian, mobilisasi SDM, pendampingan, monitoring, pelatihan, dan pengelolaan kinerja pembangkit.. Input yang Diperlukan. Surat Penunjukan/LOI: Dokumen yang menunjuk pihak yang akan mengelola O&M.. EPC Contract: Kontrak antara perusahaan EPC dan pemilik aset terkait pembangunan pembangkit.. COD (Commercial Operation Date): Tanggal mulai operasional komersial pembangkit.. Data Kinerja Pembangkit: Informasi tentang kinerja operasional pembangkit.. Data Pending Items: Daftar item atau pekerjaan yang belum selesai.. Output yang Diharapkan. Perjanjian Induk: Dokumen perjanjian antara pihak terkait untuk pelaksanaan jasa O&M.. Dokumen Mobilisasi SDM: Dokumen yang mencakup rekrutmen dan penempatan personil.. Laporan Monitoring EPC: Laporan bulanan tentang progress proyek EPC.. Laporan Pelaksanaan Jasa O&M: Laporan berkala mengenai pelaksanaan O&M.. Sertifikat STOP: Sertifikat penerimaan akhir dari EPC kontraktor.. Final Acceptance Certificate: Sertifikat penerimaan final setelah masa garansi.. Proses dan Langkah-langkah. Penugasan/Penunjukkan (LOI). Surat penunjukan/penugasan (LOI) dari pemilik aset (PLN NP/SPC Proyek) kepada Asset Manager atau Asset Operator (PJBS/MKP/perusahaan jasa O&M) untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tersebut.. Penerbitan LOI oleh pemilik aset.. Penugasan Asset Manager atau Asset Operator untuk O&M.. Penyepakatan Perjanjian Induk. Penyusunan dan persetujuan Perjanjian Induk yang mengatur syarat-syarat pokok pelaksanaan jasa O&M pembangkit.. Negosiasi syarat dan ketentuan antara pihak terkait.. Penandatanganan Perjanjian Induk.. Supporting . Tahap ini terbagi dalam dua tahapan: Pra COD dan COD-FAC.. Pra COD:. Mobilisasi SDM: Rekrutmen dan penempatan personil untuk operasi dan pemeliharaan.. Pendampingan EPC Proyek: Pendampingan oleh Asset Manager atau Asset Operator terhadap EPC proyek sebelum penyerahan.. Monitoring EPC Proyek: Monitoring progress pembangunan oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Training oleh EPC Kontraktor: Pelatihan oleh EPC Kontraktor kepada Asset Manager atau Asset Operator.. Pembuatan Laporan Monitoring: Pelaporan hasil monitoring kepada pemilik aset setiap bulan.. COD-FAC:. Mobilisasi SDM: Pemenuhan jumlah personil BSO dan non BSO.. Penyiapan Tata Kelola: Penyiapan tata kelola unit pembangkit selama 6 bulan setelah COD.. Supporting COD-FAC: Dukungan paralel dengan proses mobilisasi dan penyiapan tata kelola pembangkit.. Tahap Performance. Pengelolaan jasa O&M sepenuhnya oleh Asset Manager atau Asset Operator tanpa supervisi dari EPC Kontraktor.. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Pengawasan dan evaluasi kinerja pembangkit secara mandiri.. Penyiapan Organisasi dan SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga

kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Commercial Operation Date. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa pembangkit listrik telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Tahap ini juga digunakan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PJB atau penjelasan realisasi Commercial Operation Date (COD) proyek-proyek yang ada di RUPTL. Setelah pembangkit dinyatakan lolos COD, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit akan tetap berada di bawah supervisi EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. Input yang Diperlukan. Progres EPC. Penyediaan energi primer. Penyiapan SDM untuk OM. Checklist pre-commissioning. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Data pendukung lainnya. Checklist untuk persiapan COD. Output yang Diharapkan. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Sertifikat Laik Operasi (SLO). Checklist untuk persiapan COD. COD pembangkit. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pre-Commissioning. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki tahap commissioning. Tahap ini terdiri dari backfeeding test serta pengujian terhadap peralatan-peralatan supporting operasional pembangkit, di antaranya adalah WTP (water treatment process), cooling system, cleaning system, coal handling system, serta fire protection system.. Persiapan dan Pemeriksaan:. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sistem pendukung operasional pembangkit.. Menyiapkan daftar periksa (checklist) untuk setiap sistem dan komponen yang akan diuji.. Pelaksanaan Pengujian:. Melaksanakan backfeeding test untuk memastikan keandalan sistem distribusi listrik internal.. Menguji sistem WTP, cooling system, cleaning system, coal handling system, dan fire protection system.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan memastikan semua sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.. Commissioning. Tahap ini menjadi bukti bahwa pembangkit yang bersangkutan bisa benar-benar beroperasi dan dijadikan bahan untuk penyusunan SLO. Tahap ini terdiri dari pengujian terhadap first firing, steam admission, first synchrone, load rejection, reliability run & test, serta performance test. Ketika nilai performanya sesuai dengan kesepakatan yang ada pada kontrak, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.. First Firing and Steam Admission:. Menguji pembakaran pertama (first firing) dan pemasukan uap (steam admission) untuk memastikan sistem boiler dan turbin bekerja dengan baik.. First Synchronization:. Melakukan sinkronisasi pertama (first synchrone) untuk menghubungkan pembangkit ke grid listrik.. Load Rejection and Reliability Run:. Menguji reaksi sistem terhadap penolakan beban (load rejection) dan melakukan uji keandalan (reliability run) untuk memastikan stabilitas operasi.. Performance Test:. Melaksanakan uji kinerja (performance test) untuk memastikan pembangkit memenuhi spesifikasi performa yang disepakati dalam kontrak.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan menilai apakah pembangkit memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kontrak EPC.. Penyusunan Sertifikat

Laik Operasi (SLO). Tahap ini bersifat administratif dan harus dilakukan berdasarkan tata cara sertifikasi SLO sesuai regulasi dari lembaga pemerintahan yang bersangkutan.. Pengumpulan Dokumen:.. Mengumpulkan semua dokumen dan data hasil pengujian dari tahap pre-commissioning dan commissioning.. Penyusunan Sertifikat:.. Menyusun Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.. Proses Pengesahan:.. Mengajukan SLO ke instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan dan registrasi resmi.. Dokumentasi:.. Mendokumentasikan sertifikat yang telah disahkan dan menyimpan salinannya sebagai bukti legalitas operasional.. er Plant COD. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk penanda bahwa pembangkit telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Selain itu, tahap ini juga dijadikan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PLN NP ataupun penjelasan realisasi COD proyek-proyek yang ada di RUPTL.. Persiapan COD:.. Melakukan persiapan akhir untuk memastikan semua sistem siap untuk operasi komersial.. Menyusun checklist persiapan COD dan memastikan semua item telah terpenuhi.. Pelaksanaan COD:.. Melaksanakan kegiatan operasional yang menandai pembangkit memasuki tahap COD.. Memastikan semua prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan telah dilaksanakan dengan benar.. Dokumentasi COD:.. Mendokumentasikan hasil dan proses yang dilakukan selama tahap COD.. Menyimpan dokumen resmi yang menunjukkan pembangkit telah mencapai COD.. Supervisi Pasca-COD:.. Melakukan supervisi terhadap operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. . Tahap Completion. Penyusunan Serah Terima Operasi. Proses ini bertujuan untuk membuat dokumen serah terima operasi (STOP) sesuai dengan organisasi SPC yang telah diatur. Pengoperasian pembangkit perlu dilakukan oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Pembangkit, sebagaimana opsi-opsi O&M sesuai kesepakatan pada SHA, serta keputusan opsi yang dipilih oleh JVC.. Input yang Diperlukan. COD pembangkit. Checklist pasca COD. Data kinerja pembangkit. Output yang Diharapkan. Sertifikat STOP. Data pending items. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Kinerja Pembangkit dan Penyusunan Dokumen. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja pembangkit pasca-COD untuk memastikan bahwa semua sistem dan peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun dokumen serah terima operasi (STOP).. Pengumpulan Data Kinerja:.. Mengumpulkan data kinerja pembangkit sejak COD hingga waktu evaluasi.. Menggunakan checklist pasca-COD untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan standar yang telah ditetapkan.. Evaluasi Kinerja:.. Melakukan analisis terhadap data kinerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.. Menilai kinerja pembangkit dalam hal efisiensi, keandalan, dan pemenuhan target operasi.. Penyusunan Dokumen:.. Menyusun dokumen serah terima operasi (STOP) berdasarkan hasil evaluasi.. Memastikan semua temuan dan rekomendasi tercatat dengan jelas dalam dokumen.. Identifikasi Pending Items. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat item-item yang masih pending atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum serah terima operasi dapat dilakukan sepenuhnya.. Pengumpulan Data Pending Items:.. Mengidentifikasi item-item yang masih dalam proses penyelesaian atau perbaikan.. Mendokumentasikan semua pending items dengan deskripsi rinci dan status saat ini.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:.. Berkoordinasi dengan kontraktor EPC dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penyelesaian pending items.. Menetapkan timeline untuk penyelesaian dan verifikasi pending items.. Pembaharuan Checklist:.. Memperbarui checklist pasca-COD dengan status terbaru dari pending items.. Koordinasi dengan Pihak Terkait dan Peninjauan Akhir Dokumen. Langkah ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa dokumen serah terima operasi telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor dan Pihak Terkait:.. Mengadakan pertemuan dengan kontraktor EPC, O&M team, dan pihak lain yang relevan untuk meninjau dokumen STOP.. Mendiskusikan temuan, rekomendasi, dan pending items yang masih perlu diselesaikan.. . Peninjauan Akhir Dokumen:.. Melakukan review akhir terhadap dokumen STOP untuk memastikan kelengkapannya.. Memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi.. Validasi Dokumen:.. Mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait terhadap dokumen STOP yang telah disusun.. Penerbitan Sertifikat STOP. Tahap akhir adalah penerbitan Sertifikat Serah Terima Operasi Pembangkit (STOP), yang menandai bahwa pembangkit telah siap untuk dioperasikan secara penuh oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan.. Penyusunan Sertifikat STOP:.. Menyusun Sertifikat STOP berdasarkan dokumen yang telah disetujui.. Memastikan sertifikat mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items.. Penerbitan Sertifikat:.. Menerbitkan sertifikat STOP secara resmi.. Menyampaikan sertifikat kepada Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan serta pihak-pihak terkait lainnya.. Dokumentasi dan Penyimpanan:.. Menyimpan salinan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses serah terima operasi sebagai

referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Taking Over Certificate. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa seluruh pekerjaan EPC Contractor telah selesai dan aset sepenuhnya diserahkan dari EPC Contractor ke SPC/PJB. Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan setelah tercapainya COD dan semua pekerjaan EPC dianggap selesai. Jika masih ada pending item minor, maka akan disepakati bersama untuk dicatat dan dijadwalkan penyelesaiannya dalam masa garansi (Warranty Period).. Input yang Diperlukan. Sertifikat STOP. Data penyelesaian pending items. Output yang Diharapkan. Taking Over Certificate (TOC). Data temuan first year inspection (FYI). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pemeriksaan dan Evaluasi Aset. Tahap ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset pembangkit untuk memastikan semua pekerjaan EPC telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat setiap pending item minor yang masih perlu diselesaikan.. Inspeksi Fisik:. Melakukan inspeksi fisik terhadap seluruh komponen pembangkit.. Memeriksa kondisi operasional dan performa sistem secara keseluruhan.. Evaluasi Kinerja:. Menganalisis data kinerja dari periode pasca-COD.. Mengidentifikasi setiap masalah operasional atau ketidaksesuaian yang memerlukan penyelesaian.. Dokumentasi Pending Items:. Mencatat semua pending items minor yang masih harus diselesaikan.. Menyusun rencana penyelesaian untuk setiap pending item selama masa garansi.. Penyusunan Dokumen TOC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi aset selesai, dokumen Taking Over Certificate (TOC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penyusunan Draft TOC:. Menyusun draft TOC yang mencakup hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Memasukkan data penyelesaian pending items dan rencana penyelesaiannya dalam masa garansi.. Review Internal:. Melakukan review internal terhadap draft TOC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Memastikan semua pihak terkait setuju dengan isi draft TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dan Peninjauan. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan pihak lain yang relevan, untuk melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor:. Mengatur pertemuan dengan EPC Contractor untuk membahas hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Mendiskusikan pending items dan menyepakati rencana penyelesaiannya.. Peninjauan Akhir:. Melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC dengan semua pihak terkait.. Memastikan bahwa semua kesepakatan telah dicatat dengan jelas dalam dokumen TOC.. Penerbitan Taking Over Certificate. Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan secara resmi untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penerbitan TOC:. Menerbitkan TOC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa TOC mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items dan rencana penyelesaiannya.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan TOC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan TOC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Final Acceptance Certificate. Proses Final Acceptance Certificate (FAC) bertujuan untuk menandai bahwa proyek pembangkit telah benar-benar selesai dibangun oleh pihak EPC sesuai dengan seluruh ketentuan yang sudah disepakati dalam EPC contract. Ini termasuk penyelesaian pending items yang belum terselesaikan selama masa COD dan penyelesaian temuan first year inspection dalam masa garansi setelah masa COD. Setelah seluruh peralatan selama masa garansi dipastikan beroperasi dengan baik dan seluruh pending items telah diselesaikan, FAC dapat diterbitkan. Terbitnya FAC menandai berakhirnya EPC Contract dan seluruh sisa pembayaran akhir dapat dilakukan oleh SPC ke EPC Contractor.. Input yang Diperlukan. Taking Over Certificate (TOC). Data penyelesaian temuan first year inspection (FYI). Output yang Diharapkan. Final Acceptance Certificate (FAC). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Penyelesaian Temuan First Year Inspection. Langkah ini melibatkan penyelesaian semua temuan yang diidentifikasi selama first year inspection (FYI). Semua temuan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam EPC contract sebelum FAC dapat diterbitkan.. Identifikasi Temuan FYI:. Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua temuan dari first year inspection.. Penyelesaian Temuan:. Mengkoordinasikan dengan EPC Contractor untuk menyelesaikan semua temuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak.. Verifikasi Penyelesaian:. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua temuan telah diselesaikan dengan memuaskan.. Pemeriksaan dan Evaluasi Akhir; Koordinasi dan Peninjauan. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan EPC telah diselesaikan sesuai dengan kontrak. Koordinasi dan peninjauan dilakukan dengan semua pihak terkait untuk memastikan tidak ada isu yang belum terselesaikan.. Pemeriksaan Akhir:. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan sistem untuk memastikan operasional yang optimal.. Evaluasi Akhir:. Mengevaluasi hasil pemeriksaan

akhir dan membandingkannya dengan ketentuan dalam EPC contract.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:. Mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan lainnya, untuk memastikan semua persyaratan telah dipenuhi.. Peninjauan Dokumen:. Meninjau semua dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapannya.. Penyusunan Dokumen FAC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi akhir selesai, dokumen Final Acceptance Certificate (FAC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB secara resmi.. Penyusunan Draft FAC:. Menyusun draft FAC yang mencakup semua hasil pemeriksaan dan evaluasi akhir.. Review Internal:. Melakukan review internal terhadap draft FAC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Persetujuan Akhir:. Memastikan bahwa semua pihak terkait menyetujui isi draft FAC sebelum diterbitkan.. Penerbitan Final Acceptance Certificate; Pelaksanaan Pembayaran Akhir . Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Final Acceptance Certificate (FAC) diterbitkan secara resmi, menandai berakhirnya EPC Contract dan memungkinkan pelaksanaan pembayaran akhir.. Penerbitan FAC:. Menerbitkan FAC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa FAC mencakup semua informasi penting, termasuk status penyelesaian temuan FYI.. Pelaksanaan Pembayaran Akhir:. Mengatur pembayaran akhir kepada EPC Contractor sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. Memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan FAC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan FAC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. . Fungsi Kontrol dan Support. Fungsi Kontrol Project Management Office. Project Management Office (PMO) memainkan peran vital dalam keseluruhan proses tata kelola pengembangan pembangkit di PLN Nusantara Renewables. PMO bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi administrasi konstruksi. Tugas utama PMO mencakup administrasi proyek, manajemen proyek, review pelaksanaan konstruksi, serta penyelesaian segala permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proyek. PMO menjalankan tugas pokoknya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).. Perencanaan Proyek:. Menyusun rencana kerja dan anggaran proyek (RKAP) dengan detail, mencakup seluruh aspek teknis, finansial, dan operasional.. Mengembangkan timeline proyek yang realistis dan memastikan setiap tahapan memiliki milestone yang jelas.. Menetapkan sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan secara efektif untuk memastikan efisiensi.. Pelaksanaan Proyek:. Mengawasi implementasi rencana kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk engineering, procurement, dan construction.. Menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.. Pengembangan dan Evaluasi Administrasi Konstruksi:. Melakukan administrasi proyek yang meliputi dokumentasi, pelaporan, dan manajemen kontrak.. Mengembangkan sistem evaluasi untuk mengukur kinerja proyek secara berkala.. Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.. . Review Pelaksanaan Konstruksi:. Meninjau dan mengevaluasi progres konstruksi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana.. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dan menyusun strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Penyelesaian Permasalahan Proyek:. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang timbul selama proyek berlangsung.. Menyusun solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut.. Mengkoordinasikan implementasi solusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menghambat progres proyek.. Dalam menjalankan tugasnya, PMO harus selalu berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi:. Transparansi: Menjamin bahwa seluruh proses dan keputusan dalam proyek dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.. Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proyek memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas tugasnya.. Responsibilitas: Memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta selaras dengan tujuan perusahaan.. Independensi: Menjaga agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan proyek.. Keadilan: Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek diperlakukan secara adil dan setara, serta mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.. Fungsi Support Legal/Hukum. Bidang Legal atau Hukum di PLN Nusantara Renewables memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan proyek pembangkit listrik mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan fungsi support yang kuat di berbagai tahap proyek dan tanggung jawab penuh dalam penyusunan perjanjian kerjasama, bidang legal memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan aman

dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini membantu PLN Nusantara Renewables mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif, sambil mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul.. Fungsi Support (S) Bidang Legal. Dalam berbagai tahap pengembangan proyek pembangkit listrik, bidang legal di PLN Nusantara Renewables memegang peranan penting sebagai pendukung (support) yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa aktivitas di mana bidang legal memberikan dukungan:.. Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses identifikasi peluang proyek dengan memberikan analisis hukum terkait kelayakan proyek. Mereka meninjau regulasi dan peraturan yang relevan untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan panduan hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi dapat dilaksanakan tanpa hambatan hukum.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Dalam penyusunan longlist proyek, bidang legal memberikan masukan hukum untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.. Peran: Melakukan due diligence hukum dan memberikan rekomendasi terkait aspek hukum dari proyek-proyek potensial.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan studi kelayakan awal dengan meninjau aspek hukum yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan proyek.. Peran: Menyediakan analisis hukum yang komprehensif untuk mendukung keputusan bisnis yang berbasis hukum.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam mengidentifikasi mitra potensial dengan meninjau kelayakan hukum dan rekam jejak mitra potensial.. Peran: Menyediakan penilaian hukum terhadap calon mitra untuk memastikan kerjasama yang aman dan sesuai dengan hukum.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung dalam pembuatan daftar panjang dan pendek mitra serta pendanaan dengan meninjau aspek hukum dan regulasi yang relevan.. Peran: Memberikan saran hukum untuk memilih mitra dan skema pendanaan yang sesuai.. Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam proses permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk proyek dan mitra dengan menyediakan dukungan hukum yang diperlukan.. Peran: Menyusun dan meninjau dokumen hukum yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penerbitan Letter of Intent (Lol) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur memenuhi persyaratan hukum.. Peran: Melakukan peninjauan dan penyusunan dokumen Lol yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam menyusun dokumen permohonan RUPS dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses permohonan yang lancar dan sesuai dengan regulasi.. Penandatanganan SHA:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dengan meninjau dan menyusun dokumen yang diperlukan.. Peran: Memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi sebelum penandatanganan.. Pembentukan JVC:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Memberikan dukungan hukum untuk pembentukan JVC yang legal dan sah.. Power Purchase Agreement:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan dan peninjauan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) untuk memastikan kepatuhan hukum.. Peran: Menyediakan analisis hukum dan saran untuk menyusun PPA yang sesuai dengan peraturan.. EPC Procurement:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses pengadaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan kontrak sesuai dengan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk pengadaan yang sah dan sesuai regulasi.. Land Procurement:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pengadaan lahan dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum pertanahan.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk memastikan bahwa proses pengadaan lahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Pengurusan Perizinan:.. Tugas: Bidang legal mendukung pengurusan perizinan dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses perizinan yang lancar dan sah.. Fungsi Responsible (R) Bidang Legal. Dalam beberapa aktivitas, bidang legal bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan tugas atau aktivitas tersebut. Berikut adalah aktivitas di mana bidang legal memiliki peran Responsible:.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Bidang legal bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan meninjau semua dokumen perjanjian kerjasama untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengamankan kepentingan PLN Nusantara Renewables.. Peran: Menyusun, meninjau, dan menyetujui dokumen perjanjian kerjasama, serta memastikan bahwa semua perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.. Fungsi Support Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam mendukung dan mengkonsultasikan berbagai aktivitas proyek pengembangan pembangkit listrik. Dengan menyediakan analisis risiko yang mendalam dan rekomendasi mitigasi yang sesuai, satuan ini membantu memastikan bahwa semua proyek berjalan

dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.. Fungsi Support (S) dalam Satuan Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangkit listrik dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul. Dalam beberapa aktivitas, satuan ini berfungsi sebagai pendukung (support), memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang didukung oleh Satuan Manajemen Risiko:..

Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan dukungan dalam mengidentifikasi peluang proyek dengan menilai potensi risiko yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. . Peran: Melakukan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam fase identifikasi proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Dalam penyusunan studi kelayakan awal, Satuan Manajemen Risiko mendukung dengan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang bisa mempengaruhi kelayakan proyek.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek risiko telah dipertimbangkan dalam studi kelayakan.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menyusun dokumen manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek tersebut.. Peran: Mengembangkan dokumen manajemen risiko yang terperinci dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan strategi mitigasi telah ditetapkan... . Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko mendukung dalam proses permohonan persetujuan RUPS dengan memberikan analisis risiko yang relevan.. Peran: Menyediakan informasi risiko dan strategi mitigasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di RUPS.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Sama dengan permohonan persetujuan proyek dan partner, satuan ini juga memberikan dukungan dalam permohonan RUPS untuk aspek-aspek risiko.. Peran: Menyediakan dukungan dalam menyusun analisis risiko yang relevan untuk proses pengajuan permohonan RUPS.. Fungsi Consult (C) dalam Satuan Manajemen Risiko. Dalam beberapa aktivitas lain, Satuan Manajemen Risiko berperan sebagai pihak yang harus dikonsultasikan (consult) untuk memberikan saran, masukan, atau keahlian khusus yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang dikonsultasikan oleh Satuan Manajemen Risiko:.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan masukan terkait risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proyek-proyek yang masuk dalam longlist.. Peran: Menyediakan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek-proyek tersebut.. Pembuatan Shortlist Proyek:.. Tugas: Sama seperti dalam longlist, satuan ini juga memberikan konsultasi dalam menyusun shortlist proyek dengan mempertimbangkan aspek risiko.. Peran: Memberikan saran dan masukan terkait risiko untuk memastikan bahwa proyek-proyek dalam shortlist memiliki risiko yang terkelola dengan baik.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pengidentifikasian partner dengan menilai risiko-risiko yang terkait dengan masing-masing partner.. Peran: Menyediakan analisis risiko terhadap partner untuk memastikan kerjasama yang aman dan minim risiko.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan terkait risiko-risiko dalam penyusunan longlist dan shortlist partner serta skema pendanaan.. Peran: Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan analisis risiko untuk memastikan pemilihan partner dan skema pendanaan yang sesuai.. Penentuan Partner Terpilih:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses penentuan partner terpilih dengan mempertimbangkan risiko yang terkait.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang mendalam untuk memastikan bahwa partner yang dipilih memiliki profil risiko yang dapat diterima.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan dalam penyusunan perjanjian kerjasama dengan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah ditetapkan.. Peran: Memberikan saran terkait klausul-klausul dalam perjanjian yang berhubungan dengan risiko.. Update Feasibility Study:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pembaruan studi kelayakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin muncul dari perubahan terbaru.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang diperbarui untuk memastikan bahwa studi kelayakan tetap relevan dan akurat.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan konsultasi terkait risiko-risiko dalam penerbitan Letter of Intent (LoI) pengadaan.. Peran: Menyediakan masukan terkait mitigasi risiko dalam LoI untuk memastikan proses pengadaan yang aman.. Penandatanganan SHA, Pembentukan JVC, Power Purchase Agreement, EPC Procurement, Land Procurement, Pengurusan Perizinan, Financing Close:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko berperan dalam memberikan konsultasi untuk semua aktivitas ini dengan menilai risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang sesuai.. Peran: Menyediakan analisis risiko dan masukan terkait untuk memastikan bahwa

semua aspek proyek dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko.. TAHAP EXECUTION dan COMPLETION:.. Tugas: Dalam tahap-tahap ini, satuan manajemen risiko memberikan konsultasi pada berbagai aktivitas seperti engineering, procurement, construction, penyediaan energi primer, penyiapan jasa operation & maintenance, penyiapan organisasi & SDM, commercial operation date, penyusunan serah terima operasi, penerbitan taking over certificate, dan penerbitan final acceptance certificate.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif dan memberikan saran mitigasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek dalam tahap eksekusi dan penyelesaian.. Fungsi Support SDM. Sub Bab Proses Bisnis Support SDM menguraikan peran penting bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung utama dalam menjalankan proses bisnis utama di PLN Nusantara Renewables. Bab ini memberikan panduan mengenai bagaimana SDM berperan dalam mendukung berbagai tahapan pengembangan pembangkit listrik, mulai dari inisiasi hingga eksekusi proyek.. Dalam konteks pengembangan pembangkit listrik, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya finansial yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat. PLN Nusantara Renewables memahami bahwa SDM adalah aset penting yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.. Bab ini akan menguraikan berbagai aktivitas support yang dilakukan oleh bagian SDM, mulai dari penyusunan kapasitas dan kapabilitas hingga pemenuhan SDM untuk proyek. Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk mendukung proses bisnis utama di setiap tahapan pengembangan proyek, memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Kapasitas SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-Langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Penyusunan Kapabilitas SDM. Penyusunan Kapabilitas SDM merupakan elemen krusial di Tahapan Initiation dalam mendukung penyusunan Longlist proyek di Tahap Initiation pengembangan pembangkit oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Longlist Proyek adalah daftar awal dari proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN NR dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang, mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan

potensi keberhasilan.. Dalam konteks ini, Penyusunan Kapabilitas SDM berperan sebagai proses support yang tidak hanya mendukung tetapi juga menguatkan tahapan ini. Proses Penyusunan Kapabilitas SDM bertujuan untuk me-review kembali desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja guna memastikan kesesuaian dan optimalisasi sumber daya manusia dalam menjalankan proyek yang direncanakan. Proses ini bertujuan untuk mencapai struktur organisasi yang lean, sehingga menghindari kelebihan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Selain itu, proses ini memastikan bahwa standar kompetensi karyawan dan job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Tipe Teknologi: Jenis teknologi yang digunakan dalam proyek pembangkit listrik.. Kapasitas Pembangkit: Kapasitas total pembangkit listrik yang akan dibangun.. Jenis Pembangkit: Kategori atau jenis pembangkit listrik (misalnya, PLTU, PLTA, PLTS).. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Dokumen yang mencakup standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan berdasarkan kebutuhan proyek.. Output yang Diharapkan. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Daftar standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi dan persyaratan lainnya..

Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Standar Kompetensi (KKJ). Pada aktivitas ini dilakukan penyusunan standar kompetensi berdasarkan pada formasi tenaga kerja dalam struktur organisasi yang dibuat. Standar kompetensi yang dibutuhkan menyesuaikan dengan proyek yang akan dijalankan nantinya. Hasil dari aktivitas ini berupa Standar Kompetensi Karyawan untuk setiap divisi atau bidang dalam formasi tenaga kerja..

A. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi: Menentukan kebutuhan kompetensi berdasarkan tipe teknologi, kapasitas pembangkit, dan jenis pembangkit.. Mengkaji standar kompetensi yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan proyek..

B. Penyusunan Standar Kompetensi: Mengembangkan standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Mengadakan konsultasi dengan pakar industri dan pemangku kepentingan untuk memastikan keakuratan standar kompetensi..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi standar kompetensi dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan standar kompetensi karyawan..

Penyusunan Job Specification. Di sini dilakukan penyusunan job specification yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Job specification dapat berupa jenis kelamin, usia minimal, pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman kerja, standar fisik yang dibutuhkan, dan lainnya. Hasil dari aktivitas ini berupa Job Specification untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

A. Identifikasi Kriteria Job Specification: Menentukan kriteria job specification yang relevan untuk setiap posisi berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun.. Mengkaji kebutuhan spesifik untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

B. Penyusunan Job Specification: Mengembangkan job specification untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi, pengalaman, pendidikan, dan persyaratan lainnya.. Menyertakan detail spesifik seperti jenis kelamin (jika relevan), usia minimal, dan standar fisik..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi job specification dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan job specification untuk setiap posisi..

Review Kapasitas & Kapabilitas SDM untuk Proyek. Proses ini bertujuan untuk mereview kembali apakah desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja telah sesuai dan optimal untuk menjalankan proyek yang ditetapkan di Tahap Initiation guna mencapai struktur organisasi yang lean. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kompetensi serta job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang telah disusun untuk proyek.. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan untuk setiap posisi dalam proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk setiap posisi.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Output yang Diharapkan. Update Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang diperbarui dan lebih sesuai dengan kebutuhan proyek.. Update Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang diperbarui dan optimal.. Kapabilitas SDM Proyek: Kapabilitas SDM yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan proyek.. Update Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperbarui dan optimal..

Proses dan Langkah-langkah. Review Desain Struktur Organisasi. Pada aktivitas ini, dilakukan review kembali struktur organisasi yang telah dibuat untuk melihat apakah struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini berupa update struktur organisasi..

Analisis Struktur Organisasi: Meninjau struktur organisasi yang telah disusun.. Mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.. Konsultasi dengan Tim Proyek.. Melakukan diskusi dengan tim proyek untuk mendapatkan masukan terkait struktur organisasi.. Mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau pengurangan posisi..

Penyusunan Update Struktur Organisasi: Mengupdate struktur organisasi berdasarkan hasil analisis dan konsultasi..

Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Standard Kompetensi Karyawan. Melakukan review untuk memastikan bahwa standard kompetensi karyawan telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nanti nya. Hasil dari aktivitas ini berupa Kapabilitas SDM Proyek.. Evaluasi Standard Kompetensi:. Meninjau standar kompetensi yang telah ditetapkan.. Memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan skala proyek.. Identifikasi Kesenjangan Kompetensi:. Mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang ada dengan yang dibutuhkan.. Menyusun rencana pelatihan atau pengembangan untuk menutup kesenjangan tersebut.. Penyusunan Kapabilitas SDM Proyek:. Mengupdate standar kompetensi berdasarkan evaluasi dan identifikasi kesenjangan.. Mendokumentasikan kapabilitas SDM proyek.. Review Pengaturan Peran SDM. Melakukan review kembali terhadap peran dan tanggung jawab divisi atau bidang yang akan mengisi struktur organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah peran dan tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan struktur organisasi yang akan dibuat nantinya.. Evaluasi Tanggung Jawab Divisi:. Meninjau tanggung jawab dan peran masing-masing divisi atau bidang.. Memastikan bahwa peran tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Tim Manajemen:. Mengadakan diskusi dengan tim manajemen untuk mendapatkan masukan terkait peran dan tanggung jawab.. Menyesuaikan peran dan tanggung jawab berdasarkan masukan yang diterima.. Penyusunan Update Pengaturan Peran SDM:. Mengupdate peran dan tanggung jawab divisi dalam struktur organisasi.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Job Specification. Melakukan review terhadap job specification yang dibutuhkan untuk setiap formasi tenaga kerja pada struktur organisasi yang dibuat. Hasil dari aktivitas ini berupa kapabilitas SDM proyek yang sesuai dengan standard kompetensi karyawan dari proyek yang akan dijalankan nantinya.. Evaluasi Job Specification:. Meninjau job specification yang telah disusun untuk setiap posisi.. Memastikan bahwa spesifikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek.. Identifikasi Kebutuhan Spesifik:. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk setiap posisi berdasarkan tipe teknologi, kapasitas, dan jenis pembangkit.. Penyusunan Update Job Specification:. Mengupdate job specification berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Review Manpower Planning. Melakukan review kembali kebutuhan optimal dari tenaga kerja yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menghindari tenaga kerja berlebih atau kurang yang akan mengganggu proses pengembangan proyek tersebut.. Evaluasi Manpower Planning:. Meninjau proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang telah disusun.. Memastikan bahwa proyeksi tersebut sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek.. Identifikasi Kesenjangan Tenaga Kerja:. Mengidentifikasi kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan yang dibutuhkan.. Menyusun rencana rekrutmen atau redistribusi tenaga kerja untuk menutup kesenjangan tersebut.. Penyusunan Update Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja:. Mengupdate proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi.. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.. Negosiasi SDM dengan Partner. Proses ini bertujuan untuk menentukan kapasitas dan kapabilitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek dari sisi PLN Nusantara Renewable (PLN NR) dan partner serta pembagian komposisi jumlah tenaga kerja antara PLN NR dan partner dalam struktur tersebut. Negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan, serta bagaimana tenaga kerja tersebut akan dibagi dan dikelola selama proyek berlangsung.. Input yang Diperlukan. Proposal: Dokumen yang mencakup rencana proyek dan kebutuhan SDM.. Lol (SHA): Letter of Intent atau Shareholder Agreement yang mencakup ketentuan awal terkait SDM dan kerja sama antara PLN NR dan partner.. Output yang Diharapkan. SDM Proyek: Kesepakatan tentang kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan untuk proyek, serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner.. Referensi Utama. Dokumen Kesepakatan: Dokumen resmi yang mencakup hasil negosiasi dan kesepakatan terkait SDM antara PLN NR dan partner.. Proses dan Langkah-langkah. Negosiasi SDM dengan Partner. SPC akan melakukan negosiasi dengan partner untuk menginformasikan terkait update struktur organisasi, formasi tenaga kerja, kapabilitas SDM proyek, dan kebutuhan tenaga kerja yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar partner dan PLN NR mencapai kesepakatan terkait kapasitas dan kapabilitas SDM serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner yang telah diusulkan.. Persiapan Negosiasi:. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi terkait yang diperlukan untuk negosiasi, termasuk proposal, Lol (SHA), dan update struktur organisasi serta formasi tenaga kerja.. Menyiapkan agenda dan poin-poin penting yang akan dibahas selama negosiasi.. Penyampaian Informasi:. Mengadakan pertemuan dengan partner untuk menyampaikan update struktur organisasi, formasi tenaga kerja, kapabilitas SDM proyek, dan kebutuhan tenaga kerja.. Menjelaskan alasan dan dasar dari setiap update dan perubahan yang diusulkan.. Diskusi dan Negosiasi:. Membahas dan mendiskusikan setiap poin yang telah disampaikan.. Mendengarkan masukan dan saran dari partner serta menyesuaikan

rencana jika diperlukan.. Melakukan negosiasi terkait kapasitas dan kapabilitas SDM serta pembagian porsi tenaga kerja antara PLN NR dan partner.. Mencapai Kesepakatan:.. Berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan proyek.. Mencatat semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi untuk dituangkan dalam dokumen kesepakatan resmi.. Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menandatangani dokumen kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.. Penyusunan Dokumen Kesepakatan:.. Menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup semua poin yang telah disepakati selama negosiasi.. Memastikan bahwa dokumen tersebut jelas dan mencakup semua rincian penting terkait SDM proyek.. Review dan Validasi:.. Melakukan review internal terhadap dokumen kesepakatan untuk memastikan akurasi dan kelengkapannya.. Mengajukan dokumen tersebut kepada partner untuk review dan validasi.. Penandatanganan Dokumen:.. Mengatur pertemuan untuk penandatanganan dokumen kesepakatan oleh pihak berwenang dari PLN NR dan partner.. Menandatangani dokumen kesepakatan secara resmi.. Distribusi dan Dokumentasi:.. Mendistribusikan salinan dokumen kesepakatan kepada semua pihak yang berkepentingan.. Mendokumentasikan dan menyimpan salinan dokumen kesepakatan untuk referensi dan arsip.. Pemenuhan SDM di SPC Proyek. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan porsi yang dimiliki PLN Nusantara Renewable (PLN NR) serta kapabilitas yang sesuai untuk menjalankan proyek tersebut. Proses ini memastikan bahwa personel yang direkrut atau dimutasikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan proyek.. Input yang Diperlukan. SHA: Shareholders Agreement yang mengatur tentang porsi dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam SPC.. Kapasitas SDM Proyek: Informasi tentang jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Kapabilitas SDM Proyek: Informasi tentang kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dari tenaga kerja untuk proyek.. Output yang Diharapkan. Penetapan BOD dan BOC pada SPC: Struktur organisasi dengan penunjukan Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) pada SPC.. Personel Proyek: Personel yang telah ditugaskan dan siap bekerja pada proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Penunjukkan BOD dan BOC pada SPC. Melakukan penunjukkan BOD dan BOC pada SPC sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM yang telah disepakati pada SHA Proyek. Hasil dari aktivitas ini adalah penetapan BOD dan BOC yang akan mengisi struktur organisasi dalam proyek tersebut.. Identifikasi Kandidat:.. Mengidentifikasi calon BOD dan BOC yang sesuai dengan kriteria dan kapabilitas yang telah ditetapkan dalam SHA.. Evaluasi dan Seleksi:.. Melakukan evaluasi dan seleksi terhadap calon BOD dan BOC berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan kinerja sebelumnya.. Penunjukan Resmi:.. Melakukan penunjukan resmi BOD dan BOC sesuai dengan prosedur yang berlaku.. Mendokumentasikan keputusan penunjukan dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak terkait.. Mutasi Karyawan. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mutasi karyawan. Karyawan yang akan dimutasikan disesuaikan dengan Kapasitas SDM Proyek dan Kapabilitas SDM Proyek. Tujuan dari aktivitas ini adalah menetapkan personel atau karyawan yang akan ditugaskan dalam proyek pengembangan tersebut.. Identifikasi Karyawan untuk Mutasi:.. Mengidentifikasi karyawan yang memiliki kapabilitas sesuai dan dapat dimutasikan ke proyek.. Evaluasi dan Persetujuan:.. Melakukan evaluasi terhadap karyawan yang akan dimutasikan untuk memastikan kesesuaian kompetensi.. Mendapatkan persetujuan dari manajemen terkait mutasi karyawan.. Pelaksanaan Mutasi:.. Melaksanakan proses mutasi karyawan sesuai dengan prosedur perusahaan.. Memberikan orientasi dan briefing kepada karyawan yang dimutasikan mengenai tugas dan tanggung jawab baru mereka.. Rekrutmen Karyawan. Melakukan rekrutmen untuk mengisi posisi dalam struktur organisasi tersebut. Pemenuhan karyawan melalui rekrutmen akan mengikuti Kapasitas SDM dan Kapabilitas SDM proyek. Tujuan dari aktivitas ini adalah mendapatkan personel atau karyawan yang akan menjalankan proyek pengembangan tersebut.. . Perencanaan Rekrutmen:.. Menyusun rencana rekrutmen berdasarkan kebutuhan SDM yang telah diidentifikasi.. Pengumuman dan Penerimaan Lamaran:.. Mengumumkan posisi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi.. Menerima dan menyeleksi lamaran dari calon karyawan.. Proses Seleksi:.. Melakukan seleksi melalui tes, wawancara, dan evaluasi kompetensi.. Menyusun daftar kandidat terpilih untuk wawancara lebih lanjut.. Penawaran dan Penempatan:.. Membuat penawaran kerja kepada kandidat terpilih.. Melakukan penempatan karyawan baru dalam struktur organisasi proyek.. Memberikan orientasi kepada karyawan baru mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam proyek.. Fungsi Support Pendanaan. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, PLN Nusantara Renewables harus memastikan bahwa setiap proyek pembangkit listrik memiliki struktur pendanaan yang solid dan terencana dengan baik. Pendanaan merupakan salah satu aspek krusial dalam siklus hidup proyek, mulai dari Tahap Initiation hingga tahap penyelesaian. Tanpa pendanaan yang memadai dan tepat waktu, risiko keterlambatan proyek dan peningkatan biaya dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan strategi pendanaan yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan proyek.. Sub Bab ini memberikan

pemahaman tentang bagaimana PLN Nusantara Renewables mengelola dan mengoptimalkan sumber daya finansial untuk mendukung pengembangan proyek-proyek pembangkit dalam Tata Kelola Pengembangan Pembangkit.. Gambaran Umum Alur Pendanaan. Berikut adalah gambaran tentang alur pendanaan proyek pengembangan pembangkit listrik di PLN Nusantara Renewables. Proses ini mencakup dari identifikasi proyek, analisis kelayakan, penutupan keuangan, hingga pemantauan dan peninjauan setelah proyek berjalan. Setiap tahap memiliki proses-proses penting yang memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, dengan fokus pada manajemen risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan.. . Gambar 3 Gambaran Umum Alur Pendanaan. Alur pendanaan proyek berlangsung di sepanjang empat tahap utama tata kelola pengembangan pembangkit: Initiation (Inisiasi), Development (Pengembangan), Execution (Eksekusi), Completion (Penyelesaian). Pipeline to Financial Close. Bagian ini menggambarkan proses pendanaan yang berlangsung dari tahap awal hingga penutupan keuangan proyek (financial close). Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah:. Identification (Identifikasi): Mengidentifikasi proyek yang potensial untuk didanai.. Pre-Screening: Melakukan pra-penyaringan terhadap proyek yang diidentifikasi untuk memastikan kelayakannya.. Credit & ESS Analysis & Rating: Melakukan analisis kredit dan ESS (Environmental, Social, and Governance) serta memberikan penilaian.. Execution: Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.. Facility Disbursement & Monitoring. Setelah penutupan keuangan, proses berlanjut ke penyaluran fasilitas dan pemantauan. Tahapan ini meliputi:. Disbursement (Penyaluran): Proses pencairan dana untuk mendanai proyek.. Monitoring (Pemantauan): Memantau pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.. Project Stages (Tahapan Proyek). Setiap proyek pengembangan pembangkit melalui beberapa tahapan:. Project Initiation (Inisiasi Proyek): Tahap awal proyek, melibatkan persiapan dasar dan identifikasi proyek.. Project Assessment and Approval Process (Proses Penilaian dan Persetujuan Proyek): Melakukan penilaian mendalam dan proses persetujuan proyek.. Financial Close (Penutupan Keuangan): Tahap akhir dalam persiapan keuangan proyek, memastikan semua persyaratan keuangan terpenuhi.. Highlighted Process (Proses yang Disorot). Beberapa proses penting dalam alur pendanaan proyek:. Name Clearance: Pemeriksaan dan persetujuan nama proyek.. Key Terms & Conditions: Penentuan dan persetujuan syarat serta ketentuan utama.. Project Due Diligence: Penelitian mendalam terhadap proyek yang meliputi berbagai aspek seperti:. KYC Due Diligence (Know Your Customer). Financial Due Diligence (Keuangan). S&E Due Diligence (Safety & Environment). Lender Advisor Due Diligence: Penelitian mendalam oleh penasihat pemberi pinjaman, mencakup aspek teknis, hukum, dan lingkungan.. Credit Documentation: Dokumentasi kredit yang diperlukan.. Credit Agreements: Perjanjian kredit yang disetujui.. Security Documentation: Dokumentasi jaminan untuk pendanaan.. Post-Approval Stage (Tahap Pasca-Persetujuan). Setelah proyek disetujui dan dana dicairkan, ada beberapa aktivitas penting yang dilakukan:. Repayment Obligation Monitoring: Pemantauan kewajiban pembayaran kembali.. Project Review: Peninjauan berkala terhadap proyek.. Early Warning System: Sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.. Jenis Pendanaan. Concessional Funding. Concessional Funding adalah jenis pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah, negara, atau sektor publik lainnya, serta oleh special funds, Multilateral Financial Institutions (MFIs), dan Development Finance Institutions (DFIs). Pendanaan ini dirancang untuk memberikan dukungan keuangan dengan syarat yang lebih lunak dibandingkan dengan pinjaman komersial biasa. Pendanaan ini sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk pengembangan pembangkit listrik dan energi baru terbarukan (EBT).. Concessional funding adalah alat pendanaan yang sangat efektif untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik dan proyek energi terbarukan. Dengan menawarkan syarat pinjaman yang lebih lunak, termasuk bunga rendah atau nol dan fleksibilitas pembayaran, concessional funding membantu mengurangi beban keuangan pada proyek, memungkinkan akses ke dana yang lebih besar, dan menyediakan dukungan teknis dari penyedia pendanaan yang berfokus pada pembangunan. Hal ini menjadikan concessional funding sebagai pilihan yang menarik bagi PLN Nusantara Renewables dalam mengembangkan proyek-proyek energi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.. Karakteristik Concessional Funding. Bunga yang Sangat Rendah atau Tidak Ada. Salah satu ciri utama dari concessional funding adalah tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Dalam beberapa kasus, pendanaan ini bahkan tidak mengenakan bunga sama sekali. Tingkat bunga yang rendah ini membuat concessional funding sangat menarik bagi proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar namun memiliki sumber pendapatan yang mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya pinjaman komersial yang lebih tinggi.. Pembayaran Bunga yang Fleksibel. Pembayaran bunga dalam skema concessional funding sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Fleksibilitas ini mencakup penjadwalan ulang pembayaran bunga sesuai dengan

tahapan perkembangan proyek, yang sangat berguna untuk proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tahap operasional dan menghasilkan pendapatan.. Tema Pembangunan Spesifik. Banyak concessional funding yang ditujukan untuk mendukung tema pembangunan spesifik, terutama terkait dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Pendanaan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan akses energi bersih. Pendanaan ini sering kali terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan memiliki persyaratan yang mengharuskan proyek untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu.. Keuntungan Concessional Funding. Biaya Rendah. Karena tingkat bunga yang rendah atau nol, biaya keseluruhan pendanaan melalui concessional funding lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Hal ini mengurangi beban keuangan pada proyek, terutama pada tahap awal pengembangan.. Akses ke Dana yang Lebih Besar. Proyek yang memenuhi syarat untuk concessional funding sering kali dapat mengakses jumlah dana yang lebih besar dibandingkan dengan yang mungkin diperoleh melalui pinjaman komersial. Ini sangat penting untuk proyek besar seperti pembangunan pembangkit listrik.. Dukungan dari Penyedia yang Terkait dengan Pembangunan. Penyedia concessional funding seperti pemerintah dan DFIs biasanya memberikan dukungan tambahan dalam bentuk keahlian teknis, bantuan teknis, dan pemantauan proyek untuk memastikan keberhasilan proyek dan dampak positif yang diharapkan.. Contoh Penyedia Concessional Funding. Pemerintah dan Negara. Banyak pemerintah menyediakan concessional funding untuk proyek-proyek yang sejalan dengan kebijakan energi dan lingkungan nasional mereka. Misalnya, pemerintah dapat memberikan hibah atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek energi terbarukan.. Multilateral Financial Institutions (MFIs) dan Development Finance Institutions (DFIs). Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Finance Corporation (IFC) sering menyediakan concessional funding. Mereka mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak pembangunan yang signifikan dan sejalan dengan tujuan pembangunan global.. Project Finance/Project Bond. Project Finance adalah struktur pendanaan yang digunakan untuk mendanai proyek jangka panjang dan besar, di mana utang dan ekuitas digunakan untuk membiayai proyek. Dalam struktur ini, pinjaman dilunasi dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut, bukan dari neraca perusahaan sponsor. Project Bond adalah instrumen utang yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari publik atau investor institusional, yang juga dilunasi dari arus kas proyek.. Project finance dan project bond merupakan opsi pendanaan yang efektif untuk proyek-proyek pengembangan pembangkit listrik dan energi terbarukan. Dengan leverage yang tinggi, tenor yang panjang, dan struktur non-recourse atau limited recourse, jenis pendanaan ini memungkinkan proyek besar untuk mendapatkan dana yang diperlukan sambil membatasi risiko bagi sponsor proyek. Penggunaan project finance dan project bond dapat membantu PLN Nusantara Renewables dalam mengembangkan proyek-proyek energi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.. Penyedia pendanaan untuk project finance dan project bond meliputi: Commercial Lenders: Bank komersial yang memberikan pinjaman kepada proyek berdasarkan analisis kelayakan proyek dan arus kas yang diharapkan.. Multilateral Financial Institutions (MFIs) / Development Finance Institutions (DFIs) / Export Credit Agencies (ECAs): Lembaga-lembaga ini memberikan dukungan keuangan dan jaminan kepada proyek yang memiliki dampak pembangunan yang signifikan.. Public (Project Bond): Obligasi proyek yang diterbitkan di pasar modal untuk menarik investasi dari publik dan investor institusional.. Karakteristik Project Finance/Project Bond. Tingkat Leverage yang Tinggi. Project finance biasanya memiliki struktur leverage yang tinggi, dengan rasio Debt-to-Equity hingga 80%:20%. Ini berarti sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari utang, yang dapat meningkatkan pengembalian ekuitas bagi investor tetapi juga menambah risiko finansial.. Tenor yang Panjang. Pendanaan melalui project finance dan project bond biasanya memiliki tenor yang panjang, sering kali lebih dari 15 tahun. Tenor yang panjang ini sesuai dengan sifat jangka panjang proyek infrastruktur dan memungkinkan arus kas proyek untuk mendukung pembayaran utang secara bertahap... Non-recourse atau Limited Recourse. Dalam struktur non-recourse, kreditur hanya memiliki klaim terhadap arus kas dan aset proyek, bukan terhadap aset atau neraca sponsor proyek. Dalam struktur limited recourse, ada batasan tertentu pada klaim kreditur terhadap sponsor proyek. Ini mengurangi risiko bagi sponsor tetapi menambah risiko bagi kreditur, yang membuat mereka sangat bergantung pada keberhasilan proyek.. Keuntungan Project Finance/Project Bond. Pembiayaan Proyek Besar. Project finance memungkinkan pembiayaan proyek-proyek besar yang memerlukan investasi signifikan, seperti pembangkit listrik, infrastruktur transportasi, dan proyek energi terbarukan.. Meningkatkan Return on Equity. Dengan struktur leverage yang tinggi, project finance dapat meningkatkan return on equity bagi sponsor proyek, asalkan proyek berhasil dan menghasilkan arus kas yang memadai.. Diversifikasi Sumber Dana. Dengan menggunakan project bond, proyek dapat menarik dana dari pasar modal, mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank dan memungkinkan partisipasi

dari investor institusional dan publik.. Meningkatkan Disiplin Proyek. Struktur pembiayaan ini meningkatkan disiplin dalam manajemen proyek karena kreditur dan investor memantau kinerja proyek secara ketat untuk memastikan bahwa utang dapat dilunasi tepat waktu.. Contoh Implementasi Project Finance/Project Bond. Proyek Pembangkit Listrik. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan project finance untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik baru. Dana yang diperoleh melalui pinjaman bank atau penerbitan project bond digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional awal pembangkit. Arus kas yang dihasilkan dari penjualan listrik digunakan untuk melunasi utang.. Proyek Energi Terbarukan:. Dalam proyek energi terbarukan, seperti pembangunan ladang angin atau solar farm, project bond dapat diterbitkan untuk menarik investasi dari publik dan investor institusional. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai proyek, sementara arus kas dari penjualan energi terbarukan digunakan untuk membayar kembali obligasi.. Commercial Loan. Commercial Loan adalah pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan komersial untuk membiayai kebutuhan bisnis atau proyek tertentu. Pinjaman ini biasanya diberikan berdasarkan analisis kredit yang komprehensif terhadap peminjam dan proyek yang akan dibiayai.. Commercial loan merupakan opsi pendanaan yang fleksibel dan cepat untuk proyek pengembangan pembangkit listrik. Dengan jadwal pembayaran yang disepakati di awal, jaminan, dan restriksi tertentu, commercial loan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan sambil menjaga kendali penuh atas proyek. Penggunaan commercial loan dapat membantu PLN Nusantara Renewables dalam mencapai tujuan pengembangan energi yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas produksi energi yang ramah lingkungan.. Penyedia pendanaan untuk commercial loan meliputi:. Commercial Lenders (Perbankan nasional, regional, dan global): Bank komersial yang menawarkan pinjaman kepada perusahaan berdasarkan penilaian risiko dan kelayakan proyek. Ini termasuk bank nasional yang beroperasi di dalam negeri, bank regional yang melayani beberapa negara, dan bank global yang memiliki jaringan internasional.. Karakteristik Commercial Loan. Jadwal Pembayaran yang Disepakati di Awal. Pembayaran pinjaman mengikuti jadwal amortisasi yang telah disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman pada awal perjanjian. Jadwal ini mencakup pembayaran pokok dan bunga yang dibayarkan secara berkala, seperti bulanan atau triwulanan, selama masa pinjaman.. Memerlukan Jaminan. Sebagian besar commercial loan memerlukan jaminan (collateral) dari peminjam. Jaminan ini bisa berupa aset tetap seperti properti, peralatan, atau inventaris, yang dapat disita oleh pemberi pinjaman jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran.. Mensyaratkan Restriksi atau Kewajiban Tertentu (Covenants). Pemberi pinjaman biasanya menetapkan restriksi atau kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh peminjam selama masa pinjaman. Covenants ini bisa berupa pembatasan terhadap pengeluaran modal, rasio keuangan yang harus dipertahankan, atau kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan secara berkala. Covenants ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan memastikan kesehatan keuangan peminjam selama periode pinjaman.. . Keuntungan Commercial Loan. Akses Cepat ke Dana. Commercial loan memungkinkan perusahaan untuk mengakses dana dengan cepat dibandingkan dengan metode pendanaan lainnya seperti penerbitan obligasi atau ekuitas. Ini sangat penting untuk proyek yang membutuhkan modal dalam waktu singkat.. Fleksibilitas Penggunaan Dana. Dana yang diperoleh dari commercial loan dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik, peningkatan kapasitas produksi, atau memperluas operasional perusahaan.. Kendali Penuh atas Proyek. Dengan commercial loan, perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas proyek tanpa harus berbagi kepemilikan dengan investor lain. Ini berbeda dengan pendanaan ekuitas di mana perusahaan mungkin harus menyerahkan sebagian kontrol kepada pemegang saham baru.. Contoh Implementasi Commercial Loan. Proyek Pembangkit Listrik. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan commercial loan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik baru. Dana yang diperoleh dari bank digunakan untuk membeli peralatan, membayar biaya konstruksi, dan menutup biaya operasional awal. Pembayaran pinjaman dilakukan sesuai dengan jadwal amortisasi yang disepakati, dan aset pembangkit dapat dijadikan jaminan.. Peningkatan Kapasitas Produksi. Untuk meningkatkan kapasitas produksi energi, PLN Nusantara Renewables dapat mengambil commercial loan untuk mendanai pembelian dan pemasangan peralatan baru. Pembayaran pinjaman dilakukan dari pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh peningkatan kapasitas produksi.. Obligasi/Green Bond. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari publik. Obligasi ini merupakan janji untuk membayar kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, beserta bunga (kupon) yang dibayarkan secara berkala. Green Bond adalah jenis obligasi yang khusus digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, atau pengelolaan air bersih.. Obligasi/green bond merupakan opsi pendanaan yang efektif untuk proyek pengembangan pembangkit listrik, menawarkan pendanaan jangka panjang dengan fleksibilitas

dalam struktur pembayaran. Dengan dukungan dari publik, baik retail maupun institusional, obligasi/green bond memungkinkan PLN Nusantara Renewables untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek besar sambil memenuhi komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.. Penyedia pendanaan untuk obligasi/green bond meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu (retail) dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi (institusional) yang membeli obligasi sebagai bentuk investasi.. Karakteristik Pendanaan Obligasi/Green Bond. Pembayaran Pokok di Akhir Periode. Pembayaran pokok pinjaman pada umumnya dilakukan di akhir periode pinjaman, pada tanggal jatuh tempo obligasi. Investor menerima pembayaran pokok secara penuh setelah tenor obligasi berakhir.. Seri dengan Tenor dan Kupon Berbeda. Obligasi/green bond dapat terdiri dari beberapa seri dengan tenor dan kupon yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi seri A dengan tenor 5 tahun dan kupon 5%, serta obligasi seri B dengan tenor 10 tahun dan kupon 6%. Ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih seri obligasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.. Dapat Diterbitkan Tanpa Jaminan atau dengan Jaminan. Obligasi/green bond dapat diterbitkan tanpa jaminan (clean) atau dengan jaminan, bergantung pada peringkat kredit penerbit. Obligasi tanpa jaminan biasanya diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat kredit tinggi yang memiliki reputasi baik di pasar. Obligasi dengan jaminan dapat diberikan jika penerbit memiliki peringkat kredit yang lebih rendah, di mana aset tertentu dijadikan jaminan untuk memberikan keamanan tambahan bagi investor.. Keuntungan Obligasi/Green Bond. Pendanaan Jangka Panjang. Obligasi/green bond menyediakan pendanaan jangka panjang dengan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Ini membantu perusahaan mengelola arus kas dan meminimalkan risiko refinancing dalam jangka pendek.. . Fleksibilitas Struktur Pembayaran. Dengan pembayaran pokok di akhir periode dan kupon yang dibayarkan secara berkala, obligasi/green bond memberikan fleksibilitas dalam struktur pembayaran. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan dana secara optimal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan.. Dukungan Lingkungan. Green bond khususnya memberikan keuntungan tambahan dengan mendukung proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan. Ini membantu perusahaan memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta menarik investor yang memiliki fokus pada investasi berkelanjutan.. Contoh Implementasi Obligasi/Green Bond. Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menerbitkan green bond untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli peralatan, membiayai konstruksi, dan menutup biaya operasional awal. Pembayaran pokok dilakukan di akhir periode obligasi, sementara investor menerima pembayaran kupon secara berkala.. Peningkatan Efisiensi Energi. Green bond juga dapat digunakan untuk mendanai proyek peningkatan efisiensi energi di fasilitas yang sudah ada. Misalnya, mengganti peralatan lama dengan teknologi yang lebih efisien atau mengimplementasikan sistem manajemen energi. Pendanaan ini tidak hanya membantu mengurangi konsumsi energi tetapi juga menurunkan emisi karbon dan biaya operasional.. Sekuritisasi (KIK-EBA). Sekuritisasi adalah proses di mana aset yang menghasilkan arus kas, seperti piutang atau pendapatan dari proyek, dikonversi menjadi sekuritas atau efek yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, skema sekuritisasi dikenal sebagai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sekuritisasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual hak atas arus kas masa depan dari aset tersebut kepada investor.. Sekuritisasi (KIK-EBA) merupakan opsi pendanaan yang efektif dan fleksibel untuk pengembangan pembangkit listrik, menawarkan berbagai keuntungan seperti peningkatan likuiditas, diversifikasi sumber pendanaan, dan optimalisasi struktur neraca. Dengan melibatkan publik sebagai investor, baik retail maupun institusional, sekuritisasi memungkinkan PLN Nusantara Renewables mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek besar sambil memaksimalkan nilai aset yang ada.. Penyedia pendanaan untuk sekuritisasi (KIK-EBA) meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu (retail) dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi (institusional) yang membeli sekuritas sebagai bentuk investasi.. Karakteristik Pendanaan Sekuritisasi (KIK-EBA). Off Balance Sheet Financing. Sekuritisasi merupakan metode pembiayaan off balance sheet, di mana aset dan kewajiban terkait dikeluarkan dari neraca perusahaan. Penerimaan kas di muka diperoleh dari hasil penjualan piutang dalam bentuk efek KIK-EBA, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek baru atau akuisisi proyek yang sudah berjalan (brownfield/operasional). Hal ini membantu perusahaan meningkatkan likuiditas tanpa menambah utang di neraca mereka.. Asset Recycling. Sekuritisasi memungkinkan perusahaan melakukan asset recycling, yaitu penerimaan kas di muka dari hasil penjualan piutang yang dapat digunakan untuk memperoleh atau mengembangkan proyek baru. Dengan cara ini, aset yang sudah menghasilkan arus kas dapat digunakan untuk mendanai proyek lain yang berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan.. Beragam Skema dan Fitur. Sekuritisasi memiliki berbagai macam skema dan fitur yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan proyek. Ini termasuk struktur pembayaran yang fleksibel, tingkat suku bunga yang bervariasi, dan tenor yang dapat disesuaikan. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk merancang sekuritisasi yang paling sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan pendanaan proyek.. Keuntungan Sekuritisasi (KIK-EBA). Peningkatan Likuiditas. Sekuritisasi memungkinkan perusahaan mengakses likuiditas dengan cepat melalui penjualan piutang atau aset yang menghasilkan arus kas. Ini memberikan dana yang diperlukan untuk mendanai proyek baru atau memperluas operasi tanpa menambah beban utang.. Diversifikasi Sumber Pendanaan. Dengan menggunakan sekuritisasi, perusahaan dapat mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, mengurangi ketergantungan pada pinjaman tradisional atau ekuitas. Ini membantu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.. Optimalisasi Struktur Neraca. Off balance sheet financing membantu perusahaan menjaga struktur neraca yang sehat dengan mengurangi aset dan kewajiban yang tercatat. Ini dapat meningkatkan rasio keuangan dan membuat perusahaan lebih menarik bagi investor dan pemberi pinjaman.. Fleksibilitas dalam Pembiayaan. Beragam skema dan fitur sekuritisasi memungkinkan perusahaan untuk merancang struktur pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek dan kondisi pasar. Ini termasuk opsi pembayaran yang fleksibel dan tenor yang dapat disesuaikan.. Contoh Implementasi Sekuritisasi (KIK-EBA). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan sekuritisasi untuk mendanai pembangunan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Piutang atau pendapatan dari proyek yang sudah berjalan dapat dijual kepada investor dalam bentuk KIK-EBA, menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai proyek baru.. Akuisisi Proyek Brownfield. Sekuritisasi dapat digunakan untuk mengakuisisi proyek brownfield atau operasional yang sudah menghasilkan arus kas. Penerimaan kas di muka dari penjualan piutang proyek dapat digunakan untuk membeli aset baru yang menghasilkan pendapatan, memperluas portofolio perusahaan.. Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Kemitraan dalam konteks pendanaan proyek pembangkit listrik mencakup berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Kedua skema ini melibatkan penggalangan dana dari publik, baik dari investor retail maupun institusional, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.. Kemitraan, termasuk RDPT dan DINFRA, merupakan opsi pendanaan yang strategis untuk pengembangan pembangkit listrik. Dengan melibatkan publik dan mitra berpengalaman, PLN Nusantara Renewables dapat mengakses modal yang lebih besar, membagi risiko, dan meningkatkan kapasitas internal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan finansial perusahaan tetapi juga memastikan bahwa proyek dijalankan dengan standar kualitas dan efisiensi tertinggi.. Penyedia pendanaan untuk kemitraan, termasuk RDPT dan DINFRA, meliputi: Publik (retail dan institusional): Investor individu dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dengan potensi pengembalian yang stabil dan jangka panjang.. Karakteristik Pendanaan Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Berbagai Pendanaan dan Kontrol atas Proyek dengan Mitra. Kemitraan memungkinkan berbagai bentuk pendanaan, termasuk ekuitas dan utang, serta kontrol bersama atas proyek dengan mitra. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan manajemen proyek, memastikan bahwa kebutuhan spesifik proyek dapat terpenuhi.. Mitra Dapat Berupa Investor Strategis atau Investor Finansial/Pasar Modal. Mitra dalam kemitraan ini dapat berupa investor strategis yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam industri energi, atau investor finansial yang menyediakan modal melalui pasar modal. Kedua jenis mitra ini membawa nilai tambah yang berbeda, seperti keahlian teknis atau akses ke sumber pendanaan yang lebih besar.. Manfaat Risk Sharing dan Transfer of Knowledge. Kemitraan memungkinkan pembagian risiko antara PLN Nusantara Renewables dan mitra. Ini mengurangi eksposur risiko perusahaan dan meningkatkan stabilitas proyek. Selain itu, kemitraan dengan mitra berpengalaman dapat membawa transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas internal dan efisiensi operasional.. Mitra dengan Skala Global Dapat Membawa Serta Pendanaan. Kemitraan dengan mitra berskala global, seperti perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional, dapat membawa serta pendanaan yang signifikan. Ini tidak hanya memperkuat modal proyek tetapi juga membuka akses ke jaringan global dan praktik terbaik di industri energi.. Keuntungan Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Akses ke Modal yang Lebih Besar. Kemitraan memungkinkan PLN Nusantara Renewables mengakses modal yang lebih besar melalui kontribusi dari mitra. Ini penting untuk mendanai proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi awal yang signifikan.. Diversifikasi Risiko. Dengan berbagi risiko dengan mitra, PLN Nusantara Renewables dapat mengurangi eksposur risiko proyek. Ini mencakup risiko finansial, operasional, dan teknis, yang dapat dikelola lebih efektif melalui kemitraan.. Penguatan Kapasitas dan Keahlian. Kemitraan dengan mitra berpengalaman memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi. Ini meningkatkan kapasitas internal PLN Nusantara Renewables dan memastikan bahwa proyek dijalankan dengan efisiensi dan standar kualitas yang tinggi.. Keuntungan dari Efisiensi Operasional. Mitra strategis

sering membawa praktik terbaik dan teknologi terbaru ke dalam proyek. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang, meningkatkan profitabilitas proyek.. Contoh Implementasi Kemitraan (termasuk RDPT dan DINFRA). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menjalin kemitraan dengan investor strategis atau finansial untuk mengembangkan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. RDPT dan DINFRA dapat digunakan untuk menggalang dana dari publik, memungkinkan partisipasi luas dan akses ke modal yang diperlukan.. Peningkatan Infrastruktur Listrik. Kemitraan dengan perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur listrik yang ada. Ini termasuk modernisasi pembangkit listrik, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan efisiensi energi.. Initial Public Offering (IPO). Initial Public Offering (IPO) adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik dan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan dapat menggalang dana dari investor publik, baik retail maupun institusional, yang tertarik untuk memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan.. Initial Public Offering (IPO) merupakan opsi pendanaan yang strategis bagi PLN Nusantara Renewables untuk menggalang dana yang signifikan dari investor publik. Melalui IPO, perusahaan dapat meningkatkan profilnya, memperoleh likuiditas, dan mengakses modal yang diperlukan untuk mendanai proyek infrastruktur besar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek, PLN Nusantara Renewables juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan investor, dan mencapai tujuan strategisnya dalam pengembangan pembangkit listrik dan energi baru terbarukan.. . Penyedia pendanaan untuk IPO meliputi:. Publik (retail dan institusional): Investor individu dan institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi yang tertarik untuk berinvestasi dalam saham perusahaan yang baru terdaftar.. Karakteristik Pendanaan Initial Public Offering (IPO). Pendanaan Ekuitas dari Investor Publik. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual saham kepada investor publik. Ini berbeda dengan pinjaman atau utang karena dana yang diperoleh melalui IPO adalah ekuitas, yang tidak memerlukan pembayaran kembali dalam bentuk pokok atau bunga.. Memperoleh Dana Segar untuk Pengembangan Perusahaan. Dana yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan proyek baru, ekspansi usaha, pelunasan utang, dan peningkatan modal kerja. Ini memberikan fleksibilitas keuangan yang signifikan bagi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.. Melepaskan Sebagian Kepemilikan Perusahaan kepada Publik. Melalui IPO, perusahaan melepaskan sebagian kepemilikannya kepada investor publik. Ini berarti pemegang saham yang ada akan berbagi kepemilikan dan kontrol perusahaan dengan investor baru. Namun, ini juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas basis pemegang sahamnya dan meningkatkan likuiditas sahamnya.. Menjadi Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek. Setelah IPO, perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek. Ini membawa berbagai manfaat, termasuk akses ke pasar modal yang lebih luas, peningkatan visibilitas dan reputasi, serta kemampuan untuk menggalang dana lebih lanjut di masa depan melalui penerbitan saham tambahan.. Saham Perusahaan Diperdagangkan dengan Mekanisme Pasar. Saham perusahaan yang telah melakukan IPO akan diperdagangkan di bursa efek dengan mekanisme pasar. Ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham perusahaan secara bebas, memberikan likuiditas bagi pemegang saham dan menciptakan nilai pasar yang transparan bagi perusahaan.. Keuntungan Initial Public Offering (IPO). Akses ke Modal yang Signifikan. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal yang signifikan dari investor publik. Ini penting untuk mendanai proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi awal yang besar.. Peningkatan Profil Perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek, perusahaan akan mendapatkan perhatian lebih dari media, analis keuangan, dan investor. Ini dapat meningkatkan profil perusahaan dan memberikan pengaruh positif terhadap reputasi dan kepercayaan investor.. Likuiditas bagi Pemegang Saham. Saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek memberikan likuiditas bagi pemegang saham. Mereka dapat membeli dan menjual saham perusahaan dengan mudah, memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan investasi.. Transparansi dan Akuntabilitas. Sebagai perusahaan terbuka, perusahaan harus mematuhi standar pelaporan dan pengungkapan yang ketat. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.. Contoh Implementasi Initial Public Offering (IPO). Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. PLN Nusantara Renewables dapat menggunakan dana yang diperoleh dari IPO untuk mendanai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau biomassa. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas portofolio energi hijau dan mendukung target keberlanjutan.. Ekspansi Usaha dan Diversifikasi. Dana IPO juga dapat digunakan untuk ekspansi usaha ke wilayah baru atau diversifikasi ke sektor lain yang terkait dengan energi. Ini membantu perusahaan

untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi risiko melalui diversifikasi.. Strategi Pendanaan pada Berbagai Tahap Pengembangan. . Gambar 4 Strategi Pendanaan pada Berbagai Tahap Pengembangan. Bagan ini menggambarkan strategi pendanaan yang diadopsi oleh PLN Nusantara Power dalam konteks pengembangan pembangkit listrik pada berbagai tahap pengembangan: Early Stage, Late Development, Construction, dan Operation. Pendekatan ini menggunakan berbagai skema pendanaan untuk mengoptimalkan pembiayaan proyek, meningkatkan efisiensi biaya, dan meminimalkan risiko. Silahkan perhatikan nomor yang tampak di gambar. Nomor tersebut menunjukkan posisi penerapan opsi pendanaan.. 1. Concessional Funding pada Early Stage. Pada tahap awal pengembangan proyek, concessional funding sangat ideal karena menawarkan biaya pendanaan yang rendah. Ini bisa berupa hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), atau pembiayaan campuran (blended-financing) yang biasanya berasal dari pemerintah, lembaga keuangan internasional (MFIs/DFIs), atau sektor publik lainnya. Karakteristik utamanya adalah suku bunga yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, serta jadwal pembayaran yang fleksibel.. Pada Level Aset/Proyek. 2. Ekuitas Sendiri pada Early Stage hingga Construction dan Operation. Ekuitas sendiri digunakan terutama pada tahap awal pengembangan proyek untuk mendukung kebutuhan modal. Dalam beberapa kasus, ekuitas juga diperlukan hingga tahap konstruksi dan operasi sebagai dukungan defisiensi kas (cash deficiency support).. 3. Project Finance/Project Bond pada Construction dan Operation. Project finance merupakan metode pembiayaan yang optimal digunakan pada tahap konstruksi dan operasi proyek. Pendanaan ini biasanya melibatkan leverage yang tinggi dengan rasio utang terhadap ekuitas hingga 80:20 dan menawarkan tenor yang panjang (>15 tahun). Pendanaan ini bisa bersifat non-recourse atau limited recourse, yang berarti pembayaran pinjaman terutama berasal dari arus kas proyek itu sendiri, bukan dari aset sponsor proyek.. 4. Skema Kemitraan (Strategic Partnership) pada Early Stage hingga Operation. Kemitraan strategis bisa memberikan nilai tambah bagi PLN-NR dalam pengembangan proyek secara keseluruhan. Melalui kemitraan ini, PLN-NR dapat berbagi risiko, serta mendapatkan transfer pengetahuan dan sumber daya tambahan dari mitra strategis.. 5. Sekuritisasi (KIK-EBA) pada Early Stage hingga Operation. Sekuritisasi dapat dipertimbangkan untuk aset yang sudah menghasilkan pendapatan dan memiliki arus kas positif. Melalui skema ini, PLN-NR dapat melakukan recycling asset, di mana penerimaan kas di muka dari penjualan piutang digunakan untuk mendanai proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada. Contoh skema ini adalah KIK-EBA untuk aset yang sudah beroperasi dan DINFRA atau RDPT untuk proyek dalam tahap pengembangan.. Pada Level Holding/Portfolio. 6. Commercial Loan, Obligasi, dan Green Bond pada Construction hingga Operation. Pada level holding atau portofolio, commercial loan, obligasi, dan green bond dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Green bond khususnya menawarkan nilai lebih dibandingkan commercial loan karena tidak memerlukan jaminan dan memiliki keunggulan reputasi di pasar modal. Obligasi juga menarik karena memberikan tambahan pool of investor dan meningkatkan citra perusahaan.. 7. Initial Public Offering (IPO) pada Early Stage hingga Operation. IPO dilakukan untuk mengumpulkan dana segar guna mendanai pengembangan proyek baru. Selain memperoleh modal baru, IPO juga memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan visibilitas dan transparansi perusahaan, serta peningkatan likuiditas saham di pasar modal.. Strategi Pendanaan sebagai Subsidiary PLN . Status PLN Nusantara Renewables (PLN-NR) sebagai anak perusahaan (subsidiary) PLN yang memiliki status "unrestricted" memberikan fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan eksternal dengan beberapa keuntungan dan keterbatasan terkait ketentuan global bond yang dipegang oleh PLN.. PLN-NR Sebagai Unrestricted Subsidiary. Pendanaan Eksternal: PLN-NR sebagai unrestricted subsidiary dibentuk untuk memperoleh pendanaan eksternal tanpa terikat ketat oleh ketentuan indenture global bond yang membatasi.. Akses Pendanaan yang Lebih Baik: Dengan status ini, PLN-NR dapat lebih leluasa mengakses pendanaan eksternal.. Investasi: Investasi oleh unrestricted subsidiary dilakukan agar tidak mengganggu kepatuhan terhadap covenant Global Bond yang dipegang oleh PLN.. Implikasi pada PLN-NR. Keterbatasan Jaminan: PLN-NR tidak dapat menggunakan jaminan dari induk (PLN) atau resource agreement untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Artinya, mereka harus mandiri dalam hal pendanaan dan tidak dapat bergantung pada dukungan langsung dari PLN.. Kebutuhan Pendapatan dan Arus Kas: PLN-NR perlu memiliki pendapatan tetap dan arus kas yang stabil dari proyek-proyek yang berjalan untuk mendukung status dan kebutuhan pendanaannya.. Status PLN-NR sebagai unrestricted subsidiary memungkinkan PLN-NR untuk mengeksplorasi opsi pendanaan ini dengan lebih fleksibel, tetapi juga menuntut kemandirian dalam hal manajemen risiko dan pendanaan tanpa bergantung pada jaminan dari PLN. Strategi ini membantu PLN-NR dalam mengoptimalkan struktur pendanaannya dan memastikan kepatuhan terhadap covenant global bond yang dipegang oleh PLN.. Berikut adalah berbagai jenis perjanjian dan ketentuan (covenants) yang terkait dengan status unrestricted subsidiary.. Parent Guarantee. PLN dan/atau PLN-NP (Nusantara Power) tidak dapat memberikan jaminan

induk perusahaan kepada seluruh anak perusahaan yang memiliki status unrestricted.. Hal ini berarti PLN-NR tidak bisa mendapatkan jaminan dari PLN untuk pendanaan, sehingga harus mencari pendanaan tanpa dukungan jaminan induk.. Non-Recourse Agreement. Seluruh anak perusahaan dengan status unrestricted tidak diperkenankan melakukan pengaturan yang menyebabkan adanya recourse kepada PLN dan/atau PLN-NP.. Artinya, PLN-NR harus menanggung risiko sendiri tanpa mengalihkan risiko tersebut kepada PLN.. Pledge Shares. Anak perusahaan dengan status restricted diperbolehkan untuk melakukan penggadaian asetnya (termasuk saham) jika diperlukan, sedangkan yang unrestricted tidak.. PLN-NR sebagai unrestricted subsidiary tidak dapat menggadaikan sahamnya untuk mendapatkan pinjaman.. Penjualan dan Pengalihan Aset. Dana dari penjualan atau pengalihan aset harus digunakan untuk tujuan grup yang restricted, seperti membayar utang ke bond holder.. PLN-NR harus memastikan penggunaan dana dari penjualan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Perhitungan Rasio Finansial Global Bond (CICR). Anak perusahaan dengan status unrestricted tidak disertakan dalam perhitungan rasio finansial Global Bond.. Ini berarti utang PLN-NR tidak mempengaruhi risiko finansial global bond PLN.. Perhitungan Rasio Finansial Lainnya (DSCR, DER, DLL). Perjanjian utang PLN lainnya tidak membedakan status unrestricted dan restricted, semua anak perusahaan PLN termasuk dalam perhitungan rasio finansial.. PLN-NR tetap harus mematuhi rasio finansial tertentu meskipun memiliki status unrestricted.. Guarantee & Support Letter. Global bond dan perjanjian utang lainnya dari PLN menjelaskan bahwa jaminan dan support letter dapat diartikan sebagai kewajiban (liability).. Jaminan atau support letter dari PLN akan dihitung sebagai kewajiban dalam laporan keuangan PLN.. . Penerapan Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Penerapan Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRK) adalah kumpulan kapasitas terintegrasi yang terdiri dari Governansi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai sasaran secara andal, mengatasi ketidakpastian dan bertindak dengan integritas. . Governansi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku, proses, dan struktur yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya, dengan tetap mempertimbangkan persyaratan kepatuhan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.. Manajemen risiko adalah kegiatan organisasi yang terarah dan terkoordinasi terkait dengan desain, implementasi, dan pemeliharaan kebijakan dan prosedur penanganan risiko untuk mengambil peluang bermanfaat bagi penciptaan dan perlindungan nilai perusahaan.. Manajemen Kepatuhan adalah pendekatan sistematis untuk mengelola kepatuhan organisasi terhadap semua persyaratan yang berlaku dengan menekankan pentingnya kepemimpinan, pelatihan, penilaian risiko kepatuhan dan kontrolnya, serta pemantauan atas efektivitas dan kinerjanya.. Dalam menjalankan tata kelola korporat, perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola tersebut sejalan dengan peraturan yang berlaku untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan baik untuk perusahaan dan pemegang saham serta mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan. Pada bab ini, akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tata kelola pengembangan pembangkit PLN NR, untuk memastikan pelaksanaan tata kelola tidak menyalahi aturan yang berlaku.. Tata kelola perusahaan yang baik mengikuti lima prinsip dasar yang dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran).. Penerapan prinsip-prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness) dalam GRK sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, mendukung keberlanjutan jangka panjang, meningkatkan daya saing, melindungi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. . Transparency (Transparansi). Prinsip transparansi menekankan pada keterbukaan informasi yang material dan relevan serta kemudahan akses terhadap informasi tersebut. Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Transparansi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dan mengawasi jalannya perusahaan dengan lebih baik. Hal ini mencakup:. Pengungkapan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan. Informasi mengenai manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan. Accountability (Akuntabilitas). Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam perusahaan. Prinsip ini memastikan bahwa:. Setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Terdapat mekanisme check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Kinerja semua organ perusahaan dapat diukur dan dipertanggung jawabkan. Pengambilan keputusan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Responsibility (Tanggung Jawab). Prinsip tanggung jawab menekankan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahap Initiation. Identifikasi Project Opportunities. Project Opportunities adalah tahap awal dalam proses pengembangan bisnis pembangkitan di mana PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) mengidentifikasi proyek-proyek potensial yang strategis dan sejalan dengan tujuan korporat. Tahap ini melibatkan pemetaan dan analisis peluang proyek untuk memastikan bahwa proyek potensial tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan ekspansi bisnis PLN NR, khususnya dalam bisnis IPP (Independent Power Producer).. Tahap Project Opportunities sangat penting karena menentukan arah dan fokus pengembangan bisnis PLN NR. Dengan mengidentifikasi proyek yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan kebutuhan pasar, PLN NR dapat memastikan investasi yang dilakukan akan memberikan hasil optimal dan mendukung tujuan pertumbuhan jangka panjang.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. BDI Database: Informasi intelijen bisnis untuk pengembangan proyek.. Proposal Stakeholder: Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan.. Pengembangan Aset PLN Nusantara Power dan PLN NR: Rencana internal pengembangan aset.. Profil Proyek: Informasi awal tentang proyek yang diidentifikasi.. Output yang Diharapkan. Daftar Proyek: Daftar proyek potensial yang dihasilkan dari pemetaan peluang, siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap berikutnya.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan jangka panjang yang memetakan kebutuhan listrik.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Memetakan Proyek-Proyek Potensial. Langkah pertama dalam identifikasi peluang proyek adalah memetakan proyek-proyek potensial yang sesuai dengan strategi dan tujuan jangka panjang PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini melibatkan:.. Analisis RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik): Mengkaji dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan listrik di berbagai wilayah dan potensi proyek baru.. Penggunaan BDI Database (Business Development Intelligence): Mengakses dan menganalisis data intelijen bisnis yang relevan untuk menemukan peluang proyek baru.. Pengumpulan Proposal Stakeholder: Mengumpulkan dan mengevaluasi usulan proyek dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas lokal.. Pengembangan Aset Internal: Mengidentifikasi rencana pengembangan aset yang sudah ada di PLN Nusantara Power dan PLN NR untuk menemukan sinergi dengan proyek baru.. Menetapkan Kriteria Longlist. Setelah proyek-proyek potensial dipetakan, langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria untuk menyusun Longlist proyek. Kriteria ini meliputi:.. Keselarasan dengan Strategi Korporat: Proyek harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis PLN NR.. Kelayakan Finansial: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang jelas dan mampu menarik investasi yang dibutuhkan.. Kesesuaian Regulasi: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang relevan.. Dampak Lingkungan dan Sosial: Proyek harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan komunitas lokal, serta harus dapat diatasi atau diminimalkan.. Menyusun Daftar Potensi Proyek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, daftar potensi proyek disusun. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Awal Proyek: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dimasukkan dalam daftar panjang.. Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek lebih lanjut, termasuk studi awal dan analisis risiko.. Diskusi Internal: Mengadakan diskusi dengan tim internal dan pakar eksternal untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang lebih luas tentang proyek-proyek potensial.. Mengembangkan Profil Proyek Lebih Rinci. Langkah terakhir adalah mengembangkan profil proyek yang lebih rinci untuk proyek-proyek yang telah masuk dalam daftar panjang. Profil proyek ini meliputi:.. Deskripsi Proyek: Gambaran umum tentang proyek, termasuk tujuan, lokasi, kapasitas, dan teknologi yang digunakan.. Analisis Kelayakan: Studi kelayakan yang lebih mendalam, termasuk analisis teknis, ekonomi, dan keuangan.. Rencana Implementasi: Rencana langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan proyek, termasuk jadwal waktu dan anggaran.. Penilaian Risiko: Identifikasi dan penilaian risiko utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, serta strategi mitigasi risiko.. Pembuatan Longlist Proyek. Longlist Proyek adalah daftar awal proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang. Longlist Proyek mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan potensi keberhasilan.. Tahap Longlist Proyek sangat penting karena menyaring proyek-proyek potensial yang paling sesuai dengan strategi jangka panjang PLN NR. Ini memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan proyek yang dipilih memiliki peluang sukses yang tinggi.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau

PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Potensi Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari tahap Project Opportunities.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai dan memprioritaskan proyek.. Output yang Diharapkan. Dokumen Longlist Proyek: Daftar proyek yang telah dievaluasi dan disetujui, siap untuk tahap seleksi lebih lanjut.. Referensi Utama. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Peraturan terkait pengembangan proyek pembangkitan. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Longlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek potensial. Kriteria ini meliputi:.. Legalitas Proyek: Proyek harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, peraturan keselamatan, dan persyaratan lisensi.. Keatraktifan Proyek: Proyek harus memiliki potensi keuntungan yang menarik, termasuk aspek teknis, ekonomis, dan finansial. Faktor-faktor seperti lokasi proyek, teknologi yang digunakan, dan skala proyek juga dipertimbangkan.. Kapabilitas Perusahaan: Proyek harus sesuai dengan kapabilitas teknis dan manajerial PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Ini mencakup kemampuan perusahaan dalam hal pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek potensial berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan:.. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi rinci tentang setiap proyek dari daftar potensi proyek yang dihasilkan dari tahap Project Opportunities.. Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif: Menilai setiap proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mencakup analisis kualitatif (misalnya, penilaian risiko) dan analisis kuantitatif (misalnya, analisis biaya-manfaat).. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan penilaian yang dilakukan. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam longlist.. Penyusunan Longlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Longlist Proyek. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan. Proyek dengan skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam longlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Longlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam longlist.. Persetujuan dan Pengesahan Longlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Longlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan:.. Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Longlist Proyek.. Pembuatan Shortlist Proyek. Setelah penyusunan Longlist Proyek, di mana proyek-proyek potensial telah diidentifikasi dan diberi skor berdasarkan kriteria awal, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi lebih lanjut untuk menghasilkan Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan evaluasi lebih rinci dan komprehensif terhadap proyek-proyek yang ada dalam Longlist.. Shortlist Proyek adalah daftar terpilih dari proyek-proyek potensial yang telah melalui proses evaluasi lebih mendalam dari Longlist Proyek. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dan potensi keberhasilan yang signifikan. Shortlist Proyek disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Daftar Longlist Proyek: Informasi proyek yang diidentifikasi dari Longlist.. Kriteria Longlist: Kriteria seleksi yang digunakan dalam tahap sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Shortlist Proyek: Daftar proyek terpilih yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk pengembangan lebih lanjut.. Referensi. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Penetapan Kriteria Seleksi. Langkah pertama dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah menetapkan kriteria seleksi yang lebih rinci dibandingkan dengan tahap Longlist. Kriteria ini meliputi:.. Status Proyek: Menilai sejauh mana proyek telah berkembang, termasuk apakah studi kelayakan telah dilakukan, apakah ada persetujuan awal, dan apakah ada komitmen dari stakeholder.. Keatraktifan Proyek: Menilai daya tarik proyek berdasarkan potensi keuntungan, skala proyek, lokasi, dan teknologi yang digunakan.. Kapabilitas Perusahaan: Menilai kemampuan teknis dan manajerial PLN NR serta partner yang terlibat dalam proyek. Ini mencakup pengalaman sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan kompetensi tim proyek.. Risiko Proyek: Mengidentifikasi dan menilai risiko terkait dengan proyek, termasuk risiko finansial, teknis,

operasional, dan lingkungan.. Biaya Proyek: Menilai biaya keseluruhan proyek dan sumber pendanaan yang tersedia. Ini mencakup analisis biaya awal, biaya operasional, dan potensi pengembalian investasi.. Evaluasi dan Skoring. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi proyek-proyek dalam Longlist berdasarkan kriteria tersebut dan memberikan skor untuk setiap proyek. Proses ini melibatkan: Pengumpulan Data Tambahan: Mengumpulkan informasi lebih rinci tentang setiap proyek yang ada dalam Longlist untuk melengkapi data yang sudah ada.. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), analisis risiko, dan analisis biaya-manfaat.. Pemberian Skor: Memberikan skor untuk setiap proyek berdasarkan hasil analisis. Skor ini akan digunakan untuk menentukan prioritas proyek dalam Shortlist.. Penyusunan Shortlist Proyek. Berdasarkan hasil evaluasi dan skoring, langkah berikutnya adalah menyusun Shortlist Proyek. Proses ini melibatkan: Penyusunan Daftar: Menyusun daftar proyek berdasarkan skor yang diberikan, dengan proyek-proyek yang memiliki skor tertinggi ditempatkan pada posisi teratas dalam Shortlist.. Dokumentasi: Menyusun dokumen Shortlist Proyek yang mencakup deskripsi rinci setiap proyek, hasil penilaian, dan skor yang diberikan. Dokumen ini juga mencakup alasan mengapa setiap proyek dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan dalam Shortlist.. Persetujuan dan Pengesahan Shortlist. Langkah terakhir dalam pembuatan Shortlist Proyek adalah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Proses ini melibatkan: Review Internal: Melakukan review internal oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan skoring telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.. Diskusi dan Penyesuaian: Mengadakan diskusi dengan tim internal untuk membahas hasil review dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan, seperti manajemen senior atau dewan direksi, untuk mengesahkan dokumen Shortlist Proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study. Penyusunan Pre-Feasibility Study (Pre-FS) adalah proses awal dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Pre-FS memberikan analisis awal tentang berbagai aspek proyek termasuk operasional, finansial, legal, dan risiko. Hasil dari Pre-FS digunakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Pengadaan Konsultan Pre-FS: Konsultan yang dipilih untuk melakukan Pre-FS.. Dokumen Terkait Proyek: Dokumen yang relevan dengan proyek yang sedang dievaluasi.. Output yang Diharapkan. Dokumen Pre-FS: Dokumen yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek, siap untuk ditinjau dan disetujui oleh manajemen.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Pengadaan dan Pemilihan Konsultan. Proses pertama dalam penyusunan Pre-FS adalah pengadaan dan pemilihan konsultan yang akan bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan awal. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Kebutuhan Konsultan: Menentukan spesifikasi dan keahlian yang diperlukan dari konsultan berdasarkan kompleksitas dan kebutuhan proyek.. Penyusunan Term of Reference (ToR): Membuat ToR yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, tujuan, metode, dan deliverables yang diharapkan dari konsultan.. Proses Pengadaan: Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, termasuk pengumuman tender, evaluasi penawaran, dan seleksi konsultan terbaik.. Penunjukan Konsultan: Menandatangani kontrak kerja dengan konsultan terpilih dan memberikan briefing awal tentang proyek.. Pengumpulan Dokumen Terkait Proyek. Langkah kedua adalah mengumpulkan semua dokumen yang relevan dengan proyek yang akan dievaluasi. Dokumen ini menjadi dasar informasi bagi konsultan untuk melakukan analisis kelayakan. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah: Identifikasi Dokumen: Menentukan jenis dokumen yang diperlukan seperti data teknis, laporan sebelumnya, rencana bisnis, regulasi, dan dokumen lain yang relevan.. Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk dari divisi terkait dalam PLN NR.. Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa semua dokumen yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan up-to-date.. Penyusunan Skema Bisnis, Kebutuhan Sumber Daya, Kebutuhan Pendanaan. Langkah ketiga adalah menyusun skema bisnis yang mencakup kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pendanaan untuk proyek. Proses ini melibatkan: Analisis Skema Bisnis: Mengidentifikasi model bisnis yang paling sesuai untuk proyek, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, dan analisis persaingan.. Kebutuhan Sumber Daya: Menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk proyek seperti tenaga kerja, teknologi, material, dan infrastruktur.. Analisis Pendanaan: Mengidentifikasi sumber pendanaan potensial dan membuat proyeksi kebutuhan dana,

termasuk analisis Return on Investment (ROI) dan cash flow projection.. Dokumentasi: Menyusun hasil analisis dalam bentuk dokumen yang sistematis dan mudah dipahami.. Penyusunan Dokumen Pre-FS. Langkah terakhir adalah penyusunan dokumen Pre-FS yang berisi analisis awal tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah:.. Analisis Kelayakan Operasional: Menilai aspek teknis dan operasional proyek termasuk teknologi yang akan digunakan, lokasi proyek, dan kelayakan teknis lainnya.. Analisis Kelayakan Finansial: Menilai aspek finansial proyek termasuk biaya proyek, proyeksi pendapatan, analisis risiko finansial, dan potensi keuntungan.. Analisis Kelayakan Legal: Menilai kepatuhan proyek terhadap regulasi dan hukum yang berlaku termasuk perizinan dan kepatuhan lingkungan.. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi proyek dan strategi mitigasi risiko.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dalam bentuk laporan Pre-FS yang lengkap dan komprehensif.. Review dan Persetujuan: Mengajukan laporan Pre-FS kepada manajemen untuk ditinjau dan disetujui.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Project. Dokumen Manajemen Risiko (DMR) Project adalah dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek pengembangan pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR). DMR bertujuan untuk memastikan bahwa semua risiko potensial telah diidentifikasi dan diantisipasi, serta strategi mitigasi yang tepat telah disiapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Feasibility Study: Dokumen studi kelayakan yang memberikan informasi detail tentang proyek.. Peraturan Internal PLN NR: Kebijakan dan pedoman manajemen risiko internal.. Peraturan Eksternal: Regulasi dan peraturan eksternal yang berlaku.. Output yang Diharapkan. Dokumen Manajemen Risiko Proyek: Dokumen komprehensif yang mencakup identifikasi, analisis, penilaian, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek pengembangan pembangkit listrik.. Referensi Utama. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan manajemen risiko proyek.. Profil Risiko Korporat: Profil risiko yang telah disusun sebelumnya untuk memahami konteks risiko yang lebih luas.. Proses dan Langkah-langkah. Menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Langkah pertama dalam penyusunan Dokumen Manajemen Risiko adalah menyusun Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Finansial (KKF). Proses ini melibatkan:.. Kajian Kelayakan Operasional (KKO):.. Aspek Ekonomi: Evaluasi dampak ekonomi proyek pada komunitas dan perekonomian secara keseluruhan.. Sistem Kelistrikan: Penilaian kesesuaian proyek dengan sistem kelistrikan yang ada.. Lokasi dan Sosial: Analisis lokasi proyek termasuk dampak sosial dan ketersediaan infrastruktur pendukung.. Transmisi: Kesesuaian proyek dengan jaringan transmisi yang ada dan rencana pengembangannya.. Teknologi Pembangkit: Evaluasi teknologi pembangkit yang akan digunakan, termasuk inovasi terbaru dan keandalannya.. Energi Primer: Ketersediaan dan keamanan pasokan energi primer.. Kajian Kelayakan Finansial (KKF):.. Biaya Proyek: Estimasi total biaya proyek dari awal hingga selesai.. Project Financing/Financial Model: Pengembangan model keuangan proyek termasuk sumber pendanaan.. Makro Ekonomi: Evaluasi kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi proyek.. Tarif PPA: Analisis tarif Power Purchase Agreement (PPA) yang disepakati.. Evaluasi Kelayakan Finansial: Menggunakan indikator seperti Return on Equity (ROE), Net Present Value (NPV), dan Weighted Average Cost of Capital (WACC).. Melakukan Analisis dan Penilaian Risiko. Langkah kedua adalah melakukan analisis dan penilaian risiko terhadap proyek. Proses ini melibatkan:.. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek.. Kategorisasi Risiko: Mengelompokkan risiko ke dalam kategori seperti risiko operasional, finansial, legal, dan lingkungan.. Penilaian Risiko: Menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap risiko menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.. Prioritas Risiko: Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap proyek.. Mengembangkan Strategi Mitigasi. Langkah ketiga adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Proses ini melibatkan:.. Strategi Pencegahan: Mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko.. Strategi Pengurangan Dampak: Menyusun rencana untuk mengurangi dampak jika risiko terjadi.. Rencana Tanggap Darurat: Menyusun prosedur tanggap darurat untuk menghadapi risiko yang telah terjadi.. Alokasi Tanggung Jawab: Menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk setiap strategi mitigasi yang dikembangkan.. Menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko. Langkah terakhir adalah menyusun dan menghasilkan Dokumen Manajemen Risiko Proyek. Dokumen ini mencakup semua hasil analisis dan strategi mitigasi yang telah disusun sebelumnya. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Laporan: Menyusun semua hasil analisis dan strategi mitigasi dalam bentuk laporan yang komprehensif dan mudah dipahami.. Review dan Validasi: Melakukan review internal untuk memastikan semua informasi akurat dan valid.. Pengesahan: Mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari manajemen untuk Dokumen Manajemen Risiko Proyek..

Pengidentifikasian Partner. Identifikasi Partner adalah proses sistematis untuk menentukan mitra strategis yang akan bekerja sama dengan PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun daftar mitra potensial berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa PLN NR bekerja dengan mitra yang dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Stakeholder Proposal:** Usulan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap mitra..
- Partner Proposal:** Usulan dari mitra potensial yang menyatakan minat dan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek..
- Business Development Intelligence (BDI):** Informasi intelijen bisnis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi mitra potensial..
- Expression of Interest (EOI):** Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek..

Output yang Diharapkan.

- List Calon Partner:** Daftar mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap Seleksi Longlist dan Shortlist..

Referensi Utama.

Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner.

Panduan Pemilihan Proyek dan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan proyek dan mitra..

Regulasi Terkait: Peraturan dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis..

Proses dan Langkah-langkah.

Identifikasi Kebutuhan dan Kriteria Proyek.

Langkah pertama dalam pengidentifikasian partner adalah menentukan kebutuhan proyek dan kriteria pemilihan mitra yang sesuai. Proses ini melibatkan:.

- Menentukan Kebutuhan Proyek:.** Jenis Proyek: Identifikasi jenis pembangkit listrik yang akan dikembangkan (misalnya PLTU, PLTA, PLTS)..
- Teknologi:** Kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk proyek..
- Sumber Daya:** Kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan infrastruktur..
- Jangka Waktu:** Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek..
- Menetapkan Kriteria Pemilihan Mitra:.** Kompetensi Teknis: Kemampuan teknis mitra dalam mengelola proyek serupa..
- Kapabilitas Finansial:** Kekuatan finansial dan kemampuan pendanaan mitra..
- Reputasi dan Rekam Jejak:** Reputasi dan pengalaman mitra dalam proyek sejenis..
- Keselarasan Strategis:** Keselarasan visi dan misi mitra dengan tujuan PLN NR..
- Kepatuhan Hukum:** Kepatuhan mitra terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku..

Pemetaan Partner Potensial.

Setelah kebutuhan dan kriteria proyek ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memetakan mitra potensial yang mungkin cocok untuk proyek. Proses ini melibatkan:.

- Riset Pasar:.** Melakukan riset untuk mengidentifikasi perusahaan atau entitas yang memiliki kemampuan dan minat dalam proyek..
- Menggunakan data intelijen bisnis (BDI) untuk mengumpulkan informasi tentang calon mitra potensial..**
- Konsultasi dengan Stakeholder:.** Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan usulan dan masukan terkait mitra potensial..
- Memanfaatkan proposal dari stakeholder dan calon mitra untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai..**

Penyusunan Daftar Awal:.

Menyusun daftar awal mitra potensial berdasarkan hasil riset dan konsultasi..

Identifikasi Lebih Detail dan Analisis Awal.

Setelah daftar awal mitra potensial disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi lebih detail dan analisis awal terhadap calon mitra tersebut. Proses ini melibatkan:.

- Pengumpulan Informasi Tambahan:.** Mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang setiap calon mitra, termasuk profil perusahaan, portofolio proyek, dan laporan keuangan..
- Evaluasi Awal:.** Melakukan analisis awal untuk mengevaluasi kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek dan kriteria yang telah ditetapkan..
- Menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria awal..**

Penyusunan Daftar Pendek Awal:.

Menyusun daftar pendek awal mitra potensial yang memenuhi kriteria awal dan layak untuk dievaluasi lebih lanjut..

Penyusunan dan Distribusi Request for Proposal (RFP).

Langkah terakhir dalam pengidentifikasian partner adalah menyusun dan mendistribusikan Request for Proposal (RFP) kepada calon mitra potensial. Proses ini melibatkan:.

- Penyusunan RFP:.** Menyusun dokumen RFP yang mendetail, mencakup tujuan proyek, kebutuhan spesifik, kriteria pemilihan, dan timeline..
- Menyertakan informasi tentang proyek, termasuk aspek teknis, finansial, legal, dan risiko yang perlu dipertimbangkan oleh calon mitra..**

Distribusi RFP:.

- Mengirimkan RFP kepada calon mitra potensial yang telah diidentifikasi..
- Mengatur mekanisme penerimaan dan evaluasi proposal dari calon mitra..

Penerimaan Proposal:.

- Mengumpulkan proposal dari calon mitra yang tertarik dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut dalam tahap seleksi Longlist dan Shortlist..

Pembuatan Longlist Partner.

Seleksi Longlist Partner adalah proses evaluasi perusahaan potensial untuk menentukan daftar awal mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian calon mitra berdasarkan kriteria tertentu sehingga hanya perusahaan yang memenuhi standar tinggi yang dapat melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power..

Input yang Diperlukan.

- Daftar Potensi Partner:** Informasi calon mitra yang diidentifikasi dari tahap Partner Identification..
- Kriteria Longlist Partner:** Kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai calon mitra..

Output

yang Diharapkan. Dokumen Longlist Partner: Daftar awal mitra strategis yang telah disahkan dan disetujui, siap untuk evaluasi lebih lanjut.. Referensi Utama. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pemilihan mitra strategis.. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner: Pedoman terkait pemilihan proyek dan mitra.. Proses dan Langkah-langkah. Menghimpun Sumber Informasi. Langkah pertama dalam seleksi Longlist adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang calon mitra potensial. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:. Expression of Interest (EOI): Pernyataan minat dari calon mitra yang menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja sama dalam proyek.. Pendaftaran Umum: Informasi yang diperoleh dari pendaftaran umum calon mitra yang berminat dalam proyek.. Data Peserta Terseleksi (DPT) oleh PLN Group: Daftar peserta yang telah terseleksi oleh PLN Group berdasarkan kriteria tertentu.. Business Development Intelligence (BDI) (opsional): Informasi intelijen bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi calon mitra potensial berdasarkan data pasar dan analisis kompetitif.. Meminta Masukan/Pertimbangan dari PLN Group. Setelah menghimpun informasi, langkah berikutnya adalah meminta masukan dan pertimbangan dari PLN Group. Ini melibatkan:. Konsultasi dengan Divisi Terkait: Berkoordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam PLN Group untuk mendapatkan wawasan dan masukan mengenai calon mitra potensial.. Evaluasi Awal: Melakukan evaluasi awal berdasarkan masukan dari PLN Group untuk menyaring calon mitra yang tidak memenuhi kriteria dasar.. Melakukan Seleksi Berdasarkan Kriteria. Setelah mendapatkan masukan dari PLN Group, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan:. Penetapan Kriteria Seleksi:. Capital: Kondisi keuangan positif dan stabilitas finansial calon mitra.. Competence: Sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh calon mitra yang melengkapi kebutuhan proyek.. Compatibility: Budaya dan etika bisnis yang selaras dengan PLN NR.. Circumstances: Tidak memiliki isu legal dan masalah lain yang dapat menghambat kerja sama.. Evaluasi dan Skoring:. Melakukan penilaian terhadap calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.. Memberikan skor untuk setiap kriteria guna menentukan tingkat kesesuaian calon mitra dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Longlist:. Menyusun daftar awal mitra strategis berdasarkan hasil evaluasi dan skoring.. Daftar ini mencakup mitra yang memenuhi standar tinggi dan memiliki potensi untuk melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.. Pengesahan dan Persetujuan Longlist. Langkah terakhir dalam seleksi Longlist adalah pengesahan dan persetujuan daftar mitra strategis oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:. Penyusunan Dokumen Longlist:. Menyusun dokumen Longlist yang mencakup daftar calon mitra yang telah lolos seleksi awal.. Dokumen ini harus memuat informasi detail tentang setiap mitra, termasuk skor evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:. Mengajukan dokumen Longlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:. Mendistribusikan dokumen Longlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Pembuatan Shortlist Partner. Seleksi Shortlist Partner adalah proses evaluasi lebih lanjut untuk menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik. Proses ini melibatkan penilaian kapabilitas strategis baik dari PLN Nusantara Renewables (PLN NR) maupun calon mitra, menggunakan metode seleksi yang komprehensif untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kemampuan dan kesesuaian yang optimal untuk keberhasilan proyek. . Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Longlist Partner: Informasi calon mitra yang lolos tahap longlist.. Kapabilitas Strategis PJB dan Partner: Data mengenai kapabilitas strategis baik dari PLN NR maupun calon mitra.. Output yang Diharapkan. Kapabilitas Strategis PLN NR: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis yang dimiliki oleh PLN NR.. Kapabilitas Strategis Partner: Dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis calon mitra.. Hasil Kajian Shortlist Partner: Daftar calon mitra yang telah diseleksi berdasarkan kapabilitas strategis dan siap untuk evaluasi akhir.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Pemilihan Metode Penyusunan Shortlist. Langkah pertama dalam proses ini adalah memilih metode yang tepat untuk menyusun shortlist. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik mitra potensial. Beberapa metode yang dapat digunakan meliputi:. Desk Study: Analisis mendalam terhadap data dan dokumen yang ada untuk mengevaluasi kapabilitas mitra potensial.. Due Diligence: Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang dan kapabilitas mitra potensial untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan.. Focused Selection: Memfokuskan pada sejumlah kecil calon mitra yang telah diidentifikasi sebagai yang paling potensial, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap mereka.. Roadshow: Mengadakan presentasi dan diskusi dengan calon mitra potensial untuk mengevaluasi kapabilitas dan

kesesuaian mereka.. Pemilihan Langsung: Memilih mitra potensial langsung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melalui proses seleksi yang panjang. . Penunjukan Langsung: Menunjuk mitra potensial secara langsung berdasarkan kepercayaan dan rekam jejak yang telah terbukti.. Penetapan Kriteria Seleksi Shortlist. Langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria seleksi yang akan digunakan untuk menilai calon mitra. Kriteria ini harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting seperti:.. Kapabilitas Teknis: Pengalaman dan keahlian teknis calon mitra dalam mengelola proyek serupa.. Kapabilitas Finansial: Stabilitas dan kemampuan finansial calon mitra untuk mendukung proyek.. Kesesuaian Strategis: Sejauh mana visi dan misi calon mitra selaras dengan PLN NR.. Reputasi dan Kredibilitas: Rekam jejak dan reputasi calon mitra dalam industri terkait.. Risiko dan Kepatuhan: Potensi risiko yang terkait dengan calon mitra dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.. Penyusunan Shortlist Partner. Setelah menetapkan kriteria seleksi, langkah selanjutnya adalah menyusun shortlist mitra berdasarkan hasil evaluasi. Proses ini melibatkan:.. Evaluasi Kapabilitas Strategis:.. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kapabilitas strategis PLN NR dan calon mitra.. Menyusun dokumen yang menjelaskan kapabilitas strategis masing-masing pihak.. Skoring dan Peringkat:.. Memberikan skor untuk setiap calon mitra berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan.. Menyusun peringkat calon mitra berdasarkan skor yang diperoleh.. Review dan Validasi:.. Melakukan review internal terhadap hasil evaluasi dan peringkat calon mitra.. Memastikan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan objektif.. Pengesahan dan Persetujuan Shortlist. Langkah terakhir dalam proses ini adalah pengesahan dan persetujuan daftar shortlist mitra oleh pihak terkait dalam PLN NR. Proses ini melibatkan:.. Penyusunan Dokumen Shortlist:.. Menyusun dokumen resmi yang mencakup daftar calon mitra yang telah diseleksi beserta hasil evaluasi dan justifikasi pemilihannya.. Pengesahan oleh Manajemen:.. Mengajukan dokumen shortlist untuk disahkan oleh manajemen PLN NR.. Manajemen akan meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap daftar calon mitra yang telah disusun.. Distribusi dan Komunikasi:.. Mendistribusikan dokumen shortlist yang telah disahkan kepada divisi-divisi terkait dalam PLN NR.. Mengomunikasikan hasil seleksi kepada calon mitra yang terpilih dan menginformasikan langkah selanjutnya dalam proses kerja sama.. Penentuan Partner Terpilih. Partner Terpilih adalah hasil akhir dari proses seleksi mitra strategis yang telah melalui tahap identifikasi, longlist, dan shortlist. Pada tahap ini, PLN Nusantara Renewables (PLN NR) menentukan mitra strategis yang akan diajak bekerja sama dalam proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif. Proses ini memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kapabilitas dan kesesuaian yang optimal untuk mendukung keberhasilan proyek.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Shortlist Partner: Informasi dan hasil evaluasi dari tahap seleksi shortlist yang mencakup profil detail calon mitra potensial.. Proposal Stakeholder : Khusus untuk partner yang mengajukan proyek ke PLN NR.. Output yang Diharapkan. Kajian Partnership: Dokumen yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas dan kesesuaian calon mitra dengan PLN NR.. Usulan Partner Terpilih: Laporan yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan dan disetujui oleh Direksi PLN NR.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Akhir. Langkah pertama dalam penentuan partner terpilih adalah melakukan evaluasi akhir terhadap calon mitra yang telah masuk dalam shortlist atau calon mitra yang mengajukan proyek ke PLN NR. Dalam kasus pengajuan proyek oleh calon mitra, maka calon mitra bersangkutan melakukan pengajuan proyek ke PLN NR untuk selanjutnya dilakukan Due Dilligence sebagaimana tertuang dalam Pedoman pemilihan partner dan proyek.. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kapabilitas dan kesesuaian calon mitra telah dianalisis secara mendalam dan komprehensif.. Verifikasi Data:.. Memeriksa kembali semua data dan informasi yang telah dikumpulkan tentang calon mitra selama proses seleksi.. Melakukan verifikasi ulang terhadap kapabilitas teknis, finansial, dan legal calon mitra.. Wawancara dan Presentasi:.. Mengundang calon mitra untuk melakukan presentasi final dan wawancara dengan tim evaluasi PLN NR.. Menilai kemampuan calon mitra dalam menjawab pertanyaan kritis dan memberikan solusi untuk potensi tantangan proyek.. Analisis Risiko:.. Melakukan analisis risiko lebih lanjut untuk menilai potensi risiko yang mungkin timbul dari kerjasama dengan calon mitra.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih rinci berdasarkan temuan analisis.. Penyusunan Usulan Partner Terpilih. Setelah evaluasi akhir dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun usulan partner terpilih. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan semua hasil evaluasi menjadi laporan yang komprehensif.. Pengumpulan Hasil Evaluasi:.. Mengumpulkan semua hasil evaluasi dari tahap-tahap sebelumnya, termasuk evaluasi akhir.. Mengompilasi data dan informasi yang relevan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami.. Penyusunan Laporan Analisis Partnership:.. Menyusun laporan yang berisi analisis komprehensif tentang kapabilitas, kesesuaian, dan risiko calon mitra.. Menyertakan rekomendasi dan justifikasi untuk pemilihan

calon mitra terpilih.. Penulisan Usulan Partner Terpilih.. Menulis usulan resmi yang mengajukan calon mitra terpilih untuk disahkan oleh Direksi PLN NR.. Menyertakan semua dokumen pendukung dan hasil evaluasi dalam usulan tersebut.. Pengesahan dan Persetujuan. Langkah terakhir adalah mendapatkan pengesahan dan persetujuan resmi dari pihak terkait dalam PLN NR untuk calon mitra yang terpilih. Proses ini melibatkan beberapa tahap persetujuan internal.. Pengajuan Usulan kepada Direksi.. Mengajukan usulan partner terpilih kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan disetujui.. Melakukan presentasi singkat jika diperlukan untuk menjelaskan alasan dan justifikasi pemilihan calon mitra.. Pengesahan oleh Direksi.. Direksi meninjau usulan dan melakukan diskusi untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan matang.. Direksi memberikan pengesahan resmi terhadap calon mitra terpilih.. Persetujuan Akhir.. Setelah pengesahan oleh Direksi, usulan partner terpilih diajukan untuk persetujuan akhir oleh pemangku kepentingan terkait dalam PLN NR.. Setelah mendapatkan persetujuan akhir, calon mitra terpilih diumumkan secara resmi dan proses kerjasama dapat dimulai.. Permohonan Persetujuan RUPS Partner. Permohonan Persetujuan RUPS Partner adalah proses formal untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pemilihan mitra strategis yang telah dipilih oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didukung oleh seluruh pemangku kepentingan utama dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Usulan dan Kajian Partner Terpilih: Informasi dan hasil evaluasi dari proses pemilihan partner terpilih.. Dokumen Manajemen Risiko Proyek dan Partner: Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Financial Model (termasuk Remunerasi): Proyeksi finansial dan struktur remunerasi yang diusulkan.. Output yang Diharapkan. Persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, RUPS: Persetujuan resmi dari organ perseroan untuk melanjutkan proyek dengan mitra terpilih.. Partner Terpilih: Pengesahan mitra strategis yang akan bekerja sama dalam proyek.. Referensi Utama. Pedoman Pemilihan Proyek dan Partner. Juklak Pemilihan Partner: Petunjuk pelaksanaan pemilihan mitra.. Anggaran Dasar dan Board Manual PLN NR: Dokumen yang mencakup ketentuan dan prosedur terkait tata kelola perusahaan.. Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Penyusunan DMR.. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (DMR) yang mencakup analisis risiko terkait proyek dan mitra.. Memastikan DMR mencakup semua aspek risiko potensial dan strategi mitigasinya.. Penyampaian DMR.. Mengajukan DMR kepada Direksi PLN NR untuk ditinjau dan mendapatkan persetujuan.. Melakukan presentasi jika diperlukan untuk menjelaskan rincian dan pentingnya DMR dalam konteks pemilihan mitra.. Review dan Persetujuan Direksi.. Direksi meninjau DMR untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah direncanakan.. Direksi memberikan persetujuan atau memberikan masukan untuk perbaikan DMR.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Menyusun Keputusan Rapat Direksi.. Menyusun draf keputusan rapat Direksi yang mencakup persetujuan terhadap pemilihan mitra strategis.. Memastikan draf keputusan mencakup semua detail penting, termasuk hasil evaluasi dan justifikasi pemilihan mitra.. Penyusunan Pakta Integritas.. Menyusun pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua pihak terkait sebagai bentuk komitmen terhadap keputusan yang diambil.. Pakta integritas mencakup komitmen untuk menjalankan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.. Rapat Direksi.. Mengadakan rapat Direksi untuk membahas dan mengesahkan keputusan serta pakta integritas.. Semua anggota Direksi menandatangani keputusan rapat dan pakta integritas.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Penyampaian Keputusan Rapat Direksi.. Mengirimkan keputusan rapat Direksi dan pakta integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tinjauan dan tanggapan.. Permintaan Tanggapan Tertulis.. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pemilihan mitra strategis.. Mengatur pertemuan atau diskusi jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran Dewan Komisaris.. Review Dewan Komisaris.. Dewan Komisaris meninjau keputusan rapat Direksi dan memberikan tanggapan tertulis.. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Penyampaian Keputusan kepada Pemegang Saham.. Mengajukan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. Persiapan RUPS.. Menyusun agenda RUPS yang mencakup pembahasan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan semua dokumen pendukung, termasuk DMR, keputusan rapat Direksi, dan tanggapan Dewan Komisaris.. Pelaksanaan RUPS.. Mengadakan RUPS untuk membahas dan mengesahkan pemilihan mitra strategis.. Menyediakan presentasi dan jawaban atas pertanyaan pemegang saham terkait pemilihan mitra.. Persetujuan RUPS.. Pemegang saham memberikan persetujuan resmi terhadap pemilihan mitra strategis.. Keputusan RUPS didokumentasikan dan

ditandatangani oleh semua pihak terkait.. Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama adalah proses formal untuk merumuskan, membahas, dan menandatangani dokumen perjanjian antara PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dan mitra strategis yang telah dipilih. Proses ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memastikan bahwa kerjasama yang terjalin mendukung keberhasilan proyek investasi pembangkit listrik.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN atau PLN Nusantara Power. PLN NR bertindak sebagai Support.. Input yang Diperlukan. Persetujuan RUPS PLN NR atas Proyek dan Partner Terpilih: Dokumen persetujuan dari PLN NR yang menyatakan pemilihan proyek dan mitra strategis.. Draft Perjanjian Kerjasama: Draft awal perjanjian kerjasama yang disusun berdasarkan informasi yang relevan.. Output yang Diharapkan. Project Development Agreement atau Consortium Agreement atau Memorandum of Understanding atau Head of Agreement: Dokumen-dokumen perjanjian kerjasama yang mencakup berbagai aspek kerjasama proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama dan Konsultasi Terkait. Pengumpulan Informasi:.. Mengumpulkan semua informasi yang relevan dari tahap sebelumnya, termasuk hasil negosiasi, persetujuan RUPS, dan kajian mitra.. Mengkaji ulang dokumen terkait untuk memastikan semua aspek kerjasama telah dipertimbangkan.. Penyusunan Draft Awal:.. Menyusun draft awal perjanjian kerjasama berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melibatkan tim hukum dan konsultan untuk memastikan bahwa draft tersebut mencakup semua aspek legal dan komersial.. Konsultasi Internal:.. Mengadakan konsultasi internal dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terhadap draft awal.. Melakukan revisi draft berdasarkan masukan yang diterima.. Pembahasan dan Negosiasi Perjanjian Kerjasama dengan Partner. Penjadwalan Pertemuan:.. Menjadwalkan pertemuan dengan mitra strategis untuk membahas draft perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan hadir dalam pertemuan tersebut.. Pembahasan Draft:.. Membahas draft perjanjian kerjasama secara rinci, memastikan bahwa semua hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat diterima.. Mendiskusikan dan menyelesaikan setiap isu atau ketidaksepakatan yang muncul selama pembahasan.. Negosiasi:.. Melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai semua ketentuan dalam perjanjian.. Memastikan bahwa hasil negosiasi tercermin dalam draft perjanjian yang diperbarui.. Revisi Draft:.. Melakukan revisi draft perjanjian kerjasama berdasarkan hasil negosiasi.. Mengirimkan draft yang telah direvisi kepada mitra untuk peninjauan akhir.. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Persiapan Penandatanganan:.. Menyelesaikan semua persiapan administrasi dan legal untuk penandatanganan perjanjian kerjasama.. Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan diverifikasi.. Penandatanganan:.. Mengadakan acara penandatanganan resmi di hadapan para pemangku kepentingan.. Menandatangani perjanjian kerjasama oleh perwakilan resmi dari PLN NR dan mitra strategis.. Distribusi Dokumen:.. Mendokumentasikan dan mendistribusikan salinan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada semua pihak terkait.. Mengarsipkan dokumen asli sebagai catatan resmi perusahaan.. Tahap Development. Update Feasibility Study. Update Feasibility Study atau kajian tambahan (supplementary studies), jika diperlukan, adalah proses untuk memperbarui studi kelayakan proyek investasi pembangkit listrik berdasarkan perubahan atau perkembangan baru yang terjadi sejak penyusunan awal, terutama jika terjadi perubahan yang bersifat mendasar. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan didasarkan pada informasi terbaru.. Proses ini dilakukan hanya jika diperlukan, termasuk dalam kasus di mana studi sebelumnya masih dalam bentuk Pre-FS dan perlu diubah menjadi FS. Jika studi sebelumnya sudah dalam bentuk FS, maka cukup dilakukan kajian tambahan.. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh PLN NR untuk proyek yang bersifat Non Penugasan. Pada Proyek Penugasan, tahapan ini dilakukan oleh PLN Nusantara Power.. Input yang Diperlukan. Perjanjian Kerjasama: Informasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah disusun sebelumnya.. Output yang Diharapkan. Dokumen Update Feasibility Study: Dokumen yang mencakup, namun tidak sebatas pada, kajian kelayakan operasional, finansial, dan analisa risiko yang telah diperbarui sesuai dengan perubahan terbaru.. Referensi Utama. Pre-FS: Dokumen Pre-Feasibility Study yang telah dibuat di Tahap Initiation. RUPTL: Dokumen perencanaan penyediaan listrik nasional.. RJPP: Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Peraturan Terkait: Regulasi dan kebijakan yang relevan dengan pengembangan proyek pembangkitan.. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Awal. Langkah pertama dalam pembaruan Feasibility Study adalah melakukan evaluasi awal terhadap dokumen yang ada dan informasi terbaru. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan area mana yang memerlukan pembaruan atau kajian tambahan.. A. Analisis Dokumen:.. Memeriksa Pre-FS dan mengidentifikasi area yang perlu diperbarui atau ditambahkan.. Mengkaji Perjanjian Kerjasama untuk memahami implikasi terhadap studi kelayakan.. B. Identifikasi Perubahan:.. Mengidentifikasi perubahan atau perkembangan baru yang

mempengaruhi proyek.. Menyusun daftar kebutuhan informasi tambahan atau kajian mendalam.. Pengumpulan Data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperbarui Feasibility Study. Ini termasuk data teknis, finansial, dan operasional yang relevan.. A. Data Teknis:. Mengumpulkan data teknis terbaru terkait teknologi pembangkit, kondisi lokasi, dan persyaratan operasional.. Meninjau data lingkungan dan regulasi terbaru.. B. Data Finansial:. Mengumpulkan data biaya terbaru, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain.. Mengkaji data keuangan terkait perubahan kondisi pasar dan asumsi finansial.. Analisis dan Pembaruan Studi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan memperbarui Feasibility Study berdasarkan data dan informasi terbaru.. A. Analisis Teknis:. Melakukan analisis teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi dan desain proyek masih sesuai dan optimal.. Mengidentifikasi potensi masalah teknis dan menyusun strategi mitigasi.. B. Analisis Finansial:. Mengkaji ulang proyeksi keuangan dan melakukan analisis biaya-manfaat.. Menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan asumsi terbaru.. C. Analisis Risiko:. Mengidentifikasi risiko baru atau yang berubah sejak studi awal.. Menyusun strategi mitigasi risiko yang komprehensif.. Penyusunan Dokumen Update Feasibility Study. Langkah terakhir adalah menyusun dokumen Update Feasibility Study yang mencakup semua hasil analisis dan kajian tambahan.. A. Penyusunan Dokumen:. Menyusun laporan yang komprehensif dan terstruktur, mencakup semua bagian studi kelayakan yang diperbarui.. Memastikan bahwa dokumen mencerminkan perubahan terbaru dan memberikan rekomendasi yang jelas.. B. Review dan Validasi:. Melakukan review internal untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen.. Meminta tinjauan eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan.. C. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan dokumen Update Feasibility Study untuk disetujui oleh pihak terkait.. Mengkomunikasikan hasil pembaruan kepada semua pemangku kepentingan proyek.. Penerbitan Lol Pengadaan. Penerbitan Letter of Intent (LoI) Pengadaan adalah proses formal yang dilakukan setelah penyusunan Feasibility Study (FS) untuk mengonfirmasi kesiapan dan kelayakan proyek. Proposal ini menyatakan bahwa proyek siap dikembangkan dan telah memenuhi semua aspek kelayakan. LoI merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan dan komitmen untuk membeli energi listrik dari proyek yang diusulkan dengan bilangan tarif sesuai yang diajukan.. Konteksnya adalah di saat PLN NR sudah mendapatkan timeline atau waktu yang diberikan oleh PLN untuk mengirimkan proposal (sesuai permintaan PLN). Setelah didatarkannya informasi dari PLN terkait undangan penyampaian proposal proyek, PLN NP (untuk skema Penugasan) bersama PLN NR secara bersama melakukan submission proposal atas draft proposal yang sebelumnya telah disusun bersama dengan partner. Lingkup proposal ini meliputi aspek legal, teknis, komersial.. Dari proposal yang diterima, PLN melakukan proses klarifikasi proposal serta negosiasi tarif listrik. Setelah PLN menyepakati proposal bersangkutan, maka dilakukanlah penandatanganan Berita Acara negosiasi Tarif yang akan diterbitkan oleh PLN. Dengan penandatanganan Berita Acara, PLN akan menerbitkan Letter of intent (LOI) atas proyek beserta tarif yang disepakati dan ketentuan selanjutnya mengenai tindak lanjut proyek di dalam dokumen LOI.. Input yang Diperlukan. FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis kelayakan proyek.. RFP/KAK (Request for Proposal/Kerangka Acuan Kerja): Dokumen yang menjelaskan detail kebutuhan dan persyaratan proyek.. Dokumen Draft Proposal: Draft awal proposal yang disusun berdasarkan FS dan KAK/TOR dari PLN.. Dokumen teknis, legal, dan lainnya yang diperlukan. Output yang Diharapkan. Dokumen Proposal: Proposal akhir yang mencakup semua komponen dokumen proposal yang tertuang dalam KAK/TOR dari PLN.. Tanda Terima Proposal dari PLN: Konfirmasi penerimaan proposal oleh PLN.. BA Negosiasi Tarif: Berita acara hasil dari negosiasi tarif yang diterbitkan oleh PLN.. Issued Lol: Letter of Intent yang diterbitkan oleh PLN sebagai tanda kesediaan untuk membeli energi listrik dari proyek sesuai dengan tarif dan komponen komersial lainnya yang disepakati dan tertulis di Lol tersebut.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Proposal dan Validasinya. Langkah pertama dalam proses penerbitan Lol adalah menyusun proposal yang komprehensif dan memastikan bahwa semua komponen proposal telah divalidasi.. A. Penyusunan Proposal:. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan, termasuk FS, RFP/KAK, dan dokumen teknis serta legal.. Menyusun proposal berdasarkan pedoman dan persyaratan yang ditetapkan dalam KAK/TOR dari PLN.. B. Validasi Internal:. Melakukan review internal untuk memastikan bahwa proposal memenuhi semua persyaratan teknis, legal, dan komersial.. Memastikan bahwa semua data dan informasi yang disertakan dalam proposal akurat dan up-to-date.. C. Validasi Eksternal:. Meminta review eksternal dari konsultan atau ahli independen jika diperlukan untuk memastikan validitas proposal.. Melakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan masukan dari review eksternal.. Penandatanganan dan Penyampaian Proposal. Setelah proposal disusun dan divalidasi, langkah berikutnya adalah penandatanganan dan penyampaian proposal kepada PLN.. A. Penandatanganan Proposal:. Mengumpulkan tanda tangan dari pihak yang berwenang di JVC untuk menyetujui dan mengesahkan proposal.. Menyusun dokumen pendukung yang diperlukan untuk

penyampaian proposal.. B. Penyampaian Proposal:. Mengirimkan proposal kepada PLN sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.. Memastikan bahwa PLN menerima proposal dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan.. Pembahasan Proposal dan Negosiasi. Setelah proposal diterima oleh PLN, langkah berikutnya adalah pembahasan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.. A. Pembahasan Proposal:. Mengatur pertemuan dengan PLN untuk membahas isi proposal secara mendetail.. Menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi yang diperlukan selama pembahasan.. B. Negosiasi:. Melakukan negosiasi mengenai tarif, syarat komersial, dan aspek teknis lainnya yang tertuang dalam proposal.. Mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua persyaratan telah disepakati.. Penerbitan Letter of Intent (LoI). Setelah pembahasan dan negosiasi selesai, langkah terakhir adalah penerbitan Letter of Intent (LoI) oleh PLN.. A. Persiapan Dokumen LoI:. Menyusun draft LoI yang mencakup semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi.. Memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan tertulis dengan jelas dan lengkap dalam LoI.. B. Review dan Finalisasi:. Melakukan review internal terhadap draft LoI untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan sesuai dengan kesepakatan.. Meminta persetujuan akhir dari pihak berwenang di PLN sebelum penerbitan LoI.. C. Penerbitan LoI:. Menerbitkan LoI dan menyampaikannya kepada JVC sebagai tanda kesediaan PLN untuk membeli energi listrik dari proyek.. Mendokumentasikan dan menyimpan salinan LoI serta memastikan bahwa semua pihak terkait menerima salinan dokumen tersebut.. Permohonan RUPS untuk Pendirian JVC, Setoran Modal Awal JVC, Tambahan Modal Disetor, Penunjukan Wakil. Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses penting dalam aksi korporasi untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam pendirian Joint Venture Company (JVC), setoran modal awal JVC, Tambahan Modal Disetor (TMD), dan Penunjukan Wakil. Proses ini memastikan semua aspek pendanaan dan struktur organisasi JVC telah disetujui oleh pemegang saham sehingga proyek dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi. Dalam skema akuisisi yang memerlukan pembelian saham, hasil valuasi saham dan due diligence harus disertakan.. Pada proses ini, dimungkinkan adanya proses permohonan RUPS secara terpisah mengikuti keadaan dan keperluan proyek yang sedang dilakukan, berlaku untuk Proyek Penugasan maupun Proyek Non Penugasan.. Input yang Diperlukan. DMR (Dokumen Manajemen Risiko): Dokumen yang mencakup analisis risiko terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Kepdir & Pakta Integritas: Keputusan Direktur dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil... Rekomendasi Dewan Komisaris (Dekom): Rekomendasi resmi dari Dewan Komisaris terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Persetujuan RUPS: Persetujuan awal dari RUPS untuk memastikan prosedur yang benar telah diikuti terkait pendirian JVC, setoran modal awal JVC, TMD, dan Penunjukan Wakil.. Output yang Diharapkan. RUPS Terkait (Setoran Modal Awal JVC, TMD, Penunjukan Wakil): Dokumen persetujuan resmi dari RUPS yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melanjutkan pendirian JVC dan proyek. . Proses dan Langkah-langkah. Penyampaian DMR kepada Direksi untuk Mendapat Persetujuan. Langkah pertama adalah menyampaikan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan atas analisis risiko terkait pendirian JVC dan setoran modal awal.. A. Penyusunan DMR:. Menyusun DMR yang mencakup analisis risiko operasional, finansial, dan legal terkait pendirian JVC.. Memastikan bahwa DMR telah disusun secara komprehensif dan mencakup semua aspek yang relevan.. B. Penyampaian kepada Direksi:. Mengajukan DMR kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Direksi.. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas. Setelah DMR disetujui oleh Direksi, langkah berikutnya adalah menyusun Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas yang relevan dengan pendirian JVC.. A. Penyusunan Keputusan Rapat Direksi:. Menyusun draft Keputusan Rapat Direksi yang mencakup persetujuan atas pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Memastikan bahwa draft keputusan telah mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku.. B. Penyusunan Pakta Integritas:. Menyusun Pakta Integritas yang mencakup komitmen untuk mematuhi semua aturan dan regulasi terkait pendirian JVC.. Mendapatkan tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk persetujuan dan komitmen.. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan Permintaan Tanggapan Tertulis. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris dan meminta tanggapan tertulis mereka.. A. Penyampaian Dokumen:. Mengajukan Keputusan Rapat Direksi dan Pakta Integritas kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi resmi.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh Dewan Komisaris.. B. Permintaan Tanggapan Tertulis:. Meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait persetujuan pendirian JVC.. Mendokumentasikan semua tanggapan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.. Penyampaian kepada Pemegang Saham untuk Persetujuan RUPS. Langkah terakhir adalah menyampaikan semua dokumen yang telah disetujui kepada pemegang saham untuk

mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. A. Penyampaian Dokumen kepada Pemegang Saham:.. Mengajukan semua dokumen yang relevan, termasuk DMR, Keputusan Rapat Direksi, Pakta Integritas, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada pemegang saham.. Menyediakan penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan selama proses review oleh pemegang saham.. B. Persetujuan RUPS:.. Mengadakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemegang saham terkait pendirian JVC, setoran modal awal, dan penunjukan wakil perseroan.. Mendokumentasikan hasil RUPS dan menyimpan salinan persetujuan untuk keperluan arsip dan referensi di masa mendatang..

Penandatanganan SHA. Penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) adalah langkah penting dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC). Proses ini diawali dengan negosiasi pasal-pasal dalam SHA oleh para calon pemegang saham pada JVC project company. Perjanjian ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyepakati tanggung jawab dan keuntungan dari proyek yang dikembangkan..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat.. Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC.. Referensi Utama. SHA Termsheet: Shareholder Agreement termsheet yang menjadi bagian dari dokumen RFP (request for proposal) partnership, jika ada.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi.. Proses dan Langkah-langkah.

Pembahasan Hak dan Kewajiban; Diskusi dan Negosiasi. Langkah pertama dalam penandatanganan SHA adalah melakukan diskusi dan negosiasi mengenai hak dan kewajiban para calon pemegang saham.. A. Persiapan Diskusi:.. Mengkaji perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Menyusun draft SHA termsheet berdasarkan dokumen pengadaan partner.. B. Diskusi dan Negosiasi:.. Melakukan pertemuan dengan semua calon pemegang saham untuk mendiskusikan setiap pasal dalam draft SHA.. Negosiasi mengenai hak dan kewajiban, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab manajemen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.. C. Dokumentasi Pertemuan:.. Mencatat semua poin penting yang dibahas dan disepakati selama pertemuan.. Menyusun notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan untuk memastikan bahwa semua poin penting telah dicatat.. Finalisasi Draft SHA. Setelah diskusi dan negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft SHA.. A. Penyusunan Final Draft:.. Menggabungkan semua poin yang telah disepakati selama diskusi dan negosiasi ke dalam draft SHA.. Memastikan bahwa draft final SHA sesuai dengan Panduan Penyusunan SHA dan regulasi terkait.. B. Review dan Verifikasi:.. Melakukan review ulang terhadap draft final SHA oleh tim hukum dan para calon pemegang saham.. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua pasal sudah jelas dan tidak ada ambiguitas.. C. Persetujuan Draft Final:.. Mendapatkan persetujuan dari semua calon pemegang saham atas draft final SHA.. Mempersiapkan dokumen final untuk penandatanganan..

Penandatanganan SHA. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penandatanganan SHA oleh semua calon pemegang saham.. A. Persiapan Penandatanganan:.. Mengatur waktu dan tempat untuk penandatanganan SHA.. Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk draft final SHA dan dokumen pendukung lainnya.. B. Proses Penandatanganan:.. Mengumpulkan semua calon pemegang saham untuk menandatangani SHA.. Menyaksikan dan mencatat proses penandatanganan untuk memastikan keabsahan dokumen.. C. Dokumentasi dan Penyimpanan:.. Menyimpan salinan SHA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi di masa mendatang.. Mendokumentasikan penandatanganan sebagai bukti legal bahwa semua pihak telah menyepakati perjanjian..

Pembentukan Joint Venture Company (JVC). Pembentukan Joint Venture Company (JVC) adalah tahap penting dalam skema Independent Power Producer (IPP) di mana perusahaan patungan dibentuk untuk mengembangkan dan merealisasikan proyek pembangkit listrik. JVC bertindak sebagai project vehicle dari para pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan kesepakatan dalam Shareholder Agreement (SHA)..

Input yang Diperlukan. Perjanjian kerjasama proyek sebelumnya yang telah disepakati sebagai dasar untuk penyusunan SHA.. Draft SHA termsheet yang masuk dalam dokumen pengadaan partner.. Notulen atau dokumen pendukung lainnya dari pertemuan pembahasan SHA untuk memastikan bahwa semua poin penting telah disepakati dan dicatat.. SK Kementerian Hukum dan HAM yang terkait. Dokumen Administratif, yang meliputi:.. Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT JVC . Surat Kuasa NR untuk mewakili Pengurusan Akta Pendirian. POA/ Surat Kuasa PT JVC untuk register akun, pengurusan NIB dan Izin umum yang diperlukan. Surat Pernyataan

Penyetoran Modal. Surat Pernyataan Domisili. Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh NPWP dan SPT PT . Surat Pernyataan Kesanggupan Memperoleh Keputusan, Persetujuan, dan/atau Rekomendasi dari Instansi Terkait sesuai dengan Bidang Usaha PT. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dari PT . Corporate Approval penunjukan wakil Partner. Output yang Diharapkan. SHA Signed: Shareholder Agreement yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham dalam JVC.. Referensi Utama. Panduan Penyusunan SHA: Dokumen panduan yang digunakan untuk menyusun SHA sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Surat Penugasan Proyek: Surat resmi yang memberikan penugasan proyek dan dasar legal untuk pembentukan JVC.. Peraturan Pemerintah yang Terkait: Regulasi pemerintah yang relevan dengan pembentukan JVC dan penyusunan SHA.. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Anggaran Dasar JVC. Langkah pertama dalam pembentukan JVC adalah penyusunan Anggaran Dasar (AD) yang akan menjadi dasar hukum operasional JVC.. A. Penyusunan Draft Anggaran Dasar:. Mengumpulkan informasi dari SHA yang telah ditandatangani.. Menyusun draft Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku.. B. Konsultasi dengan Pemegang Saham:. Mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham untuk membahas dan merevisi draft Anggaran Dasar.. Memastikan semua pemegang saham setuju dengan isi Anggaran Dasar.. C. Finalisasi Anggaran Dasar:. Memperbaiki dan menyelesaikan Anggaran Dasar berdasarkan masukan dari pemegang saham.. Mempersiapkan dokumen final untuk pengesahan.. Penyusunan Semua Dokumen Perijinan yang Diperlukan untuk Pendirian JVC. Setelah Anggaran Dasar disusun, langkah berikutnya adalah menyiapkan semua dokumen perijinan yang diperlukan untuk mendirikan JVC.. A. Identifikasi Dokumen Perijinan:. Mengidentifikasi semua dokumen perijinan yang diperlukan seperti Izin Usaha, NPWP, NIB, dan dokumen lainnya.. B. Pengumpulan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dari para pemegang saham dan pihak terkait.. Memastikan dokumen yang dikumpulkan lengkap dan sesuai dengan persyaratan hukum.. C. Penyusunan dan Verifikasi Dokumen:. Menyusun semua dokumen perijinan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen untuk memastikan keabsahannya.. Pengesahan JVC dan Mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah semua dokumen perijinan disiapkan, langkah berikutnya adalah pengesahan JVC dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.. A. Pengajuan Dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM:. Mengajukan semua dokumen perijinan yang telah disusun ke Kementerian Hukum dan HAM.. Memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi.. B. Proses Pengesahan:. Mengikuti proses pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika ada kendala dalam proses pengesahan.. C. Mendapatkan SK Pengesahan:. Mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.. Menyimpan SK sebagai bukti legalitas JVC.. Implementasi dan Operasionalisasi JVC. Setelah JVC disahkan, langkah terakhir adalah implementasi dan operasionalisasi JVC.. A. Penetapan Struktur Organisasi:. Menetapkan struktur Dewan Komisaris (BOC) dan Direksi (BOD) sesuai dengan Anggaran Dasar.. Menunjuk wakil perseroan yang telah disetujui.. B. Pengadaan Sarana dan Prasarana:. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional JVC.. Mengatur kantor, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya.. C. Pelaksanaan Operasional:. Memulai kegiatan operasional sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun.. Melaksanakan proyek pembangkit listrik sesuai dengan kesepakatan dalam SHA.. Power Purchase Agreement. Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) adalah perjanjian yang mengatur jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik selaku penjual (seller) dan PT PLN (Persero) selaku pembeli (offtaker). PPA meliputi semua persyaratan komersial untuk penjualan tenaga listrik antara kedua belah pihak, termasuk tanggal operasional komersial, jadwal pengiriman listrik, denda untuk keterlambatan, syarat pembayaran, dan ketentuan pengakhiran kontrak. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner. PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC.. Input yang Diperlukan. Dokumen Perjanjian (SHA): Shareholder Agreement yang telah disepakati.. Proposal dan Letter of Intent (LoI): Proposal proyek dan LoI yang diterbitkan oleh PLN.. Feasibility Study: Hasil studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. Draft PPA: Draft awal perjanjian PPA untuk dibahas dan dinegosiasikan.. Output yang Diharapkan. Dokumen PPA Final: Perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Referensi Utama. Regulasi Internal dan Eksternal yang Terkait: Kebijakan dan regulasi internal PLN NR serta peraturan eksternal yang harus dipatuhi dalam penyusunan PPA.. Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Draft Review PPA. Langkah pertama adalah menyusun draft review PPA yang mencakup semua ketentuan penting dan syarat komersial yang akan dinegosiasikan.. A. Penyusunan Draft Awal:.

Menggunakan informasi dari dokumen SHA, proposal, Lol, dan hasil Feasibility Study untuk menyusun draft awal PPA.. Melibatkan tim legal dan teknis untuk memastikan semua aspek penting tercakup dalam draft.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft PPA untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi internal serta eksternal.. Mengadakan rapat internal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari tim manajemen.. Negosiasi dengan PLN. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk mencapai kesepakatan final tentang ketentuan dalam PPA.. A. Pengaturan Jadwal Negosiasi:. Mengatur jadwal pertemuan dengan tim PLN untuk membahas draft PPA.. Menyusun agenda dan poin-poin negosiasi yang akan dibahas.. B. Pembahasan Poin-Poin Penting:. Membahas tarif harga jual listrik, termasuk staging harga.. Menegosiasikan periode PPA dengan mempertimbangkan kelayakan proyek dan bankability proyek.. Mendiskusikan skema BOOT atau BOT, financing date, periode Take or Pay dan Take and Pay, liquidated damage, force majeure, termination, supply energi primer, dan dispute resolution.. C. Penyusunan Notulen Pertemuan:. Mencatat semua poin yang disepakati dan perbedaan yang masih ada.. Menyusun notulen pertemuan sebagai dasar untuk revisi draft PPA.. Finalisasi Draft PPA. Setelah negosiasi selesai, langkah berikutnya adalah finalisasi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi.. A. Revisi Draft PPA:. Melakukan revisi draft PPA berdasarkan hasil negosiasi dengan PLN.. Memastikan semua perubahan yang disepakati telah dimasukkan dalam draft final.. B. Validasi Final Draft:. Melakukan validasi akhir terhadap draft PPA oleh tim legal dan manajemen.. Mengadakan rapat final untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait.. Penandatanganan PPA oleh Pihak Berwenang. Langkah terakhir adalah penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. A. Penyiapan Dokumen untuk Penandatanganan:. Menyiapkan dokumen PPA final yang telah disetujui untuk ditandatangani oleh pihak berwenang.. Mengatur jadwal penandatanganan dengan PLN.. B. Penandatanganan PPA:. Melakukan penandatanganan PPA oleh pihak berwenang dari JVC dan PLN.. Menyimpan salinan PPA yang telah ditandatangani untuk arsip dan referensi.. C. Distribusi Dokumen PPA:. Mendistribusikan salinan PPA kepada semua pihak yang berkepentingan.. Memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam PPA.. EPC Procurement. EPC Procurement adalah proses pengadaan kontraktor yang bertanggung jawab atas Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam proyek pembangunan pembangkit listrik. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan konstruksi pembangkit. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC atau jika disepakati kemudian dapat dilakukan oleh konsorsium NR/NP bersama dengan partner.. Input yang Diperlukan:. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Kajian teknis yang menentukan spesifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk proyek.. Hasil Kajian Lokasi Pembangkit: Kajian lokasi yang menentukan persyaratan lokasi untuk kontraktor EPC.. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. Draft Kontrak EPC: Draft awal kontrak yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani.. Output yang Diharapkan. List Kontraktor EPC: Daftar kontraktor EPC yang telah diidentifikasi.. List Konsultan Transactional: Daftar konsultan yang akan membantu dalam proses transaksi.. Kontraktor EPC Terpilih: Kontraktor EPC yang dipilih melalui proses pengadaan.. Draft Kontrak EPC: Draft final kontrak yang siap untuk ditandatangani.. Kontrak EPC Efektif: Kontrak EPC yang telah ditandatangani dan disahkan.. Laporan Pelaksanaan Konstruksi: Laporan berkala yang memantau kemajuan konstruksi.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan.. SK PJB No. 100.K/010/DIR/2017: Surat Keputusan terkait pengadaan EPC.. Permenperin No. 54/2012: Peraturan Menteri Perindustrian terkait pengadaan.. Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi Kontraktor dan Konsultan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kontraktor dan konsultan potensial yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk proyek.. A. Pemetaan Kontraktor Potensial:. Mengumpulkan data dari hasil kajian teknologi dan lokasi pembangkit untuk menentukan spesifikasi yang dibutuhkan.. Menyusun list kontraktor EPC potensial yang memenuhi kriteria teknis dan finansial.. B. Penilaian Awal:. Melakukan penilaian awal terhadap kontraktor berdasarkan pengalaman, reputasi, dan kapabilitas teknis mereka.. Menyusun list konsultan transactional yang akan membantu dalam proses transaksi.. Proses Pengadaan Kontraktor EPC. Langkah kedua adalah melaksanakan proses pengadaan untuk memilih kontraktor EPC yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun draft kontrak EPC awal yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Menyiapkan dokumen tender dan mengumumkan pengadaan secara terbuka atau terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari kontraktor yang berminat.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Mengadakan presentasi dan wawancara dengan

kontraktor potensial untuk memastikan kesesuaian.. C. Penentuan Kontraktor Terpilih:. Menyusun laporan evaluasi dan merekomendasikan kontraktor EPC terpilih.. Mendapatkan persetujuan dari manajemen dan pihak terkait.. Penandatanganan Kontrak EPC. Langkah ketiga adalah menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor terpilih.. A. Negosiasi Final:. Mengadakan negosiasi akhir dengan kontraktor terpilih untuk memastikan semua persyaratan dan ketentuan telah disepakati.. Menyusun draft final kontrak EPC berdasarkan hasil negosiasi.. B. Validasi Internal:. Melakukan tinjauan internal terhadap draft final kontrak EPC untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.. Mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang untuk penandatanganan kontrak.. C. Penandatanganan Kontrak:. Menandatangani kontrak EPC oleh pihak berwenang dari JVC dan kontraktor terpilih.. Mendokumentasikan kontrak yang telah ditandatangani dan menyimpan salinan untuk arsip.. Implementasi Kontrak EPC. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan kontrak EPC dan memantau pelaksanaannya.. A. Mobilisasi Kontraktor:. Mengkoordinasikan mobilisasi kontraktor ke lokasi proyek.. Menyusun jadwal pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. B. Pemantauan dan Laporan Berkala:. Melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan konstruksi dan memastikannya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.. Menyusun laporan pelaksanaan konstruksi dan menyampaikan kepada pihak terkait.. C. Penanganan Isu dan Penyelesaian:. Menyelesaikan isu-isu yang muncul selama pelaksanaan kontrak.. Memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan..

Land Procurement. Land Procurement adalah proses pengadaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik. Ketersediaan lahan yang memadai dan legal sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Proses ini mencakup kajian risiko operasional dan finansial, serta memastikan kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, Proses ini dilakukan oleh JVC dan PLN NR hanya sebagai support atau consult. . Dalam rangka percepatan proyek, maka Land Procurement dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Kajian Risiko Operasional: Hasil kajian risiko operasional yang mencakup penilaian potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Kajian Risiko Finansial: Hasil kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Dokumentasi Legal: Dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Output yang Diharapkan. Kepastian Kepemilikan Lahan: Kepemilikan lahan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, siap digunakan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik.. Referensi Utama. Dokumen FS (Feasibility Study): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis lokasi dan kebutuhan lahan.. Regulasi Pemerintah: Peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan lahan.. Kebijakan Internal PLN NR: Kebijakan dan prosedur internal PLN NR terkait pengadaan lahan..

Proses dan Langkah-langkah. Identifikasi dan Evaluasi Lahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi lahan yang potensial untuk pembangunan pembangkit listrik.. A. Pemetaan Lahan Potensial:. Menggunakan hasil kajian lokasi pembangkit dari Dokumen FS untuk menentukan area yang sesuai.. Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi lahan yang memenuhi kriteria teknis dan legal.. B. Penilaian Risiko Operasional dan Finansial:. Melakukan kajian risiko operasional yang mencakup potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek.. Melakukan kajian risiko finansial yang mencakup analisis biaya-manfaat dan evaluasi biaya akuisisi lahan.. Menentukan skema pemanfaatan lahan, apakah berbentuk jual beli atau sewa menyewa.. C. Dokumentasi dan Verifikasi Legal:. Mengumpulkan dokumen legal yang diperlukan untuk akuisisi lahan, termasuk sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan izin terkait.. Memverifikasi keabsahan dokumen legal dengan instansi terkait.. Negosiasi Pengadaan Lahan. Langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan pembelian.. A. Pendekatan dan Penawaran:. Menghubungi pemilik lahan untuk membahas potensi akuisisi atau sewa menyewa.. Menyusun dan mengajukan penawaran harga yang sesuai dengan hasil kajian risiko finansial.. B. Negosiasi dan Kesepakatan:. Melakukan negosiasi harga dan persyaratan pembelian atau sewa menyewa dengan pemilik lahan.. Mencapai kesepakatan final yang menguntungkan kedua belah pihak.. C. Penyusunan Perjanjian Jual Beli atau Sewa Menyewa Lahan:. Menyusun perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.. Mendapatkan tanda tangan dari kedua belah pihak pada perjanjian jual beli atau sewa menyewa lahan.. Pengesahan dan Penyerahan Lahan. Langkah ketiga adalah mengesahkan dan menyerahkan lahan yang telah dibeli.. A. Pengesahan Dokumen:. Mengajukan dokumen perjanjian jual beli untuk pengesahan kepada notaris atau pejabat terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.. B. Penyerahan dan Pencatatan:. Melakukan penyerahan lahan secara resmi dari pemilik lama ke JVC, sesuai skema yang disepakati.. Mencatat perubahan kepemilikan lahan di instansi terkait untuk memastikan kepemilikan sah, jika skema yang

dipilih adalah sewa menyewa.. Pengelolaan dan Penggunaan Lahan. Langkah terakhir adalah mengelola dan menggunakan lahan yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan proyek.. A. Persiapan dan Pembersihan Lahan:. Melakukan persiapan lahan, termasuk pembersihan dan perataan tanah.. Mengelola lahan agar siap digunakan untuk kegiatan konstruksi.. B. Penggunaan Lahan untuk Proyek:. Mengalokasikan lahan sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun.. Memantau dan mengelola penggunaan lahan selama seluruh tahap proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan rencana awal..

Pengurusan Perizinan. Pengurusan perizinan adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi yang memungkinkan pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik dalam skema Independent Power Producer (IPP) maupun skema NON IPP. Proses ini mencakup berbagai jenis izin yang harus dipenuhi dari tahap pengembangan hingga tahap konstruksi. Perizinan ini mencakup izin lingkungan, izin penanaman modal, dan izin operasional lainnya. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC.. Dalam rangka percepatan proyek, maka Pengurusan Perizinan dapat diproses lebih awal oleh PLN NP dari mulai Tahap Initiation atau di awal Tahap Development..

Input yang Diperlukan. Feasibility Study (FS): Dokumen studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, finansial, dan operasional.. List Kebutuhan Perizinan: Daftar kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. Dokumen Persyaratan Pengurusan Perizinan: Semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin.. Set Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah disiapkan untuk diajukan ke instansi terkait.. Output yang Diharapkan. List Kebutuhan Perizinan: Daftar lengkap kebutuhan perizinan yang telah diidentifikasi.. Prosedur Tiap Perizinan: Prosedur rinci untuk setiap jenis perizinan yang diperlukan.. List Konsultan Perizinan dan Kompetensinya: Daftar konsultan yang akan membantu dalam pengurusan perizinan beserta kompetensi mereka.. List Lembaga Perizinan: Daftar instansi atau lembaga yang terkait dengan proses perizinan.. Basic Komunikasi Pengurusan Perizinan dengan Instansi Terkait: Panduan komunikasi dasar dengan instansi terkait.. Dokumen Perizinan: Dokumen perizinan yang telah diterbitkan dan sah.. PPA Signing: Penandatanganan Power Purchase Agreement setelah izin diperoleh.. Pencapaian Financing Close: Penyelesaian proses pendanaan setelah izin diperoleh.. Pelaksanaan EPC: Implementasi kontrak EPC setelah semua izin diperoleh.. Referensi Utama. SOP Instansi Terkait: Standar Operasional Prosedur dari instansi pemerintah terkait.. PERMENHU B 25/2011: Peraturan Menteri Perhubungan yang relevan.. KEPPRES NO. 39/1991: Keputusan Presiden yang terkait dengan perizinan..

Proses dan Langkah-langkah. Pengurusan Perizinan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait. Langkah pertama adalah mengurus perizinan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan telah terpenuhi.. A. Identifikasi Kebutuhan Perizinan:. Menggunakan hasil studi kelayakan (FS) untuk mengidentifikasi semua izin yang diperlukan.. Menyusun daftar lengkap kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi.. B. Persiapan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen persyaratan pengurusan perizinan yang diperlukan.. Menyusun set dokumen perizinan yang siap diajukan ke instansi terkait.. C. Koordinasi dengan Instansi:. Melakukan komunikasi dengan instansi terkait untuk memastikan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti.. Mengatur pertemuan atau konsultasi dengan instansi untuk mendapatkan klarifikasi jika diperlukan.. Pengesahan atas Semua Dokumen Perizinan. Langkah kedua adalah mengesahkan semua dokumen perizinan yang telah disiapkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait.. A. Penyampaian Dokumen:. Menyerahkan set dokumen perizinan yang telah disiapkan kepada instansi terkait untuk pengesahan.. Mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi untuk pengesahan dokumen.. B. Verifikasi dan Pengesahan:. Mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait.. Mendapatkan surat keputusan pengesahan dari instansi yang berwenang.. C. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Mencatat dan menyimpan salinan dokumen perizinan yang telah disahkan sebagai referensi.. Mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah atau Instansi Terkait. Langkah ketiga adalah mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau instansi terkait yang memungkinkan proyek untuk dilanjutkan ke tahap eksekusi.. A. Tindak Lanjut dan Monitoring:. Memantau status pengajuan izin untuk memastikan tidak ada hambatan atau keterlambatan.. Mengikuti perkembangan proses izin secara berkala dengan instansi terkait.. B. Pengambilan Izin:. Mengambil dokumen izin resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau instansi terkait.. Memastikan bahwa semua izin yang diperlukan telah diperoleh sebelum memulai tahap konstruksi.. C. Pelaporan dan Komunikasi:. Melaporkan status perizinan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.. Menyediakan panduan komunikasi dasar untuk mengkoordinasikan pengurusan perizinan dengan instansi terkait..

Financing Close. Financing Close (FC) adalah proses dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik, baik untuk skema NONIPP maupun skema IPP, yang melibatkan pemenuhan semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (lender) kepada peminjam (borrower) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman (Facility Agreement) sebelum pencairan pinjaman dapat dilakukan. Proses ini memastikan bahwa semua

persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi sehingga pinjaman dapat dicairkan untuk membiayai proyek. Sebagaimana tertuang dalam RASCI, PLN NR hanya sebagai support atau consult terkait proses EPC. Proses ini dilakukan oleh JVC..

Input yang Diperlukan. JVC Establishment: Dokumen pendirian JVC yang telah disahkan.. Power Purchase Agreement (PPA): PPA yang telah ditandatangani.. Land Procurement: Dokumen kepemilikan dan izin lahan.. EPC Bid: Dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Permit & License: Izin dan lisensi yang diperlukan.. Pemenuhan Syarat FC: Semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement..

Output yang Diharapkan. Financial Close (FC): Kondisi di mana semua persyaratan peminjaman telah terpenuhi, dan pinjaman dapat dicairkan..

Referensi Utama. Facility Agreement: Perjanjian Pinjaman yang menetapkan semua syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pencairan pinjaman..

Proses dan Langkah-langkah. Pemenuhan Persyaratan. Langkah pertama dalam proses Financing Close adalah memastikan semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman dalam Facility Agreement telah terpenuhi. Ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi berbagai dokumen serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan..

A. JVC Establishment: Mengumpulkan dan mengesahkan dokumen pendirian JVC.. Memastikan bahwa JVC telah secara resmi didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

B. Power Purchase Agreement (PPA): Memastikan bahwa PPA telah ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.. Menyimpan salinan resmi PPA untuk referensi..

C. Land Procurement: Mengumpulkan dokumen kepemilikan dan izin lahan.. Memastikan bahwa lahan yang diperlukan untuk proyek telah tersedia dan siap digunakan..

D. EPC Bid: Mengumpulkan dokumen hasil pengadaan kontraktor EPC.. Memastikan bahwa kontraktor EPC telah dipilih dan siap untuk memulai pekerjaan..

E. Permit & License: Mengumpulkan semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk proyek.. Memastikan bahwa semua persyaratan perizinan telah terpenuhi..

F. Pemenuhan Syarat FC: Mengumpulkan semua dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman telah dipenuhi..

Validasi Data. Langkah kedua adalah melakukan validasi data untuk memastikan bahwa semua informasi dan dokumen yang diserahkan akurat dan lengkap. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat menghambat proses pencairan pinjaman..

A. Verifikasi Dokumen: Memeriksa kembali semua dokumen yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti PPA, izin lahan, dan kontrak EPC..

B. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul selama proses validasi..

C. Penyelesaian Discrepancies: Mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap perbedaan atau kekurangan dalam dokumen yang telah dikumpulkan.. Memastikan bahwa semua masalah telah diselesaikan sebelum dokumen diserahkan kepada pemberi pinjaman..

Pencairan Pinjaman. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan data telah divalidasi, langkah terakhir adalah pencairan pinjaman. Pencairan ini menandai bahwa proyek telah mencapai tahap Financing Close dan siap untuk dilanjutkan ke tahap implementasi..

A. Penandatanganan Dokumen Akhir: Menandatangani semua dokumen akhir yang diperlukan untuk pencairan pinjaman.. Memastikan bahwa semua pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan mereka..

B. Pencairan Dana: Mengatur pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Facility Agreement.. Memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui..

C. Pelaporan dan Dokumentasi: Menyimpan semua dokumen dan laporan yang terkait dengan proses Financing Close.. Menyusun laporan akhir untuk pemangku kepentingan yang relevan..

Halaman ini sengaja dikosongkan. . Tahap Execution. Engineering, Procurement, Construction. Proses Engineering, Procurement, Construction (EPC) bertujuan untuk mendapatkan Kontraktor EPC terpilih yang akan melaksanakan proses konstruksi pembangkit listrik dengan memperhatikan regulasi yang berlaku dan menjunjung prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Aktivitas utama dalam proses EPC meliputi identifikasi kontraktor, pelaksanaan pengadaan, penandatanganan kontrak, dan implementasi kontrak..

Input yang Diperlukan. Dokumen FS (Feasibility Study): Hasil studi kelayakan proyek yang mencakup analisis teknis, finansial, dan risiko.. Detailed Engineering Design: Rancangan teknis detail yang menjadi acuan dalam konstruksi pembangkit.. Power Plant Equipment: Spesifikasi dan daftar peralatan utama yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Dokumen Permintaan Backfeeding: Dokumen yang menjelaskan kebutuhan backfeeding untuk persiapan testing dan commissioning..

Output yang Diharapkan. Detail Engineering Design: Rancangan teknis detail yang telah disiapkan dan disetujui.. Power Plant Equipment: Peralatan pembangkit yang telah diadakan dan siap untuk instalasi.. Block Pembangkit (Power house, BoP, Auxiliary): Struktur dan fasilitas pendukung pembangkit yang telah dibangun.. Start Up dan Siap untuk Pengujian Pembangkit: Pembangkit siap untuk dioperasikan dan diuji sebelum commissioning..

Referensi Utama. EPC Contract: Kontrak EPC yang

mencakup semua persyaratan dan ketentuan pengadaan serta pelaksanaan proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Proses Engineering . Proses ini mencakup penyiapan dokumen detail engineering design oleh Kontraktor EPC, baik untuk peralatan utama maupun peralatan pendukung pembangkit.. A. Penyusunan Detail Engineering Design (DED):. Menyiapkan desain teknis yang rinci untuk semua komponen utama dan pendukung pembangkit.. Mengadakan pertemuan teknis dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian desain. . B. Validasi Desain:. Melakukan review dan validasi desain oleh tim internal dan eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar.. Mengajukan desain untuk disetujui oleh pihak berwenang.. Proses Procurement. Kontraktor EPC melakukan pengadaan seluruh peralatan pembangkit dan melaksanakan pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk mendukung proses konstruksi.. A. Penyusunan Dokumen Pengadaan:. Menyusun spesifikasi teknis dan dokumen tender untuk pengadaan peralatan pembangkit.. Mengumumkan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. B. Evaluasi dan Seleksi:. Mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran dari pemasok.. Melakukan penilaian teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk dan memilih pemasok yang paling sesuai.. C. Penyiapan Kontrak Pengadaan:. Menyusun kontrak pengadaan berdasarkan hasil seleksi dan negosiasi dengan pemasok.. Menandatangani kontrak pengadaan dengan pemasok terpilih.. Proses Construction. Proses konstruksi dilaksanakan oleh Kontraktor EPC sesuai dengan Detail Engineering Design dan Kontrak EPC yang telah ditandatangani. Proses ini biasanya mengikuti Work Breakdown Structure (WBS) yang telah dibuat oleh Kontraktor EPC.. . A. Mobilisasi dan Persiapan:. Mengkoordinasikan mobilisasi tim dan peralatan ke lokasi proyek.. Menyiapkan lokasi konstruksi sesuai dengan rencana kerja dan WBS.. B. Pelaksanaan Konstruksi:. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan jadwal yang telah disusun.. Melakukan pengawasan dan kontrol kualitas secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.. C. Laporan Kemajuan:. Menyusun laporan kemajuan konstruksi secara berkala dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang muncul selama proses konstruksi.. Backfeeding. Pelaksanaan backfeeding dilakukan sebagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan testing dan commissioning pembangkit.. A. Persiapan Backfeeding:. Menyusun rencana dan jadwal backfeeding berdasarkan kebutuhan proyek.. Mengajukan permintaan backfeeding dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.. B. Pelaksanaan Backfeeding:. Melaksanakan proses backfeeding sesuai dengan rencana yang telah disetujui.. Memastikan bahwa semua sistem dan peralatan berfungsi dengan baik selama proses backfeeding.. C. Pengujian dan Verifikasi:. Melakukan pengujian awal dan verifikasi sistem untuk memastikan kesiapan sebelum tahap commissioning.. Menyusun laporan hasil backfeeding dan menyampaikan kepada pihak terkait.. Penyediaan Energi Primer. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik, khususnya untuk pembangkit non-EBT, agar dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan energi primer, penyusunan proposal, persetujuan skema penyediaan energi primer, pengadaan bahan bakar, dan penandatanganan perjanjian bahan bakar dengan supplier.. Input yang Diperlukan. Hasil Kajian Teknologi Pembangkit: Analisis teknologi yang digunakan dalam pembangkit untuk menentukan jenis dan jumlah energi primer yang dibutuhkan.. Perencanaan Supply Energi Primer: Rencana yang mencakup perkiraan kebutuhan energi primer dan sumbernya.. Harga Energi Primer: Informasi tentang harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit.. Proposal yang Disetujui: Dokumen proposal yang telah disetujui oleh pihak terkait.. Supplier Terpilih: Daftar pemasok bahan bakar yang telah dipilih berdasarkan evaluasi.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara PLN atau SPC dengan pemasok.. Output yang Diharapkan. Supply Energi Primer: Pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik.. Harga Energi Primer: Harga bahan bakar yang telah disepakati dalam perjanjian.. Proposal yang Disetujui: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pihak terkait.. Fuel Agreement dengan PLN: Perjanjian bahan bakar antara PLN dan pemasok.. Terpilihnya Supplier Energi Primer: Pemasok bahan bakar yang telah dipilih.. Fuel Agreement dengan Supplier: Perjanjian bahan bakar antara SPC dan pemasok.. Supply Energi Primer oleh Supplier: Penyediaan bahan bakar oleh pemasok sesuai dengan perjanjian.. Proses dan Langkah-langkah. Perencanaan Supply Energi Primer . Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan suplai energi primer untuk pengembangan pembangkit listrik baru. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian teknologi pembangkit.. A. Identifikasi Kebutuhan Energi Primer:. Melakukan analisis kebutuhan energi primer berdasarkan jenis teknologi pembangkit yang akan digunakan.. Menyusun perkiraan kebutuhan bahan bakar untuk jangka waktu tertentu.. B. Estimasi Harga Energi Primer:. Mengumpulkan data harga bahan bakar dari berbagai sumber.. Menyusun perkiraan biaya bahan bakar untuk kebutuhan pembangkit.. Penyusunan Proposal. Perencanaan energi primer tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan proposal yang diajukan ke PT PLN (Persero).. A. Penyusunan Rencana Kebutuhan Energi Primer:. Menyusun dokumen proposal yang mencakup rencana kebutuhan energi primer selama masa PPA (Power Purchase Agreement)..

Mengajukan skema penyediaan energi primer yang diusulkan.. B. Pengajuan Proposal:. Mengajukan proposal ke PT PLN (Persero) untuk mendapatkan persetujuan.. Persetujuan Skema Penyediaan Energi Primer. PLN akan memutuskan skema yang digunakan dalam penyediaan energi primer.. A. Evaluasi Proposal:. PT PLN (Persero) mengevaluasi proposal yang diajukan.. Memutuskan skema penyediaan energi primer yang akan digunakan (Passthrough atau IPP).. B. Penentuan Skema:. Menentukan apakah penyediaan energi primer dilakukan oleh PLN atau SPC.. Menyesuaikan nilai Komponen C dalam PPA berdasarkan skema yang dipilih.. Fuel Procurement. Jika skema penyediaan energi primer yang disetujui dilakukan oleh SPC, maka SPC harus melaksanakan proses pengadaan energi primer.. A. Proses Pengadaan:. SPC melakukan proses pengadaan energi primer sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Mengumumkan tender dan mengumpulkan penawaran dari pemasok.. B. Evaluasi Penawaran:. Melakukan evaluasi teknis dan finansial terhadap penawaran yang masuk.. Memilih pemasok yang memenuhi kriteria dan kebutuhan proyek.. Fuel Agreement PLN dengan Supplier. Untuk skema penyediaan energi primer yang dilakukan oleh PLN, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan PLN. Sedangkan untuk skema yang dilakukan oleh SPC, perusahaan penyedia energi primer akan melaksanakan fuel agreement dengan SPC.. A. Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian:. Melakukan negosiasi dengan pemasok energi primer untuk mencapai kesepakatan harga dan syarat lainnya.. Menyusun dan menandatangani perjanjian bahan bakar (fuel agreement) dengan pemasok terpilih.. B. Pelaksanaan Perjanjian:. Memastikan pemasok melaksanakan penyediaan energi primer sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.. Mengawasi dan mengontrol kualitas dan kuantitas energi primer yang disuplai oleh pemasok.. Penyiapan Jasa Operation & Maintenance. Aktivitas penyiapan jasa Operation & Maintenance (O&M) bertujuan untuk memastikan operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini melibatkan penunjukan pihak yang bertanggung jawab, penyusunan perjanjian, mobilisasi SDM, pendampingan, monitoring, pelatihan, dan pengelolaan kinerja pembangkit.. Input yang Diperlukan. Surat Penunjukan/LOI: Dokumen yang menunjuk pihak yang akan mengelola O&M.. EPC Contract: Kontrak antara perusahaan EPC dan pemilik aset terkait pembangunan pembangkit.. COD (Commercial Operation Date): Tanggal mulai operasional komersial pembangkit.. Data Kinerja Pembangkit: Informasi tentang kinerja operasional pembangkit.. Data Pending Items: Daftar item atau pekerjaan yang belum selesai.. Output yang Diharapkan. Perjanjian Induk: Dokumen perjanjian antara pihak terkait untuk pelaksanaan jasa O&M.. Dokumen Mobilisasi SDM: Dokumen yang mencakup rekrutmen dan penempatan personil.. Laporan Monitoring EPC: Laporan bulanan tentang progress proyek EPC.. Laporan Pelaksanaan Jasa O&M: Laporan berkala mengenai pelaksanaan O&M.. Sertifikat STOP: Sertifikat penerimaan akhir dari EPC kontraktor.. Final Acceptance Certificate: Sertifikat penerimaan final setelah masa garansi.. Proses dan Langkah-langkah. Penugasan/Penunjukkan (LOI). Surat penunjukan/penugasan (LOI) dari pemilik aset (PLN NP/SPC Proyek) kepada Asset Manager atau Asset Operator (PJBS/MKP/perusahaan jasa O&M) untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tersebut.. Penerbitan LOI oleh pemilik aset.. Penugasan Asset Manager atau Asset Operator untuk O&M.. Penyepakatan Perjanjian Induk. Penyusunan dan persetujuan Perjanjian Induk yang mengatur syarat-syarat pokok pelaksanaan jasa O&M pembangkit.. Negosiasi syarat dan ketentuan antara pihak terkait.. Penandatanganan Perjanjian Induk.. Supporting . Tahap ini terbagi dalam dua tahapan: Pra COD dan COD-FAC.. Pra COD:. Mobilisasi SDM: Rekrutmen dan penempatan personil untuk operasi dan pemeliharaan.. Pendampingan EPC Proyek: Pendampingan oleh Asset Manager atau Asset Operator terhadap EPC proyek sebelum penyerahan.. Monitoring EPC Proyek: Monitoring progress pembangunan oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Training oleh EPC Kontraktor: Pelatihan oleh EPC Kontraktor kepada Asset Manager atau Asset Operator.. Pembuatan Laporan Monitoring: Pelaporan hasil monitoring kepada pemilik aset setiap bulan.. COD-FAC:. Mobilisasi SDM: Pemenuhan jumlah personil BSO dan non BSO.. Penyiapan Tata Kelola: Penyiapan tata kelola unit pembangkit selama 6 bulan setelah COD.. Supporting COD-FAC: Dukungan paralel dengan proses mobilisasi dan penyiapan tata kelola pembangkit.. Tahap Performance. Pengelolaan jasa O&M sepenuhnya oleh Asset Manager atau Asset Operator tanpa supervisi dari EPC Kontraktor.. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh Asset Manager atau Asset Operator.. Pengawasan dan evaluasi kinerja pembangkit secara mandiri.. Penyiapan Organisasi dan SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga

kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Commercial Operation Date. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa pembangkit listrik telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Tahap ini juga digunakan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PJB atau penjelasan realisasi Commercial Operation Date (COD) proyek-proyek yang ada di RUPTL. Setelah pembangkit dinyatakan lolos COD, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit akan tetap berada di bawah supervisi EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. Input yang Diperlukan. Progres EPC. Penyediaan energi primer. Penyiapan SDM untuk OM. Checklist pre-commissioning. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Data pendukung lainnya. Checklist untuk persiapan COD. Output yang Diharapkan. Hasil pre-commissioning. Checklist untuk commissioning. Hasil commissioning. Sertifikat Laik Operasi (SLO). Checklist untuk persiapan COD. COD pembangkit. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pre-Commissioning. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki tahap commissioning. Tahap ini terdiri dari backfeeding test serta pengujian terhadap peralatan-peralatan supporting operasional pembangkit, di antaranya adalah WTP (water treatment process), cooling system, cleaning system, coal handling system, serta fire protection system.. Persiapan dan Pemeriksaan:. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sistem pendukung operasional pembangkit.. Menyiapkan daftar periksa (checklist) untuk setiap sistem dan komponen yang akan diuji.. Pelaksanaan Pengujian:. Melaksanakan backfeeding test untuk memastikan keandalan sistem distribusi listrik internal.. Menguji sistem WTP, cooling system, cleaning system, coal handling system, dan fire protection system.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan memastikan semua sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.. Commissioning. Tahap ini menjadi bukti bahwa pembangkit yang bersangkutan bisa benar-benar beroperasi dan dijadikan bahan untuk penyusunan SLO. Tahap ini terdiri dari pengujian terhadap first firing, steam admission, first synchrone, load rejection, reliability run & test, serta performance test. Ketika nilai performanya sesuai dengan kesepakatan yang ada pada kontrak, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.. First Firing and Steam Admission:. Menguji pembakaran pertama (first firing) dan pemasukan uap (steam admission) untuk memastikan sistem boiler dan turbin bekerja dengan baik.. First Synchronization:. Melakukan sinkronisasi pertama (first synchrone) untuk menghubungkan pembangkit ke grid listrik.. Load Rejection and Reliability Run:. Menguji reaksi sistem terhadap penolakan beban (load rejection) dan melakukan uji keandalan (reliability run) untuk memastikan stabilitas operasi.. Performance Test:. Melaksanakan uji kinerja (performance test) untuk memastikan pembangkit memenuhi spesifikasi performa yang disepakati dalam kontrak.. Dokumentasi Hasil:. Mendokumentasikan hasil pengujian dan menilai apakah pembangkit memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kontrak EPC.. Penyusunan Sertifikat

Laik Operasi (SLO). Tahap ini bersifat administratif dan harus dilakukan berdasarkan tata cara sertifikasi SLO sesuai regulasi dari lembaga pemerintahan yang bersangkutan.. Pengumpulan Dokumen:. Mengumpulkan semua dokumen dan data hasil pengujian dari tahap pre-commissioning dan commissioning.. Penyusunan Sertifikat:. Menyusun Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.. Proses Pengesahan:. Mengajukan SLO ke instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan dan registrasi resmi.. Dokumentasi:. Mendokumentasikan sertifikat yang telah disahkan dan menyimpan salinannya sebagai bukti legalitas operasional.. er Plant COD. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk penanda bahwa pembangkit telah resmi dioperasikan dan masuk dalam sistem. Selain itu, tahap ini juga dijadikan sebagai bukti terhadap eksekusi penugasan kepada PLN NP ataupun penjelasan realisasi COD proyek-proyek yang ada di RUPTL.. Persiapan COD:. Melakukan persiapan akhir untuk memastikan semua sistem siap untuk operasi komersial.. Menyusun checklist persiapan COD dan memastikan semua item telah terpenuhi.. Pelaksanaan COD:. Melaksanakan kegiatan operasional yang menandai pembangkit memasuki tahap COD.. Memastikan semua prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan telah dilaksanakan dengan benar.. Dokumentasi COD:. Mendokumentasikan hasil dan proses yang dilakukan selama tahap COD.. Menyimpan dokumen resmi yang menunjukkan pembangkit telah mencapai COD.. Supervisi Pasca-COD:. Melakukan supervisi terhadap operasi dan pemeliharaan pembangkit oleh EPC Contractor hingga pembangkit tersebut ditetapkan FAC (Final Acceptance Certificate).. . Tahap Completion. Penyusunan Serah Terima Operasi. Proses ini bertujuan untuk membuat dokumen serah terima operasi (STOP) sesuai dengan organisasi SPC yang telah diatur. Pengoperasian pembangkit perlu dilakukan oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Pembangkit, sebagaimana opsi-opsi O&M sesuai kesepakatan pada SHA, serta keputusan opsi yang dipilih oleh JVC.. Input yang Diperlukan. COD pembangkit. Checklist pasca COD. Data kinerja pembangkit. Output yang Diharapkan. Sertifikat STOP. Data pending items. Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Evaluasi Kinerja Pembangkit dan Penyusunan Dokumen. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja pembangkit pasca-COD untuk memastikan bahwa semua sistem dan peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun dokumen serah terima operasi (STOP).. Pengumpulan Data Kinerja:. Mengumpulkan data kinerja pembangkit sejak COD hingga waktu evaluasi.. Menggunakan checklist pasca-COD untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan standar yang telah ditetapkan.. Evaluasi Kinerja:. Melakukan analisis terhadap data kinerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.. Menilai kinerja pembangkit dalam hal efisiensi, keandalan, dan pemenuhan target operasi.. Penyusunan Dokumen:. Menyusun dokumen serah terima operasi (STOP) berdasarkan hasil evaluasi.. Memastikan semua temuan dan rekomendasi tercatat dengan jelas dalam dokumen.. Identifikasi Pending Items. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat item-item yang masih pending atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum serah terima operasi dapat dilakukan sepenuhnya.. Pengumpulan Data Pending Items:. Mengidentifikasi item-item yang masih dalam proses penyelesaian atau perbaikan.. Mendokumentasikan semua pending items dengan deskripsi rinci dan status saat ini.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:. Berkoordinasi dengan kontraktor EPC dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penyelesaian pending items.. Menetapkan timeline untuk penyelesaian dan verifikasi pending items.. Pembaharuan Checklist:. Memperbarui checklist pasca-COD dengan status terbaru dari pending items.. Koordinasi dengan Pihak Terkait dan Peninjauan Akhir Dokumen. Langkah ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa dokumen serah terima operasi telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor dan Pihak Terkait:. Mengadakan pertemuan dengan kontraktor EPC, O&M team, dan pihak lain yang relevan untuk meninjau dokumen STOP.. Mendiskusikan temuan, rekomendasi, dan pending items yang masih perlu diselesaikan.. . Peninjauan Akhir Dokumen:. Melakukan review akhir terhadap dokumen STOP untuk memastikan kelengkapannya.. Memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi.. Validasi Dokumen:. Mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait terhadap dokumen STOP yang telah disusun.. Penerbitan Sertifikat STOP. Tahap akhir adalah penerbitan Sertifikat Serah Terima Operasi Pembangkit (STOP), yang menandai bahwa pembangkit telah siap untuk dioperasikan secara penuh oleh Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan.. Penyusunan Sertifikat STOP:. Menyusun Sertifikat STOP berdasarkan dokumen yang telah disetujui.. Memastikan sertifikat mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items.. Penerbitan Sertifikat:. Menerbitkan sertifikat STOP secara resmi.. Menyampaikan sertifikat kepada Pihak Pelaksana Jasa Operasi dan Pemeliharaan serta pihak-pihak terkait lainnya.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses serah terima operasi sebagai

referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Taking Over Certificate. Proses ini bertujuan untuk menandai bahwa seluruh pekerjaan EPC Contractor telah selesai dan aset sepenuhnya diserahkan dari EPC Contractor ke SPC/PJB. Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan setelah tercapainya COD dan semua pekerjaan EPC dianggap selesai. Jika masih ada pending item minor, maka akan disepakati bersama untuk dicatat dan dijadwalkan penyelesaiannya dalam masa garansi (Warranty Period).. Input yang Diperlukan. Sertifikat STOP. Data penyelesaian pending items. Output yang Diharapkan. Taking Over Certificate (TOC). Data temuan first year inspection (FYI). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Pemeriksaan dan Evaluasi Aset. Tahap ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset pembangkit untuk memastikan semua pekerjaan EPC telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat setiap pending item minor yang masih perlu diselesaikan.. Inspeksi Fisik:. Melakukan inspeksi fisik terhadap seluruh komponen pembangkit.. Memeriksa kondisi operasional dan performa sistem secara keseluruhan.. Evaluasi Kinerja:. Menganalisis data kinerja dari periode pasca-COD.. Mengidentifikasi setiap masalah operasional atau ketidaksesuaian yang memerlukan penyelesaian.. Dokumentasi Pending Items:. Mencatat semua pending items minor yang masih harus diselesaikan.. Menyusun rencana penyelesaian untuk setiap pending item selama masa garansi.. Penyusunan Dokumen TOC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi aset selesai, dokumen Taking Over Certificate (TOC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penyusunan Draft TOC:. Menyusun draft TOC yang mencakup hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Memasukkan data penyelesaian pending items dan rencana penyelesaiannya dalam masa garansi.. Review Internal:. Melakukan review internal terhadap draft TOC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Memastikan semua pihak terkait setuju dengan isi draft TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dan Peninjauan. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan pihak lain yang relevan, untuk melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC sebelum diterbitkan.. Koordinasi dengan EPC Contractor:. Mengatur pertemuan dengan EPC Contractor untuk membahas hasil pemeriksaan dan evaluasi aset.. Mendiskusikan pending items dan menyepakati rencana penyelesaiannya.. Peninjauan Akhir:. Melakukan peninjauan akhir terhadap dokumen TOC dengan semua pihak terkait.. Memastikan bahwa semua kesepakatan telah dicatat dengan jelas dalam dokumen TOC.. Penerbitan Taking Over Certificate. Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Taking Over Certificate (TOC) diterbitkan secara resmi untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB.. Penerbitan TOC:. Menerbitkan TOC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa TOC mencakup semua informasi penting, termasuk status pending items dan rencana penyelesaiannya.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan TOC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan TOC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. Penerbitan Final Acceptance Certificate. Proses Final Acceptance Certificate (FAC) bertujuan untuk menandai bahwa proyek pembangkit telah benar-benar selesai dibangun oleh pihak EPC sesuai dengan seluruh ketentuan yang sudah disepakati dalam EPC contract. Ini termasuk penyelesaian pending items yang belum terselesaikan selama masa COD dan penyelesaian temuan first year inspection dalam masa garansi setelah masa COD. Setelah seluruh peralatan selama masa garansi dipastikan beroperasi dengan baik dan seluruh pending items telah diselesaikan, FAC dapat diterbitkan. Terbitnya FAC menandai berakhirnya EPC Contract dan seluruh sisa pembayaran akhir dapat dilakukan oleh SPC ke EPC Contractor.. Input yang Diperlukan. Taking Over Certificate (TOC). Data penyelesaian temuan first year inspection (FYI). Output yang Diharapkan. Final Acceptance Certificate (FAC). Referensi Utama. EPC Contract. Fuel/Supplier Contract. OM Contract. Power Purchase Agreement (PPA). Regulasi Eksternal. Proses dan Langkah-langkah. Penyelesaian Temuan First Year Inspection. Langkah ini melibatkan penyelesaian semua temuan yang diidentifikasi selama first year inspection (FYI). Semua temuan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam EPC contract sebelum FAC dapat diterbitkan.. Identifikasi Temuan FYI:. Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua temuan dari first year inspection.. Penyelesaian Temuan:. Mengkoordinasikan dengan EPC Contractor untuk menyelesaikan semua temuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak.. Verifikasi Penyelesaian:. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua temuan telah diselesaikan dengan memuaskan.. Pemeriksaan dan Evaluasi Akhir; Koordinasi dan Peninjauan. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan EPC telah diselesaikan sesuai dengan kontrak. Koordinasi dan peninjauan dilakukan dengan semua pihak terkait untuk memastikan tidak ada isu yang belum terselesaikan.. Pemeriksaan Akhir:. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan sistem untuk memastikan operasional yang optimal.. Evaluasi Akhir:. Mengevaluasi hasil pemeriksaan

akhir dan membandingkannya dengan ketentuan dalam EPC contract.. Koordinasi dengan Pihak Terkait:. Mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait, termasuk EPC Contractor, SPC/PJB, dan lainnya, untuk memastikan semua persyaratan telah dipenuhi.. Peninjauan Dokumen:. Meninjau semua dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapannya.. Penyusunan Dokumen FAC. Setelah pemeriksaan dan evaluasi akhir selesai, dokumen Final Acceptance Certificate (FAC) disusun untuk menandai serah terima aset dari EPC Contractor ke SPC/PJB secara resmi.. Penyusunan Draft FAC:. Menyusun draft FAC yang mencakup semua hasil pemeriksaan dan evaluasi akhir.. Review Internal:. Melakukan review internal terhadap draft FAC untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.. Persetujuan Akhir:. Memastikan bahwa semua pihak terkait menyetujui isi draft FAC sebelum diterbitkan.. Penerbitan Final Acceptance Certificate; Pelaksanaan Pembayaran Akhir . Setelah semua persetujuan dan peninjauan akhir selesai, Final Acceptance Certificate (FAC) diterbitkan secara resmi, menandai berakhirnya EPC Contract dan memungkinkan pelaksanaan pembayaran akhir.. Penerbitan FAC:. Menerbitkan FAC dan menyampaikannya kepada EPC Contractor dan SPC/PJB.. Memastikan bahwa FAC mencakup semua informasi penting, termasuk status penyelesaian temuan FYI.. Pelaksanaan Pembayaran Akhir:. Mengatur pembayaran akhir kepada EPC Contractor sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.. Memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.. Dokumentasi dan Penyimpanan:. Menyimpan salinan FAC dan dokumen pendukung lainnya untuk arsip.. Mendokumentasikan proses penerbitan FAC sebagai referensi untuk proyek-proyek di masa mendatang.. . Fungsi Kontrol dan Support. Fungsi Kontrol Project Management Office. Project Management Office (PMO) memainkan peran vital dalam keseluruhan proses tata kelola pengembangan pembangkit di PLN Nusantara Renewables. PMO bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi administrasi konstruksi. Tugas utama PMO mencakup administrasi proyek, manajemen proyek, review pelaksanaan konstruksi, serta penyelesaian segala permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proyek. PMO menjalankan tugas pokoknya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).. Perencanaan Proyek:. Menyusun rencana kerja dan anggaran proyek (RKAP) dengan detail, mencakup seluruh aspek teknis, finansial, dan operasional.. Mengembangkan timeline proyek yang realistis dan memastikan setiap tahapan memiliki milestone yang jelas.. Menetapkan sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan secara efektif untuk memastikan efisiensi.. Pelaksanaan Proyek:. Mengawasi implementasi rencana kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk engineering, procurement, dan construction.. Menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.. Pengembangan dan Evaluasi Administrasi Konstruksi:. Melakukan administrasi proyek yang meliputi dokumentasi, pelaporan, dan manajemen kontrak.. Mengembangkan sistem evaluasi untuk mengukur kinerja proyek secara berkala.. Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.. . Review Pelaksanaan Konstruksi:. Meninjau dan mengevaluasi progres konstruksi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana.. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dan menyusun strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.. Penyelesaian Permasalahan Proyek:. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang timbul selama proyek berlangsung.. Menyusun solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut.. Mengkoordinasikan implementasi solusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menghambat progres proyek.. Dalam menjalankan tugasnya, PMO harus selalu berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi:. Transparansi: Menjamin bahwa seluruh proses dan keputusan dalam proyek dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.. Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proyek memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas tugasnya.. Responsibilitas: Memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta selaras dengan tujuan perusahaan.. Independensi: Menjaga agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan proyek.. Keadilan: Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek diperlakukan secara adil dan setara, serta mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.. Fungsi Support Legal/Hukum. Bidang Legal atau Hukum di PLN Nusantara Renewables memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan proyek pembangkit listrik mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan fungsi support yang kuat di berbagai tahap proyek dan tanggung jawab penuh dalam penyusunan perjanjian kerjasama, bidang legal memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan aman

dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini membantu PLN Nusantara Renewables mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif, sambil mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul.. Fungsi Support (S) Bidang Legal. Dalam berbagai tahap pengembangan proyek pembangkit listrik, bidang legal di PLN Nusantara Renewables memegang peranan penting sebagai pendukung (support) yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa aktivitas di mana bidang legal memberikan dukungan:.. Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses identifikasi peluang proyek dengan memberikan analisis hukum terkait kelayakan proyek. Mereka meninjau regulasi dan peraturan yang relevan untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan panduan hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi dapat dilaksanakan tanpa hambatan hukum.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Dalam penyusunan longlist proyek, bidang legal memberikan masukan hukum untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.. Peran: Melakukan due diligence hukum dan memberikan rekomendasi terkait aspek hukum dari proyek-proyek potensial.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan studi kelayakan awal dengan meninjau aspek hukum yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan proyek.. Peran: Menyediakan analisis hukum yang komprehensif untuk mendukung keputusan bisnis yang berbasis hukum.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam mengidentifikasi mitra potensial dengan meninjau kelayakan hukum dan rekam jejak mitra potensial.. Peran: Menyediakan penilaian hukum terhadap calon mitra untuk memastikan kerjasama yang aman dan sesuai dengan hukum.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung dalam pembuatan daftar panjang dan pendek mitra serta pendanaan dengan meninjau aspek hukum dan regulasi yang relevan.. Peran: Memberikan saran hukum untuk memilih mitra dan skema pendanaan yang sesuai.. Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam proses permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk proyek dan mitra dengan menyediakan dukungan hukum yang diperlukan.. Peran: Menyusun dan meninjau dokumen hukum yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penerbitan Letter of Intent (Lol) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur memenuhi persyaratan hukum.. Peran: Melakukan peninjauan dan penyusunan dokumen Lol yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam menyusun dokumen permohonan RUPS dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses permohonan yang lancar dan sesuai dengan regulasi.. Penandatanganan SHA:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dengan meninjau dan menyusun dokumen yang diperlukan.. Peran: Memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi sebelum penandatanganan.. Pembentukan JVC:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pembentukan Joint Venture Company (JVC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Memberikan dukungan hukum untuk pembentukan JVC yang legal dan sah.. Power Purchase Agreement:.. Tugas: Bidang legal membantu dalam penyusunan dan peninjauan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) untuk memastikan kepatuhan hukum.. Peran: Menyediakan analisis hukum dan saran untuk menyusun PPA yang sesuai dengan peraturan.. EPC Procurement:.. Tugas: Bidang legal mendukung proses pengadaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dengan memastikan bahwa semua dokumen dan kontrak sesuai dengan hukum.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk pengadaan yang sah dan sesuai regulasi.. Land Procurement:.. Tugas: Bidang legal berperan dalam pengadaan lahan dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum pertanahan.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk memastikan bahwa proses pengadaan lahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.. Pengurusan Perizinan:.. Tugas: Bidang legal mendukung pengurusan perizinan dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.. Peran: Menyediakan dukungan hukum untuk proses perizinan yang lancar dan sah.. Fungsi Responsible (R) Bidang Legal. Dalam beberapa aktivitas, bidang legal bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan tugas atau aktivitas tersebut. Berikut adalah aktivitas di mana bidang legal memiliki peran Responsible:.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Bidang legal bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan meninjau semua dokumen perjanjian kerjasama untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengamankan kepentingan PLN Nusantara Renewables.. Peran: Menyusun, meninjau, dan menyetujui dokumen perjanjian kerjasama, serta memastikan bahwa semua perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.. Fungsi Support Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam mendukung dan mengkonsultasikan berbagai aktivitas proyek pengembangan pembangkit listrik. Dengan menyediakan analisis risiko yang mendalam dan rekomendasi mitigasi yang sesuai, satuan ini membantu memastikan bahwa semua proyek berjalan

dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.. Fungsi Support (S) dalam Satuan Manajemen Risiko. Satuan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Renewables memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangkit listrik dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul. Dalam beberapa aktivitas, satuan ini berfungsi sebagai pendukung (support), memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang didukung oleh Satuan Manajemen Risiko:..

Identifikasi Project Opportunities:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan dukungan dalam mengidentifikasi peluang proyek dengan menilai potensi risiko yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. . Peran: Melakukan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam fase identifikasi proyek.. Penyusunan Pre-Feasibility Study:.. Tugas: Dalam penyusunan studi kelayakan awal, Satuan Manajemen Risiko mendukung dengan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang bisa mempengaruhi kelayakan proyek.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek risiko telah dipertimbangkan dalam studi kelayakan.. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menyusun dokumen manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan strategi mitigasi risiko untuk proyek tersebut.. Peran: Mengembangkan dokumen manajemen risiko yang terperinci dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan strategi mitigasi telah ditetapkan... . Permohonan Persetujuan RUPS Proyek dan Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko mendukung dalam proses permohonan persetujuan RUPS dengan memberikan analisis risiko yang relevan.. Peran: Menyediakan informasi risiko dan strategi mitigasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di RUPS.. Permohonan RUPS:.. Tugas: Sama dengan permohonan persetujuan proyek dan partner, satuan ini juga memberikan dukungan dalam permohonan RUPS untuk aspek-aspek risiko.. Peran: Menyediakan dukungan dalam menyusun analisis risiko yang relevan untuk proses pengajuan permohonan RUPS.. Fungsi Consult (C) dalam Satuan Manajemen Risiko. Dalam beberapa aktivitas lain, Satuan Manajemen Risiko berperan sebagai pihak yang harus dikonsultasikan (consult) untuk memberikan saran, masukan, atau keahlian khusus yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran tugas pada aktivitas-aktivitas yang dikonsultasikan oleh Satuan Manajemen Risiko:.. Pembuatan Longlist Proyek:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan masukan terkait risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proyek-proyek yang masuk dalam longlist.. Peran: Menyediakan analisis risiko awal dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek-proyek tersebut.. Pembuatan Shortlist Proyek:.. Tugas: Sama seperti dalam longlist, satuan ini juga memberikan konsultasi dalam menyusun shortlist proyek dengan mempertimbangkan aspek risiko.. Peran: Memberikan saran dan masukan terkait risiko untuk memastikan bahwa proyek-proyek dalam shortlist memiliki risiko yang terkelola dengan baik.. Pengidentifikasian Partner:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pengidentifikasian partner dengan menilai risiko-risiko yang terkait dengan masing-masing partner.. Peran: Menyediakan analisis risiko terhadap partner untuk memastikan kerjasama yang aman dan minim risiko.. Pembuatan Longlist dan Shortlist Partner & Pendanaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan terkait risiko-risiko dalam penyusunan longlist dan shortlist partner serta skema pendanaan.. Peran: Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan analisis risiko untuk memastikan pemilihan partner dan skema pendanaan yang sesuai.. Penentuan Partner Terpilih:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses penentuan partner terpilih dengan mempertimbangkan risiko yang terkait.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang mendalam untuk memastikan bahwa partner yang dipilih memiliki profil risiko yang dapat diterima.. Perjanjian Kerjasama:.. Tugas: Satuan ini memberikan masukan dalam penyusunan perjanjian kerjasama dengan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan mitigasi yang tepat telah ditetapkan.. Peran: Memberikan saran terkait klausul-klausul dalam perjanjian yang berhubungan dengan risiko.. Update Feasibility Study:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko memberikan konsultasi dalam proses pembaruan studi kelayakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin muncul dari perubahan terbaru.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang diperbarui untuk memastikan bahwa studi kelayakan tetap relevan dan akurat.. Penerbitan Lol Pengadaan:.. Tugas: Satuan ini memberikan konsultasi terkait risiko-risiko dalam penerbitan Letter of Intent (LoI) pengadaan.. Peran: Menyediakan masukan terkait mitigasi risiko dalam LoI untuk memastikan proses pengadaan yang aman.. Penandatanganan SHA, Pembentukan JVC, Power Purchase Agreement, EPC Procurement, Land Procurement, Pengurusan Perizinan, Financing Close:.. Tugas: Satuan Manajemen Risiko berperan dalam memberikan konsultasi untuk semua aktivitas ini dengan menilai risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang sesuai.. Peran: Menyediakan analisis risiko dan masukan terkait untuk memastikan bahwa

semua aspek proyek dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko.. TAHAP EXECUTION dan COMPLETION:.. Tugas: Dalam tahap-tahap ini, satuan manajemen risiko memberikan konsultasi pada berbagai aktivitas seperti engineering, procurement, construction, penyediaan energi primer, penyiapan jasa operation & maintenance, penyiapan organisasi & SDM, commercial operation date, penyusunan serah terima operasi, penerbitan taking over certificate, dan penerbitan final acceptance certificate.. Peran: Menyediakan analisis risiko yang komprehensif dan memberikan saran mitigasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek dalam tahap eksekusi dan penyelesaian.. Fungsi Support SDM. Sub Bab Proses Bisnis Support SDM menguraikan peran penting bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung utama dalam menjalankan proses bisnis utama di PLN Nusantara Renewables. Bab ini memberikan panduan mengenai bagaimana SDM berperan dalam mendukung berbagai tahapan pengembangan pembangkit listrik, mulai dari inisiasi hingga eksekusi proyek.. Dalam konteks pengembangan pembangkit listrik, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya finansial yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat. PLN Nusantara Renewables memahami bahwa SDM adalah aset penting yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.. Bab ini akan menguraikan berbagai aktivitas support yang dilakukan oleh bagian SDM, mulai dari penyusunan kapasitas dan kapabilitas hingga pemenuhan SDM untuk proyek. Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk mendukung proses bisnis utama di setiap tahapan pengembangan proyek, memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan proyek.. Penyusunan Kapasitas SDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan sehingga berpengaruh terhadap formasi tenaga kerja dari desain struktur yang dibuat dan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan usaha memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terstruktur dengan baik.. Input yang Diperlukan. Longlist Proyek Pengembangan dalam RJPP: Daftar proyek pengembangan yang teridentifikasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi yang diperlukan untuk proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan.. Output yang Diharapkan. Struktur Organisasi: Desain struktur organisasi untuk proyek pengembangan.. Formasi Tenaga Kerja: Rincian formasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek.. Proses dan Langkah-Langkah. Desain Struktur Organisasi. Divisi SDM PLN NR menggunakan Longlist Proyek dalam membuat desain struktur organisasi dari proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini adalah struktur organisasi proyek pengembangan usaha.. Identifikasi Proyek: Menggunakan longlist proyek pengembangan dalam RJPP untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan.. Desain Awal Struktur Organisasi: Menyusun desain awal struktur organisasi berdasarkan kebutuhan proyek.. Konsultasi dengan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.. Finalisasi Struktur Organisasi: Menyelesaikan desain struktur organisasi berdasarkan masukan yang diterima.. Penentuan Tanggung Jawab, Distribusi, dan Pengaturan Peran SDM. Dalam proses pengaturan peran SDM, akan ditentukan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau bidang yang ada dalam Struktur Organisasi. Hasil dari proses pengaturan peran SDM ini adalah berupa formasi tenaga kerja.. Penentuan Tanggung Jawab: Menetapkan tanggung jawab setiap divisi atau bidang dalam struktur organisasi.. Distribusi Peran: Mengatur distribusi peran dan fungsi SDM sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.. Penyusunan Formasi Tenaga Kerja: Menyusun formasi tenaga kerja yang mencakup jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap divisi atau bidang.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja, Proyeksi Total Kebutuhan, Rencana Rekrutmen. Dipetakan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) dari formasi tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses manpower planning ini, dapat diproyeksikan total kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut.. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja: Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Membuat proyeksi total kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang.. Rencana Rekrutmen: Menyusun rencana rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah diproyeksikan.. Penyusunan Kapabilitas SDM. Penyusunan Kapabilitas SDM merupakan elemen krusial di Tahapan Initiation dalam mendukung penyusunan Longlist proyek di Tahap Initiation pengembangan pembangkit oleh PLN Nusantara Renewables (PLN NR). Longlist Proyek adalah daftar awal dari proyek-proyek potensial yang telah diidentifikasi dalam tahap Project Opportunities. Dokumen ini menjadi panduan bagi PLN NR dalam merencanakan pengembangan bisnis jangka panjang, mencakup proyek-proyek yang diprioritaskan berdasarkan kriteria seleksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan dan

potensi keberhasilan.. Dalam konteks ini, Penyusunan Kapabilitas SDM berperan sebagai proses support yang tidak hanya mendukung tetapi juga menguatkan tahapan ini. Proses Penyusunan Kapabilitas SDM bertujuan untuk me-review kembali desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja guna memastikan kesesuaian dan optimalisasi sumber daya manusia dalam menjalankan proyek yang direncanakan. Proses ini bertujuan untuk mencapai struktur organisasi yang lean, sehingga menghindari kelebihan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Selain itu, proses ini memastikan bahwa standar kompetensi karyawan dan job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Tipe Teknologi: Jenis teknologi yang digunakan dalam proyek pembangkit listrik.. Kapasitas Pembangkit: Kapasitas total pembangkit listrik yang akan dibangun.. Jenis Pembangkit: Kategori atau jenis pembangkit listrik (misalnya, PLTU, PLTA, PLTS).. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Dokumen yang mencakup standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan berdasarkan kebutuhan proyek.. Output yang Diharapkan. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Daftar standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi dan persyaratan lainnya..

Proses dan Langkah-langkah. Penyusunan Standar Kompetensi (KKJ). Pada aktivitas ini dilakukan penyusunan standar kompetensi berdasarkan pada formasi tenaga kerja dalam struktur organisasi yang dibuat. Standar kompetensi yang dibutuhkan menyesuaikan dengan proyek yang akan dijalankan nantinya. Hasil dari aktivitas ini berupa Standar Kompetensi Karyawan untuk setiap divisi atau bidang dalam formasi tenaga kerja..

A. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi: Menentukan kebutuhan kompetensi berdasarkan tipe teknologi, kapasitas pembangkit, dan jenis pembangkit.. Mengkaji standar kompetensi yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan proyek..

B. Penyusunan Standar Kompetensi: Mengembangkan standar kompetensi untuk setiap posisi dalam struktur organisasi.. Mengadakan konsultasi dengan pakar industri dan pemangku kepentingan untuk memastikan keakuratan standar kompetensi..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi standar kompetensi dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan standar kompetensi karyawan..

Penyusunan Job Specification. Di sini dilakukan penyusunan job specification yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Job specification dapat berupa jenis kelamin, usia minimal, pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman kerja, standar fisik yang dibutuhkan, dan lainnya. Hasil dari aktivitas ini berupa Job Specification untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

A. Identifikasi Kriteria Job Specification: Menentukan kriteria job specification yang relevan untuk setiap posisi berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun.. Mengkaji kebutuhan spesifik untuk setiap posisi dalam struktur organisasi..

B. Penyusunan Job Specification: Mengembangkan job specification untuk setiap posisi, termasuk kualifikasi, pengalaman, pendidikan, dan persyaratan lainnya.. Menyertakan detail spesifik seperti jenis kelamin (jika relevan), usia minimal, dan standar fisik..

C. Validasi dan Finalisasi: Melakukan validasi job specification dengan pihak terkait.. Menyelesaikan dan mendokumentasikan job specification untuk setiap posisi..

Review Kapasitas & Kapabilitas SDM untuk Proyek. Proses ini bertujuan untuk mereview kembali apakah desain struktur organisasi, formasi tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja telah sesuai dan optimal untuk menjalankan proyek yang ditetapkan di Tahap Initiation guna mencapai struktur organisasi yang lean. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kompetensi serta job specification telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan nantinya..

Input yang Diperlukan. Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang telah disusun untuk proyek.. Standar Kompetensi (KKJ) Karyawan: Standar kompetensi yang diharapkan dari karyawan untuk setiap posisi dalam proyek.. Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.. Job Specification: Spesifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk setiap posisi.. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proyek.. Output yang Diharapkan. Update Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang diperbarui dan lebih sesuai dengan kebutuhan proyek.. Update Formasi Tenaga Kerja: Formasi tenaga kerja yang diperbarui dan optimal.. Kapabilitas SDM Proyek: Kapabilitas SDM yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan proyek.. Update Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja: Proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperbarui dan optimal..

Proses dan Langkah-langkah. Review Desain Struktur Organisasi. Pada aktivitas ini, dilakukan review kembali struktur organisasi yang telah dibuat untuk melihat apakah struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan proyek yang akan dijalankan. Hasil dari aktivitas ini berupa update struktur organisasi..

Analisis Struktur Organisasi: Meninjau struktur organisasi yang telah disusun.. Mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.. Konsultasi dengan Tim Proyek.. Melakukan diskusi dengan tim proyek untuk mendapatkan masukan terkait struktur organisasi.. Mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau pengurangan posisi..

Penyusunan Update Struktur Organisasi: Mengupdate struktur organisasi berdasarkan hasil analisis dan konsultasi..